

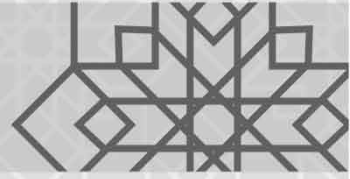
**IDEOLOGI
AKUNTANSI
ISLAM**

IDEOLOGI AKUNTANSI ISLAM

Dr. Alimuddin, S.E., M.M., Ak.
Muhammad Ruslan, S.E.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
J A K A R T A



Kata Sambutan

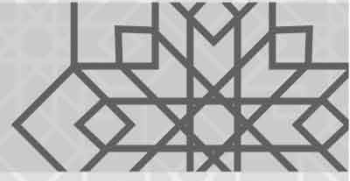
Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., Ak., M.Si., CA.

Ketua Program Studi S3 Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Alhamdulillah hadir lagi sebuah karya pemikiran akademisi Indonesia. Buku ini semakin memperkaya hadirnya literatur akuntansi Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, akuntansi harus terus berkembang dinamis, terlebih untuk akuntansi Islam yang muncul dan berkembangnya masih sangat dini. Penjelajahan akademik untuk menemukan pondasi yang kuat atas akuntansi Islam, selanjutnya dilakukan baik dalam ranah keilmuan akuntansi itu sendiri maupun pada ranah keilmuan agama. Penulis buku ini berusaha masuk pada kedua ranah ini.

Islam sebagai rahmatan lil'alamin telah mengajarkan bahwa Tuhan merupakan pusat kehidupan, yang oleh karenanya maka akuntan harus menjadikan orientasi utamanya. Dalam kerangka demikian semestinya disiplin akuntansi dapat menjadi media pengorientasian akuntan ini. Namun sayangnya akuntansi, termasuk di dalamnya akuntansi Islam, yang berkembang atau dikembangkan saat ini masih bersifat sekuler atau setidaknya merefleksikan sifat sekuler berdasarkan nilai-nilai kapitalisme yang menempatkan pemodal sebagai pusat kuasa dalam berakuntansi. Buku ini dihadirkan untuk memberikan wacana berbeda dengan melakukan dekonstruksi ideologi sehingga dapat menempatkan Tuhan sebagai pusat kuasa akuntansi.

DUMMMY



Kata Sambutan

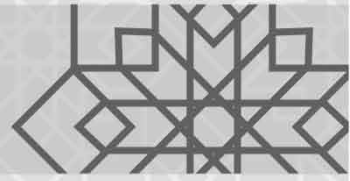
Prof. Eddy R.Rasyid, PhD., Ak., CA.

Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Andalas
Komisaris PT Semen Padang

Membaca (cepat) Buku ini, impresi pertama saya adalah “wah Brawijaya banget.” Dikalangan akademisi akuntansi, kami sudah saling mengenal bagaimana keunikan pengembangan pemikiran akuntansi, termasuk Akuntansi Islam (*Islamic Accounting*) di Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya. Ada dua pendekatan dalam pengembangan akuntansi Islam yang ditempuh para akademisi akuntansi. Pendekatan pertama adalah dengan tetap mengadopsi akuntansi barat, yang selama ini telah digunakan, tetapi kemudian menyaringnya. Teori dan metode yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam kemudian ditinggalkan, dan dicarikan penggantinya. Pendekatan kedua adalah dengan membongkar akuntansi barat tersebut sampai keakar-akar filosofisnya, dan membangun sesuatu yang baru. Untuk membongkarnya ini digunakan basis-basis filosofis yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Rekan-rekan di Akuntansi Brawijaya mengikuti pendekatan kedua. Menurut saya, kini mungkin sudah waktunya untuk mengatakan bahwa Akuntansi Brawijaya *School of Thought*, telah eksis dan tentu saja dengan esensinya sendiri. Serangkaian studi telah dilakukan untuk membongkar akuntansi Barat tidak saja menggunakan basis filosofi Islam, tetapi juga nilai-nilai budaya lokal, disamping yang berakar dari nilai-nilai sosial yang terhimpun dalam catatan dan peninggalan hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia di masa kerajaan-kerajaan dulu seperti Majapahit, Sriwijaya, Siak Indrapura dan lainnya.

Yang sering menjadi pertanyaan bagi sebagian rekan adalah, “*what’s nexts?*” Maksudnya, “setelah semuanya itu, lalu praktek akuntansi yang ada sekarang mau diapakan.” Bila perlu diubah, “menjadi seperti apa?” Jawabnya, bila dijawab sekarang, bagi saya adalah “ya belum tahu dan perlu dicari tahu.” Kalau begitu, bilakah pencarian ini akan memberikan hasil? Ya, jawabnya “belum tahu, laksanakan dululah.”

Buku karya Dr. Alimuddin, Ak ini, yang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Brawijaya, memberikan kontribusi penting dalam rangkaian usaha membangun Akuntansi Islam. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang dengan serius ingin membangun praktik akuntansi yang beretika dan berakar pada nilai-nilai kehidupan yang insani.



Kata Sambutan

Dr. Ir. Aji Dedi Mulawarman, MSA.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
FORDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam)

Mengapa Akuntansi Islam? Bagi praktisi bahkan mungkin akademisi, istilah ini justru terdengar asing dibandingkan akuntansi syariah yang sudah banyak dikenal. Pemilihan nama ini bukan dimaksudkan untuk mencari “sensasi”. Lebih dari itu, penekanan kata “Islam” merujuk pada ideologi, sedangkan kata “syariah” merujuk pada aturan. Inilah yang dibahas tuntas buku ini: ideologi yang melandasi Akuntansi Islam.

Perkembangan akuntansi Islam, khususnya di Indonesia, semakin pesat apalagi sejak munculnya PSAK 59 tahun 2002 untuk kali pertamanya sebagai “pembabat alas” yang kemudian disusul di tahun 2007 dengan pengesahan PSAK 101-106.

Perkembangan praktik selalu disertai dengan perkembangan dialektika keilmuan, takterkecuali akuntansi Islam. Buku ini mencoba memaparkan dasar diskursus epistemologi yang sangat terstruktur dan mudah dipahami, bahkan bagi pemula. Penempatan paradigma Barat *vis a vis* paradigma Tauhid memberikan kejelasan tentang perbedaan fundamental, bahwa akuntansi Islam bukan sekadar teknik namun membawamu atas nilai, yang tidak sama dengan konsep *value laden* pada paradigma modern Barat.

Pendedahan pandangan Islam tentang kosmologi, menjadi titik tolak diskusi epistemology dalam buku ini. Pandangan ini yang menjadikan paradigam tauhid utuh, karena tuhan, alam, dan ilmu adalah kesatuan

yang tidak terpisah. Buku ini dengan gampang menjelaskan pula sejarah perpindahan paradigma, serta alasan-alasan yang menjadi sebab mengapa paradigma yang utuh ditinggalkan demi modernitas dan demi suburnya kapitalisme. Tampak usaha keras penulis untuk mengaitkan paradigma tauhid ini dengan konsep ekonomi hingga akuntansi Islam.

Khusus tentang Akuntansi Islam, penulis telah menyajikan sebuah narasi mengalir tentang sejarah serta perkembangannya. Walaupun tidak secara rigid penulis menolak fakta sejarah bahwa Bapak akuntansi adalah Luca Pacioli, namun diakui penulis bahwa akuntansi modern tidak bisa tidak dipengaruhi oleh Islam. Dengan demikian bahkan akuntansi modern memiliki akar ideologi serupa dengan akuntansi Islam yaitu akuntabilitas kepada Tuhan. Hal yang menarik yang ditawarkan buku ini adalah bahwa teoretisasi akuntansi Islam dapat dilakukan secara bebas, selama masih menggunakan koridor agama. Tidak hanya akuntansi yang didedah, namun juga akuntan (para *rausyan fikr*) yang dengan kapabilitasnya mengkreasi akuntansi.

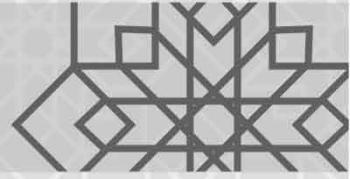
“...berarti pada dasarnya akuntan seharusnya menjadi perwakilan yang tertindas di dalam masyarakat ekonomi, yang dalam posisi tersebut berperan untuk memberi kepastian terpenuhinya hak-hak *stakeholders* secara adil sesuai ketentuan Tuhan tentang hal tersebut.”

Pernyataan ini sudah tentu memberikan sebuah oposisi opini atas netralitas atau bahkan profesionalitas akuntan. Jika selama ini, akuntan dipandang sebagai pihak yang memberikan informasi yang netral untuk keperluan *economic decision making*, maka penulis berkeyakinan sebaliknya. Akuntan justru harus berpihak (tidak netral) pada pihak yang lemah. Implikasinya, sebagaimana yang dipaparkan dalam buku ini, akuntan akan mampu memandang IFRS sebagai sebuah *doxa* atau penjajahan terselubung untuk kepentingan pemilik modal.

Terlepas dari padatnya bab-bab serta kesan padat yang ditampilkan penulis, buku ini tetap layak dibaca. Buku ini memberikan penyadaran bagi kita tentang kuatnya ideologi yang membentuk praktik, serta adalah kewajiban kita untuk tak lelah membenahi akuntansi sebagai kekhusukan ibadah kita (akuntan *rausyan fikr*) pada Tuhan.

Dr. Ir. Aji Dedi Mulawarman, MSA.

Ketua Umum DPN FORDEBI
Dosen Tetap Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya



Kata Pengantar

Dengan nama Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang

Puja dan puji segenap hanya kepada-Nya tertuang segala bentuk penyembahan, tercurah kata rindu yang tak tertara lewat dzikir dan *tasbih* sebagai wujud cinta hamba yang merindu. Dialah penghancur para tiran pembangkang dan penabur cinta para pecinta. Ia yang “bersembunyi” dari hati yang lemah dan ber-*tajalli* pada jiwa yang lapang nan suci.

Salam penghormatan dan pemuliaan kepada para kekasih-Nya, *hujjah*-Nya di muka bumi, para utusan pembawa risalah pembebasan dan penghulu jiwa para utusan Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarganya yang suci. Kehadiran mereka adalah simbol dari sejarah panjang perjuangan melawan kezaliman, suatu pesan khusus, dan sekaligus simbol kebangkitan yang tertindas.

Salam pembebasan bagi mereka yang tertindas di manapun dan siapa pun di muka bumi ini. Kemenangan sebagai rahmat Tuhan selalu menanti para jiwanya. Semoga jiwa ini selalu rela tunduk pada pencerahan dan samping selalu tegap untuk para penindas.

Karya sederhana ini sebenarnya merupakan wujud keresahan penulis setelah bertahun-tahun bergelut dengan dunia akuntansi konvensional. Bermula dari keresahan itulah hingga penulis tuangkan dalam bentuk proposisi-proposisi yang berbentuk kalimat.

Tulisan ini mencoba mempersepsi akuntansi sebagai realitas disiplin ilmu dalam kerangka paradigma teologi pembebasan. Secara metodologis merupakan akumulasi pemikiran kritis dalam upaya dekonstruktif terhadap kemapanan akuntansi konvensional yang selama ini bertendensi kuat dengan kapitalisme. Teologi pembebasan sebagai konsepsi dasar yang mendasari akuntansi secara filosofis, berpijak dan berpangkal pada kesadaran Tuhan. Meniscayakan pola dialogis dalam konstruksi teoretis doktrinal antara Islam sebagai ideologi dengan akuntansi sebagai realitas disiplin ilmu.

Upaya membangun sebuah perspektif baru terhadap akuntansi yang berdasar pada prinsip emansipatif, liberatif, humanis, ekologis, dan berkesadaran transendental dengan menerjemahkan makna-makna akuntansi dalam kerangka filosofi teologi pembebasan. Elaborasi antara akuntansi dengan wahyu dibangun dalam kerangka doktrinal filosofis yang melibatkan penyerapan makna secara ontologis, epistemologis, metodologis dan aksiologis dalam bangunan struktur pengideologisasian Islam dalam akuntansi. Dengan demikian akan tercipta bangunan pengetahuan akuntansi yang hidup, *hudus* serta berkiblat pada khittahnya sebagai risalah suci dalam menegakkan nama-nama Tuhan dalam laporan keuangan.

Dalam akuntansi dipersepsi bukan sekadar sebagai gagasan yang bebas nilai, bukan pula sekadar pengetahuan instrumental (mencatat dan melaporkan) melainkan dibalik sebuah tampakan *instrument* tersimpang jiwa yang lebih substansial, yakni nilai, dan ideologi bersemayam dibalik pengaturan akuntansi. Wujud perampasan hak serta ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat merupakan wujud bagaimana akuntansi memainkan peran ideologis dalam menampakkan hak. Kuasa struktur akuntansi kapitalisme hadir dengan taring yang menghisap kesadaran kemanusiaan, mempertemukan interaksi bisnis dalam pola-pola dominatif, dan menciptakan marginalisasi lewat laporan keuangan.

Di sinilah wujud dekonstruktif akuntansi Islam pembebasan setelah berelaborasi dengan teologi pembebasan merepresentasikan ideologi akuntansi Islam dalam memainkan perannya sebagai ajaran pembebas. Upaya pembebasan secara ontologis merupakan upaya filosofis untuk menggonggus kesadaran Tuhan dalam akuntansi sebagai hakikat dari realitas itu sendiri, dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat akuntansi.

Tinjauan metodologis menerjemahkan makna tauhid sebagai kesatuan realitas Tuhan, manusia, dan alam dalam bingkai kesadaran sistem. Ditempatkan sebagai struktur yang memiliki kuasa dalam membentuk kesadaran agen.

Tinjauan epistemologis merupakan landasan dalam mempersepsi realitas yang meliputi uraian makna kebenaran pengetahuan dalam pola kemanunggalan melibatkan terjemahan makna akal, rasa dan karsa dalam akuntansi. Sedangkan tinjauan aksiologis menekankan tafsir ideologis dalam kerangka normatif dalam perannya akuntansi Islam pembebasan untuk mendistribusikan nilai-nilai yang selama ini tersumbat dan tertahan dalam akuntansi kapitalisme dalam bentuk *surplus value* yang menjadi sumber penindasan.

Makna *surplus value* kemudian disucikan sebagai zakat yang merepresentasikan hak masyarakat lemah yang selama ini terpinggirkan dalam peradaban akuntansi kapitalisme. Model pendistribusian hak menjadi dasar dalam menciptakan jaringan kuasa altruisme dalam akuntansi memengaruhi keseluruhan realitas agen dan struktur-struktur sosial. Penyucian struktur akuntansi akan mendorong penyucian realitas secara konstruktif yang merepresentasikan pencapaian nilai akuntansi Islam yang bersandar pada Tuhan (*falah*) dengan menempatkan akuntansi sebagai struktur manifestasi sifat Tuhan di muka bumi dalam menampakkan yang hak dan yang batil (maha mencatat) untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan alam, dan sosial.

Makassar, 30 September 2015

Penulis

DUMMMY

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., Ak., M.Si., CA. Ketua Program Studi S3 Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
KATA SAMBUTAN	vii
Prof. Eddy R.Rasyid, PhD., Ak., CA. Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Andalas Komisaris PT Semen Padang	
KATA SAMBUTAN	ix
Dr. Ir. Aji Dedi Mulawarman, MSA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Fordebi (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam)	
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 AKUNTANSI SEBAGAI IDEOLOGI PERADABAN	1
BAB 2 PARADIGMA AKUNTANSI ISLAM	7
A. Historisitas Ilmu dan Paradigma	8
1. Epistemologi dan Pembentukan Paradigma	8
2. Paradigma Cartesian-Newtonian dalam Akuntansi	10

B.	Paradigma Tauhid	15
1.	Misi Islam Atas Penciptaan	16
2.	Konsepsi Islam Atas Kosmologi	17
3.	<i>Wahdatul Al Wujud</i> : Konsepsi Ibnu 'Arabi Atas Kosmologi	20
4.	<i>Aslahatul Al Wujud</i> : Konsepsi Mulla Shadra Atas Kosmologi	21
C.	Paradigma Teologi Pembebasan: Sebuah Tinjauan Tafsir (<i>Maudhu'i</i>) Terhadap Islam	23
1.	Tafsir <i>Maudhu'i</i>	23
2.	Paradigma Teologi Pembebasan dalam Konteks Akuntansi	25
D.	Pergeseran Paradigma dan Kecenderungan Sejarah dalam Al-Qur'an	27
1.	Norma Sejarah dalam Islam: Relevansi <i>Basic Structure</i> dengan Suprastruktur	27
2.	<i>Science Revolutions</i> : Pergeseran Paradigma Akuntansi	29
E.	Konstruksi Ideologi dalam Akuntansi	31
1.	Akuntansi Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis Terhadap Akuntansi	32
2.	Akuntansi Islam dalam Tinjauan Sejarah	33
3.	Nilai-nilai Akuntansi Islam dalam Al-Qur'an	35
4.	Teorisasi Akuntansi Islam	37

BAB 3 MAKRIFAT AKUNTANSI, DETERMINASI PUNCAK PERJALANAN SPIRITUALITAS AKUNTANSI: SUATU TINJAUAN ONTOLOGIS

A.	Akuntansi Islam Pembebasan: Refleksi Kebutuhan Umat	42
1.	Pembebasan sebagai Puncak Perjalanan Spiritualitas Akuntansi	44
a.	Noda Hitam Akuntansi sebagai Teknologi	44

b.	Akuntansi sebagai Teknologi: Sumber Ketimpangan	45
2.	Penyucian Akuntansi: Mengurai Makna Tuhan dalam Akuntansi	47
a.	<i>Makrifat</i> Akuntansi: Ketersingkapian Tabir sebagai Puncak Perjalanan	47
b.	Makna “Tuhan” dalam Akuntansi	48
c.	<i>Syahadat</i> dalam Akuntansi	51
B.	Akuntansi Islam: Antara Teori (Sains) dan Doktrin	53
1.	Akuntansi Islam sebagai Akuntansi Doktrinal (<i>Tasydiq</i>) Bukan Akuntansi Saintis (<i>Theory</i>)	54
2.	Perbedaan Akuntansi Islam, Kapitalisme dan Sosialisme	56
C.	Doktrin Akuntansi Islam: Antara Substansi dan Aksiden	57
1.	Perbedaan Substansi dan Aksiden	57
2.	Relasi Substansi dan Aksiden dalam Akuntansi Islam	58
3.	Aksiden dan Peran Kearifan Lokal dalam Penggagasan Akuntansi Islam	60
D.	Ringkasan	61
BAB 4	TEORI SISTEM DAN AKUNTANSI ISLAM: SUATU TINJAUAN METODOLOGIS	63
A.	Teori Sistem: Integrasi Subsistem dalam Perspektif Makro	64
1.	Definisi Sistem (<i>Systema</i>)	64
2.	Integrasi Sistem (<i>Wholism</i>) dan Teorisasi Akuntansi Islam	65
3.	Anomali dan <i>Disfungsional</i> Sistem	66
B.	Akuntansi Islam sebagai Bagian dari Sistem yang Kompleks	66

C.	Strukturasi Negara dan Akuntansi Islam: Integrasi Agen dan Struktur	68
D.	Penerapan Akuntansi Islam dalam Tinjauan Politik	71
	1. Tenggelamnya Agen dalam Struktur: Refleksi Kedaulatan Struktur	72
	2. Akuntansi Islam dan Integrasi Mikro-Makro: Suatu Perspektif	73
E.	Kedaulatan Negara: Refleksi Kedaulatan Akuntansi	74
F.	Akuntansi Islam: Upaya Penemuan Konsep Bukan Penciptaan	76
G.	Ringkasan	78
BAB 5	METAFISIKA AKUNTANSI ISLAM: TINJAUAN KRITIS TERHADAP EPISTEMOLOGI BARAT DAN EPISTEMOLOGI BERPASANGAN (<i>BINARY OPPOSITIONS</i>) ATAU EPISTEMOLOGI MANUNGGAL	79
A.	Epistemologi Islam: Tinjauan Dekonstruktif Terhadap Epistemologi Barat	80
	1. Hierarki Pengkonseptualisasian Teorisan Akuntansi	80
	2. Kerancuan Metodologi Atas Epistemologi Barat	82
	3. Strukturalisme Transendental dan Matinya Spiritualitas Barat	82
	a. Dari Rasionalisme Instrumental Menuju Rasionalisme Transendental	83
	b. Peran Intuisi (<i>Irfani</i>) dalam Epistemologi Islam	85
	4. Pragmatisme dan Kapitalisasi Agama: Produk Epistemologi Barat	86
	a. Akuntansi dan Filsafat Pragmatisme	86
	b. Kapitalisasi Agama dalam Akuntansi: Tinjauan Semiologi	88

B.	Islamisasi Akuntansi atau Pengideologisasian Islam: Tinjauan Kritis	91
1.	Kelemahan Dasar Model Konvergensi	92
2.	Pengideologisasian Islam: Akuntansi Islam sebagai <i>Mainstream</i> Tersendiri	93
a.	Akuntansi Islam sebagai Proses Pengideologisasian Islam	94
b.	<i>Hyper-Positivistik</i> : Pergeseran Paradigma	95
C.	<i>Islamic Methaphysics</i> : Antara Epistemologi Berpasangan (<i>Binary Oppositions</i>) atau Epistemologi Manunggal	96
1.	Epistemologi Berpasangan (<i>Binary Oppositions</i>) atau Epistemologi Manunggal	96
2.	<i>Islamic Methaphysics</i> : Telaah Kritik Epistemologi Berpasangan (Manunggal)	97
a.	“Perbedaan”: Antara Eksistensi atau Esensi	98
b.	Perbedaan dalam Kesatuan dan “Keniscayaan Kemustahilan”	99
c.	Teori Gradasi: Mengurai Keterhubungan Perbedaan	100
d.	Eksistensi-eksistensi atau Eksistensi-Esensi: Ketidaksinergitas <i>Binary Oppositions</i> dengan Konsepsi Kemanunggalan	101
e.	Eksistensi-Esensi dalam Kerangka 4 Perhubungan	102
D.	Ringkasan	105

BAB 6 AKUNTANSI ISLAM DAN METAFORA PEMBEBASAN: SUATU TINJAUAN AKSIOLOGIS 107

A.	Hakikat Penciptaan dan Metafora Pembebasan dalam Akuntansi	108
1.	Risalah Penciptaan Manusia	108
2.	Akuntansi Islam sebagai Risalah	109
3.	Metafora Pembebasan	111
4.	Penyempurnaan Risalah dan Eskatologi	113

B.	Akuntansi dalam Pusaran Kekuasaan: Simbol Kekuasaan Teks	113
1.	Akuntansi sebagai <i>Practice</i> : Relasi <i>Habitus</i> dan <i>Field</i>	115
2.	Akuntansi sebagai <i>Practice</i> : “Arena” Pertarungan	115
3.	Objektivitas Pertarungan: <i>Class Struggle</i> dalam Struktur Akuntansi	117
C.	Hakikat Nilai dalam Islam dan Kedaulatan Buruh dalam Akuntansi	119
1.	Buruh dan Fenomena Perbudakan dalam Peradaban Akuntansi	119
2.	Hakikat Nilai Islam dan Doktrin <i>Pasca</i> Produksi: Landasan Aksiologis Akuntansi (Islam) Pembebasan	122
a.	Hakikat Nilai dan Kerja dalam Islam: Tinjauan Fikih	122
b.	Kedaulatan Buruh dalam Akuntansi Islam: Doktrin <i>Pasca</i> Produksi	123
c.	<i>Constant Phenomena</i> sebagai Dasar Kepemilikan Atas Properties	125
d.	Pengaruh Doktrinal Nilai dalam Sistem Kerja Sama	126
e.	<i>Store Labour</i> sebagai Dasar Nilai	128
f.	“Risiko” Bukan Dasar Pembentukan Nilai Ekonomis	129
D.	<i>Unity Theory</i> : Refleksi Atas Konsepsi Kepemilikan Sumber Daya dan Filosofi Masyarakat dalam Islam	130
1.	Doktrin Pra-Produksi dan Hak Milik Atas Sumber Daya Alam dalam Islam	130
2.	Filosofi Masyarakat dalam Islam	133
a.	Makna “Ummah” dalam Masyarakat Islam	133
b.	<i>Cooperative</i> Bukan Kompetitif: Tipikal Masyarakat Islam	135

3.	<i>Unity Theory</i> : Tuhan sebagai Pusat Kepentingan	136
a.	<i>Shari'ate Enterprise Theory</i>	138
b.	Penglibatan “Kompetitor”	139
c.	“Generasi Mendatang” sebagai <i>Stakeholders</i>	140
d.	Alam sebagai <i>Stakeholders</i> : Penolakan Atas Antroposentrisme	142
4.	Pendistribusian Nilai Lebih (<i>Surplus Value</i>)	143
a.	Zakat sebagai Hak <i>Stakeholders</i> yang “Lemah”	145
b.	Penerima Hak Atas Nilai Lebih (Zakat)	146
c.	Terciptanya Nilai Tambah (<i>Value Added</i>)	148
E.	Ringkasan	150
BAB 7	PENYEMPURNAAN NILAI TAMBAH SPIRITUAL DAN FILOSOFI ETIKA DALAM ISLAM	153
A.	Kesejahteraan: Etika atau Keadilan?	154
B.	Akhlak Islam dalam Pendistribusian Nilai Lebih (<i>Surplus Value</i>)	157
1.	Altruisme (Pengorbanan) Bukan Egoisme (Kepentingan)	158
2.	“Halal” dari Sisi Perolehan, Pengukuran, dan Pendistribusian	160
3.	Bukan Perbuatan Alami	161
4.	Bertujuan untuk Membebaskan	162
C.	Ringkasan	162
BAB 8	AKUNTAN TERCERAHKAN (<i>RAUSYAN FIKR</i>), PERWAKILAN “TUHAN” DALAM ENTITAS BISNIS: REFLEKSI KEDAULATAN AGEN	165
A	Relasi Akuntan sebagai “Agen” dan Akuntansi sebagai “Struktur”	166
B.	Akuntan dan Belunggu Kapitalisme	167
1	Dilema Keprofesian	167
2.	Independensi dan Dosa Sosial Akuntan	168

3.	Akuntan dan Dunia <i>Simulacra</i>	169
4.	Masa Depan Akuntan sebagai Profesi	171
C.	Akuntan Tercerahkan (<i>Rausyan Fikr</i>): Refleksi Kedaulatan Agen	172
D.	<i>Rausyan Fikr</i> : Pembebasan dari “Perbudakan” Keprofesian	173
E.	Akuntan Tercerahkan (<i>Rausyan Fikr</i>): Perwakilan yang Tertindas dalam Entitas Bisnis	175
F.	<i>Khusuk</i> sebagai Basis Etika (Ibadah) Akuntan	176
G.	Ringkasan	177
BAB 9 AKUNTANSI ISLAM PEMBEBASAN: PERSPEKTIF IDEOLOGIS		
		179
A.	Pembebasan sebagai Risalah Akuntansi Islam	180
B.	Risalah Akuntan dalam Akuntansi	182
C.	Supremasi Keadilan dalam Akuntansi dan Filosofi Hak	183
1.	Kerja sebagai Dasar Kepemilikan	183
2.	Bagi Hasil	185
3.	Objektifikasi Nilai pada Kerja	187
D.	Akuntansi Islam dan Desentralisasi Kekayaan	188
E.	Spiritualisasi Materi sebagai Gerak <i>Trans-Substansial</i>	189
F.	Nilai Lebih: Zakat atau CSR?	190
G.	Ringkasan	191
DAFTAR ISTILAH		193
DAFTAR PUSTAKA		205
BIODATA PENULIS		217

1



Akuntansi Sebagai Ideologi Peradaban

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, akuntansi sebagai disiplin ilmu tidak lepas dari dinamika zaman. Perkembangan teori yang selama ini hanya dipandang secara evolutif dalam mencapai suatu struktur yang mapan tidak selamanya berkembang sebagaimana awalnya. Khun (1962) yang memperkenalkan istilah “paradigma “ menciptakan sebuah cara pandang yang revolutif dalam melihat dinamika ilmu pengetahuan (Muslih, 2004: 68). Dinamika ilmu pengetahuan tidak harus bergerak secara linear, pergeseran paradigma sebagai sudut pandang manusia dalam memahami realitas, telah ikut menggeser cara pandang dalam melihat akuntansi sebagai realitas disiplin ilmu.

Kenyataan hari ini mencerminkan bahwasanya di dalam struktur metateori akuntansi kontemporer memperlihatkan sebuah dominasi cara pandang yang mengarah pada struktur hegemonik.¹ Dinamika wacana

¹Istilah yang diperkenalkan Gramsci (seorang *Neo-Marxisme* Italia, 1891-1937) yang menganalisis gagalnya pemberontakan buruh di Italia oleh fasisme. Ia sampai pada kesimpulan adanya dominasi secara halus yang ia sebut sebagai “hegemoni” yakni dominasi tanpa ancaman kekerasan. Ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima secara pasif sebagai sesuatu yang wajar baik bersifat moral, intelektual maupun budaya. lihat: Gramsci, *Negara*

akuntansi telah menempatkan sebagai salah satu alat yang dimainkan untuk melegalkan dan melegitimasi sebuah struktur yang menindas. Kapitalisme² sebagai ideologi yang merebak seiring pasca revolusi industri (Ritzer, 2003: 7-9) memberi andil dalam mempercepat dinamika evolutif akuntansi. Upaya pembebasan manusia dari struktur feodalisme³ akuntansi telah menciptakan sebuah tatanan feodalisme modern. Tampuk kuasa kerajaan telah bergeser pada kuasa modal yang menggilas kelas marginal atas dasar kebebasan pasar dan keberpihakan kepada pemodal sebagai jalan menuju kesejahteraan.

Cengkeraman kapitalisme dalam akuntansi semakin kuat disebabkan peran kekuasaan secara ideologis yang menopangnya. Sehingga *science war* (Mulawarman, 2007) tak terelakkan lagi, membentuk realitas benturan antar peradaban dalam pola *superior* dan *inferior* (Barat dan Timur⁴). Sebab pada dasarnya akuntansi adalah produk peradaban. Penetrasi akuntansi dari suatu bangsa ke bangsa yang lain, tiada lain adalah bentuk penetrasi nilai, budaya bahkan ideologi.

Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man* (2004), menganggap bahwa pertentangan peradaban telah berakhir, melahirkan kekuatan kemenangan pada kubu kapitalisme sebagai basis ideologi. Dialektika⁵ sejarah telah berakhir pada kemenangan kapitalisme sebagai

dan Hegemoni (terj.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Dan: Apozzolini, *Pijar-pijar Pemikiran Gramsci* (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. xiii-xiv.

²Istilah yang pertama kali dipergunakan oleh Marx (1841-1883) dalam mengkritik praktik ekonomi yang berlaku di Eropa Barat yang cenderung menindas kelas proletar. Hal ini menunjuk pada sistem ekonomi liberal yang digagas oleh Adam Smith "*The Wealth of Nation*". Lihat: Skousen, *Sang Maestro (terj.)*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 167.

³Sistem yang menekankan asas kepemilikan secara ekonomi berada pada bangsawan, yang secara politik adalah penguasa pada sistem aristokrasi, dengan corak ekonomi mengedepankan sistem *agricululture*, sehingga tanah menempati nilai yang prestisius. Marx menyebutnya sebagai sistem yang berlaku pada masa *prapitalism*. Tanpa menafikan sistem ini tetap ada pada masa sekarang (kapitalisme) meskipun tidak sekuat sebelumnya akibat revolusi yang terjadi dalam sejarah dunia.

⁴Penggunaan istilah Barat dan Timur bukan merupakan pembedaan secara geografis dan geopolitik, melainkan karena perbedaan pandangan dunia. Barat dengan materialismenya dan Timur mencakup Islam sebagai ideologi tersendiri yang non-materialisme, menempatkan Tuhan sebagai sentral dan landasan pengetahuan. Berbeda pada polaritas Barat dan Timur dalam perang militer dunia pertama dan kedua yang merepresentasikan ideologi komunisme dan kapitalisme.

⁵Formula pembacaan perkembangan sejarah oleh Hegel dalam pola konfliktual (pertentangan) antara tesa dan antitesa, melahirkan sintesis. Lihat: Russell, *Sejarah Filsafat Barat (terj.)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 954.

“roh” absolut.⁶ Realitas itulah menjadi struktur dominan pada akuntansi kontemporer, kuasa kapitalisme bersembunyi dibalik pengaturan-pengaturan akuntansi.

Pergeseran struktur feodalisme menuju kapitalisme ternyata tetap menyisakan ruang polaritas masyarakat, yang terbagi dalam kelas sosial antara kelas penguasa ekonomik (tuan/borjuasi)⁷ dan yang dikuasai (budak/buruh).⁸ Struktur hierarki tersebut telah banyak melahirkan kontradiksi internal, baik berupa tekanan politik dari kelas budak/buruh maupun tekanan antara kelas tuan atas dasar persaingan. Hubungan pemodal dengan buruh berlangsung dalam proses yang dominatif, ketika persaingan antara borjuasi dalam mengakumulasi kekayaan menjadikan buruh sebagai pihak yang termarginalkan lewat perampasan *surplus value*.⁹

Ironisnya ketika akuntansi sebagai disiplin ilmu yang merupakan produk sejarah, justru berperan sebagai *ancilia power* (budak kekuasaan) dalam melanggengkan kekuasaan menindas dengan memosisikan diri sebagai “pelayan” atas kepentingan kelas tertentu yakni kelas penguasa secara ekonomik. Pada struktur masyarakat feodal (*prapitalism*), akuntansi tidak ubahnya menjadi alat kaum feodal dalam mengkalkulasi kepentingan tanah para bangsawan. Diera kapitalisme, ternyata peran akuntansi tidak berubah, justru bergeser menjadi doktrin hegemoni dalam melanggengkan kekuasaan pemodal (borjuasi) dalam menguasai realitas

⁶Istilah yang diperkenalkan oleh Hegel untuk menunjuk sebuah kesadaran (sistem) tertinggi yang sempurna dan universal, yang lahir secara dialektis akibat pertentangan “tuan dan budak” yang Fukuyama maknai sebagai sistem liberal (kapitalisme). *Ibid.*, hlm. 962-965.

⁷Istilah “tuan” dan “borjuasi” memiliki substansi makna yang sama yakni menunjuk pada kelas sosial yang menempati posisi kelas elit. Secara semantik penggunaan kata tersebut merujuk pada struktur sosial yang menindas, yang mana istilah “tuan” digunakan pada masa feodalisme dan “borjuasi” diperkenalkan oleh Marx untuk struktur sosial kapitalisme.

⁸Begitupun halnya dengan istilah “budak” dan “proletar”, menunjuk pada kelas sosial dengan strata rendah yang cenderung tertindas pada masa feodalisme dan kapitalisme.

⁹Sering disebut “nilai lebih”. Gagasan Marx yang melihat relasi kapitalis dan buruh dalam entitas perusahaan berlangsung dalam pola penindasan. Nilai lebih adalah nilai yang seharusnya menjadi milik kaum pekerja (proletar) yang justru dinikmati oleh borjuasi. Nilai ini muncul akibat kerja lebih kaum buruh, yang mana laba yang selama ini dijadikan sebagai kinerja dan dinikmati oleh kaum borjuasi adalah hasil eksploitasi buruh (nilai lebih). Lihat: Engels, *Tentang Das Kapital Marx (terj.)*, ([t.t.]: Renaissance, 2007), bab II dan III.

buruh maupun alam secara eksploitatif. Realitas akuntansi dalam struktur teori mencerminkan bagaimana pola dominasi tersebut berlangsung dalam laporan keuangan.

Keberadaan ilmu akuntansi dalam melanggengkan keamanan sepihak yang menindas, telah menghilangkan peran ilmu yang seharusnya berorientasi pada perubahan untuk keadilan.¹⁰ Hal ini diistilahkan oleh Syahrur (2003: 251) sebagai “tirani pengetahuan” yang mengarah pada tirani sosial. Tirani ilmu muncul sebagai akibat ketidaksesuaian antara ilmu sebagai konsepsi dengan realitas kultur dan keyakinan masyarakat. Upaya penyeragaman ilmu secara *absolutisme*¹¹ yang berpangkal ujung pada upaya penstandarisasian akuntansi, justru menciptakan apa yang diistilahkan Feyerebend (1978) sebagai *anarchist epistemology*.

Hadirnya akuntansi Islam (1991) merupakan *mainstream* tersendiri atas sistem yang mapan. Islam sebagai basis ideologi memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah peradaban ilmu yang membebaskan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an.

Meskipun seiring dengan perkembangan organisasi maupun badan usaha yang menglabalkan dirinya sebagai lembaga syariah, tetapi hal terlihat kontradiktif adalah ketika kita mencoba melihat sisi lain dari masyarakat. Pembengkakan kemiskinan, disparitas kesenjangan yang membengkak, hal ini dapat dengan mudahnya kita melihat fenomena sosial yang menjadi semiotika dari ketidaksejahteraan sebagian besar masyarakat meskipun di sisi lain pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan organisasi syariah semakin melonjak. Pertumbuhan institusi syariah ternyata tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan dan pemutusan kesenjangan yang ada.¹² Realitas kesenjangan yang begitu ironis dalam masyarakat, pada dasarnya

¹⁰Hal ini menjadi lonceng kematian ilmu atas kegagalannya dalam menjawab persoalan dan tuntutan masyarakat. Horgan (2005) menyatakan ilmu pengetahuan telah memasuki babak senja kala (kematian). Omerod (1994) mendungungkan kematian ilmu ekonomi karena gagal menciptakan kesejahteraan. Piliang (2005) menyatakan kematian ilmu sebagai suatu yang melampaui batas untuk menuju titik ekstrem, peleburan dan pencampuradukan (*trans*), dan kondisi tidak ada lagi objek (ilmu pengetahuan) itu sendiri. Santoso (2010) mengistilahkan *ironic science*, atau (*fatalistic science*).

¹¹Seperti halnya munculnya isu IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

¹²Peneliti menganalogikan seperti halnya pertumbuhan kloter haji Indonesia justru berbanding negatif terhadap tingkat penghuni jalanan dan masyarakat Muslim yang mengais-ngais makanan di kolom-kolom jembatan dan di jalanan.

merupakan sebuah semiotika sosial akan adanya realitas penindasan yang terpola pada relasi penguasaan yang kuat terhadap yang lemah.

Pola hubungan yang negatif antara pertumbuhan institusi syariah dengan semakin lebarnya kesenjangan sosial. Di samping bertentangan dengan doktrin Islam yang memberikan jaminan kesejahteraan ketika aturan Tuhan ditegakkan,¹³ hal ini juga mendorong kita untuk menanyakan kembali seberapa kuat relasi Islam sebagai sebuah basis ideologi yang membebaskan dengan institusi syariah yang melaksanakan akuntansi Islam.

Sebab evolusi kapitalisme dapat saja merangkul sisi agama untuk meredakan dan memenangkan pertarungan ideologi sehingga yang lahir adalah “kapitalisasi agama”. Yang mana melahirkan kapitalisme yang berjabah Islam atau proses sintesis antara Islam dan kapitalisme lewat slogan “Islamisasi akuntansi” sebagai model konvergensi justru hanya menciptakan Islam berwajah kapitalisme. Terkadang bukan hanya sintesis agama dengan kapitalisme terjadi, tesis Weber¹⁴ justru menegaskan bagaimana peran agama (Protestan) di Eropa justru menjadi kekuatan etis yang mendorong bangkitnya kapitalisme. Ketika labelisasi agama dijadikan tameng untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, dipersepsi secara instrumental dalam mengaktualkan keserakahan dengan membalut diri dengan “kesalehan agama” dalam memapankan struktur penindasan yang hierarkis.

Kesenjangan sosial yang menjadi salah satu tipikal corak hasil struktur yang tercipta dari tatanan sistem kapitalisme, kelihatannya juga telah diperankan oleh institusi syariah. Perlakuan terhadap masyarakat dalam menjalankan sistem cenderung terpola pada pola-pola kelas, yang termanifestasi pada kebijakan-kebijakan yang secara filosofis lahir dari cara pandang mekanis yang memandang manusia secara hierarkis.

Kapitalisasi agama bukan hal yang langka, seperti yang dipahami Gramsci bahwa pelanggaran sebuah struktur yang menindas tidak hanya diperankan oleh *ruling class*, melainkan institusi *civil society* baik yang berbentuk institusi bisnis, pendidikan maupun agama (Gramsci, 2003:

¹³QS Al-Maaidah [5]: 66.

¹⁴Akumulasi kekayaan khususnya dalam sekte Calvinisme dianggap sebagai doktrin kesejahteraan manusia dalam melayani Tuhan, dengan menempatkan “kerja” sebagai tujuan akhir spiritual. Lihat: Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme (terj.)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. xii.

127). Gramsci menegaskan bahwa selama kekuatan hegemonik masih langgeng bekerja di bawah kapitalisme maka keadilan hanya tinggal ilusi. Oleh karenanya dibutuhkan cara pandang yang baru dalam mempersepsi akuntansi secara normatif dalam kaitannya sintesis Islam sebagai ideologi dengan akuntansi sebagai disiplin ilmu. Formula integrasi meniscayakan segenap struktur metateori akuntansi akan memperlihatkan sisi ideologis yang kuat dalam membebaskan yang tertindas, bukan justru menjadi alat yang memapankan *status quo* penindasan.

2



Paradigma Akuntansi Islam

“.....

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi (QS Al-Qashash [28]: 5).

.....”

A. Historisitas Ilmu dan Paradigma

Ilmu pada hakikatnya bukanlah realitas yang statis, melainkan dinamis. Berkembang melewati fase kehidupan baik yang bersifat evolutif maupun revolutif, memengaruhi peradaban manusia baik yang bersifat kemajuan maupun kemunduran. Tuhan dengan jelas menegaskan:....*Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, Kami pergilirkan di antara manusia* (QS Ali 'Imran [3]: 140).

Fase kejayaan dan kehancuran seperti dengan fase penciptaan dan penghancuran dalam doktrin Hinduisme lewat ajaran (tarian) Shiva.¹ Dinamisasi akuntansi tidak lepas dari dua fase tersebut, seperti halnya realitas kosmik diciptakan dalam sebuah keseimbangan, ada kalanya penghancuran itu hadir sebagai gerak untuk menyempurna, mempertahankan keseimbangan. Penghancuran sebagai bentuk pergeseran paradigma akuntansi pada dasarnya adalah bentuk penyempurnaan diri akuntansi itu sendiri. Bergerak dalam suatu lompatan-lompatan radikal menuju koridor (fitrah) akuntansi sebagai manifestasi sifat Tuhan di muka bumi. Hal ini selaras dengan fitrah keseluruhan makhluk sebagai realitas yang senantiasa bergerak menuju sumber-Nya.

1. Epistemologi dan Pembentukan Paradigma

Epistemologi merupakan salah satu rangkaian dari filsafat sebagai sebuah kerangka pemikiran yang menelusuri jejak pengetahuan baik berupa landasan pengetahuan, sumber maupun alat pengetahuan, serta kriteria dari sebuah pengetahuan yang benar maupun pengetahuan yang salah. Sehingga epistemologi dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari “teori pengetahuan” (Suriasumantri, 2009: 9).

Perbedaan perlakuan terhadap realitas merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologi seseorang. Dengan demikian, epistemologi

¹Dalam mitologi Hindu disebut bahwa tarian shiva adalah tarian kosmik (semesta). Digambarkan secara metafora empat tangan shiva, tangan kanan memegang alat musik merepresentasikan gemuruh suara halus penciptaan, sedangkan sepasang tangan kiri memegang api yang menyiratkan penghancuran. Tangan kanan yang lain dalam posisi memberkati, sedangkan tangan kiri yang satu lagi menyilang di badan menunjuk pada kaki kiri yang diangkat, sebagai simbol dari kebangkitan kesadaran yang baru. Metafora tarian ini menggambarkan sebuah siklus baru sebagai siklus pembaruan realitas menuju keseimbangan sebagai wujud penyempurnaan melewati fase penciptaan dan penghancuran. Menghancurkan kepalsuan untuk melahirkan kesejatian.

menempati peran yang fundamental dalam mengkonstruksi lahirnya teori. Perbedaan epistemologi meniscayakan perbedaan pandangan dunia hingga memengaruhi pembentukan kerangka ideologi (Muthahhari, 2008: 30-41). Perbedaan ideologi memengaruhi pengkonstruksian teori sebagai perbedaan manusia dalam membaca dan mempersepsi realitas hingga memengaruhi perbedaan manusia dalam memperlakukan realitas.

Pandangan dunia merupakan bentuk dari sebuah kesimpulan, penafsiran, hasil kajian yang ada pada seorang berkenaan dengan alam semesta, manusia, masyarakat dan sejarah (Muthahhari, 2010: 2). Jika pandangan dunia saling berbeda maka ideologi pun akan saling berbeda dan teori secara normatif pun akan berbeda.

Doktrin *mainstream* akuntansi positif² yang menganggap ilmu pengetahuan “harus” objektif (terlepas dari subjek) dan bebas nilai merupakan sebuah doktrin yang pada dasarnya pun syarat dengan nilai itu sendiri.³ Ahimsa (2009) menegaskan bahwa tidak ada objektivitas dalam ilmu, sebab apa yang selama ini dianggap sebagai objektivitas ternyata juga tetap didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu, yang tidak berbeda dengan ideologi itu sendiri sebagai seperangkat nilai-nilai. Sebab Sains bukan *value-neutral*, tetapi sebaliknya ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah *value laden*, yang erat terkait dengan nilai-nilai sosio-kultural, nilai-nilai budaya, pertimbangan politik praktis (Muslih, 2004: 63).

Penerimaan nilai-nilai dalam komunitas ilmiah membentuk kemapanan paradigma. Khun (1962) menggunakan istilah “paradigma” untuk menjelaskan kerangka pikir yang digunakan ilmuwan dalam komunitas ilmiah untuk menginterpretasikan realitas (Muslih, 2004: 62).

²Model akuntansi yang diperkenalkan oleh Watts dan Zimmerman (1978), yang merupakan produk dari paradigma positivisme, yang secara ideologis adalah *mainstream* kapitalisme. Lihat: Ghazali, Pidato Pengukuhan Guru Besar: *Pergeseran Paradigma Akuntansi Positivisme ke Perspektif Sosiologis* (UNDIP: Semarang, 2004). Dan Triantoro, *Praktik Akuntansi dalam Budaya Kapitalisme*, Jurnal Percikan, Vol. 91, Edisi Agustus 2008.

³Meminjam analisis Foucault tentang relasi wacana/ilmu dengan kekuasaan. Foucault mengatakan “*knowledge is not something that can exist apart power relation*”. Setiap diskursus (ilmu) tidak lepas dari relasi kekuasaan yang ada. Kekuasaan yang dimaksud bukan hanya kekuasaan politik melainkan kecenderungan otoritas dan hegemoni dalam konteks dominasi ideologi lewat kerangka sebuah teori. Foucault menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi. Lihat: Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* Ed. 6, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 611.

Cara ilmuwan memandang dunia menentukan dunia macam apa yang akan dikonstruksi.

Ritzer (1975) mengungkapkan bahwa kemenangan suatu paradigma atas paradigma yang lain lebih disebabkan karena para pendukung paradigma yang menang itu lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan (*power*) bukan karena paradigma yang menang tersebut lebih benar atau lebih baik dari yang dikalahkan (Fakih, 2009: 20).

Runtuhnya suatu paradigma merupakan refleksi dari rapuhnya epistemologi yang dijadikan sebagai landasan pengetahuan. Sehingga keruntuhan paradigma pada hakikatnya telah meruntuhkan pula seluruh bangunan sistem maupun struktur yang terbentuk atas paradigma tersebut. Kontradiksi-kontradiksi epistemologi dan paradigma menjadi gejala rapuhnya paradigma yang bersangkutan. Kontradiksi tersebut tidak hanya berkisar pada kontradiksi eksternal yakni ketidaksesuaian antara konsep dengan kebutuhan ideal masyarakat, melainkan kontradiksi internal secara logik, rasionalitas yang buntu dalam hal ketidakmampuan untuk diterima secara logis.

2. Paradigma Cartesian-Newtonian dalam Akuntansi

Paradigma Cartesian⁴ menyuguhkan pandangan baru tentang hakikat manusia dengan menitikberatkan kesadaran individual sebagai subjek yang otonom. Manusia tidak lagi sebagai peziarah di dunia (*viator mundi*), melainkan sebagai pencipta dunia (*faber mundi*) (Heriyanto, 2003). Tuhan sebagai pusat (*teosentrism*) bergeser pada manusia adalah pusat segalanya (*antroposentrism*). Gejala ini menciptakan sekularisasi dalam ilmu pengetahuan yang terakomodir dalam *mainstream* akuntansi positif. Upaya pengkerdilan realitas dalam ruang batas materiil, secara ontologi akan mengesampingkan realitas nilai (Tuhan) dalam akuntansi.

Menurut Descartes, kepastian kebenaran dapat diperoleh melalui strategi kesangsian metodis (Hardiman, 2007: 38). Sebuah kerangka *absolutisme* kebenaran yang berlandaskan pada *scientific methodology*, dengan model penalaran induktif (empirik) sebagai kriteria ilmiah pengetahuan

⁴Lahir pada abad pertengahan oleh Rene Descartes, bagian mata rantai dari upaya manusia untuk menemukan kebenaran di luar gereja dengan menghidupkan filsafat rasionalisme. Paradigma ini berevolusi hingga lahirnya aliran eksistensialisme dalam filsafat yang menempatkan superioritas kehidupan pada manusia. Descartes dikenal sebagai Bapak filsafat modern.

yang bersifat *singular statements*. Dalam hal ini akuntansi konvensional sebagai produk *scientific methodology*, dikriteriakan sebagai pengetahuan yang kebenarannya bersifat tunggal mengikuti prinsip-prinsip saintifik. Berbeda dengan mazhab postmodernisme,⁵ yang justru menekankan *pluralism statements*, dengan berusaha melihat realitas dari sudut pandang emansipatoris (*the others*).

Pandangan Descartes dalam perkembangannya semakin dikukuhkan oleh teori yang diciptakan oleh Newton (1642-1727)⁶. Sehingga dapat dikatakan bahwa fondasi ilmu pengetahuan modern termasuk akuntansi konvensional dibangun atas filsafat paradigma Cartesian-Newtonian.

Asumsi Dasar Paradigma Cartesian-Newtonian

Asumsi yang menjadi kerangka paradigma ini meliputi:

Pertama, Subjektivisme-Antroposentrisme. Hakikat dasar sebuah eksistensi adalah kesadaran subjek. Manusia sebagai pihak yang mempersepsi menjadi dasar dari keberadaan yang lain (*the others*) seperti halnya pernyataan Descartes "*cogito ergo sum*" (aku berpikir, maka aku ada) (Russell, 2007: 740). Secara epistemologis, manusia (rasio) diposisikan sebagai pusat segalanya yang dapat membangun ilmu secara objektif. Wujud antroposentris dalam akuntansi menggiring lahirnya marginalisasi. Kuasa akuntansi melekat pada manusia yang hanya tunduk pada nalar positif yang memiliki karakter kalkulatif, matematis bahkan pragmatis dengan menempatkan modal sebagai puncak nilai sekaligus sebagai basis realitas akuntansi yang terpatni pada asumsi *unit monetary*. Akuntansi konvensional dipersepsi murni sebagai produk nalar positif manusia yang umumnya bersifat instrumental.

Berbeda dengan Islam mengakui aktualitas akal,⁷ indra⁸ dan hati⁹ sebagai epistemologi dalam menyerap realitas wujud. Wujud itu sendiri

⁵Sebuah paham *counter* (tandingan) sekaligus kritik yang bersifat dekonstruktif terhadap paham modernisme. Postmodernisme identik dengan relativisme, pluralisme sebagai bentuk penolakan terhadap cara berpikir modernisme yang terkesan memonopoli kebenaran. Lihat: Ritzer, *op.cit.*, hlm. 628-645.

⁶Penemuan Newton tentang teori gravitasi pada kosmologi menegaskan cara kerja alam yang mekanik dan atomistik.

⁷QS Ar-Ruum [30]: 24.

⁸QS Yunus [10]: 101; Al-A'raaf [7]: 185; dan Asy-Syu'ara [26]: 7.

⁹QS Al-Hajj [22]: 46; Al-A'raaf [7]: 179; Al-Qaaf [50]: 37; Fushshilat [41]: 53; Al-Anfaal [8]: 29; dan Asy-Syams [91]: 7-9.

tiada lain adalah Tuhan sebagai pusat eksistensi.¹⁰ Sehingga konsepsi nilai akuntansi tidak terpenjara pada realitas pragmatis sebagai kecenderungan produk nalar semata, melainkan mencakup realitas yang tak terjamah oleh nalar positif.

Kedua, Dualisme. Realitas *res cogitans* dan *res extensa* (jiwa dan materi) dianggap sebagai realitas terpisah satu sama lain bahkan independen tanpa bergantung satu sama lain. Pola keterpilahan konsep telah menginspirasi lahirnya dikotomi antara alam dan sosial bahkan Tuhan dalam akuntansi. Subjek (manusia) diposisikan sebagai pihak yang berkesadaran, memiliki kekuatan pengendalian (*superior*) sedangkan alam diperlakukan sebagai benda mati (*inferior*) tak berkesadaran dan tak bermakna sebagai objek yang tereksplorasi. Hubungan manusia (*superior*) dan alam (*inferior*) itu diperantarai oleh akuntansi. Akuntansi konvensional yang berparadigma Newtonian ini cukup merepresentasikan bagaimana pengaturan akuntansi yang egoistik, memperlakukan alam sebagai objek yang tereksplorasi hingga meninggalkan jejak persoalan ekologis yang cukup ironis. Berbeda dengan Islam yang mempertahankan sifat *hudus*¹¹ pada alam sebagai transendensi Tuhan secara *monistik*.¹² Sehingga dalam Islam akuntansi memiliki sisi kehudusan dalam memandang alam.

Ketiga, Mekanistik-Deterministik. Realitas dianggap di luar kesadaran subjek. Alam sebagai mesin raksasa yang bergerak dalam koridor yang pasti tanpa intervensi manusia. Seperti kata Spinoza, alam semesta ini merupakan sebuah mesin raksasa yang Tuhan pun tunduk terhadap ketentuan tersebut. Alam merupakan sebuah sistem tanpa tujuan, sebuah rangkaian akibat-akibat yang tidak memiliki sebab akhir. Spinoza menempatkan manusia dan kehidupannya dalam genggamannya mesin raksasa yang disebut alam (Matson, 1966: 8-10) dalam (Hadi, 2003). Asumsi ini dalam penelitian akuntansi memengaruhi pembentukan teori dengan pendekatan induktif (empirik) yang menjadi dasar akuntansi positif. Determinisasi akuntansi menempatkan akuntansi sekadar sebagai produk alam dan produk sejarah karena tuntutan bisnis semata, kering dan hampa, tanpa bangunan nilai yang kokoh selain materi sebagai hukum-hukum alam.

¹⁰QS Al-Baqarah [2]: 115.

¹¹QS Al-Israa' [17]: 44; An-Nahl [16]: 49; dan Ar-Rahman [55]: 6.

¹²QS Al-Hijr [15]: 21.

Berbeda dengan Islam, yang menegaskan asas kebebasan (*free will*)¹³ pada diri manusia. Akuntansi sebagaimana ia adalah bagian dari kehidupan manusia bukanlah sekadar produk sejarah, melainkan memiliki peran dalam membentuk realitas dengan memosisikan manusia dan alam sebagai makhluk yang memiliki fitrah untuk menyempurna¹⁴. Oleh karena itu, bangunan pengetahuan Islam tidak melepaskan unsur “ide” dalam memengaruhi realitas. Kebenaran akuntansi Islam adalah kebenaran ide yang melampaui makna kebenaran akuntansi positif yang sekadar mendudukan akuntansi sebagai produk sejarah yang deterministik.

Keempat, Reduksionisme-Atomistik. Realitas pengetahuan akuntansi direduksi dan dipisahkan dengan realitas pengetahuan yang lain. Akuntansi sebagai ilmu dianggap hanya “angka”, yang tidak memiliki kaitan dengan etika, teologi dan ilmu lainnya sehingga ilmu harus objektif, independen dan netral. Reduksionisme akuntansi menjadikan akuntansi konvensional menjadi gagasan yang tidak utuh dalam memahami dan memperlakukan realitas, hal ini merupakan keniscayaan dari konsekuensi akuntansi yang berpusat pada nalar semata yang cenderung mempersempit realitas, memisahkan, membandingkan, membedakan serta menilai realitas hanya dalam bentuk angka. Berbeda dengan Islam yang berpedoman pada integrasi epistemologi (Nata, 2005: 141-184), melihat realitas akuntansi sebagai bagian dari realitas lain yang lebih kompleks. Akuntansi tidak dapat lepas dari unsur etika, ekologis, sosiologis dan ilmu lainnya. Sebagaimana Islam sebagai ajaran universal, holistik, mengedepankan persamaan ketimbang perbedaan, integrasi ketimbang fragmentasi. Terkandung wujud dalam akuntansi yang merepresentasikan wujud akal, indra dan karsa manusia dalam memandang keseluruhan realitas.

Kelima, Instrumentalisme. Pengetahuan sebagai alat yang bersifat mekanik. Dalam terapannya ilmu akuntansi terlihat kering, semua dipersepsi sebagai alat untuk menguasai (*regulatory*). Akuntansi dalam *mainstream* positif dipersepsi dan difungsikan sebagai alat untuk menguasai realitas lain serta mengakumulasi kekayaan, sebagaimana pengetahuan menurut Bacon adalah sarana untuk menguasai (Hardiman, 2007: 27), layaknya akuntansi yang melanggengkan penguasaan borjuasi terhadap buruh, penguasaan pemodal terhadap alam bahkan penindasan entitas

¹³QS Al-Ankabut [29]: 40; dan Al-Kahfi [18]: 29.

¹⁴QS Ar-Ruum [30]: 30.

bisnis terhadap entitas bisnis lainnya. Efisiensi dan efektivitas yang menjadi tujuan regulasi-regulasi akuntansi konvensional memiliki karakter yang kuat berbasis kapital. Berbeda dengan Islam yang menempatkan pengetahuan (akuntansi) sebagai wujud pemuliaan manusia¹⁵ untuk memuliakan dirinya atas karunia Tuhan memberi akal untuk manusia. Dengan demikian pengetahuan adalah sarana untuk membebaskan manusia dan membebaskan realitas yang tertindas lainnya (*liberty*). Regulasi akuntansi dalam Islam berpangkal pada kesadaran hakikat penciptaan manusia untuk menyatu dengan penciptanya yang diperantarai oleh akuntansi sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga hubungan transendental antara manusia, alam dan Tuhan menyatu menjadi jiwa akuntansi yang berbasis altruisme.

Keenam, Materialisme-Saintisme. Peran “Tuhan” dalam akuntansi bersifat irasional. Realitas yang menjadi dasar pembentukan teori adalah realitas yang dapat diempiriskan, dikuantifikasi dan diuji secara observasional. Unsur metafisis dianggap sebagai irasionalitas yang tidak ilmiah. Hal ini merupakan bagian dari filosofi materialisme yang menempatkan materi sebagai wujud hakiki. Berbeda dengan Islam yang justru menempatkan hakikat realitas akuntansi bersandar pada non-materi (Tuhan), sedangkan materi hanyalah realitas *i’tibari*.¹⁶ Sehingga dalam akuntansi Islam justru menempatkan realitas metafisis dan non-material sebagai landasan sekaligus tujuan akuntansi, sedangkan akuntansi kapitalisme berkiblat pada poros spiral materi semata.

Ketujuh, Value neutral. Akuntansi sebagai ilmu diasumsikan harus netral (bebas nilai). Dengan menafikan jejak-jejak dan peran Tuhan dalam ilmu. Ilmu akuntansi konvensional sebagaimana pengetahuan modern telah memutuskan interkoneksi jejaring kehidupan antara manusia dengan alam dan dengan hal-hal transendental. Doktrin tentang bebas nilainya akuntansi telah merendahkan realitas manusia, alam bahkan Tuhan sebagai realitas yang tak berkesadaran bahkan tidak memiliki eksistensi melainkan sekadar materi atau sekadar persepsi semata.

Secaran aksiologis, kebaikan dipahami sebagai upaya mengendalikan materi/alam lewat pengetahuan akuntansi. Upaya mengakumulasi kekayaan menjadi landasan manusia dalam memandang alam. Sebab

¹⁵QS Az-Zumar [39]: 9.

¹⁶QS Al-Baqarah [2]: 115.

konsep kemajuan (*progress*) peradaban dipandang secara materialistik yakni bertambahnya kepemilikan dan penguasaan manusia terhadap alam (Heriyanto, 2003: 29) dalam (Sabri, 2009: 62).

Krisis ekologis, dominasi destruktif pada berbagai sektor: kemiskinan, dehumanisasi, dekadensi moral, alienasi dan reifikasi pada kehidupan sosial. Dalam pandangan dunia modern, krisis-krisis yang terjadi tidak bisa disalahkan pada manusia modern. Sebab hal tersebut bebas dari campur tangan manusia. Manusia dan alam sama sekali terpisah (Suteja, 2009). Upaya untuk memisahkan akuntansi terhadap realitas persoalan kemiskinan, dehumanisasi, perbudakan, alienasi, bahkan kriminalisasi yang seolah-olah tidak memiliki relevansi dengan akuntansi, seperti halnya dengan memisahkan roh dari jasadnya. Sebab pada dasarnya akuntansi tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pengetahuan teknis belaka (pencatatan dan pelaporan), melainkan di setiap tampilan teknis terdapat substansi jiwa akuntansi yang melekat kuat, menjadi karakter dasar yang memengaruhi setiap tampilan teknisnya.

Dalam Islam realitas alam dipersepsi sebagai jejaring kehidupan yang bersifat organis yang memiliki sifat altruisme, bukan sekadar benda mati yang tak bermakna dan tak berkesadaran. Manusia diciptakan bukan untuk menguasai alam, melainkan bagaimana melestarikannya¹⁷ dengan menciptakan pola *simbiosis mutualism*¹⁸ antara manusia dan alam. Antara manusia dengan yang lainnya, manusia dengan alam memiliki status yang sama sebagai makhluk Tuhan.

B. Paradigma Tauhid¹⁹

Setiap konsepsi ilmu sebagai hasil pengembangan pemikiran manusia, tidak lepas dari filosofi dasar yang menjadi bangunan kerangka ilmuwan

¹⁷QS Al-A'raaf [7]: 96.

¹⁸Relasi yang saling memberi manfaat. Seperti lebah dengan bunga, yang mana lebah mendapatkan makanan dari bunga dan bunga memperoleh penyerbukannya. Seperti petani dengan ladang, ketika petani menuai hasil dari ladang, dan ladang mendapatkan dirinya yang terpelihara oleh petani.

¹⁹Hakikat ajaran Islam yang mengandung makna penegasan dan penafian. Tiada wujud melainkan diri-Nya, menafikan realitas lain yang mandiri selain diri-Nya. Kontra atas Tauhid adalah *syirik* yakni penyekutuan yang bermakna pengakuan selain diri-Nya. Dalam filsafat Islam, prinsip Tauhid termaknai sebagai integrasi epistemologi (*bayani, burhani, irfani*) sebagai semiotika bahwa Islam adalah ajaran universal, holistik, tanpa ada dikotomi secara ontologis (*dualisme*). Tuhan adalah realitas mutlak, yang tak terbagi (*monisme*).

dalam memandang realitas sebagai hasil interaksi manusia dengan alam semesta. Semua agama, adat istiadat, aliran pemikiran dan filsafat sosial bersandar pada apa yang disebut sebagai pandangan dunia (Muthahhari, 1993: 9).

Sebab paradigma sebagai hasil kesimpulan manusia atas alam semesta menentukan bagaimana manusia memperlakukan alam baik dalam konteks mengubah, menjauhi maupun mengendalikan alam. Akuntansi yang bersandar pada paradigma yang berbeda akan melahirkan konstruksi teoretis yang berbeda pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya pengabsolutan akuntansi sebagai sebuah kebenaran yang harus diterima secara universal, pada dasarnya upaya tersebut tiada lain merupakan pemutlakan terhadap paradigma yang satu terhadap yang lainnya yang mengarah pada hegemoni.

1. Misi Islam Atas Penciptaan

Islam diturunkan oleh Allah memiliki misi yang jelas terkait dengan alam semesta. Islam ingin merevolusi paradigma manusia yang pada awalnya kosmosentris²⁰ menjadi teosentris,²¹ dengan menempatkan alam sebagai ciptaan dan manifestasi Tuhan yang tujuannya bukan untuk ditakuti atau dijauhi (kosmosentrisme) apalagi dieksploitasi sampai pada tahap pengrusakan (positifisme), melainkan sesuai dengan hakikat penciptaan manusia sebagai *khalifatul fil ardh*,²² pengolah sekaligus pemelihara alam sebagai sebuah amanah penciptaan.

Islam tidak menganggap bahwa dunia luar merupakan musuh yang harus dilumpuhkan atau ditundukkan. Tidak pula menganggap alam harus ditakuti sehingga ia harus lari darinya, melainkan Islam menganggapnya sebagai lahan perjuangan, pertumbuhan dan pengembangan potensi manusia (Baqir, 2003: 6). Kekuatan-kekuatan alam yang biasa tampak di mata manusia sebagai hal yang menakutkan dan berbahaya itu dapat dirombak dan diubah menjadi sumber penghidupan, kalau manusia dapat mengendalikannya dengan cara yang benar. Islam menaruh kepercayaan

²⁰Keyakinan masyarakat yang menempatkan alam sebagai pusat segalanya, alam disakralkan bahkan ditakuti dengan memanifestasikan alam sebagai dewa atau roh, sehingga menjadikan alam seperti “perawan” di mana manusia tidak ingin menyentuhnya apalagi merusaknya.

²¹Tuhan adalah sentral kehidupan.

²²QS Al-Baqarah [2]: 30.

kepada keampuhan tindakan manusia yang terarah dengan baik (Naqvi, 1991: 14).

Sejalan dengan peran manusia sebagai “pemakmur”²³ bumi, maka Tuhan membekali manusia kemampuan sebagai makhluk yang dikaruniai akal,²⁴ setelah sebelumnya Tuhan telah menjinakkan alam semesta untuk manusia.²⁵ Dan menetapkan aturan dan larangan atas pengrusakan alam,²⁶ sebab keseimbangan alam tergerus akibat ulah manusia sendiri.²⁷

Misi Islam atas penciptaan harus diterjemahkan sebagai misi Islam dalam akuntansi untuk memakmurkan alam. Sehingga keniscayaan akuntansi Islam harus berperan dalam mendistribusikan hak-hak alam untuk menjaga keseimbangan semesta sebagai misi penciptaan. Akuntansi Islam memandang alam sebagai bagian integral dengan kehidupan (*stakeholders*), alam bukan objek semata seperti halnya akuntansi kapitalisme memandang alam, melainkan alam juga adalah subjek yang hidup, berkesadaran bahkan memiliki sisi altruisme sebagai makhluk yang diciptakan dari realitas yang *hudus*.

2. Konsepsi Islam Atas Kosmologi²⁸

Baqir dalam karyanya *Trend History In Qur'an (terj.)* menegaskan bahwasanya:

Hubungan manusia dengan alam bukanlah hubungan antara seorang pemilik dengan barang miliknya. Hubungan keduanya adalah hubungan antara seorang yang menerima kepercayaan dengan barang yang dipercayakan, tanpa memandang kedudukan sosialnya. Hubungan antar manusia adalah hubungan antara dua orang rekan yang menjalankan kewajiban yang sama sebagai *khalifah* Allah, bukan hubungan antara majikan dengan budak (Baqir, 2010: 154).

²³QS Huud [11]: 61.

²⁴QS Ar-Ruum [30]: 24; Az-Zumar [39]: 42; dan Shaad [38]: 29.

²⁵QS Al-Luqman [31]: 20.

²⁶QS At-Takwir [81]: 27.

²⁷QS Ar-Ruum [30]: 41.

²⁸Ilmu yang mengkaji hakikat alam semesta yang di dalamnya terdiri atas mikrokosmos dan makrokosmos. Termasuk mengkaji secara filosofis apakah alam semesta merupakan realitas mandiri atau “akibat” dari realitas selain dirinya atau alam itu sendiri adalah realitas. Kosmologi dalam agama juga membahas bagaimana relasi Tuhan dengan alam semesta. Aristoteles menyebutnya sebagai “filsafat alam semesta”. Lihat: Hariyono, *Tabir Mistri Jagad Raya* (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2001), bab I.

Alam semesta²⁹ dalam pandangan dunia tauhid bergerak dalam suatu sistem harmonis menuju pada suatu arah kesempurnaan. Alam merupakan realitas yang organis³⁰ yang tercipta secara sempurna,³¹ bukan benda mati yang statis. Sebab, tidak satu pun makhluk yang diciptakan dengan sia-sia tanpa tujuan.³² Semua memiliki tujuan dan diatur oleh norma-norma Ilahi yang pasti (tidak berubah).³³ Di antara *maujud-maujud* Tuhan maka manusialah yang dianggap dan dikarunia kemuliaan khusus dan bertanggung jawab atas evolusi dirinya dan kesejahteraan masyarakatnya dan kesejahteraan alam itu sendiri.

Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan dunia tauhid memberikan roh, tujuan, dan makna kepada kehidupan karena ia menempatkan manusia di jalan kesempurnaan yang tiada batasnya (Muthahhari, 1993: 20) dengan menempatkan alam sebagai *maujud* organis yang berasal dari dan milik yang Mutlak dan hakikatnya kembali menuju yang Mutlak.³⁴ Sehingga wajib hukumnya diperlakukan sebagaimana alam adalah manifestasi yang Mutlak yang kebergantungannya kepada Tuhan, menjadikan alam sebagai makhluk yang terlestarikan melalui santunan dan kehendak Ilahi.

Paradigma Tauhid dalam akuntansi sangat menentang cara pandang Cartesian yang memilah dan menciptakan status yang struktural hierarkis dalam konteks relasi manusia terhadap alam.³⁵ Semua dipandang sebagai kodrat yang mekanis, alam tidak ubahnya adalah benda mati yang tak bermakna. Paradigma Cartesian telah mencerabut kewibawaan Tuhan dalam alam semesta bahkan menganggapnya telah “mati”.³⁶

Krisis demi krisis menerpa kehidupan manusia, kehampaan moralitas dan spiritual menjadi tipikal manusia modern. Semangat pengrusakan alam lewat eksploitasi besar-besaran yang dijiwai oleh semangat kapitalisme,

²⁹Makrokosmos (alam fisik) dan mikrokosmos (manusia).

³⁰QS Al-Israa' [17]: 44; An-Nahl [16]: 49; An-Naml [27]: 88.

³¹QS Al-Furqaan [25]: 2.

³²QS Ali 'Imran [3]: 191.

³³QS Faathir [35]: 43; dan Al-A'raaf [7]: 34.

³⁴QS Al-Baqarah [2]: 156; dan An-Naazi'at [79]: 44.

³⁵QS Al-An'aam [6]: 38.

³⁶Pernyataan Nietzsche lewat teori nihilismenya mengatakan “*got ist tot, got bleibt tot, und wir ihn gettot, requiem aeternam deo*”. Tuhan telah mati, Tuhan terus mati, kita telah membunuhnya dan semoga Tuhan beristirahat dalam kedamaiannya yang abadi. Lihat: Mujiyono (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 31.

telah menciptakan berbagai penyakit alam yang ujung-ujungnya berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Penindasan struktural terhadap alam dan makhluk Tuhan yang diperlemah (buruh) mengakibatkan kesenjangan ekonomi, perebutan lahan eksploitasi, konflik kelas ikut mewarnai dinamika sosial.

Kegagalan akuntansi modern dalam membangun peradaban yang holistik, dialogis dan humanis, tiada lain akibat terputusnya ikatan akuntansi dengan Tuhannya, dengan menempatkan nafsu (keserakahan) sebagai Tuhannya.³⁷

Oleh sebab itu, tauhid dalam akuntansi dipahami sebagai cara pandang yang holistik dan organis sebagai penggambaran adanya *unity of godhead* (kesatuan keTuhanan) sosial maupun alam. Tidak ada keterpisahan antara Tuhan dengan alam semesta dalam akuntansi, Suhrawardi menganggap bahwa hikmah adalah pancaran (*faidh*) abadi dari Prinsip Pertama (Nasution, 2005: 151). Ibaratkan alam adalah lukisan (buah pengetahuan Tuhan yang sempurna), ketika manusia merendahkan alam, sesama manusia, hewan dan sejenisnya, sama halnya manusia telah merendahkan Tuhannya sebagai pemilik lukisan.

Bentuk pengagungan dan kecintaan kepada Tuhan termanifestasi pada kadar kecintaan manusia terhadap makhluk-Nya. Persepsi yang menempatkan alam sebagai realitas yang terpisah dengan Tuhan, merupakan bentuk *syirik* yang bertentangan dengan tauhid, sebab hal ini tiada lain adalah bentuk pengingkaran pensifatan Tuhan dalam penciptaan. Praktik pengrusakan alam merupakan metafora bentuk kebencian manusia terhadap alam semesta, pada hakikatnya juga merupakan bentuk pengingkaran manusia terhadap Tuhannya. Sebab alam semesta adalah manifestasi diri-Nya secara esensial. Seperti yang dikatakan Al Sirhindi (Al-Maktubat 1: 306)

..Bagaimanakah pengetahuan tentang benda itu dapat dicela atau direndahkan, sedangkan benda-benda tersebut merupakan objek pengetahuan Tuhan dan ilmu-Nya tentang benda-benda itu merupakan bagian dari sifat-Nya yang sempurna (Nasir, 2009).

³⁷QS Al-Furqaan [25]: 43.

3. *Wahdatul Al Wujud*: Konsepsi Ibnu 'Arabi³⁸ Atas Kosmologi

Konsepsi kesatuan realitas (tauhid) terpatri dalam gagasan beliau *Wahdatul Al Wujud* (kebersatuan wujud). Chittick dalam karyanya *Dunia Imajinal Ibnu 'Arabi (terj.)* menganggap bahwa sekalipun istilah wujud beragam, tetapi istilah tersebut dalam pengertian yang fundamental menyajikan fakta bahwa wujud adalah satu. Pada tingkatan tertinggi, wujud adalah realitas Tuhan yang absolut dan tak terbatas yakni wujud niscaya (*wajib al wujud*). Sedangkan pada tingkatan terbawah wujud merupakan substansi yang meliputi segala sesuatu selain Tuhan (*ma siwallah*). Oleh karena itu, wujud digunakan untuk merujuk pada keseluruhan kosmos kepada segala sesuatu yang eksis, di samping merujuk pada segala sesuatu dalam semesta (Chittick, 2001: 28).

Hal ini menegaskan bahwa wujud adalah realitas tunggal dan tidak dapat menjadi dua wujud (*dualisme*) (Chittick, 2001: 29). Dalam relasi Tuhan dengan kosmologi, Ibnu 'Arabi memandang bahwa skema kosmologis secara mendasar merupakan hubungan beragam tatanan kosmik dengan prinsip-prinsipnya yang menunjukkan bagaimana dunia yang berbeda merupakan perwujudan dan determinasi dari Sang Prinsip.

Dunia merupakan eksistensi kosmik yang meliputi manifestasi fisik, psikis dan spiritual (Nasr, 2006: 193-194) yang lahir dari peluapan wujud pada arketip-arketip samawi yang tiada lain merupakan bayangan dan citra-Nya yang termanifestasi lewat transendensi Tuhan sebagai sarana untuk menampakkan diri-Nya di bumi, sebab diri-Nya yang azali tak dapat dibagi dan tanpa syarat (*ahadiyah*) (Nasr, 2006: 186)

Wujud menjadi nyata oleh karena Tuhan sebagai yang *dzahir* memperlihatkan diri-Nya dalam suatu wadah manifestasi (*locus of manifestation*) yakni di dalam kosmos itu sendiri (Chittick, 2001: 31). Wadah manifestasi Tuhan bersifat jamak karena keanekaragaman efek-efek yang mereka tampilkan, namun mereka satu karena kesatuan wujud yang menjelma di dalam-Nya. Oleh karena itu, Tuhan dalam keesaan-Nya

³⁸Salah satu ulama sufi terbesar yang pernah dimiliki oleh umat Islam, lahir di Andalusia (Spanyol) pada tanggal 17 Ramadan tahun 560 H bersamaan dengan 1165 M di daerah Mursiyah bagian utara Andalusia. Salah satu karya beliau yang cukup populer adalah kitab *Al-Futuh al-Makkiyyah*. Lihat; Chittick, *Dunia Imajinal Ibnu 'Arabi* (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), hlm. 1.

adalah identik dengan wujud segala sesuatu (Chittick, 2001: 32), sedangkan *maujud* adalah kasih sayang dan nafas Tuhan dalam wujud (Nasr, 2006: 192).

Semesta ditenggelamkan secara misterius dalam Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa mempercayai tatanan realitas sebagai bagian yang terlepas dari realitas absolut dapat mengantarkan pada dosa besar dalam Islam yakni politeisme (*syirik*) (Nasr, 2006: 182). Dunia dan segala isinya bukanlah Tuhan tapi realitasnya tak lain dari realitas-Nya...*Kemanapun engkau menghadap di situlah wajah Allah (QS Al-Baqarah [2]: 115).*

4. *Aslahatul Al Wujud*: Konsepsi Mulla Shadra³⁹ Atas Kosmologi

Salah satu ajaran Mulla Shadra adalah terkait doktrin *Aslahatul Al Wujud* sebagai sebuah kesadaran transenden dalam memahami kosmologi, yang merupakan konsepsi penolakan terhadap dualisme eksistensi. Alam semesta bagi Mulla Shadra adalah realitas wujud sebagai satu kesatuan. Wujud kadangkala didefinisikan sebagai realitas mutlak yang paling nyata yang menjadi sumber sekaligus pusat dari seluruh prinsip metafisika. Keberadaan yang terberikan oleh Allah disebut *maujud* yakni realitas lain yang berifat fana' atau *mahiyah* (Nur, 2002: 152-154).

Relasi antara wujud dan *maujud* diikat oleh prinsip kebergantungan. Mulla Shadra hanya mengakui wujud sebagai satu-satunya realitas yang orisinal yang mandiri sedangkan *mahiyah-mahiyah* bersifat derivatif (Nur, 2002: 196-197). Wujud adalah realitas tunggal (*unitary reality*) yang memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda dalam satu kesatuan eksistensi.

Realitas *maujud* adalah emanasi Ilahi yang berbenturan dengan likuiditas-likuiditas yang berbilang dan muncul dengan bentuk-bentuk makhluk yang beragam. Kesemuanya menunjukkan Tuhan sesuai dengan kadar dan kesiapan masing-masing. Multiplisitas muncul dari unitas yang

³⁹Sadr Al-Muta'allihin yang akrab dipanggil Mulla Shadra, Lahir 1571 di Syiraz dengan nama Sadruddin Muhammad. Ajaran filsafat Shadra dikenal dengan *Hikmah Muta'aliyat*, sebuah corak filsafat (hikmah) yang populer dalam sejarah perkembangan filsafat Islam yang berhasil mengharmonisasikan aliran dan corak filsafat-filsafat Islam sebelumnya. Mulla Shadra membangun pemikirannya melalui pendekatan sintesis; antara *Al-Isyraq (Illuminatif)*, *Massya'i (peripatetik)*, *'Irfan (gnosis)*, dan *Kalam (teologi)*. Integralisasi tersebut mengindikatori bahwa corak Islam sebagai sebuah paradigma dan filosofi hidup bersifat holistik. Lihat: Shadra, *Menuju Kesempurnaan (terj.)*, (Makassar: Safinah, 2003), hlm. 1-16.

bermakna keragaman dalam kesatuan (Nur, 2002; 186-194) yang hadir dalam bentuk gradasi (*tasykik*) (Nur, 2002: 196-197).

Miri (2007) mengatakan bahwa kesatuan di antara keragaman ini sangat mendasar dan penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika manusia bergerak melawan biosistem dan makhluk lainnya, maka ia sendirilah yang sebenarnya merugi di samping melanggar fitrah dirinya sebagai makhluk teomorfis. Sebab kenyataan bahwa seluruh bagian dan makhluk yang ada di dunia seluruhnya merupakan perwujudan serta bentuk nyata dari kebenaran Tuhan di alam raya.

Kesadaran transendensi dan ekuivalensi tersebut terjabarkan pada pandangan bahwa setiap *maujud* alam ini berada pada level keberadaan yang berbeda-beda, memiliki semua sifat kesempurnaan mengalir disegenap *maujud* alam ini baik yang material maupun yang tidak. Kesemua makhluk bertutur kata dengan mengingat-Nya, bertasbih, dan bersujud kepada-Nya⁴⁰ yang mereka semua menuju kepada-Nya (gerak substansi).⁴¹ Mereka tidak kunjung tenang sebelum mencapai cahaya, kesenangan dan kesempurnaan absolut, yaitu Allah Swt. (Miri, 2007).

Dengan demikian, paradigma Tauhid merupakan paradigma yang melihat realitas sebagai satu kesatuan yang tak terpisah. Meminjam gagasan Syekh Siti Jenar tentang *manunggaling kawula kalawan gusti* (prinsip kemanunggalan) bahwa asal mula dan arah seluruh realitas berasal dan berakhir pada Allah (Chodijim, 2002: 33). Tidak ada perbedaan struktural hierarkis pada *maujud*, melainkan ciptaan memiliki akses *maujud* yang setara (horizontal).

Konsepsi *wahdatul wujud* maupun *aslahatul wujud* merupakan landasan filosofis akuntansi Islam sebagai paradigma tauhid yang mempersepsi realitas *stakeholders* akuntansi berada pada pijakan yang sama (emansipatris), organis dan komunal, tidak ada batas demarkasi di antaranya yang mengarah pada penguasaan satu sama lain. Manusia, pemodal, buruh, alam berada pada pijakan yang sama sebagai titipan Tuhan

⁴⁰QS Al-Israa' [17]: 44; QS An-Nahl [16]: 49.

⁴¹Gagasan Mulla Shadra dalam menjelaskan perjalanan makhluk menuju Al Haaq, dikenal dengan istilah empat perjalanan. Dari makhluk menuju Hakikat, dari Hakikat ke Hakikat dengan Hakikat, dari Hakikat kepada makhluk dengan Hakikat, dari makhluk ke makhluk dengan Hakikat. Lihat: Nasution, *Filsafat Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005) hlm. 175-176.

yang memiliki sifat *hudus* yang mengalir dan senantiasa bergerak menuju Tuhan sebagai pusat realitas dan pusat akuntansi.

C. Paradigma Teologi Pembebasan: Sebuah Tinjauan Tafsir (*Maudhu'i*) Terhadap Islam

Secara umum Al-Qur'an memiliki dua bentuk ayat yakni ayat *mutasabihat*⁴² dan *muhkamat*.⁴³ Keberadaan ayat *mutasabihat* tersebutlah, sehingga Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya perenungan dan pemikiran dalam menggapai makna yang sesungguhnya terhadap ayat Tuhan.⁴⁴ Sebab totalitas kebenaran wahyu telah dikurung wujudnya sebagai teks yang dibatasi oleh kendala waktu dan bahasa (Abdurrahman, 2003: 114).

Al-Qur'an sebagai teks pada dasarnya adalah "penjelmaan" Tuhan, melaluinya Tuhan bercerita tentang entitas diri-Nya, dengan menjadikan manusia sebagai subjek cerita, dan pada saat yang sama pula Ia menjadikan manusia sebagai objek, kepada siapa Tuhan bercerita. Sehingga makna kebenaran di alam adalah hasil interpretasi manusia atas wahyu. Sebab perwujudan Tuhan di alam tersimpan dalam lembaran-lembaran teks (wahyu). Di sinilah letak tafsir (*maudhu'i*) sebagai sebuah kajian interpretatif memainkan peran yang penting dalam menyingkap tabir makna Al-Qur'an, yang menjadi dasar filosofis postulat akuntansi Islam.

1. Tafsir *Maudhu'i*⁴⁵

Tafsir *maudhu'i* merupakan model penafsiran yang berangkat dari realitas sosial menuju pola dialog dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an

⁴²Ayat yang menurut para ulama membutuhkan kajian mendalam disebabkan karena kandungan maknanya yang dalam, sehingga potensi perbedaan penafsiran cukup besar.

⁴³Ayat yang kemungkinan potensi perbedaan penafsiran sangat kecil, disebabkan karena kejelasan makna secara tekstual.

⁴⁴QS Az-Zumar [39]: 42.

⁴⁵Menurut Quraish Shihab, tafsir *maudhu'i* pertama kali dicetuskan oleh Prof. Dr. Ahmad Al Kuomy. Shihab menganggap benih metode tafsir ini sudah ada sejak Rasulullah dan berkembang jauh sesudah Beliau. Penggunaannya mensyaratkan kemampuan akademis yang tinggi. Lihat, Sanaky, metode tafsir, *jurnal al mawarid* edisi XVIII tahun 2008. Dan, Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. xiii-xviii.

dengan realitas bergabung bersama, berawal dari realitas dan berujung pada Al-Qur'an (Baqir, 2001: 76). Metode ini kata Baqir tidak seperti dengan metode umumnya (tafsir *juz'i*) yang cenderung menafsirkan teks dengan menempatkan penafsir sebagai pihak yang pasif dan sekadar sebagai pendengar dan pelapor yang dalam menafsirkan teks yang cenderung berpisah dengan realitas sosial (Baqir, 2011: 74). Kecenderungan penafsiran hanya bertumpu pada model "pengalihan" sekadar memindahkan bunyi teks kepada realitas, seakan-akan teks keagamaan adalah realitas yang dapat berbicara sendiri.

Dalam metode *maudhu'i*, Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, melainkan harus dipahami secara kontekstual dan menyeluruh dengan tidak membatasi diri pada teks dan konteks ketika Al-Qur'an turun. Penafsiran berorientasi pada zaman agar selaras dengan kondisi ruang, waktu, dan tempat di mana kita hidup. Dengan menerjemahkan konsepsi Al-Qur'an dalam kerangka sosial, tidak terjebak pada cara pandang yang menempatkan agama sebagai konsumsi individual. Tetapi melihat agama sebagai bagian dari sistem sosial.

Upaya menerjemahkan bahasa kebenaran dan makna "ibadah" dalam konteks keberpihakan secara ideologis atas kondisi sosial masyarakat yang tertindas.⁴⁶ Sebab ketika Al-Qur'an sebagai kitab pembimbing dan pedoman manusia berpisah dengan realitas sosial, maka pada saat yang sama, Al-Qur'an telah kehilangan perannya dalam kehidupan. Al-Qur'an bukanlah kitab ilmu pengetahuan, melainkan ia adalah kitab hidayah (pembimbing)⁴⁷ yang memiliki kandungan normatif, yang Baqir (2008: 79) sebutkan sebagai "doktrin".⁴⁸ Hal ini sejalan dengan yang dikatakan

⁴⁶Realitas yang dominan pada umat Islam hari ini adalah Islam telah kehilangan roh ideologisnya. Dalam konteks kehidupan kapitalisme, agama dikungkung dan dipenjara dalam ruang privasi, sekularisasi berbagai bidang kehidupan menjadikan "Tuhan" seolah-olah terpenjara di ruang-ruang yang sempit (baca: tempat ibadah). Menurut Marlaw (1999), Islam kehilangan roh ideologisnya bermula setelah sepeninggal Nabi dan beberapa penggantinya, dalam proses sejarah yang panjang dan kompleks dikungkung oleh kekuasaan (dinasti kesukuan), ketika ajaran Islam hanya difungsikan sebagai alat dalam menopang kekuasaan yang menindas dengan menjadikan agama sebagai ritual belaka. Lihat: Marlaw, *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought (terj.)*, (Bandung: Mizan, 1999).

⁴⁷QS Shaad [38]: 29; dan At-Takwir [81]: 27.

⁴⁸Baqir, membedakan antara ilmu dengan doktrin. Meskipun tidak ada keterpisahan di dalamnya. Doktrin tiada lain adalah ideologi yang menuntun manusia dalam memecahkan persoalan secara praktis yang merupakan hasil dari konsepsi

Syariati, yang menganggap bahwa Islam bukanlah *cultural science* melainkan Ia adalah mazhab ideologi, sebuah kesadaran kemanusiaan dan intelektual dengan karakternya yang normatif dalam menjawab persoalan manusia (Supriyadi, 2003: 154).

2. Paradigma Teologi Pembebasan⁴⁹ dalam Konteks Akuntansi

“Pembebasan” sesungguhnya adalah karakter dasar dari ajaran Islam baik ditinjau secara teologis⁵⁰ maupun historis.⁵¹ Dengan demikian, teologi pembebasan merupakan turunan dari penafsiran *maudhu’i* yang lahir sebagai konstruk dialektis antara nilai-nilai normatif transenden dengan realitas sosial. Agama dimaknai secara fungsional dalam konteks pembebasan manusia dari keterikatan struktur yang tidak mencerminkan sifat “Tuhan”.⁵²

Menempatkan Islam sebagai mazhab ideologi atau doktrin dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meniscayakan karakter hasil elaborasi antara realitas sosial sebagai sebuah gejala dan peristiwa (baca: ilmu) dengan wahyu, akan melahirkan konsepsi teoretis dan praktis yang mengandung unsur dekonstruktif atas sebuah sistem, struktur sosial dan ilmu pengetahuan akuntansi yang menindas. Hal inilah yang penulis sebut sebagai paradigma teologi pembebasan dalam konstruk ilmu pengetahuan (akuntansi).

Sehingga terminologi akuntansi Islam mengandung makna sebagai akuntansi pembebasan yang bersifat dekonstruktif dan revolutif terhadap kemapanan akuntansi konvensional⁵³ dengan dasar ideologi, bahwa Islam

manusia tentang kondisi yang ideal (keadilan, kemanusiaan, dll). Sedangkan ilmu merupakan penjelasan rinci atas gejala maupun peristiwa. Baqir menempatkan ekonomi Islam sebagai doktrin. Lihat: Baqir, *Iqthisadhuna (terj.)*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 79-92.

⁴⁹Istilah teologi pembebasan selama ini hanya termaknai sebagai kesadaran gerakan sosial politik, dengan menafsirkan agama secara revolusioner dalam konteks gerakan sosial politik.

⁵⁰Banyak ayat Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan Islam sebagai ajaran pembebasan. “Jihad” dalam Al-Qur’an merupakan simbolitas makna pembebasan (QS An-Nisaa’ [4]: 75).

⁵¹Secara historis, Islam hadir di zaman penindasan (jahiliyah) dengan misi membebaskan masyarakat. Berhala secara sosial bermakna penindasan. Dan Tauhid adalah simbol pembebasan, yang secara sosial bermakna keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan bersama.

⁵²Sistem sosial yang tidak adil dan eksploitatif.

⁵³Akuntansi yang berwatak kapitalisme baik yang berbentuk *pure capitalism* maupun yang membalut dirinya dengan wajah agama dan wajah humanistik lainnya.

adalah ajaran keadilan, menolak segala bentuk ketimpangan sosial dan alam dengan menempatkan ketimpangan sosial sebagai produk dari struktur sosial yang menindas.⁵⁴ Ketimpangan pola pendistribusian hak dalam entitas bisnis merupakan produk dari relasi sosial yang terbangun oleh rekayasa paradigma ilmu akuntansi yang menindas.

Akuntansi sebagai produk ideologi memainkan peran dalam membentuk struktur sosial masyarakat, sebab pola dasar pendistribusian hak ditentukan oleh struktur dasar akuntansi. Hal ini dikarenakan filosofi dasar yang menjadi postulat akuntansi adalah bagian dari mata rantai kekuasaan ideologis.⁵⁵

Berangkat dari tujuan dasar ekonomi Islam adalah kesejahteraan bersama,⁵⁶ di sinilah letaknya terminologi “syariah” termaknai sebagai slogan untuk mengartikulasikan penyuaaraan terhadap proses marginalisasi sosial dalam entitas masyarakat ekonomi. Engineer menegaskan pengkonstruksian teologi pembebasan hadir dengan bentuknya yang anti kemapanan, baik kemapanan religius maupun ekonomi dalam rangka membela kelompok *mustadha'afin*⁵⁷ (Engineer, 2009: 9). Upaya untuk mengubah secara fundamental sistem eksploitatif menjadi sistem yang berkeadilan.

Tafsir pembebasan menempatkan akuntansi Islam sebagai *mainstream* tersendiri dengan nilai-nilai universal seperti egaliter, keadilan, ekologis dan anti terhadap segala bentuk penindasan, baik penindasan antara

⁵⁴Struktur sosial yang menindas merupakan filosofi dasar hadirnya agama dalam setiap masa termasuk ajaran Muhammad Saw. Dalam masyarakat Arab, penindasan berlangsung dalam berbagai sektor, dalam ekonomi penindasan tersebut berupa sikap kapitalistik masyarakat Arab yang senang menumpuk-numpuk harta dan menimbunnya, usaha *gharar* dan spekulatif lainnya hingga menciptakan penguasaan akses ekonomi secara tidak seimbang (monopoli) hingga lahir ketimpangan sosial ekonomi. Islam hadir untuk mendekonstruksi sistem tersebut (QS Al-Humazah [104]: 1-6; Al-Baqarah [2]: 275).

⁵⁵Yang membedakan ideologi adalah filosofi yang mendasarinya. Dalam konteks “hak” semua ideologi memiliki konsepnya masing-masing. Baik kapitalisme, sosialisme maupun Islam.

⁵⁶Dalam Islam hak kepemilikan secara absolut hanya milik Tuhan. Alam semesta diciptakan bukan untuk segelintir orang melainkan untuk sekalian makhluk-Nya (*rahmatan lil alamin*) (QS Al-Baqarah [2]: 29).

⁵⁷Istilah yang dipergunakan Al-Qur'an untuk menunjuk orang-orang yang tertindas (QS Al-Qashash [28]: 5; dan Al-A'raaf [7]: 137. Ketertindasan adalah bentuk ketidaktersampaian hak.

manusia maupun manusia dengan alam. Formulasi teori melahirkan ilmu yang tidak hanya menjelaskan fenomena, melainkan mengubah dan memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Model perubahan ilmu pengetahuan dalam tafsir pembebasan bersifat revolutif, tidak terjebak pada model reformatif yang cenderung hanya mengkomodifikasi isu “etika” untuk dikonfrontasikan dengan akuntansi kapitalisme. Sebab kapitalisme menguat bukan karena pengenduran etika, melainkan sebaliknya (Weber, 2006: xxxv).

D. Pergeseran Paradigma dan Kecenderungan Sejarah dalam Al-Qur’an

Sejarah meniscayakan dinamika kehidupan manusia. Proses sejarah yang berlangsung secara positif merupakan refleksi dari bagaimana manusia mengambil peran di dalamnya. Relativitas sejarah adalah sebuah kepastian yang terikat pada norma sejarah itu sendiri. Paradigma sebagai bangunan dasar pengetahuan merupakan variabel yang memengaruhi arah perkembangan sejarah. Pergeseran paradigma adalah bentuk pergeseran manusia dalam memandang realitas alam semesta. Mitosentrisme yang dominan pada masyarakat primitif sedikit demi sedikit bergeser hingga munculnya paradigma teosentrisme. Dari teosentrisme menuju antroposentrisme hingga positivisme, menjadi catatan sejarah bahwa masyarakat mengalami proses yang dinamis.

1. Norma Sejarah dalam Islam: Relevansi *Basic Structure* dengan Suprastruktur

Berbeda dengan Marxisme yang menempatkan faktor produksi sebagai *basic structure* dalam membentuk sejarah manusia (Mandel, 2006: 61). Islam sebagai basis ideologi menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak (*ikhtiar*) sebagai *basic structure* dalam sejarah.⁵⁸ Islam menganggap masyarakat sebagai organisme hidup. Sejarah tidak berlangsung secara deterministik,⁵⁹ meskipun perubahan sejarah itu sendiri terikat oleh hukum-hukum sejarah yang niscaya dan universal.⁶⁰ Kemerdekaan manusia tidaklah bertentangan dengan hukum-hukum

⁵⁸QS Ar-Ra’d [13]: 11; Al-Anfaal [8]: 53.

⁵⁹QS Al-Insaan [76]: 3.

⁶⁰QS Al-Israa’ [17]: 77; Al-Jin [72]: 16; dan An-Nisaa’ [4]: 123.

sejarah, tidak bertentangan dengan universalitas sejarah dan tidak pula bertentangan dengan fakta bahwa sejarah tunduk pada hukum tertentu (Muthahhari, 2008: 314).

Kandungan batin manusia sebagai sisi spiritullah yang menggerakkan sejarah dan bersama dengan gabungan antara gagasan dan kehendak manusia. Sebab manusia dipahami sebagai perwujudan kekuatan kreatif Tuhan. Struktur masyarakat berubah sejalan dengan berubahnya gagasan dan kehendak manusia. Kaitan antara kandungan batin manusia dengan suprastruktur masyarakat merupakan kaitan sebab-akibat (Baqir, 2010: 162).

Islam memahami bahwa proses sejarah tidak selamanya berlangsung secara linear,⁶¹ sebab adakalanya terjadi penyimpangan sejarah. Penyimpangan sejarah terjadi ketika sejarah dituntun di luar koridor fitrah manusia.⁶² Sejarah seperti itu hanya menyisakan persoalan hidup bagi manusia itu sendiri yang mempercepat kehancuran suatu peradaban.⁶³ Kontekstualisasi makna peradaban selaras dengan posisi akuntansi sebagai bagian ataupun peradaban itu sendiri.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa sebelum kehancuran sebuah tatanan masyarakat, sejarah terlebih dahulu memasuki fase kejenuhan dan kerentanan. Sebuah fase sejarah ketika keserakahan manusia diaktualkan, manusia tenggelam dalam kemewahan yang diperoleh lewat ketidakadilan baik antar manusia maupun manusia dengan alam (eksploitatif) (Hitami, 2009: 203-204). Ketika materialisme telah menjadi “Tuhan baru” dalam akuntansi, manusia dengan bangganya memutus ikatan dirinya dengan Tuhannya (baca: sekularisasi). Baqir dalam karyanya *Trend History In Qur’an (terj.)* mengatakan:

Suatu masyarakat yang bermain-main dengan hukum-hukum alam yang suci berarti telah menandatangani surat kematiannya di tangannya sendiri. Sebab penyimpangan dari kecenderungan-kecenderungan alamiah akan melibatkannya ke dalam begitu banyak penyimpangan, konsekuensinya akan membawa dirinya pada kehancuran dan kemusnahan. Itu sebabnya kita katakan bahwa, adalah mungkin untuk melanggar hukum-hukum ini selama waktu tertentu, tetapi tidaklah mungkin untuk mengabaikannya dalam waktu yang lama, sebab

⁶¹QS Al-Maidaah [5]: 66.

⁶²QS Al-A’raaf [7]: 96.

⁶³QS Al-Kahfi [18]: 59.

pengabaian hukum-hukum ini akan membawa pada kemusnahan (Baqir, 2010: 143).

Kemusnahan tersebut bukanlah kemusnahan secara personal/individu, melainkan kemusnahan tatanan masyarakat dalam hal ini adalah peradaban akuntansi. Peradaban akuntansi itu sendiri dalam sejarah manusia adalah bagian dari kerangka pandangan dunia (*world view*) manusia. Dengan demikian, kehancuran tidak melihat sisi individualitas apakah di dalam tatanan bersangkutan terdapat orang baik atau tidak, sebab masyarakat ditentukan oleh perilaku mayoritas anggotanya (entitas bisnis).⁶⁴ Proses penghancuran tersebut akan diikuti dengan lahirnya tatanan yang lain.⁶⁵

Model perubahan sejarah tersebut berdasar pada kecenderungan sejarah yang ditentukan oleh manusia sendiri.⁶⁶ Sebab suprastruktur masyarakat ekonomi hanya dapat berubah kalau *basic structure* berubah yang tiada lain adalah paradigma yang menjadi kerangka dasar (pengetahuan) manusia dalam menciptakan tindakannya yang membentuk peradaban.

2. *Science Revolutions: Pergeseran Paradigma Akuntansi*

Penghancuran peradaban akuntansi yang kemudian diikuti dengan lahirnya peradaban baru, merupakan refleksi dari sebuah pergeseran paradigma yang memengaruhi pergantian peradaban manusia. Pola pergeseran paradigma dalam sebuah kerangka ilmu menurut Khun (1962) dikenal sebagai revolusi sains (Muslih, 2004: 69).

Menurut Khun (1962) sebelum sampai pada revolusi pengetahuan, pada awalnya ilmuwan memasuki fase praparadigmatik.⁶⁷ Sampai tiba saatnya paradigma yang dominan diterima dalam suatu komunitas ilmiah. Penerimaan tersebut menandai fase perkembangan paradigma memasuki

⁶⁴QS Al-Anfaal [8]: 25.

⁶⁵QS Ali 'Imran [3]: 140. Al-Qur'an menyebutkannya seperti halnya hancurnya kaum Madyan suku Syu'aib (Al-Huud [11]: 84-95), kisah kaum Nuh (Al-Ankabut [29]: 14), Luth (QS Adz-Dzaariyaat [51]: 31-34). Nabi Hud atas kaum 'Ad (QS Al-Haaqqah [69]: 6-8), Nabi Shalih atas kaum Tsamud (QS Asy-Syu'araa [26]: 141-158). Nabi Musa atas Fir'aun (QS Al-Anfaal [8]: 54). Kaum Saba' (QS Saba [34]': 15-17).

⁶⁶QS Al-Furqaan [25]: 43.

⁶⁷Pada tahap ini perkembangan ilmu belum terorganisir dengan baik, pola kompetisi teori mewarnai dinamika ilmu, akibat ketidakselarasan bahasa, nilai-nilai, asumsi-asumsi, tujuan-tujuan, norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi unsur sebuah paradigma. Lihat: Muslih, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 63.

fase kemapanan, yang Khun istilahkan sebagai sains normal (*normal science*) (Ritzer, 2004: A-13).

Dalam perkembangannya sebuah paradigma tidak selamanya berjalan pada koridor linear. Ketika paradigma yang mapan gagal dalam menjawab persoalan masyarakat maka terjadi ruang-ruang kerapuhan semakin terlihat. Maka Khun mengistilahkan fenomena tersebut sebagai anomali paradigma (Muslih, 2004: 64-65). Suatu krisis selalu diawali dengan pengkaburan terhadap paradigma yang ada serta pengenduran kaidah-kaidah riset yang normal, sebagai akibatnya paradigma baru (paradigma rival) muncul, setidak-tidaknya sebagai embrio.

Kompetisi kembali terjadi antara paradigma lama dengan paradigma baru sebagai rival yang tak dapat terdamaikan. Dan puncaknya kata Khun adalah terjadinya revolusi sains berupa pergeseran paradigma. Revolusi sains merupakan episode perkembangan non-kumulatif, di mana paradigma lama diganti dengan paradigma baru yang bertentangan (Muslih, 2004: 66). Perkembangan berlangsung lewat sebuah lompatan-lompatan yang radikal dan revolusioner sehingga bangunan dasar pengetahuan akan runtuh seiring dengan runtuhnya paradigma lama. Formula dalam pergeseran paradigma menjadi signifikan agar ilmuwan/peneliti tidak terjebak pada aktivitas “tambal-sulam” teori yang sesungguhnya lahir dari rahim paradigma yang rapuh. Sebab perubahan adalah keniscayaan, semua tatanan kehidupan bergerak menuju sumber-Nya.⁶⁸ Manusia yang diberi kewenangan dalam menentukan arah peradaban lewat *ikhtiar* dalam menggapai janji Tuhan sebagai orang-orang yang mendapat kemenangan.⁶⁹

Hal ini cukup konteks dengan kecenderungan anomali-anomali yang terjadi pada akuntansi konvensional yang gagal dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat secara ekonomis. Pertentangan yang kian akut, krisis ekologis seolah selalu menempatkan entitas bisnis yang dibangun dalam akuntansi yang paradigma cartesian, berkarakter kapitalisme sebagai pelaku utama. Bangunan dasar akuntansi kapitalisme semakin terlihat sisi kerapuhannya meski dengan berbagai model *self correction* yang terjadi, tetapi tetap saja karakternya yang akumulatif dan menindas tidak dapat ditepis. Akibatnya paradigma Islam khususnya teologi pembebasan harus muncul sebagai paradigma rival yang akan menjawab kontradiksi-

⁶⁸QS Al-Baqarah [2]: 156.

⁶⁹QS An-Nuur [24]: 55; dan Al-Anbiyaa [21]: 105.

kontradiksi logik pada akuntansi, membebaskan dari jaringan kuasa naluri akuntansi menuju kuasa altruisme sebagai upaya dalam menciptakan cara pandang yang humanis, ekologis dan emansipatoris dalam mempersepsi akuntansi sebagai disiplin ilmu.

Baqir (2006) menegaskan bahwa akhir sejarah peradaban yang dikatakan oleh Fukuyama sebagai bentuk kemenangan kapitalisme adalah justru akhir sejarah bagi peradaban yang terputus hubungannya dengan Allah dan awal sejarah bagi peradaban yang kembali menyatu dengan dan bersama Allah (Fadhil, 2011). Kecenderungan sejarah tersebut dalam sebuah struktur metateori paradigmatic disebutkan oleh Harahap (2004) dalam bukunya *Akuntansi Islam*, ia menganggap bahwa perkembangan masyarakat tampaknya mengarah kepada asalnya “*back to nature*” atau “*back to basic*” (Harahap, 2004: 1). Seperti yang diuraikan Siddiqi (1975), proses sejarah bukanlah keniscayaan sejarah melainkan ditentukan oleh kemestian moral yang akan melahirkan kemenangan sedangkan penentangan dan pengabaian moral menjadi semiotika dari kehancuran (Hitami, 2009: 16). Akuntansi Islam dalam hal ini dapat berperan sebagai “juru selamat” atau gerakan “Mahdisme” sebagai gerakan “Ratu Adil” atas struktur kejumudan akuntansi konvensional. *Katakanlah “Yang benar telah datang...”, Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap* (QS Al-Israa’ [17]: 81).

E. Konstruksi Ideologi dalam Akuntansi

Akuntansi sebagai sebuah konsep, bukan hanya sebagai sistem seni mencatat (*bookkeeping system*), mengelompokkan sampai aktivitas melaporkan (*reporting system*), tetapi jauh dari hal tersebut akuntansi tidak dapat lepas dari identitas kesejarahannya sebagai basis ideologi. Oleh karenanya, akuntansi tidak hanya dikembangkan untuk merespons informasi yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga hanyut dalam jiwa kapitalisme (Muhammad, 2002: 97).

Seperti yang diungkapkan Tricker (1978) dalam Arvian (2008), akuntansi adalah anak dari budaya masyarakat di mana akuntansi dipraktikkan. Upaya refleksi pemikiran manusia dalam posisinya sebagai makhluk berbudaya, maka akuntansi adalah produk budaya, nilai dan kondisi lingkungan masyarakat yang merepresentasikan realitas, sekaligus berperan secara ideologis menciptakan realitas. Akuntansi adalah suprastruktur dari *basic structure* yang kompleks yakni ideologi.

Marx menegaskan pola ini, dengan mengatakan bahwa akuntansi (konvensional) merupakan bagian dari sistem yang kompleks (ideologi kapitalisme),⁷⁰ yang dijadikan sebagai *instrument* dalam membentuk kesadaran palsu dan memistikan informasi, untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi-politik kapitalis (Harahap, 2005: 135).

Keterkaitan erat antara akuntansi dan ideologi kapitalisme sesungguhnya telah lama diungkapkan oleh Sombart (1919) (dalam Kam, 1990; dan Chiapello, 2003). Sombart meyakini bahwa sistem akuntansi *double entry* merupakan salah satu alat teknologi (*technological device*) yang mendukung perkembangan kapitalisme karena akuntansi memengaruhi dua ciri penting dari kapitalisme yaitu mencari laba dan rasionalitas ekonomi (Suyudi, 2012).

Gambling dan Karim (1986) menegaskan dengan pendekatan model kolonial (*colonial models*), bahwa ketika masyarakat yang bersangkutan adalah Islam, maka sistem ekonomi pun harus Islam dan akuntansi otomatis juga harus berdasar pada Islam. Begitupun halnya dengan masyarakat kapitalis, sistem ekonomi sampai teorisasi dan praktik akuntansi pun syarat dengan nilai-nilai kapitalisme (Harahap, 2007: 7). Akuntansi yang dibentuk oleh lingkungannya akan dapat memengaruhi jiwa dan alur pikir dari akuntansi, sehingga akuntansi menjadi disiplin ilmu yang mempunyai kekuatan *magic* yang mampu menghipnotis jalan pikiran manusia, mendikte keputusan-keputusan manusia bahkan memperbudak manusia (Triyuwono, 2006: 97).

1. Akuntansi Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis Terhadap Akuntansi

Islam sebagai ideologi secara normatif berperan dalam menciptakan rekonstruksi tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai ajarannya. Islam bukan hanya ajaran mengandung ritual saja, melainkan Islam sebagai ajaran yang terintegrasi dengan kehidupan (holistik) tanpa ada garis demarkasi (*dualisme*) antara dunia dan akhirat, tidak ada dikotomi yang mengarah pada pemisahan antara ilmu dan agama dalam Islam. Doktrin dasar sebagai *addin* harus termaknai secara kontekstual sebagai upaya dalam membebaskan masyarakat yang tertindas.

⁷⁰Ketidakterpisahan antara akuntansi dengan ideologi, juga diungkapkan oleh Belakoui (1985), dan hasil penelitian Bailey (1988) di negara sosialis juga menyimpulkan hal yang sama. Lihat: Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28.

Proses penafsiran ajaran Islam hingga melahirkan akuntansi Islam, merupakan bagian dari kebutuhan sejarah. Sebagaimana akuntansi sebagai sebuah disiplin ilmu secara teoretis maupun praktis merupakan produk sejarah sebagai kebutuhan manusia atas kompleksitas tuntutan kehidupan berupa perkembangan ekonomi dan pertumbuhan institusi bisnis.

Akuntansi Islam hadir sebagai bentuk upaya menata kembali ilmu sesuai dengan refleksi nilai dalam masyarakat, sehingga akuntansi Islam berperan dalam mendekonstruksi akuntansi konvensional yang cenderung kapitalistik, dengan mengembalikan tradisi pemikiran pada realitas nilai dalam masyarakat. Membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban, beserta jaringan-jaringan kuasa Newtonian yang berkarakter kapitalistik, kemudian akan menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi⁷¹ yang mengikat manusia dalam kehidupan (*ontologi Tauhid*).

Agama dalam posisi ini dalam konteks fenomena berperan seperti budaya. Menciptakan perilaku sosial yang menjadi nilai hingga membentuk kebiasaan masyarakat dalam pranata sosial. Oleh karena itu, agama dapat dianggap sebagai (*turats*) budaya (nilai) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian, akuntansi yang lahir dari rahim agama merepresentasikan nilai dan budaya masyarakat itu sendiri sebagai masyarakat Islam.

Penggunaan kata “Islam” bukan “syariah” dalam terminologi akuntansi Islam lebih merupakan sebuah bentuk penekanan unsur ideologi yang menyertainya. Sebab kata “syariah” yang bermakna aturan, tentu akan bebas nilai secara ontologis ketika tidak ada unsur penekanan atas pelekatan kata “aturan” tersebut. Semua ajaran maupun ideologi dunia memiliki “syariah”nya masing-masing.

2. Akuntansi Islam dalam Tinjauan Sejarah

Akuntansi sebagai ilmu bukanlah hal yang baru dalam Islam. Beberapa bukti yang memperkuat bahwasanya akuntansi telah berkembang sejak awal peradaban Islam. Filosofi yang mendasarinya tiada lain bahwa dalam Islam, pertanggungjawaban menjadi salah satu doktrin mendasar dari ajarannya secara teologis dan sosiologis. Filosofi manusia dalam Islam

⁷¹QS Ar-Rahman [55]: 60.

dipahami sebagai pemegang amanah bukan penguasa absolut,⁷² sehingga dengannya pertanggungjawaban kepada sang pemilik menjadi niscaya.⁷³

Begitupun halnya eksistensi doktrin zakat dalam Islam mengindikatori bahwa sejak abad ke-6 M kedatangan Islam, Muslim telah memiliki konsepsi tentang akuntansi yang mengatur model dan sistem pencatatan atas pendistribusian zakat yang begitu kompleks seiring dengan kompleksitas hidup masyarakat pada saat itu di setiap waktu hingga lahirnya Baitul Mall sebagai institusi yang menaunginya (Harahap, 2004: 122-123). Sebab dalam Islam dipahami bahwa akuntansi bukan hanya sebagai kebutuhan sejarah atau kebutuhan bisnis semata melainkan secara teologis, ia adalah perintah Tuhan.⁷⁴

Perintah tersebut merupakan manifestasi dari filosofi dasar manusia sebagai makhluk yang secara fitrah⁷⁵ adalah baik, yang memiliki kecenderungan dalam menegakkan keadilan, kebenaran, kepastian sebagai bentuk esensi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Perintah mencatat dalam Islam bukanlah merupakan asumsi sebagaimana dipahami dalam akuntansi konvensional yang membangun filosofi dalam teori *agency*, dengan memandang manusia sebagai makhluk yang selalu bertindak atas naluri yang egois dan serakah. Ketidakseimbangan (*asimetri*) informasi dianggap sebagai awal munculnya moral *hazard*. Dengannya akuntansi sebagai sebuah sistem dan struktur dibangun untuk menekan sisi kenaluriaan manusia yang dipandang secara buruk.

Dengan demikian, akuntansi Islam dan konvensional memiliki akar perbedaan secara mendasar. Meskipun dalam rentang sejarah perkembangan akuntansi Barat yang dianggap ditemukan oleh Lucas Pacioli (1491) tidak lepas dari pengaruh sejarah perkembangan ilmu dalam Islam itu sendiri,⁷⁶

⁷²QS Al-Baqarah [2]: 30; dan Thaha [20]: 6.

⁷³QS Al-Haaqqah [69]: 20.

⁷⁴QS Al-Baqarah [2]: 282.

⁷⁵QS Ar-Ruum [30]: 30.

⁷⁶Watt (1995) menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat Eropa tidak akan berkembang seperti ketika pertama kali mengembangkannya, melainkan keluasan eksperimen dan pikiran serta tulisan orang Arablah yang memengaruhinya. Penemuan Barat layaknya akuntansi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan Islam Arab. Russel (1986) menegaskan bahwa sebelum dikenal *double entry* oleh Pacioli, sudah ada sistem *double entry* Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan yang dikenal dengan istilah *Kitabat Alamwal* (pencatatan uang). Lihat: Harahap, *op. cit.*, hlm. 6 dan hlm. 139.

meskipun dengan model modifikasi yang berbeda setelah ilmu bersimbiosis dengan kecenderungan budaya, nilai masyarakat Eropa pada saat itu, sehingga akuntansi muncul dengan wajah yang baru, merepresentasikan budaya dan nilai masyarakat Eropa itu sendiri. Dengan demikian, hal ini menguatkan bagaimana keselarasan ilmu dibangun dengan latar budaya yang kuat sehingga setiap tampilan ilmu pastilah merepresentasikan budaya, nilai dan ideologi di mana ilmu itu lahir.

Dalam Islam sendiri, akuntansi dikenal dengan nama ilmu hisab (ilmu hitung) atau dikenal juga dengan istilah *Muhasabah*, sedangkan profesi akuntan dikenal dengan sebutan *Al-Muhtasib*. Kedua istilah di atas mempunyai akar kata yang sama yaitu berasal dari kata "*hasaba*", yang bermakna menghitung dan menimbang semua amalan manusia dan tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tercatat dan terdaftar. Kata "*hisab*" juga mempunyai arti lain dalam bahasa, yaitu merupakan akar dari kata kerja "*hasaba*", yang berarti mengkalkulasikan dan mendata.⁷⁷

Hayashi (1995) mengemukakan bahwa peran akuntan (*mutasahib*) di masyarakat Islam tidak hanya sekadar melakukan praktik pencatatan, melainkan bagaimana ia dapat memastikan berjalannya prosedur institusi yang jujur, adil sesuai syariah, di samping memastikan ada tidaknya penimbunan dan penyimpangan yang terjadi (Harahap, 2004: 8). Dengan demikian, terdapat keselarasan tujuan antara Islam dan akuntansi (Harahap, 2004: 117-122), yakni berperan dalam menjaga kebenaran dan keadilan,⁷⁸ kepastian dan keterbukaan⁷⁹ serta kejujuran.⁸⁰

3. Nilai-nilai Akuntansi Islam dalam Al-Qur'an

Berikut adalah kandungan nilai dalam Al-Qur'an yang menjadi asumsi filosofis akuntansi Islam:

Pertama, Keadilan. Keadilan adalah konsepsi yang mengatur pola pemetaan distribusi hak dan kewajiban, yang pengimplementasiannya menurut Abu Ubaid akan membawa kesejahteraan sosial dan keselarasan sosial (Karim, 2006: 273). Kesejahteraan suatu tatanan masyarakat tidak

⁷⁷Lihat: majalah IAI edisi no. 20/tahun III/oktober 2009, kolom opini, *Konsep Hitungan Laba Akuntansi Syariah*, hlm. 48.

⁷⁸QS Al-Zalzalah [99]: 7-8.

⁷⁹QS Al-Hujuraat [49]: 6.

⁸⁰QS Al-Israa' [7]: 35.

lepas dari peran apakah sistem yang terbentuk berdasarkan keadilan atau tidak, sebab keadilan dapat dianggap sebagai tiang dari kesejahteraan. Islam sangat menegaskan pentingnya keadilan, bahkan dianggap sebagai bagian dari hakikat penciptaan manusia dengan amanah menegakkan keadilan di muka bumi.⁸¹ Akuntansi memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan, apakah dalam struktur akuntansi, metode penilaian, pengakuan maupun pencatatan mencerminkan keadilan atau sebaliknya.

Kedua, Kebenaran. Prinsip kebenaran tidak lepas perannya terhadap penegakan nilai yang lain. Kebenaran bagi manusia identik dengan kejujuran⁸² dan komitmen moral⁸³ dalam bertindak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Ketiga, Humanis. Akuntansi yang humanis berarti akuntansi yang dibentuk merujuk pada penempatan manusia pada eksistensinya yakni sebagai makhluk yang mempunyai fitrah yang suci.⁸⁴ Dengannya akuntansi islam diharapkan untuk dapat menstimulasi perilaku manusia menjadi lebih humanis sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kecenderungan pada kebaikan.⁸⁵ Keadaan ini akan memperkuat kesadaran diri tentang hakikat (fitrah) manusia itu sendiri yang akan menciptakan nilai emansipatoris pada akuntansi Islam. Proses humanisasi sebagai bagian dari hak manusia untuk mendapatkan keadilan.

Keempat, Emansipatoris. Prinsip emansipatoris merupakan prinsip kesetaraan dan kesederajatan.⁸⁶ Kecenderungan bisnis yang hanya mengakui kepentingan *stockholders* dengan menyampingkan *stakeholders* yang lain, merupakan konsep yang tidak berdasar pada prinsip kesetaraan. Islam menegaskan ajarannya sebagai ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan,⁸⁷ sebagai bentuk perlawanan Islam terhadap segala bentuk penindasan baik sosial maupun ekonomi. Penindasan tiada lain penyakit sosial yang lahir dari kekeliruan cara pandang yang cenderung menempatkan dan memilah-milah realitas sosial dalam batas-batas demarkasi yang bersifat hierarkis.

⁸¹QS An-Nisaa' [4]: 58; Al-A'raaf [7]: 29; dan Al-Muthaffifin [83]: 1-4.

⁸²QS Al-Mu'minum [23]: 71; dan Al-Baqarah [2]: 188.

⁸³QS Al-Baqarah [2]: 42.

⁸⁴QS Al-A'raaf [7]: 172; dan Ar-Ruum [30]: 30.

⁸⁵QS Ali 'Imran [3]: 110.

⁸⁶QS Al-Hujuraat [49]: 13.

⁸⁷HR Muslim, No. 4651.

Kelima, Teologikal. Nilai akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis yang profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintasi batas dunia profan. Bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan merupakan doktrin utama ajaran Islam. Hal ini menyadarkan manusia bahwa praktik bisnis merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan (Triyuwono, 2001: 28). Teologikal merupakan konsep *etics* yang dihasilkan dari doktrin eskatologis manusia sebagai makhluk teomorfis yang memiliki kerinduan untuk kembali kepada yang menciptakannya dalam keadaan tenang dan suci.⁸⁸ Pensucian pribadi memiliki relevansi dengan bentuk penebusan amanah sosial manusia sebagai penghindaran atas dosa sosial⁸⁹ dengan terlibat dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera secara materiil maupun spiritual.

Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi *differensia* antara akuntansi Islam dan konvensional, di samping menjadi kekuatan dalam mencapai orientasi akuntansi Islam yang selaras dengan tujuan ekonomi Islam yakni pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat, sebagai wujud masyarakat Islam sebagai masyarakat komunal emansipatoris.⁹⁰ Kesejahteraan umat baik materiil maupun non-materiil dalam Islam dianggap sebagai bagian dari sistem sosial. Kesejahteraan tidak diserahkan pada “kebaikan” personal, melainkan terjabarkan dalam sistem sosial yang mengikat secara struktural. Akuntansi dalam posisi ini dipersepsi sebagai struktur tersendiri yang memiliki kaitan dengan struktur-struktur yang lain, memiliki kuasa dalam mengendalikan dan memengaruhi masyarakat.

4. Teorisasi Akuntansi Islam

Perumusan sebuah teori dipengaruhi oleh paradigma ilmuwan. Secara umum, penyusunan teorisasi akuntansi terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan positivistik, interpretatif, paradigma kritis dan postmodernisme (Chua, 1986) dalam Triyuwono (2006: 213). Dalam posisinya akuntansi Islam, sebagian ilmuwan memosisikan bernaung di

⁸⁸QS Al-Fajr [5]: 27-28; dan Al-Insyiqaaq [84]: 6.

⁸⁹QS Al-Jaatsiyah [45]: 28.

⁹⁰Istilah yang diperkenalkan peneliti, yang bermakna sistem relasi sosial masyarakat yang terbangun dalam suatu kesadaran kolektif diikat oleh kultur ideologis, bukan ikatan temporer berdasarkan kepentingan. Sistem kepemilikan bersifat fleksibel, berbeda dengan model komunal modern yang diperkenalkan Marx yang bersifat kepemilikan bersama secara total.

bawah paradigma postmodernisme yang bersifat afirmatif, sebagian pula yang meletakkan pada posisi paradigma tersendiri sebagai paradigma religius. Meskipun paradigma Islam memiliki sisi kesamaan dengan paradigma postmodernisme dalam konteksnya yang berperan melawan dan meng-*counter* hegemoni paradigma positifisme yang menjadi basis pengetahuan modernisme. Tetapi tetap saja bahwa asumsi doktrinal di antaranya cukup berbeda.

Paradigma positivistik membangun asumsi bahwasanya subjek dan objek adalah realitas yang terpisah satu sama lain (Mulawarman, 2011). Subjek memiliki superioritas dalam memahami objek yang bersifat pasif. Metode penyusunan teori dari paradigma positivistik lebih menekankan metode induktif, dengan pengalaman sebagai basis epistemologi. Konstruksi teori dibentuk dari pengalaman yang bersifat partikular menuju penggeneralisasian sehingga menjadi postulat umum.

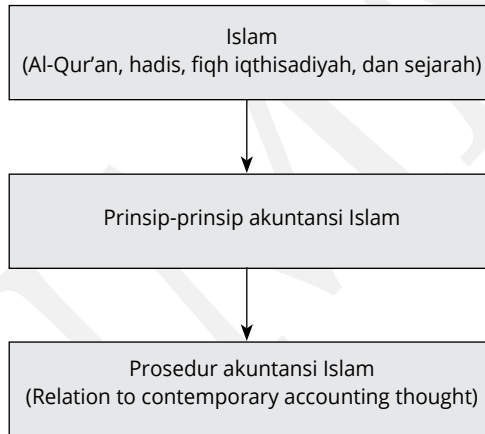
Berbeda dengan paradigma postmodernisme, menegaskan ketidakterpisahan antara subjek dengan objek, menyatu dalam pola dialogis. Menurut Rosenau (1992: 15) postmodernisme dapat dibagi menjadi dua orientasi utama, yaitu postmodernisme skeptis dan afirmatif (Mulawarman, 2011). Dalam postmodernisme, kebenaran sebuah konsep pada dasarnya majemuk bahkan tak terbatas. Sebab kebenaran itu sendiri hakikatnya hanyalah proses pelekatan makna atas realitas dari sudut pandang tertentu. Postmodernisme cenderung menolak fakta kebenaran. Sedangkan dalam Islam makna absolut dan relatif pada dasarnya manunggal seperti halnya dengan makna persepsi dan fakta itu sendiri pada dasarnya tidak dapat dipisah apalagi dipertentangkan. Subjektif dan objektif memiliki sisi yang berada pada diri yang satu. Sehingga akuntansi Islam di samping memahami realitas kebenaran secara majemuk dalam konteksnya pengetahuan yang kontekstual, juga memahami kebenaran yang tunggal dalam konteksnya sebagai pengetahuan yang tekstual (wahyu). Keduanya harus bersimbiosis dan manunggal untuk kemudian disebut ia sebagai kebenaran.

Meskipun akuntansi Islam dibangun sebagai *mainstream* tersendiri, namun dalam proses penyusunan teori di antara pakar akuntansi Islam juga mengalami perbedaan metodologi. Meskipun demikian secara substansi dari sisi epistemologi dan ontologi tidak ada perbedaan. Ada dua aliran dalam akuntansi Islam sebagaimana disebutkan oleh AAO-IFI dalam SFAC NO. 1 (Adnan, 1999: 2) dalam (Triyuwono, 2001: 4) yakni:

Pertama, Mereka (pakar) yang berpendapat bahwa tujuan dan kaidah akuntansi islam dibangun atas dasar prinsip dan ajaran-ajaran Islam, lalu “membandingkannya” dengan pemikiran akuntansi kontemporer yang sudah mapan.

Kedua, Perumusan akuntansi islam harus berangkat dari tujuan dan kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada, kemudian mengujinya dari sudut pandang syariah, bagian yang sejalan diterima dan dipakai sedangkan bagian yang dipandang tidak sesuai ditolak.

Kelompok pertama lebih disebut sebagai kelompok idealis, yang berasumsi atas kemurnian akuntansi Islam dan yang kedua lebih mengedepankan aspek pragmatis berupa asas manfaat, kemudahan dengan mengakomodasi peran akuntansi konvensional. Berikut perbedaan kerangka metodenya:



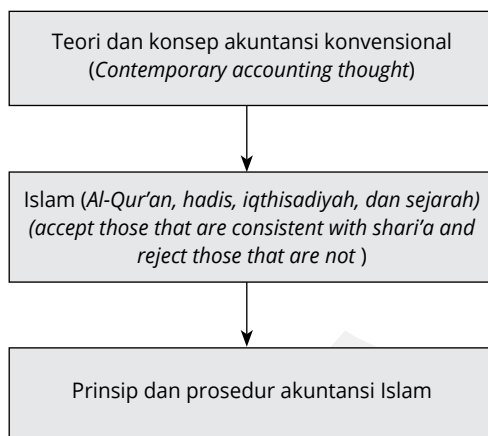
(Sumber: Suwiknyo, 2007)

Gambar 2.1 Struktur Teorisasi Akuntansi Islam (Metode 1)

Konsepsi tersebut membawa implikasi yang besar terhadap perumusan teori akuntansi islam yaitu Islam sebagai sumber ilmu. Jika metode ini dijalankan, maka penguasaan tentang ilmu Al-Qur'an menjadi alat yang wajib ditekuni oleh peneliti akuntansi islam. Dari sinilah kemudian muncul syarat menjadi peneliti akuntansi islam tidak jauh berbeda dengan syarat seorang Mufasir/Mujtahid.⁹¹ Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi,

⁹¹Orang Islam yang melakukan proses ijtihad (kesepakatan atas hasil pengkajian). Penguasaan ilmu menjadi syarat utama di antaranya penguasaan bahasa Arab, ilmu

maka akan menghasilkan penafsiran yang keliru, yang memengaruhi kekeliruan konsep akuntansi yang dihasilkannya (Suwiknyo, 2007). Berbeda dengan metode kedua:



(Sumber: Suwiknyo, 2007)

Gambar 2.2 Struktur Teorisasi Akuntansi Islam (Metode 2)

Metode yang kedua ini banyak dikembangkan oleh para peneliti yang memiliki latar belakang keilmuan akuntansi konvensional yang mapan. Hasil dari perumusan akuntansi islam dengan metode kedua lebih memilih atas teori-teori akuntansi konvensional yang searah dengan nilai Islam (Suwiknyo, 2007). Metode ini lebih dikenal dengan istilah “Islamisasi akuntansi”, Harahap (2004) menggunakan istilah konvergensi akuntansi konvensional. Menurut Harahap, akuntansi kapitalis (konvensional) hari ini telah menuju irama akuntansi Islam dengan mengindikatori lahirnya isu-isu akuntansi seperti akuntansi pertambahan nilai, akuntansi sumber daya manusia, akuntansi pertanggungjawaban sosial, akuntansi karyawan (Harahap, 2004: 149-151).

nahwu, ilmu *tasrif/sarf*, ilmu *al-isytiqاق*, ilmu *al-ma'ani*, ilmu *al-bayan*, ilmu *al-badi'*, ilmu *ushuluddin*, ilmu *usul fiqh*, *azbab al nuzul*, *nasikh dan masukh*, *qira'at Al-Qur'an*, filsafat, *tassawuf*, *mantiq*, irfan, dan lain-lain.

3



Makrifat Akuntansi, Determinasi Puncak Perjalanan Spiritualitas Akuntansi: Suatu Tinjauan Ontologis

“

Orang-orang pergi ke kuil mereka, demi menemui-Ku, betapa sederhana dan bodohnya anak-anak-Ku, yang berpikir bahwa Aku ada dalam pengasingan.

Mengapa mereka tidak datang dan menemui-Ku, dalam proses kehidupan, di mana Aku selalu hidup, di tanah pertanian, pabrik dan pasar, di mana Aku mendorong mereka yang mencari nafkah dengan keringat di keningnya?.

Mengapa mereka tidak datang menyambut-Ku, di gubuk-gubuk si miskin, dan menjumpai-Ku dengan memberi si miskin dan orang yang membutuhkan dan menghapus air mata janda-janda dan yatim piatu?, Mengapa mereka tidak datang menyambut-Ku di antara orang-orang tertindas?...

Aku yakin mereka tidak pernah kehilangan diri-Ku, jika mereka berusaha menemui diri-Ku, di dalam keringat dan perjuangan hidup dan dalam air mata dan tragedi orang miskin.

(Syair: Khusdeva Singh, 1974)

.....”

A. Akuntansi Islam Pembebasan: Refleksi Kebutuhan Umat

Lebih 30 tahun wacana akuntansi Islam semakin bergulir sejak tahun 1980-an, sampai hari ini konsepsi ideal yang turun dalam bentuk praktik masih menyisakan banyak persoalan yang kompleks. Kelemahan akar filosofis masih membuka ruang perdebatan yang tak berkesudahan, sehingga mengharuskan kembali untuk menggali dan mengkaji lebih dalam sumber-sumber pengetahuan dalam Islam. Upaya dalam mencari dan menemukan konsepsi filosofis yang ideal yang di dalamnya terhindar dari kontradiksi-kontradiksi filosofis.

Dapat diakui perkembangan lahirnya entitas syariah jauh lebih deras dibanding dengan perkembangan teorisasi akuntansi Islam. Perkembangan entitas tersebut tidak lagi dibatasi oleh batas-batas regional (ruang), tidak pula dibatasi oleh jenis aktivitas bisnis, tetapi merembes ke berbagai segmen bisnis dan geografis.¹ Hal ini kemudian secara pragmatis mendorong lahirnya model “konvergensi” pada tataran praktik akuntansi dengan mengandalkan model pengadopsian kerangka dasar akuntansi konvensional, pengteorisasian akuntansi Islam yang hadir pun lebih dominan dibangun lewat pendekatan pasar untuk kepentingan pasar. Model konvergensi yang cenderung pragmatis cukup menjadi semiotika atas betapa derasnya kebutuhan umat yang belum mampu dijawab oleh para pemikir Muslim. Meski gagasan dasar dalam Islam dipahami sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjawab keseluruhan persoalan hidup manusia sebagaimana Islam hadir membawa nilai-nilai universal dan abadi sebagai bentuk kesempurnaan ajarannya (*kaffah*).

Di Indonesia sendiri sejak tahun 1991, perkembangan akuntansi Islam masih banyak berputar pada poros sektor jasa perbankan seiring dengan lahirnya PSAK No. 59 yang merupakan hasil adopsi dari konsep AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) hingga lahirnya PSAK 101-106² yang mengatur secara teknis penyajian laporan

¹Perkembangan ini seiring bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah di dunia. Mulai dari Amerika Serikat (*Abrar Investment, Inc* dan *Albaraka Bank Corp, Inc*), Inggris (*Gulf International Bank, London* dan *Islamic Finance House Public*) sampai ke Timur Tengah (*Kuwait Finance House*), termasuk Indonesia sejak tahun 1991 (lahirnya BMT). Begitupun sektor aktivitas bisnis, perkembangan institusi syariah tidak lagi hanya terbatas pada aktivitas jasa khususnya finansial (perbankan), tetapi meluas ke berbagai aktivitas bisnis jasa yang lain.

²PSAK 101 mengatur penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 (akuntansi murabbahah), PSAK 103 (akuntansi *salam*), PSAK 104 (akuntansi *isthisnha*), PSAK

keuangan yang di dalamnya masih menyisakan persoalan-persoalan filosofis mendasar, masih kental dengan unsur kapitalisme.³ Realitas tersebut menjadi indikator sebab tidak tercapainya tujuan akuntansi Islam untuk kesejahteraan.⁴

Begitupun halnya, akuntansi Islam tidak membatasi diri hanya untuk mengatur aktivitas jasa saja, melainkan harus mengatur secara keseluruhan aktivitas bisnis yang lain seperti perdagangan dan industri tanpa memandang jenis skala usaha apakah perusahaan besar, menengah ataupun kecil. Dengan demikian, keberadaan konsepsi dasar yang dapat memayungi seluruh entitas sektor bisnis adalah kebutuhan mendasar umat Islam hari ini, seiring pembengkakan aktivitas perekonomian ke sektor perdagangan dan industri.⁵

Untuk menjawab kebutuhan umat tersebut tentu dibutuhkan kerangka terobosan baru dari sekadar pengcaplokkan model akuntansi konvensional, sebab model konvergensi pada kenyataannya juga telah menciptakan pencampuran nilai sehingga validitas nilai Islam menjadi kabur. Misi Islam sebagai ajaran pembebas yang membawa risalah pembebasan dalam akuntansi terkesan tenggelam bahkan “mandul” dalam cengkeraman percikan aroma kapitalisme. Sehingga *instrument-instrument* syariah lebih cenderung menjadi simbolitas pasar ketimbang sebagai *substantive* ideologis.

105 (akuntansi *mudharabah*), dan PSAK 106 (akuntansi *musyarakah*). Lihat: Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan, (Jakarta: IAI, 2007).

³Baydon dan Willet (2000) menganggap bahwa SAK Syariah adalah hasil adopsi dari model akuntansi Barat, tanpa ada perubahan mendasar. Begitupun Triyuwono (2002) yang menyebut SAK Syariah masih kental dengan nilai kapitalisme dan begitu juga Hameed (2000), dan Harahap (2001). Lihat juga: Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 108.

⁴Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka (Al-Maaidah [5]: 66).

⁵Hasil penelitian Tambunan menyimpulkan terjadinya pergerakan perubahan struktural ekonomi dunia khususnya negara berkembang termasuk Indonesia, yakni pergeseran kekuatan struktural ekonomi *agriculture* ke mekanisasi industri. Data bank dunia (1997) menunjukkan pertumbuhan PDB dunia untuk sektor primer (pertanian) hanya mencapai 7%, sedangkan industri manufaktur dan pengilangan minyak saja sudah mencapai 38%. Dalam hal ini negara berkembang telah mengalami proses peningkatan laju pertumbuhan industrialisasi, seiring dengan peningkatan ladang pertanian yang disulap menjadi ladang industri. Lihat: Tulus Tambunan, *Industrialisasi Negara Berkembang, Kasus Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

1. Pembebasan sebagai Puncak Perjalanan Spiritualitas Akuntansi

Akuntansi yang mapan hari ini dibangun atas kerangka yang bias kelas. Pijakan paradigma positivistik yang dibangun di atas fondasi Newtonian menjadikan kerangka akuntansi sebagai konsepsi yang kering, *instrument* dalam memapankan sistem yang mereproduksi gejala krisis kemanusiaan berupa pertentangan kelas dan musnahnya keseimbangan ekosistem.

a. Noda Hitam Akuntansi sebagai Teknologi

Akuntansi lewat pengaturan-pengaturannya (penilaian, pengukuran dan pengambilan keputusan) sebagai teknologi termaknai sebagaimana makna teknologi yang lahir dalam rentang histori. Teknologi telah mengalami pergeseran fungsi, tidak lagi berfungsi dalam memudahkan pekerjaan manusia, teknologi (akuntansi) tidak pula membebaskan manusia, tetapi telah menjadi *instrument* manusia untuk mengaktualkan keserakahan dalam mengakumulasi kekayaan dengan mengeksploitasi alam tanpa kendali. Perkembangan teknologi (akuntansi)⁶ dalam faktanya tidak menciptakan kesejahteraan bagi para buruh, yang tetap terpenjara dalam jurang ketimpangan (*social gap*) yang cukup ironis.

Semenjak manusia beralih dari fase primitif menuju fase teknologi hingga meletusnya revolusi industri, teknologi (akuntansi) justru menjadikan manusia semakin teralienasi (*terasing*) dalam jurang yang dalam, gejala *fethisisme* (pembendaan) telah menjadi penyakit manusia modern hari ini. Teknologi (akuntansi) yang lahir karena manusia, pada saat yang sama menjadikan manusia sekaligus sebagai “korban”. Ketika teknologi telah menggiring manusia menjadi “budak” atas karyanya sendiri, maka jadilah komoditas dan materi sebagai “berhala” modern dalam akuntansi.

Bias kelas atas penguasaan teknologi (akuntansi) untuk segelintir golongan menciptakan ketidakseimbangan kehidupan. Teknologi (akuntansi) menjadi simbol penguasaan manusia atas alam, sekaligus marginalisasi manusia atas manusia yang lain. Penguasaan teknologi menciptakan akses yang tidak berimbang terhadap penguasaan dan

⁶Dalam posisi ini, akuntansi ditafsirkan secara ideologis sebagai struktur yang memiliki kuasa dalam mendistribusikan hak.

pendistribusian sumber daya, yang berujung pada penindasan manusia atas manusia. Kuasa kepentingan kelas sangat kental memengaruhi pembentukan struktur akuntansi kapitalisme yang berbasis modal. Sehingga akuntansi konvensional seolah menjadi *instrument* bagi kelas sosial yang menguasai modal, modal memungkinkan manusia mengendalikan yang tidak memiliki kuasa terhadap modal.

b. Akuntansi sebagai Teknologi: Sumber Ketimpangan

Akuntansi kontemporer sebagai sebuah produk teknologi ikut memainkan peran yang cenderung bias kelas, “dikontrol” oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan secara ekonomi. Akibatnya citra akuntansi menjadi representasi dan perpanjangan tangan dari pemilik modal. Akuntansi ditakdirkan untuk “menghamba” kepada pemodal dalam mengakumulasi kekayaan meskipun harus mengeksploitasi dan merusak alam. Tidak berlebihan jika dikatakan akuntansi dalam industri menjadi *instrument* “suci” para manajer dan akuntan yang dilegitimasi secara struktural yuridis sebagai konsepsi ilmiah yang digunakan untuk “merampas” hak milik kaum buruh (*surplus value*) lewat pengaturan-pengaturannya. Di sinilah peran akuntansi memainkan peran dalam melegitimasi “perampasan” hak sehingga mereproduksi kesenjangan sosial yang begitu dalam.

Islam sangat memerangi asas penguasaan sumber daya berdasarkan kekuatan,⁷ baik kekuatan teknologi, kekuatan politik (kekuasaan), maupun kekuatan ekonomi (modal). Sebab hukum pasar yang menciptakan akses penguasaan yang tidak berimbang menciptakan gejala ketimpangan yang berujung pada marginalisasi kaum yang “lemah” sebagai pihak yang tertindas dan tergilas oleh keserakahan dan kebutaan teknologi (akuntansi).

Perkembangan teknologi (akuntansi) yang terkontrol oleh segelintir manusia, tiada lain karena kompleksitas kehidupan manusia di tengah pusaran kompetisi yang begitu dahsyat. Lokomotif manusia bertindak tanpa terikat oleh fitrah manusia dengan menggilas unsur-unsur kearifan hidup. Teknologi akuntansi telah menjebak masyarakat dalam pola hidup

⁷QS Al-Hasyr [59]: 6). Ayat ini mengindikasikan bahwa perolehan harta dari sumber daya alam dalam Islam tidak didasarkan atas kekuatan. Akumulasi kekayaan yang lahir dari perbedaan kepemilikan atas “kekuatan” para manusia menjadi penyebab ketimpangan sosial.

“organik”⁸ yang cenderung memandang manusia sebagai “musuh”, terikat pada ikatan temporer atas dasar untung-rugi yang pada kenyataannya mereproduksi pertentangan hingga berujung pada marginalisasi dalam pola *superior-inferior*.

Ambisi untuk mengakumulasi kekayaan dalam sistem kapitalisme adalah syarat utama *survival*-nya sebuah entitas di tengah kompetisi yang berdasar pada logika *laissez faire*. Akuntansi sebagai teknologi pun digiring sebagai “alat” aktualitas keserakahan manusia, bercengkerama dalam logika *going concern*. Dalam perkembangannya secara evolutif di tengah pusaran kompetisi telah menggiring pula labelisasi agama masuk dalam pusaran pasar sebagai sebuah “*instrument* pasar” dalam melanggengkan dan mempertahankan pengaruh *status quo* pasar di tengah semakin menguatnya paradigma simbolitas pemahaman masyarakat atas agama.

Atas dasar konsepsi akuntansi ilmiah berbasis agama, muncul tampakan-tampakan wajah akuntansi yang “saleh” meskipun terpendam karakter yang “tiranik” untuk menguasai alam, menguasai buruh dan memonopoli pasar untuk kepentingan laba. Hal ini sangat koheren dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa ada sebagian manusia mendirikan masjid untuk menciptakan kemudharatan,⁹ dan mengatakan dirinya beriman, padahal sesungguhnya ia tidak beriman,¹⁰ seolah-olah memberi makan pada fakir dan miskin meskipun kata Tuhan sungguh ia tidak melakukannya karena mencampurbaurkan antara *haq* dan yang *bathil*.¹¹ Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; “Ini dari Tuhan”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (QS Al-Baqarah [2]: 79).

⁸Sistem sosial organik dalam teori Durkheim adalah hasil pergeseran nilai dari sistem sosial mekanik. Sistem organik ditandai dengan hancurnya tatanan solidaritas sosial menuju semangat individualisme. Hancurnya solidaritas sosial tiada lain adalah produk sejarah yang kompleks, yakni lahirnya era industrialisasi dan urbanisasi berperan dalam merekayasa pola hidup masyarakat (menjadi kapitalis). Lihat: Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69 dan hlm. 116-120.

⁹QS At-Taubah [9]: 107.

¹⁰QS Al-Hujuraat [49]: 14; Al-Baqarah [2]: 8.

¹¹QS Al-Fajr [89]: 17-19.

2. Penyucian Akuntansi: Mengurai Makna Tuhan dalam Akuntansi

Pertanyaan mendasar atas konsepsi ini adalah apa makna spiritualitas dalam akuntansi Islam? Bagaimana bentuk konsepsi akuntansi yang melibatkan Tuhan sebagai *stakeholders* sentral¹²? Pertanyaan ini searah dengan pertanyaan “apa makna Tuhan dalam kehidupan”?, dalam artian bagaimana menerjemahkan “Tuhan” dalam kehidupan?, selaras dengan pertanyaan “bagaimana menerjemahkan makna “Tuhan” dalam konsepsi akuntansi? Sebab Kebenaran tidak hanya didapatkan dalam ide sebagai sebuah konsep, melainkan bagaimana kesesuaian “ide” dengan “realitas” dapat terjalin, Tuhan sebagai *Al Haq* harus ditemukan dalam konteks sosial termasuk dalam struktur akuntansi.

a. Makrifat Akuntansi: Ketersingkapan Tabir sebagai Puncak Perjalanan

Spiritualitas dalam akuntansi seperti halnya spiritualitas dalam makna agama yakni bersifat substansi (*esoteric*) bukan simbol (*exsoteric*), yang bermakna pembebasan. Hakikat perjalanan spiritual manusia menuju *maqam* spiritual tertinggi, bentuk kedekatan manusia dengan Tuhan ketika tabir¹³ makna kehidupan tersingkap (*makrifatullah*). Ketersingkapan tabir menggiring manusia dalam menemukan makna dari setiap nafas kehidupan dan seluruh eksistensi adalah esensi dan *tajalli* dari pemilik-Nya. Egoisme dan pragmatisme sebagai dasar dalam akuntansi kapitalisme adalah tabir (penghalang), sekaligus musabab tergiringnya akuntansi dalam mereproduksi marginalisasi yang berujung pada penindasan.

Dalam Islam egoisme hanya dapat tunduk pada kesadaran altruisme. Altruisme dalam akuntansi Islam adalah simbol pembebasan. Mulla Shadra menjelaskan hakikat perjalanan altruisme tersebut dalam istilah empat

¹²Tuhan adalah *stakeholders* sentral, pusat dari keseluruhan realitas dan puncak kepentingan dalam akuntansi. Puncak ego menyatu dengan Ego Semesta (altruisme). Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bercorak antroposentrisme, menempatkan manusia sebagai pusat realitas dan manusia adalah puncak segala kepentingan (egoisme). Akibatnya akuntansi hadir hanya untuk mengakomodasi kepentingan manusia meski dalam kenyataannya terjadi pula reduksi makna “manusia” yakni segelintir manusia yang memiliki kuasa terhadap modal.

¹³Ketidakteringkapan tabir disebabkan adanya tembok yang memisahkan. Dan tembok itu diciptakan oleh manusia sebagai ego.

kategori perjalanan, yakni perjalanan “*makhluk menuju Tuhan*”, “*dari Tuhan bersama makhluk menuju Tuhan*”, “*bersama Tuhan menuju makhluk*” dan “*dari makhluk ke makhluk bersama Tuhan menuju Tuhan*”. Sebuah konsepsi intuitif manusia dalam merefleksikan makna kehidupan dengan menempatkan terminologi sosial sebagai puncak penyucian manusia.

Perjalanan “*dari makhluk ke makhluk bersama Tuhan menuju Tuhan*” selaras dengan fitrah dan amanah manusia dalam menjalankan misi penciptaan sebagai umat terbaik manusia yang dilahirkan untuk menyuruh yang *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah yang *mungkar* (keburukan) (QS Ali-Imran [3]:110).

Kuntowijoyo menafsirkan makna ayat tersebut dalam tiga makna yakni “*nahy mungkar*” yang berarti emansipatif, “*amar ma'ruf*” (liberasi atau pembebasan), dan “*al iman billah*” (transendensi atau spiritualitas) sebagai landasan (Jurdi, 2010: 9). Dalam hal ini makna transendensi dan spiritualitas sesungguhnya adalah bentuk pembebasan manusia secara sosiologis, dalam kaitannya manusia dengan manusia dan alam. Relasi unsur yang terbangun bersifat *hyper*, melampaui batas-batas profan.

Di sinilah letak ketersingkapan tabir dalam akuntansi, berpangkal ujung pada kesadaran transendensi (altruisme) dalam menegakkan sisi ideologis Islam dalam akuntansi (pengideologisasian Islam) untuk membebaskan yang tertindas (*mustada'afin*) sebagai bentuk penyucian akuntansi. Pembebasan menjadi puncak *makrifat*, determinasi atas manunggalnya ego partikular akuntansi dalam lautan Ego Universal (altruisme).

Akuntansi yang sampai pada *maqam makrifat* adalah akuntansi yang tidak lagi terjebak pada pola dikotomis (subjek-objek, *superior-inferior*), melainkan manunggal disebabkan hilangnya tabir (penghalang) yang memisahkannya, dengan memandang kehakikian realitas *stakeholders* (manusia, buruh, masyarakat, dan alam) sebagai luapan eksistensi dari Tuhan sebagai pusat akuntansi.

b. Makna “Tuhan” dalam Akuntansi

Syariati menegaskan ketika ia menafsirkan makna terminologi “Tuhan” dalam Al-Qur’an, dalam frasa “Kerajaan Tuhan”,¹⁴ menurut Syariati, kata “Tuhan” dalam Al-Qur’an memiliki padanan makna secara sosiologis yang

¹⁴QS Az-Zukhruf [43]: 85; dan Al-Furqaan [25]: 2.

bermakna golongan masyarakat yang tertindas (*mustada'afin*).¹⁵ Dengan demikian makna “kerajaan Tuhan” sebagai representasi dari sistem sosial kemasyarakatan termasuk entitas masyarakat ekonomi merupakan bentuk pemuliaan dan keberpihakan kepada orang-orang tertindas, termarginalkan yang menyandang status sebagai miskin, fakir, *mustada'afin*, buruh, budak, pekerja, yang umumnya bekerja secara paksa untuk kepentingan segelintir orang, tereksplotasi sebagai korban atas sistem yang tidak adil. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan orang-orang tertindas, sebagaimana Islam mengandung asas emansipatoris, kesetaraan atas semua makhluk. Hal ini dipertegas oleh Tuhan, ketika Tuhan menyetarakan diri-Nya dan Rasul-Nya dengan orang-orang tertindas,

...Apa saja harta... yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya... adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Penyetaraan secara beriringan antara Tuhan, Rasul dan orang yang tertindas (*mustada'afin*) merupakan akumulasi makna yang secara semantik menjelaskan keterhubungan antara Tuhan dan kehidupan sosial, dalam pola kemanunggalan antara Tuhan dengan orang-orang tertindas.¹⁶ “Tuhan” adalah representasi orang-orang tertindas secara sosial, hal ini sejalan dengan perintah Tuhan untuk menegakkan keadilan, selaras dengan peran agama untuk membebaskan para “hamba-hamba” Tuhan yang tertindas dengan melawan para tiran¹⁷ yang disimbolisasikan dengan makna jihad.¹⁸

Di sinilah letak konsepsi puncak perjalanan akuntansi Islam ketika akuntansi menjadi konsepsi ideologis dalam membela dan memperjuangkan

¹⁵ Seperti pada ayat: *Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu (QS At-Taghabun [64]: 17).* Kata “pinjam” melekat pada orang-orang yang berkekurangan (*mustada'afin*) yang dinisbahkan dalam frasa (hak) “Tuhan”.

¹⁶ *Hindarilah doa orang-orang tertindas, sebab ia tidak memiliki tabir (penghalang) dengan Allah (HR Ibn Abbas).*

¹⁷ Tirani adalah akar ketidakadilan yang memicu ketimpangan, menghancurkan tatanan sosial yang harmonis. Tirani merujuk pada sistem yang di dalamnya terdapat eksploitasi segelintir orang (golongan) dengan memarginalkan sebagian yang lain. Sistem akuntansi kapitalisme yang membangun kesejahteraan di atas marginalisasi adalah salah satu bentuk tirani.

¹⁸ *Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!” (QS An-Nisaa' [4]: 75).*

masyarakat yang tertindas. Sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Ghandi ketika ia mengatakan “aku tidak menemukan Tuhan, kecuali di wajah orang-orang tertindas”.¹⁹

Tuhan melekatkan diri-Nya kepada orang-orang yang termarginalkan²⁰ yang berarti hak Tuhan melekat secara sosiologis kepada pihak yang tertindas sebagai korban ketidakadilan sistem. Rasulullah pernah berkata: *Saya bersumpah kepada Allah bukanlah orang yang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya kelaparan.*²¹ Tuhan menyebut sistem akuntansi (sebagaimana ketika menunjuk manusia) yang tidak mendistribusikan hak “Tuhan” kepada yang tertindas adalah sistem yang terpenjara dalam kesesatan yang nyata.²²

Tuhan memmanifestasikan wajah-Nya kepada orang-orang tertindas. Masyarakat kata Engineer (2009: 7) yang membiarkan masyarakat yang lain tertindas bukanlah masyarakat Islam. Sistem akuntansi yang membiarkan dan memapankan penindasan dan eksploitasi segelintir orang kepada mayoritas manusia adalah sistem yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan.

Sebab ketimpangan sosial muncul tidak secara natural,²³ melainkan dibentuk dan dikonstruksi oleh struktur akuntansi yang tidak berpijak

¹⁹Gandhi menganggap tujuan hidupnya tiada lain keinginannya untuk menjumpai Tuhannya secara langsung, baginya Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah Tuhan. Dan tempat baginya untuk itu adalah dengan melayani kebutuhan-kebutuhan orang-orang tertindas. Pembebasan adalah ikhtiar satu-satunya untuk menjumpai Tuhan yang bersatu dalam ciptaannya. Lihat: Hick, *Dimensi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 241.

²⁰Metaforis Jalaluddin Rumi: Ketika Tuhan berkata pada Musa “Akulah Tuhan, Aku jatuh sakit sedang kau tidak menjenguk-Ku”, Musa bertanya, “wahai Tuhan, engkau tidak pernah sakit, aku tidak mengerti; berilah petunjuk tentang ucapan ini”, dan Tuhan menjawab: Sesungguhnya hamba-Ku yang terpilih dan tersayang telah sakit, Aku adalah dia, perhatikan baik-baik, sakitnya adalah sakit-Ku. Yang dimaksud adalah orang-orang *mustada'afin* (tertindas). Dan Ucapan Isa: jika engkau (menolong) memberi makan orang tahanan dan orang sakit dan lapar, maka engkau telah menolong-Ku. *Ibid.*, hlm. 189.

²¹HR Bukhari.

²²QS Yaasiin [36]: 47.

²³Pada dasarnya kemiskinan, ketimpangan adalah gejala alam yang dipersepsi manusia sebagai “kejahatan” akibat ketidaktersampaian hak. Disebabkan ia adalah gejala alam maka sebabnya pun pasti berasal dari alam. Oleh karenanya persoalan alam ini harus diselesaikan di alam dengan berdasarkan sistem-sistem alam. Mustahil realitas alam dan kejadian alam mandiri berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan realitas alam yang lain. Ia tidak memiliki keterkaitan dengan transendental, dalam artian kemiskinan bukan karena “takdir” melainkan dikonstruksi oleh struktur (sistem). Salah satunya adalah sistem akuntansi sebagai struktur yang tidak berpihak pada keadilan yang mereproduksi gejala alam tersebut.

pada keadilan Tuhan. konstruksi tersebut disebut oleh Tuhan sebagai “pendusta agama”²⁴ yang dalam terminologi ekonomi mengandung arti bahwa ketimpangan sosial adalah bentuk “perampasan hak”²⁵ oleh mereka para “pendusta agama” yang dimapankan oleh struktur sosial, dengan menggunakan akuntansi sebagai *instrument* dalam menumpuk-numpuk harta.²⁶ Akuntansi yang mapan telah menjadi *instrument* terhambatnya hak masyarakat lemah (*surplus value*) yang dilegitimasi secara yuridis, ilmiah bahkan moral sebagai sebuah kewajaran.

c. **Syahadat dalam Akuntansi**

Konsepsi Mulla Shadra yang memandang puncak perjalanan pada bentuk pembebasan manusia secara sosial merupakan analogi dari bentuk penyempurnaan spiritualitas akuntansi (*makrifat* akuntansi). Penglibatan Tuhan dalam akuntansi adalah bentuk penglibatan kaum *mustada'afin*²⁷ dalam konsepsi filosofis akuntansi, yang disebut Kuntowijoyo (2006: 49) sebagai objektivikasi dalam ilmu pengetahuan yakni kerangka ilmu yang mengarah pada fungsi sosial yang bersifat transformatif.

Konsepsi pembebasan adalah cerminan makna *mi'raj*²⁸ Rasulullah dalam menjalani pendakian spiritual untuk menjalin kontak dengan Pemilik Kesucian untuk kemudian berpaling ke bumi untuk membebaskan manusia-manusia yang tertindas. Membebaskan umat dari belenggu pemikiran materialistik dan kekejaman teknologi (akuntansi) yang mengakibatkan penindasan akibat menyimpangnya manusia dari fitrahnya.

²⁴QS Al-Maa'uun [107]: 1-3).

²⁵Istilah yang dipergunakan Allah dalam Al-Qur'an yang selaras dengan makna “perampasan hak”, terdapat dalam surah An-Nisaa' [4]: 161, dan Al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...* Lihat juga: QS Adz-Dzaariyaat [51]: 19. Mereka yang merampas hak atau memakan harta dengan cara *bhatil* disebut oleh Tuhan sebagai “pendusta agama”, yang tindakan tersebut dianggap memusuhi Tuhan dan Rasul-Nya.

²⁶QS An-Nisaa' [4]: 37; dan Al-Humazah [4]: 2-4.

²⁷Istilah yang dipergunakan Tuhan dalam Al-Qur'an yang secara ideologis menunjuk pada golongan masyarakat yang tertindas.

²⁸*Mi'raj* Rasul adalah bentuk pencapaian spiritual Nabi untuk memulai proses revolusi besar dalam sejarah hidup manusia. Kata Iqbal dalam Muthahhari (2008: 263): Seandainya Nabi hanya seorang mistikus, tentu Beliau tidak akan kembali lagi ke “bumi” karena telah tenteram bertemu dengan Tuhannya. Tetapi Nabi kembali ke “bumi” untuk menggerakkan perubahan sosial dalam mengubah jalannya sejarah manusia dengan memimpin revolusi sosial-budaya untuk membebaskan para makhluk Tuhan yang tertindas, melawan struktur yang menindas (*jahiliyah*). Turunnya Nabi untuk membebaskan manusia adalah puncak (hakikat) Islam yang sesungguhnya.

Mi'raj adalah simbol pencapaian makna *syahadat* tertinggi berupa “persaksian”. Sebagaimana *syahadat* adalah ikrar manusia untuk menjadi *abdullah* (abdi Tuhan), konsekuensi atas persaksian adalah kepasrahan total²⁹ kepada Tuhan yang berarti abdi Tuhan tidak sekadar “pembebas” yang tertindas tapi juga “penentang” kezaliman (sistem yang menindas). Dengan menafikan atau menegasikan Tuhan-Tuhan “kecil” menuju persaksian kepada Tuhan Sejati. Tuhan-Tuhan “kecil” yang dimaksud adalah “nafsu”³⁰ yang melingkupi dan merepresentasikan segala bentuk penindasan. Akuntansi yang hanya berorientasi materiil adalah bentuk “berhala” dalam akuntansi Islam.

Bahkan menurut Syariati, eksistensi agama selalu hadir untuk melawan “agama” yakni agama pembebasan (Tauhid) melawan agama perbudakan yang sering disimbolkan sebagai agama “berhala”.³¹ Realitas tersebut cukup merepresentasikan ketika konsepsi akuntansi Islam pembebasan hadir tidak hanya untuk melawan hegemoni kapitalisme maupun sosialisme, tetapi juga akuntansi Islam yang berkarakter kapitalisme. Sebab paradigma modernisme yang dibangun atas rasionalitas *instrumentalism* yang berkarakter kapitalisme telah menciptakan gejala *syndrom midas*³² ke seluruh

²⁹QS Al-An'am [6]: 161.

³⁰QS Al-Furqaan [25]: 43.

³¹Bagi Syariati, sejarah hidup manusia adalah sejarah pertentangan dua kutub yang berbeda yakni kutub Habil dan Qabil yakni penindasan dan pembebasan, kezaliman dan keadilan. Ironinya kata Syariati senjata dari kedua *front* itu adalah agama, yakni agama hadir untuk melawan “agama”. Lihat: Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim (terj)* (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 37-38. Dan, Dharmawan, *Agama Itu Bukan Candu* (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 12-13.

³²Midas adalah nama raja dalam suatu mitologi Yunani yang kerakusannya membawa bencana bagi semua umat manusia. Dalam mitologi tersebut disebutkan karena keserakahan Raja Midas atas kekayaan materiil, ia meminta mantera pada Dewa Olympus agar dikaruniai emas yang melimpah. Maka permintaan itu pun dipenuhi dengan memberi *mukjizat* pada tangan Midas, sehingga dengan sentuhan tangan Midas membuat semua yang tersentuh berubah menjadi emas. Maka satu persatu yang disentuhpun menjadi emas hingga istri dan anaknya bahkan makanan pun ikut menjadi emas. Gejala inilah yang membawa bencana akhirnya Raja Midas dikucilkan oleh rakyatnya sendiri karena takut disentuh oleh Rajanya. Sardar mengasumsikan bahwa tangan Raja Midas dalam konteks modernisme hari ini terdapat pada teknologi (termasuk akuntansi sebagai teknologi) yang justru membawa bencana yang begitu dahsyat bagi umat manusia. Operasionalisasi teknologi oleh segelintir penguasa (Midas) telah menjadikan alam dan buruh sebagai tumbal atas keserakahan pemodal dan penguasa lainnya (Midas). Lihat, Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

segmen masyarakat yakni tergerusnya keseimbangan alam dan tertindasnya kehidupan sebagian besar manusia yang dikontrol oleh segelintir manusia atas nama ilmu pengetahuan (baca: akuntansi).

B. Akuntansi Islam: Antara Teori (Sains) atau Doktrin

Upaya dalam menjawab persoalan-persoalan sosial, kemanusiaan dan ekologis yang diproduksi oleh akuntansi sebagai struktur. Menempatkan Islam sebagai pedoman manusia dalam kehidupan. Persoalan hidup manusia pada hakikatnya hanya dapat diselesaikan dengan pengetahuan normatif atau ideologi bukan pengetahuan positif sebagai sains, sebab sains berdasar pada kecenderungan pengetahuan yang bebas nilai,³³ sedangkan persoalan kemanusiaan adalah persoalan nilai yang bersifat normatif. Oleh karenanya akuntansi Islam dalam posisi ini harus didefinisi kembali dalam posisinya bukan sebagai pengetahuan saintis melainkan pengetahuan doktrinal (ideologis). Sehingga pembangunan doktrinal akuntansi Islam harus menggunakan perangkat-perangkat pengetahuan doktrinal bukan perangkat saintis yang cenderung empiris.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan landasan pokok akuntansi Islam, pensandaran kebenaran akuntansi Islam pada teks (wahyu) menegaskan kebenaran pengetahuan akuntansi Islam sebagai pengetahuan doktrinal. Itulah sebabnya Al-Qur'an bukanlah buku yang berbicara tentang teori ilmiah (sains) melainkan kitab yang di dalamnya berisi doktrin (nilai) dan mengandung hikmah³⁴ dalam menjelaskan realitas³⁵ yang merupakan petunjuk dan pedoman³⁶ yang mulia³⁷ untuk manusia dalam mengatur tentang bagaimana tatanan yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang selaras dengan hakikat penciptaan dan fitrah manusia sebagai ciptaan. Al-Qur'an mengatur seluruh sistem hidup makhluk-Nya yang ditujukan

³³Pengetahuan tentang hukum *demand* dan *supply*, ketika harga naik kecenderungan permintaan akan turun atau penawaran akan meningkat adalah pengetahuan sains yang tetap saja pengetahuan tersebut yang bebas nilai tidak dapat menjawab persoalan-persoalan kemiskinan, ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Sebab persoalan kemiskinan dan ketimpangan adalah persoalan keadilan yang membutuhkan pengetahuan ideologis (doktrinal).

³⁴QS Yaasiin [36]: 2.

³⁵QS An-Nahl [16]: 89.

³⁶QS Ibrahim [14]: 1; An-Nahl [16]: 64.

³⁷QS Qaaf [50]: 1.

untuk manusia agar keseimbangan kehidupan alam dapat tercapai, yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang dalam ekonomi mengatur secara normatif bagaimana manusia seharusnya memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya.

1. Akuntansi Islam sebagai Akuntansi Doktrinal³⁸ (*Tasydiq*) Bukan Akuntansi Sainis (*Theory*)

Dikarenakan Al-Qur'an sebagai pedoman normatif, maka akuntansi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an, pada hakikatnya bukanlah teori (sains) melainkan sebuah doktrin Islam³⁹ dalam mengatur sistem pencatatan yang berlandaskan pada pijakan nilai Islam, yang kandungan maknanya merupakan *instrument* Islam dalam memberi kepastian atas terdistribusinya hak-hak manusia maupun alam secara adil sesuai konsepsi Islam tentang keadilan. Dalam sistem yang lebih luas, akuntansi Islam merupakan bagian dari sistem, kaidah, dan doktrin Islam tentang ekonomi.

Doktrin pada dasarnya menurut Baqir (2008: 61) adalah metode atau cara yang dipilih dan diikuti masyarakat dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan problem praktis yang dihadapinya, dalam hal ini doktrin adalah “ideologi atau sistem”, yang secara normatif, objeknya adalah bagaimana menciptakan tatanan sosial yang adil. Sedangkan teori ilmiah (sains) berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal

³⁸Doktrin yang dimaksud di sini bukan dogma. Doktrin berpijak pada rasionalitas sedangkan dogma merupakan “pencaplokan” cara berpikir secara irasionalitas. Doktrin adalah kajian nilai yang normatif berbicara tentang “apa yang seharusnya” bukan kajian positif tentang “apa yang terjadi”. Keadilan pada dasarnya adalah kajian doktrinal bukan kajian teoretis.

³⁹Teori pada dasarnya adalah kajian tentang fakta (konkret) yang secara metodologis didekati dari dua metode yakni deduktif dan induktif. Keilmiahn teori khususnya dalam perspektif Barat terletak pada kecenderungannya pada observasional. Islam dalam posisi ini bukanlah sains atau teori sebab ideologi Islam bukanlah ideologi eksperimental, yang kebenarannya digagas dan dibuktikan dari realitas sosial (empirik). Melainkan ideologi Islam melampaui realitas fisik (metafisik), yang kadar kebenarannya terletak pada realitas yang mandiri (wahyu) bukan pada alam. Di sinilah yang dimaksud Islam sebagai kajian doktrinal atau ilmu *tasydiqi*, konsepsi doktrinal lahir dari pengorganisasian persepsi-persepsi Islam tentang alam, manusia, sosial dan Tuhan. Kebenaran agama dan kebenaran pengetahuan pada dasarnya berbeda meskipun tidak dapat dipisahkan. Kebenaran dari hasil perhitungan $1 + 1 = 2$ adalah kebenaran pengetahuan (sains), tetap saja ia bukan kebenaran agama, sebab $1 + 1 = 2$ pada dirinya ia bebas nilai, sedangkan kebenaran agama adalah kebenaran tentang nilai.

kehidupan ekonomi, peristiwa, gejala-gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa dan fenomena dengan sebab-sebab dan faktor umum yang memengaruhinya (Baqir, 2008: 78-90).

Islam mereproduksi model pengetahuan yang bersifat doktrinal sehingga pengetahuan tersebut mengandung nilai-nilai yang bersifat transformatif. Sebagai sebuah ideologi, agama Islam bertengger di atas keyakinan yang secara sadar dipilih untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah yang mencuat dalam masyarakatnya. Di sinilah letak ketika Syariat menegaskan Islam bukan pengetahuan kultural (sains) yang mereproduksi pengetahuan yang bebas nilai, melainkan Islam adalah ideologi, sebagaimana ideologi adalah keberpihakan. Ideologi Islam bukanlah ideologi eksperimental⁴⁰ yang digagas dan lahir dari fakta (gejala-gejala) alam atau sosial.

Berbeda dengan teori ilmiah (sains) yang pada hakikatnya bersifat relatif sebab teori dibangun dan bersandar pada alam, sebagaimana hakikat alam yang cenderung berubah-ubah sebagai keniscayaan sifatnya yang materiil. Sedangkan doktrin bersifat mandiri sebagai sebuah konsepsi ide yang eksistensi dan esensinya adalah nomena, tidak terikat apalagi didikte secara eksistensi oleh fenomena yakni realitas alam. Kuntowijoyo (2006) menggunakan istilah strukturalisme transendental.

Berbeda dengan akuntansi saintis yang proses pengagasannya berangkat dari analisis masalah dan kebenarannya dibuktikan pada realitas alam sebagai fenomena disebut sebagai metode ilmiah (metode positif, induksi ataupun deduksi) yang bersifat empirikal (observasional). Akuntansi Islam sebagai pengetahuan doktrinal (*tasydiki*) meletakkan kebenaran pada realitas yang mandiri, alam bukan sumber kebenaran pengetahuan melainkan hanya merupakan medan untuk mengaktualnya kebenaran pengetahuan secara normatif. Kebenaran melekat pada realitas yang melampaui alam (wahyu).

Meskipun pengetahuan doktrin dan pengetahuan teoretis berbeda, tetapi tetap saja Islam menganggap tidak ada keterpisahan di antaranya, seperti halnya antara nilai (normatif) dengan perilaku tidak dipisahkan dalam kehidupan. Pengetahuan dalam Islam memiliki karakter ideal sebagai

⁴⁰Kapitalisme maupun sosialisme dalam posisi ini adalah bentuk ideologi yang pada dasarnya dibangun dari realitas alam secara teoretis. Bergerak dari kecenderungan positif sebagai teori menuju kecenderungan normatif sebagai ideologi.

alat untuk menegakkan nilai-nilai (keadilan). Penulis menggunakan istilah “pengideologisasian Islam” dalam akuntansi sebagai wujud dialogis antara Islam secara doktrinal dengan realitas sebagai konstruk teoretis.

2. Perbedaan Akuntansi Islam, Kapitalisme dan Sosialisme

Substansi perbedaan antara akuntansi Islam, akuntansi kapitalisme dan akuntansi sosialisme pada hakikatnya bukanlah perbedaan teoretis melainkan perbedaan doktrin atau nilai (*tasydiqi*) yang secara filosofis perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologi dan pandangan dunia masing-masing ideologi. Di sinilah letak kedudukan untuk menegaskan bahwa akuntansi Islam, akuntansi kapitalisme dan akuntansi sosialisme adalah konstruk gagasan yang berdiri sendiri, berbeda satu sama lain, yang tidak mungkin dikompromikan atau dicampurbaurkan.

Dalam aktivitas bisnis yang lebih luas, sistem produksi dan sistem distribusi merupakan wilayah kajian doktrinal bukan teoretis. Akuntansi sebagai *instrument* teknologi yang memetakan arus distribusi dan menggambarkan sistem produksi dipengaruhi oleh doktrin ideologis atas sistem produksi maupun distribusi entitas bisnis. Misalnya perbedaan konsepsi distribusi sistem kapitalisme dan sosialisme. Dalam kapitalisme aspek dasar sistem distribusi berdasarkan hakikat kebebasan individu dalam berusaha berupa hukum pasar (kompetisi) *survival the fittest*. Kebebasan individu adalah landasan akuntansi dalam memastikan tercatatnya sistem pembukuan berdasarkan hukum tersebut yakni terdistribusinya hak berdasarkan usaha (keadilan proporsional/*proportional justice*).

Begitupun dengan sosialisme yang melandaskan sistem distribusi hak pada kebutuhan individu secara kolektif, maka akuntansi pun hadir untuk memastikan terdistribusinya hak kepada semua individu secara kolektif berdasarkan kebutuhan masing-masing individu (keadilan distributif/*distributive justice*) serta memastikan tidak munculnya kepemilikan individu. Dalam kaitannya dengan ideologi maka akuntansi berperan dalam memastikan sistem ideologi berlaku sesuai dengan doktrinal dalam masyarakat penganut ideologi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa wilayah kajian akuntansi adalah wilayah doktrinal.

Dengan demikian, akuntansi Islam adalah sistem pencatatan yang berdasarkan sisi doktrinal Islam tentang keadilan. Filosofi laporan keuangan sebagai produk akuntansi dalam Islam adalah memastikan sistem produksi

dan distribusi hak atas entitas bisnis berjalan sesuai dengan doktrin nilai Islam yakni terciptanya kesejahteraan bagi seluruh alam.⁴¹ Dalam posisi ini laporan keuangan dalam Islam tidak sekadar dipersepsi sebagai produk intelektual melainkan mencakup kediriannya sebagai produk spiritual.

Hasil penelitian Alimuddin, et al (2014) memperkenalkan konsep harga pokok produksi berbasis nilai keadilan dengan memperlihatkan cara perhitungan harga pokok produksi yang memasukkan bukan hanya seluruh biaya yang terserap dalam proses produksi (*absorption costing* seperti pada perhitungan harga pokok produksi konvensional) tetapi juga memasukkan unsur biaya pelestarian lingkungan dan biaya social di mana perusahaan beroperasi. Bahkan untuk menentukan harga jual pun harus memperhitungkan biaya pelestarian lingkungan disekitar perusahaan dan biaya untuk mengembangkan masyarakat setempat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar yang ditimbulkan akibat operasi perusahaan (Alimuddin, 2011).

Akuntansi Islam secara fungsional berperan dalam memastikan berjalannya proses bisnis dalam koridor ketersampaian hak baik sosial maupun alam. Pokok kajian akuntansi Islam adalah kajian doktrinal. Sebagaimana Al-Qur'an sebagai kitab doktrinal (nilai),⁴² ketika Al-Qur'an dimaknai sebagai teori (sains), maka kita terjebak pada relativitas dalam memaknai kitab suci sebagaimana teori yang bersifat fluktuatif, berevolusi secara kumulatif bahkan revolutif. Sebagaimana ditegaskan oleh Kuntowijoyo (2006: 4) bahwasanya kebenaran bersifat non-kumulatif sedangkan teori (kemajuan) bersifat dinamis, berkembang dan kumulatif.

C. Doktrin Akuntansi Islam: Antara Substansi dan Aksiden

Perbedaan doktrinal akuntansi antara Islam, kapitalisme dan sosialisme disebabkan perbedaan konsepsi atas persepsi-persepsi dalam memandang realitas alam, manusia bahkan Tuhan. Islam memiliki konsepsi sendiri dalam memahami fakta kosmik, fakta sosial, fenomena-fenomena serta keterhubungannya dengan segenap hukum yang ada. Ada dua kerangka konsepsi Islam yang menopang kerangka akuntansi Islam, sebagaimana konsepsi Islam atas Syariat terdiri dari Syariat yang bersifat substansi dan aksiden.

⁴¹QS Al-Anbiyaa [21]: 107.

⁴²QS An-Nahl [16]: 89.

1. Perbedaan Substansi dan Aksiden

Substansi pada hakikatnya merujuk pada konsepsi yang mutlak, tidak berubah, dan eksistensinya sebagai konsepsi yang mandiri (*independent*) sebagai sebuah nomena, bukan fenomena. Substansi lebih bersifat esoterik sedangkan aksiden lebih cenderung bersifat eksoterik. Kategori substansi akuntansi Islam merupakan kaidah *absolut* sebagai sebuah nilai yang melekat, secara logis merupakan hubungan niscaya dalam hal ini adalah universalitas nilai Islam yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan aksiden merupakan sisi eksoterik akuntansi Islam yang bersifat relatif dan *derivative*, yang konsepsinya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis.

Sisi aksiden akuntansi Islam meniscayakan perbedaan konsepsi yang mungkin saja dibatasi oleh ruang maupun waktu yang berbeda (relatif), tetapi eksistensinya tetap menyatu dalam kategori substansi (*absolut*) sebagaimana aksiden tidak boleh bertentangan sisi doktrinal (substansi) Islam tentang keadilan sebagai landasan nilai dalam akuntansi.

Konsepsi aksiden dalam akuntansi Islam mengindikatori akuntansi Islam sebagai konsep yang dinamis, beradaptasi dalam segala zaman dan ruang sebagaimana realitas kehidupan manusia yang kompleks, tidak statis melainkan berkembang secara terus-menerus. Baqir (2008: 109) dalam menjelaskan ekonomi Islam menggunakan istilah “ruang kosong” untuk mengisi kaidah hukum yang non-permanen atas doktrin Islam tentang ekonomi yang tidak terdapat pada ruang legislasi hukum Islam yang *absolut* (substansi).

2. Relasi Substansi dan Aksiden dalam Akuntansi Islam

Pola relasi substansi dan aksiden bersifat dialektis integratif yang merepresentasikan realitas sebagai fakta sosial dalam kerangka nilai doktrinal secara mandiri. Kerangka aksiden dalam akuntansi Islam bisa saja mirip dengan kerangka aksiden dengan akuntansi kapitalisme ataupun sosialisme secara fenomena. Tetapi dalam kajian substansi pada tataran teoretis hukum doktrinal akan tampak perbedaan yang signifikan.

Seperti halnya sistem ekonomi Islam dalam rentang historis, tampak bahwa Islam pada masa Nabi juga menganut kebijakan kebebasan

ekonomi,⁴³ yang dalam terminologi modern kebebasan ekonomi identik dengan sistem kapitalisme. Tetapi kadang pula Islam memperlihatkan gejala sosialistik dalam perekonomian, ketika Nabi sebagai kepala negara ikut mengintervensi keseimbangan pasar. Gejala ini disebut gejala aksiden yang menggiring pada fenomena yang sama, tetapi dengan sisi substansi yang sungguh berbeda bahkan bertentangan.

Dalam akuntansi munculnya istilah pertanggungjawaban sosial. Konsep pertanggungjawaban sosial tidak lagi menjadi domain akuntansi Islam, melainkan juga menjadi milik akuntansi kapitalisme dan sosialisme. Secara aksiden terlihat tidak ada perbedaan secara fenomena, tetapi secara substansi (keterikatan nilai) akan memperlihatkan perbedaan signifikan. Sebab kerangka teori dalam akuntansi dibentuk oleh kerangka nilai yang mendasarinya (ideologi), epistemologi memengaruhi perbedaan ideologi maka akar yang berbeda meniscayakan substansi teoretis (doktrinal) yang berbeda pula.

Begitupun halnya dalam akuntansi Islam. Sisi aksiden bisa saja tampak sama secara fenomena, sebab fenomena adalah sebuah fakta alam. Tetapi yang membedakannya secara substansi adalah kajian doktrinal dan hukum yang mendasarinya. Misalnya sisi debit dan kredit dalam struktur akuntansi, sistem penjurnalan dan pengelompokan akun dan sejenisnya bukanlah hal yang mutlak sebagai sebuah konsep, bahwasanya akuntansi Islam harus berbeda dengan akuntansi kapitalisme dan sosialisme.

Substansi perbedaan akuntansi Islam terdapat pada interpretasi substansi nilai doktrinal terhadap konsepsi teks (laporan keuangan), bahwa apakah ketika menggunakan sistem pembukuan berpasangan (*double entry*)

⁴³Baqir merangkai penjelasan terkait dengan kebijakan-kebijakan pada masa Rasul yang kadang cenderung sosialistik kadang pula memperlihatkan sisi kebebasan ekonomi (kapitalisme) sebagai sebuah fenomena. Kebebasan ekonomi yang terjadi pada masa Rasul, secara doktrinal berbeda dengan kebebasan dalam doktrin kapitalisme. Kebebasan ekonomi pada kondisi historis tersebut mengikuti kecenderungan alamiah kondisi hidup masyarakat yang masih cenderung dengan keterbatasan daya dan kekuatan eksploitasi. Sehingga ditetapkannya dengan sebuah fakta bahwasanya individu yang mengeksploitasi secara bebas tidak meyakinkannya sampai pada tahap yang merusak. Berbeda ketika makna kebebasan dikontekskan dengan kondisi lazimnya hari ini, kebebasan ekonomi justru akan mengancam kehidupan manusia seiring munculnya sarana-sarana manusia untuk mengeksploitasi berupa teknologi. Di samping itu, kebebasan tersebut tidak seperti kebebasan kapitalisme yang bersifat naturalistik (non-intervensi). Lihat Baqir, *Iqthisadhuna (terj)*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 137-141.

atau *single entry* sebagai sebuah kebutuhan praktis telah mengakomodir unsur nilai yang menjadi doktrin Islam atau tidak? Akuntansi Islam tidak menganggap fundamental model struktur akuntansi yang pada hakikatnya tidak memengaruhi pembentukan nilai-nilai Islam. Hal tersebut adalah bagian dari kondisi yang bersifat variabel secara geopolitik, geografis dan pertimbangan kebutuhan praktis lainnya. Hal ini merepresentasikan sisi aksiden akuntansi Islam, yang meniscayakan perbedaan (kemajemukan). Sisi aksiden inilah yang menegaskan sisi kebenaran Islam yang majemuk.

3. Aksiden dan Peran Kearifan Lokal dalam Penggagasan Akuntansi Islam

Aksiden sebagai sebuah tampakan seperti makna cabang (*furu'*) dalam syariat fikih, yang dibatasi oleh unsur ruang dan waktu. Hal ini sejalan dengan asas kemudahan dalam Islam yang terakomodir sebagai prinsip dalam akuntansi Islam. Sebagaimana Islam, akuntansi Islam menolak penyeragaman formal sebagai aksiden, sebab aksiden adalah bagian dari produk budaya secara lokalitas.

Kebenaran akuntansi Islam sebagai sebuah konsep sangat tergantung dari kebenaran dan ketepatan akuntan dalam mengungkap tabir makna hakiki konsepsi Islam sebagai doktrinal nilai, peran akal dan intuisi dalam memahami sumber hukum Islam memainkan peran signifikan. Proses ini dikenal sebagai proses *ijtihad*. Kesalahan konsepsi doktrinal akan mengakibatkan kesalahan dalam mengkonsepsi dan menjalankan akuntansi yang sesuai dengan Islam.

Begitupun halnya ketepatan dalam membedakan dan mengintegrasikan konsepsi substansi dan aksiden dalam akuntansi Islam. Makna substansi dan aksiden tidak dapat lepas dari peran lokalitas budaya dan pola hidup serta standar hidup masyarakat yang bersangkutan. Hal ini seperti halnya dalam syariat berpakaian, Islam hanya mengajarkan makna substansi, tetapi aksidensial atasnya merupakan bagian dari produk budaya masyarakat setempat.⁴⁴

⁴⁴Upaya penyeragaman membawa kekuasaan yang mengarah pada penindasan. Dalam konteks aksiden kebenaran Islam harus dipersepsi majemuk dalam hal ini merujuk pada budaya. Akuntansi Islam harus tampil secara dialektis dengan budaya masyarakat. Seperti halnya dengan akuntansi, dalam konteks berpakaian misalnya kadang masyarakat Muslim tidak bisa membedakan yang mana nilai Islam dan yang mana budaya Arab sebagai bangsa. Sehingga dalam beberapa konteks pendakwaan

Islam bukanlah realitas nilai yang harus dipertentangkan dengan budaya. Sebab pada dasarnya dalam rentang sejarah telah terjadi proses integratif. Bukankah firman Tuhan yang disebut sebagai “wahyu” untuk turun ke bumi harus diterjemahkan dalam bahasa? Dan realitas bahasa adalah produk budaya manusia. Oleh karenanya akuntansi Islam sebagai ideologi bukan hadir untuk menggusur budaya lokal sebagai nilai melainkan berbaur tanpa harus kehilangan identitas nilainya yang substansial sebagai pedoman manusia.⁴⁵

Seiring dengan semakin ekspansifnya korporasi memasuki daerah-daerah lokalitas masyarakat, sehingga pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai *stakeholders* harus menyesuaikan secara lokalitas. Islam sebagai ajaran emansipatoris harus diterjemahkan dalam akuntansi berupa kesederajatan dalam mengakses informasi akuntansi, refleksi sebagai upaya dalam memasyarakatkan akuntansi yang selama ini cenderung elitis dan berbasis kelas.

D. Ringkasan

Perbedaan akuntansi Islam dengan akuntansi kapitalisme maupun sosialisme terletak pada akar paradigma (pandangan dunia) masing-masing. Disebabkan Islam bersandar pada realitas transendental, maka secara ontologis hakikat paling dasar untuk memahami akuntansi Islam adalah mengurai makna Tuhan dalam akuntansi. Upaya ini merupakan “pensucian akuntansi” (*syahadat* akuntansi) dengan menempatkan “pembebasan” sebagai puncak perjalanan spiritualitas, seperti halnya makna *mi’raj* Rasul yang puncak penyempurnaan risalah ketika Ia turun “membebaskan” manusia dari belenggu ketidakadilan.

Islam kadang justru dominan adalah bentuk ekspansi budaya Arab.

⁴⁵Salah satu corak akuntansi Islam yang hadir hari ini (di Indonesia) dalam konteks bahasa, banyak yang menggunakan bahasa Arab yang kadangkala justru menyusahkan pemakai laporan keuangan, sehingga tidak terpenuhi asas kemudahan, dan terkesan cukup bias kelas (elitis) tidak menyentuh semua lapisan *stakeholders*. Realitas bahasa adalah budaya yang bersifat aksiden, indikator sebuah akuntansi Islam tentu sangat sempit bahkan tidak memiliki relevansi yang jelas ketika ia hanya direduksi secara simbolik lewat penggunaan bahasa-bahasa. Sebab Islam itu pada hakikatnya adalah nilai. Dan bahasa hanyalah alat untuk mengungkap makna dari nilai itu sendiri. *Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu (QS Al-Baqarah [2]: 282).*

Persaksian Tuhan dalam akuntansi menggiring kesiapan untuk menerima segala ketentuan Tuhan tentang fungsi akuntansi yang berperan dalam membebaskan rakyat-rakyat tertindas (*mustada'afin*) dalam perannya sebagai *instrument* ideologis dalam memetakan pendistribusian hak yang adil berdasarkan konsepsi “keadilan” dalam Islam.

Tabir Tuhan tersingkap pada wajah orang-orang tertindas (*mustada'afin*), para buruh, pekerja, fakir, miskin, “budak”, sebagai korban ketidakadilan sistem, yang “terampas” hak-haknya. Maka akuntansi Islam (pembebasan) hadir untuk mendistribusikan hak-hak yang “terampas” tersebut. Oleh karenanya akuntansi Islam pembebasan menganggap signifikan untuk mendefinisikan kembali apa hakikat dan ruang lingkup akuntansi Islam sesungguhnya. Landasan pokoknya adalah Al-Qur'an sebagai teks (wahyu) meniscayakan akuntansi Islam pada dasarnya adalah sebuah doktrinal bukan teoretis (saintis). Objek kajian akuntansi Islam terletak pada nilai-nilai (keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain) dalam menjawab persoalan hidup manusia, bukan pada fakta alam konkret sebagai sebuah teori.

Realitas akuntansi Islam secara doktrinal harus berdialog dengan fakta (teori), oleh karenanya perbedaan akuntansi Islam, kapitalisme dan sosialisme terletak pada perbedaan doktrinal bukan teoretis. Doktrin adalah substansi sedangkan teori adalah aksiden. Pokok kajian akuntansi Islam yang membedakan dengan kapitalisme, sosialisme adalah kajian substansi (doktrinal), sedangkan aksiden (tampakan) bersifat relatif yang memungkinkan untuk sama secara tampakan ataupun berbeda.

4



Teori Sistem dan Akuntansi Islam: Suatu Tinjauan Metodologis

“.....

*Sebagian Bani Adam merupakan anggota tubuh sebagian yang lain
Karena dalam penciptaannya, mereka berasal dari jauh yang sama
Jika pada suatu saat sebagian anggota tubuh itu merasa sakit
Maka anggota-anggota yang lain pun akan merasakannya
Kau yang tidak ikut susah ketika melihat kesusahan orang lain
Maka kau tidaklah layak menyandang nama sebagai anak Adam*

(Bait syair Sa'di) dalam Muthahhari (1995: 237)

.....”

A. Teori Sistem: Integrasi Subsistem dalam Perspektif Makro

Akuntansi yang berangkat dari asumsi nilai, meniscayakan relevansi pengaruh ideologi dalam pengkonstruksian teori. Ideologi dalam kenyataannya adalah seperangkat nilai yang mengarahkan manusia dan kehidupan secara kompleks menuju suatu tatanan nilai sebagai tujuan, mencakup keseluruhan struktur, bahkan mengatur relasi struktur dalam suatu sistem yang kompleks.

1. Definisi Sistem (*Systema*)

Istilah sistem berasal dari kata Yunani "*systema*", dalam Amirin (2010: 1) "*systema*" memiliki pengertian, yakni:

- a. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*Whole compounded of several parts*) (Shorode dan Voich, 1974: 115).
- b. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*An organized, functioning relationship among units or components awad*).

Dengan kata lain "*systema*" mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*) yang saling terorganisasikan, bersifat organik yakni saling berhubungan dalam satu kesatuan yang kompleks (*complexity*).

Dalam mengkaji objek dengan pendekatan sistem (*system approach*) berangkat dari asumsi bahwa realitas adalah bagian yang kompleks terhubung satu sama lain membentuk model jaringan atas interaksi (pertukaran) satu sama lain yang menunjang berlangsungnya proses sistemik. Campbell (1979) menambahkan suatu penekanan bahwasanya sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem (Amirin, 2010: 90).

Shrode dan Voich memetakan substansi makna sistem setidaknya terdiri dari: *Pertama*, merupakan himpunan bagian-bagian. *Kedua*, bagian-bagian itu saling berkaitan. *Ketiga*, masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama satu sama lain dan saling mendukung, semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama dan tujuan sistem. *Keempat*, terjadi dalam lingkungan yang rumit dan kompleks (Amirin, 2010: 10).

Dalam mencapai tujuan sistem maka peran subsistem (unsur atau komponen) yang terangkai dalam sub-subsistem yang tak terbatas saling menopang secara fungsional struktural, semua komponen saling bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan sistem yakni pencapaian nilai. Ketidakseimbangan dalam sistem terjadi manakala subsistem yang menopang sistem terjadi *disfungsional* baik berupa konflikual (pertentangan) yang bersifat destruktif maupun pergeseran peran dan fungsi di luar dari koridor nilai sistem.

2. Integrasi Sistem (*Wholism*) dan Teorisasi Akuntansi Islam

Wholism sebagai kebulatan dalam keseluruhan yakni melihat sistem sebagai satu kesatuan keseluruhan yang bulat yang memiliki fungsi yang berbeda, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian yang bersifat mekanik. Asas kebulatan sistem menjadikan seluruh subsistem sebagai input dasar yang diolah oleh sistem menghasilkan *output* sebagai sebuah mata rantai nilai. Dalam hal ini lingkungan alam dan masyarakat secara umum merupakan subsistem yang memiliki hak atas nilai yang dihasilkan oleh entitas masyarakat ekonomi sebagai bagian dari mata rantai nilai.

Proses transformasi dalam sistem merupakan media dalam mencapai tujuan sistem (nilai). Proses transformasi sistem merupakan perangkat kerja yang saling berinteraksi dalam mengolah *input* menjadi *output* dalam suatu mata rantai nilai yang secara doktrinal terikat oleh unsur-unsur ideologis. Dalam entitas bisnis aktivitas transformasi sistem berakar pada pengolahan sumber daya alam untuk mencapai nilai dengan melibatkan seluruh komponen subsistem di antaranya adalah manusia yang terdiri dari manajemen, buruh, karyawan dan masyarakat luas bahkan pesaing (kompetitor) serta lingkungan sosial masyarakat dan alam.

Proses ini merupakan bagian dari proses produksi, distribusi dan konsumsi, dengan menempatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan alam sebagai tujuan sistem. Proses reproduksi nilai dalam mata rantai nilai dalam masyarakat ekonomi bersifat konstruktif, hal ini merupakan bagian dari sisi doktrinal sistem yang mengakomodir unsur nilai dalam memandang proses pertukaran yang terjadi oleh subsistem dalam jaringan sistem yang kompleks.

3. Anomali dan *Disfungsional* Sistem

Ketidakseimbangan sistem terjadi ketika komponen sistem sebagai sebuah struktur mengalami anomali baik berupa *disfungsional* maupun marginalisasi. Dalam entitas bisnis sebagai representasi masyarakat ekonomi peran buruh, karyawan, manajemen, alam, masyarakat, negara bahkan kompetitor merupakan struktur yang menopang sistem. “Sakitnya” buruh akan memengaruhi kelangsungan hidup sistem yang lebih luas seperti entitas bisnis.¹ Ataupun rusaknya ekosistem alam memengaruhi proses kehidupan masyarakat ekonomi.

Proses humanisasi dan penempatan nilai sesuai dengan hak merupakan upaya dalam mempertahankan berjalannya sistem. Pertentangan yang selama ini dimapankan oleh struktur akuntansi kapitalisme dalam memandang *stakeholders* sebagai subsistem memengaruhi secara destruktif ketercapaian sistem. Betapa ironis ketika akuntansi kapitalisme justru memapankan pertentangan kelas yang fatal dalam entitas bisnis antara buruh dan majikan (pemodal). Antara alam dan lingkungan sosial harus dipertentangkan dengan entitas bisnis di tengah mandulnya kedaulatan negara sebagai bagian dari sistem yang tertinggi. Dan yang paling menonjol adalah pertentangan antara kompetitor seolah-olah dilegitimasi secara nalar dan moral dalam kerangka determinis sebagai keniscayaan. Akibatnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan sistem menciptakan gejala dominasi yang berujung pada monopoli dengan meninggalkan efek sosial yakni ketimpangan sosial.

B. Akuntansi Islam sebagai Bagian dari Sistem yang Kompleks

Akuntansi secara hierarkis merupakan komponen dari struktur yang kompleks, bagian dari tatanan masyarakat secara ekonomi maupun politik. Gambling dan Karim (1986) memandangnya sebagai sebuah relasi *colonial* yang ia sebut sebagai model *colonial*. Model *colonial* menggambarkan realitas

¹ Seperti halnya dalam suatu analogi *butter fly effect* “hentakan sayap seekor kupu-kupu di suatu benua dapat mengakibatkan bencana tsunami di benua yang lain”. atau “hentakan kaki seekor semut dapat mengakibatkan gempa di benua yang lain”. Menandakan bahwa realitas ini kompleks dan tidak terpisah satu sama lain. Sejarah dunia mencatat sepuntung rokok yang membakar suatu demonstran mengakibatkan membakar negara dalam bentuk revolusi (revolusi Tunisia, 2010).

akuntansi sebagai sebuah jejaring dari realitas sistem politik dan sistem ekonomi dalam perspektif makro. Akuntansi tidak dapat lepas bahkan merupakan sebuah turunan nilai dari sistem ekonomi suatu tatanan politik.

Masyarakat yang hidup dalam sistem ekonomi kapitalisme akan menganut model akuntansi kapitalisme. Begitupun sistem sosialisme akan menciptakan akuntansi sosialisme. Demikian juga akuntansi Islam harus diterjemahkan dalam skala makro yakni bagian dari sistem ekonomi yang secara politik menjadi sisi doktrinal Islam dalam mengatur filosofi hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, posisi akuntansi Islam adalah bentuk penjabaran teoretis maupun praktis atas sistem ekonomi dalam Islam. Makna keadilan² dalam Islam merupakan landasan filosofis akuntansi Islam. Suatu tatanan masyarakat dapat dilihat sistem nilai yang dianut salah satunya adalah melihat corak dan model akuntansi yang berlaku. Akuntansi adalah gambaran realitas ekonomi, sosial budaya dan politik suatu negara. Begitupun sebaliknya, akuntansi bukan hanya gambaran realitas melainkan berperan dalam menciptakan realitas baru.

Dengan demikian, akuntansi adalah struktur yang harus bertanggung jawab atas kondisi sosial masyarakat. Fenomena ketimpangan sosial yang begitu ironis serta ketidakseimbangan ekologis dalam kehidupan merupakan hasil konstruksi sosial dalam diri akuntansi sebagai struktur bagian dari sistem. Hal ini menggambarkan adanya sebuah anomali yang kritis di tubuh akuntansi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Struktur akuntansi yang menentukan pemetaan hak dalam suatu masyarakat ekonomi, menentukan pola relasi kerja antara semua *stakeholders*.

Krisis ekologis sebagai cerminan kerakusan institusi bisnis dipengaruhi oleh struktur akuntansi dalam konteks *instrument* dan pengaturan-pengaturan teoretisnya dalam struktur teori. Pola marginalisasi dalam masyarakat lahir secara kausalitas atas marginalisasi konsepsi di tubuh akuntansi. Begitupun sebaliknya unsur pembebasan secara sosial ditentukan oleh kerangka konsepsi yang dimiliki oleh akuntansi Islam pada khususnya.

²Keadilan dalam akuntansi Islam bermakna pendistribusian hak sebagaimana konsepsi “hak” dalam Islam. “*Sempurnakan takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya....*” (QS Asy-Syu’araa [26]: 181-182).

C. Strukturasi Negara dan Akuntansi Islam: Integrasi Agen dan Struktur

Konsepsi agen pada umumnya merujuk pada tingkat mikro sebagai aktor. Menurut Burns pengertian agen dapat meliputi individu, kelompok maupun organisasi (Ritzer, 2003: 506). Sedangkan konsep struktur biasanya mengacu pada struktur sosial yang berskala besar (makro). Jadi baik agen maupun struktur dapat mengacu pada fenomena tingkat mikro dan makro. Agen merujuk pada fenomena tingkat mikro sedangkan struktur mengacu pada struktur yang lebih makro.

Akuntansi Islam dalam entitas bisnis secara mikro memiliki relasi dengan struktur yang lebih kompleks (makro) yakni negara. Akuntansi Islam tidak dapat dipandang sebagai subsistem yang terlepas secara politik dari sistem ekonomi secara makro, sebagaimana ekonomi dalam Islam memandang peran negara sangat fundamental dalam perekonomian untuk menjamin berlangsungnya proses adaptasi hukum Islam secara normatif.

Giddens yang memperkenalkan teori strukturasi dalam menjelaskan keterhubungan agen dan struktur dalam pola integratif dengan menempatkan relasi agen dan struktur bersifat mutual. Dengan demikian, agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah satu sama lain. Akuntansi dan sistem ekonomi negara adalah realitas yang bersimbiosis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Model relasi tersebut dalam kerangka sistem menempatkan keadilan sebagai tujuan sistem yakni terciptanya harmonisasi di antara komponen (*stakeholders*) yang bersandar pada terciptanya kesejahteraan. Akuntansi Islam dan negara memainkan peran yang signifikan, disebabkan karena dua entitas tersebut memiliki fungsi distributif yang sama dalam menentukan dan mendistribusikan hak dan kewajiban komponen atau unsur sistem yang lain (*stakeholders*).

Dengan kerangka strukturasi tersebut maka posisi agen dan struktur bukanlah merupakan dua kumpulan fenomena biasa yang berdiri sendiri (*dualism*) dan mekanis, bukan pula berdiri di atas relasi *oposisi biner* (pertentangan), tetapi mencerminkan dualitas yang bersifat mutual dialektis dan organis. Peran negara ikut diperankan oleh institusi bisnis atas dasar akuntansi Islam secara doktrinal. Isu lingkungan (kesejahteraan ekologis) dan kesejahteraan sosial berupa terdistribusinya hak secara

adil merupakan dua objek kajian yang menjadi domain antara negara dan akuntansi Islam. Kesejahteraan ekologis, dan sosial adalah dasar pencapaian sekaligus manifestasi kesejahteraan spiritual. Dalam artian bahwa Islam mempersepsi realitas alam baik yang bersifat ekologis maupun sosial bersatu padu dengan realitas spiritualitas. Tidak ada keterpisahan di antaranya, tidak pula ia bertentangan.

Pertentangan Agen dan Struktur dalam Akuntansi Kapitalisme

Berbeda dengan konteks yang mapan hari ini, dalam struktur akuntansi konvensional (kapitalisme), relasi yang terbangun antara agen dan struktur bersifat temporer. Disebabkan karena penjabaran sistem kapitalisme yang berpangkal pada *laissez faire* (kebebasan pasar) menolak model intervensi negara dalam perekonomian. Akibatnya akuntansi kapitalisme dan negara tidak memiliki relasi konstruktif melainkan mandiri bahkan bisa saja bertentangan (konfliktual). Doktrin kapitalisme³ yang bercorak kepentingan keuntungan pemodal kadang harus berbenturan dengan tujuan negara yang bersifat sosial.⁴

Hubungan perekat antara institusi bisnis dan negara sangat lemah, cenderung diikat oleh ikatan formal saja yang cenderung pragmatis yakni dengan memosisikan entitas bisnis sebagai “pembayar pajak” saja kepada negara. Seperti kata Friedman (1970) bahwa fungsi sosial maupun ekologis

³Filosofi yang mendasari sistem kapitalisme adalah menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan segalanya termasuk sosial. Kesejahteraan dipahami sebagai produk dari kebebasan individu yang lahir secara tidak sengaja (*invisible hand*) akibat cinta individu terhadap dirinya sendiri. Seseorang yang berbelanja di toko bukan untuk kepentingan si pemilik toko, melainkan murni untuk dirinya sendiri, pada saat itu kepentingan individu lain akan terpenuhi juga yakni pemilik toko. Doktrin kapitalisme sangat dipengaruhi oleh cara berpikir paradigma Newtonian dengan menempatkan individu sebagai atom sosial (atomistik), bahkan kapitalisme menganggap asas filosofi terbentuknya negara bukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, tetapi untuk mengadministrasikan hak milik individu (John Locke). Kesejahteraan adalah milik manusia secara individu, yang mana individu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, kesejahteraan tersebut lahir dari kompetisi yang bebas. Di sinilah letak kadang berbenturan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara (*oposisi biner*).

⁴Kasus PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Riau baru-baru ini (November 2012) cukup hangat dibicarakan akibat proyek bioremediasi atau pemulihan lingkungan dari kondisi tanah yang terkena limbah akibat eksplorasi minyak yang dilakukan PT CPI ternyata terkuak oleh kejaksan sebagai fiktif. Yang lebih ironisnya biaya pemulihan lingkungan (*cost recovery*) itu ditanggung oleh negara setiap tahun, diperkirakan tingkat kerugian negara mencapai Rp 200 miliar.

bukanlah merupakan fungsi yang harus dijalankan entitas bisnis, sebab tanggung jawab tersebut adalah kewenangan dan tugas negara.⁵

Atas dasar “pajak” seolah-olah menjadi semiotika “penebusan dosa” entitas bisnis kapitalisme untuk tidak memainkan peran sosial dan lingkungan dengan melimpahkan secara penuh kepada negara atas nama “pajak” sebagai penggugur kewajiban. Sehingga tidak dapat dinafikan ketika relasi antara entitas tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri bahkan muncul dengan pola konflik berupa pertentangan atas dasar perbedaan kepentingan.

Model pertentangan yang terjadi pada kenyataannya telah menjadikan negara sebagai struktur harus tunduk pada kuasa modal. Gejala feodalisme kemudian muncul dengan wajah entitas bisnis yang memiliki kuasa dalam “mendikte” negara. Pundi-pundi APBN diisi secara politik dari entitas bisnis yang menjadi simbol *survival*-nya negara. Di sinilah letak ketika negara secara politik yang memiliki kekuasaan politik harus memberikan legitimasi hukum⁶ dengan cara “dipaksa” untuk praktik eksploitasi entitas bisnis yang tak terkendali. Relasi yang berlangsung secara dominatif mencitrakan kedaulatan negara yang tergadai dan terpasang oleh kekuasaan pemodal.⁷

⁵Bukan hanya Milton Friedman yang menggagas agar perusahaan tidak seharusnya bertanggung jawab secara sosial. De George, Jam Mickie menganggap *immoral* bisnis dalam artian bisnis dengan pertanggungjawaban moral tidak memiliki keterkaitan, ia menganggap aktivitas bisnis hanya berperan memperbesar “kue” akumulasi keuntungan, sedangkan fungsi pendistribusian adalah fungsi politik (negara). Lihat: Alois, *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 55-58.

⁶Dalam kenyataannya di Republik ini, praktik eksploitasi tak terkendali yang dilakukan oleh korporasi terkesan dilegitimasi oleh negara dalam bentuk undang-undang meski harus menabrak Undang-Undang Dasar (UU 1945 Pasal 33). Seperti munculnya kebijakan Surat Kuasa Pertambangan (SKP), HPH (Hak Pengelolaan Hutan) atau HTI (Hutan Tanaman Industri) yang menciptakan gejala alam seperti banjir bandang di Wasior yang baru-baru ini menelan korban. Dan juga misalnya lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, memberi legitimasi komersialisasi air di Republik ini mengakibatkan krisis air bersih ketika sumber air masyarakat kering dan aktivitas petani pun terbengkalai (kasus Kubang Jaya, Babakan Pari, Kabupaten Sukabumi, dan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dan lain-lain) (Lihat: www.pasulogandasasmita.com). Tidak sedikit konflik rakyat dan korporasi berujung pada tragedi kemanusiaan (kasus mesuji) dan lain-lain.

⁷Realitas kekuasaan politik yang dipasung oleh kekuasaan modal menegaskan aktualitas teori pertentangan kelas Marx, yang menganggap bahwa kekuasaan baik institusi ataupun birokrasi negara pada hakikatnya hanyalah representasi dari para penguasa modal (*borjuasi*), sebab menurut Marx birokrasi termasuk negara merupakan produk dari pertentangan kelas, di mana dalam sistem kapitalisme kelas *borjuasi* yang

D. Penerapan Akuntansi Islam dalam Tinjauan Politik

Karena akuntansi Islam berakar kuat pada kaidah sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi dalam Islam memosisikan peran negara secara politik baik dalam rangka menjaga kestabilan pasar lewat pengaturan produksi maupun konsumsi sebagai bagian berjalannya proses syariah dalam perekonomian. Begitupun halnya akuntansi Islam, akuntansi adalah simbolitas sistem yang terkonsepsi dari realitas sosial, ekonomi dan politik. Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari unsur negara sebagai bagian dari mutualisme dialektis dalam menjalankan peran distributif yang sama untuk menegakkan keadilan. *Baitul Mall* dalam sejarah Nabi adalah bentuk konkret simbiosis antara akuntansi dan negara dalam menegakkan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan realitas penerapan akuntansi Islam khususnya di Indonesia, penerapan akuntansi Islam tidak ditopang oleh kekuasaan secara yuridis, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada agen (aktor) sebagai sebuah pilihan yang bersifat *vouluntarism*. Bahkan *survival*-nya organisasi yang menerapkan akuntansi islam kadang harus terpentak dari arus kompetisi baik kompetisi antara organisasi konvensional (kapitalis) bahkan harus terjebak dengan kompetisi antara organisasi syariah sendiri. Hal ini cukup bertentangan dengan doktrin Islam dalam kehidupan sosial. Filosofi masyarakat dalam Islam bersifat *cooperative* bukan *kompetitif*.⁸

menang, sehingga cenderung memapankan kekuasaannya lewat kekuasaan politik. Untuk konteks Indonesia cukup relevan dengan hasil penelitian diungkap *Kompas* (2011) mengungkapkan 44,65% wakil rakyat (politisi) sebagai pemegang kendali kekuasaan politik adalah pengusaha, jadi pengusaha bertindak sebagai penguasa. Lihat: Muhammad Ruslan, 2011, opini, *Indonesia Bukan Milik Kita, tapi Milik dia...?* (tidak diterbitkan).

⁸*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara* (QS Al-Hujuraat [49]: 10). Dan hadis Nabi Saw., diriwayatkan dari Amirul mukmini Ali as.: Ada seseorang pria datang kepada Nabi Saw. dan berkata, “wahai Rasulullah! Tunjukkan padaku jalan yang dengannya Allah bisa mencintaiku dan orang-orang juga mencintaiku, harta bendaku dapat bertambah dan tubuhku tetap sehat dan hidupku akan panjang serta Allah menunggikanku bersama di akhirat nanti” Nabi suci Saw. menjawab: Ada enam keinginan yang menuntut tiga keutamaan. Jika engkau ingin Allah mencintaimu maka bertakwalah kepada-Nya dan jagalah dirimu dari berbuat dosa dan jika engkau menginginkan orang-orang mencintaimu, maka bersahabatlah dengan mereka dan berbuat baiklah kepada mereka, janganlah cemburu dengan milik orang lain dan janganlah bersaing di dalamnya, jika engkau mendambakan bahwa harta bendamu bertambah, maka bayarlah zakat dan jika engkau menginginkan tubuhmu sehat, maka berilah sedekah dan jika engkau berhasrat berumur panjang, maka peliharalah

1. Tenggelamnya Agen dalam Struktur: Refleksi Kedaulatan Struktur

Akuntansi Islam yang berorientasi pertanggungjawaban dengan penekanan pada asas distributif (sosial) harus berkompetisi untuk mempertahankan hidup dengan organisasi kapitalisme yang berorientasi akumulasi kekayaan. Di sinilah letak ketika kedaulatan struktur memaksa agen sesuai keinginan struktur. Dikotomi di antara keputusan untuk mendistribusikan nilai (keuntungan) terbentur dengan keputusan untuk menginvestasikan dalam bentuk modal atau penguasaan segmen pasar untuk kepentingan akumulasi laba karena kuatnya pengaruh kompetisi pasar.

Model kompetisi yang tak berimbang, pada realitasnya telah mengubah haluan organisasi “syariah” yang seharusnya menjalankan fungsi keadilan harus terjebak dalam ranah kapitalistik atas dasar kelangsungan hidup organisasi. Realitas ini telah menggiring organisasi syariah “berwajah kapitalistik” disebabkan karena struktur sosial yang membentuknya. Struktur sosial berperan dalam “memaksa” organisasi “syariah” untuk berkarakter kapitalis atas dasar kelangsungan hidup organisasi, sebagaimana sistem sosial memiliki peran yang besar dalam membentuk aktor (agen). Tarik menarik antara aktor dan struktur pada kenyataannya telah menggilas aktor sehingga terjadi persegeran makna atas simbol. Ketika labelisasi “syariah” diproduksi sebagai produk oleh organisasi kapitalisme⁹ atas dasar persaingan memperebutkan pangsa pasar untuk kepentingan akumulasi kekayaan sebagai asas kinerja untuk kelangsungan hidup organisasi (*going concern*).

Instrument-instrument akuntansi Islam kemudian tereduksi secara formal tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tapi menjadi alat untuk kepentingan pasar di tengah pusaran

silaturahmi (Shirazi, 2005: 77). Allah hanya memerintahkan untuk berkompetisi untuk kebaikan (*fastabiqul khairat*) bukan berlomba-lomba untuk saling menguasai atas nama materi.

⁹Semakin menjamurnya organisasi syariah yang dibentuk oleh organisasi konvensional, menyebabkan tumpang tindih peran antara pembebasan atau akumulasi kekayaan. Misalnya perbankan syariah hari ini banyak di antaranya hanya merupakan perpanjangan tangan dari perbankan konvensional, yang membedakannya tiada lain adalah simbolitas saja. Di sinilah letak ketika peran organisasi syariah kemudian “mandul” untuk mencapai tujuan sosial. Maka tidak mengherankan ketika pertumbuhan organisasi syariah tidak diikuti dengan pengurangan ketimpangan sosial.

kompetisi yang begitu dahsyat. Makna Islam sebagai “pembebas” ditenggelamkan atas nama kelangsungan usaha (*going concern*). Maka yang terjadi adalah formula akuntansi yang berwajah *shaleh* berkarakter “tiran”. Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam organisasi syariah harus (baca: dipaksa) untuk terjebak pada pola-pola kelas yang mengakomodir kepentingan segelintir kelas yang memiliki kekuasaan modal.¹⁰

2. Akuntansi Islam dan Integrasi Mikro-Makro: Suatu Perspektif

Diibaratkan sebuah pohon akan tumbuh sangat dipengaruhi oleh lahan tempat ia tumbuh. Akuntansi Islam tidak cukup hanya dipandang secara mikro dalam entitas bisnis yang sempit, melainkan harus dipandang secara lebih luas (makro) berupa keselarasan antara semua komponen sistem antara satu sama lain. Akuntansi bermodel sosialis tidak akan hidup di lahan kapitalisme, begitupun sebaliknya. Seperti halnya kontradiksi-kontradiksi serta benturan akan terjadi ketika ruang penopang sistem *disfungsional* satu sama lain.

Pola perumusan dasar akuntansi Islam tidak dapat didasarkan pada perspektif mikro yang cenderung parsial yakni merujuk pada entitas bisnis secara sempit. Melainkan harus dilihat dalam kerangka sistem yang lebih kompleks dalam hal keterkaitan antara seluruh komponen satu sama lain. Akuntansi Islam tidak hanya mengurus rumah tangga produksi secara individual, melainkan mencakup keseluruhan rumah tangga produksi, keterkaitan antara satu dengan yang lain dalam tingkat negara sebagai satu kesatuan sistem. Ruang lingkup akuntansi Islam mencakup relasi antara satu sama lain dalam sistem. Islam dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah sistem bukan sebagai sebuah ajaran yang sempit dan parsial, yang tereduksi pada unsur moralitas saja yang hanya mengatur skala subjek secara individual (*personal*).

Ketika akuntansi Islam hanya dipandang satu sudut moral saja dengan misalnya lahirnya konsep biaya sosial yang dikeluarkan entitas bisnis, maka

¹⁰Sebut saja sistem *collateral* dalam perbankan konvensional juga diterapkan pada perbankan Islam. Ketika sistem penyaluran kredit berdasarkan kriteria kepemilikan kekayaan yang dimitologikan sebagai “agunan” yang seolah-olah menjadi syarat utama proses distribusi modal, yang menciptakan perspektif kelas. Maka organisasi syariah pun dipasung untuk segelintir masyarakat yang memiliki kuasa atas modal, peran untuk menjalankan fungsi pembebasan pun redup bahkan hilang oleh proses “kapitalisasi agama” untuk kepentingan laba.

dalam hal ini secara aksiden tidak ada bedanya dengan model akuntansi kapitalisme. Evolusi perkembangan kapitalisme semakin menemukan bentuknya yang baru dengan menampilkan tampakan-tampakan yang lebih humanis. Bukankah kapitalisme sebagai sistem dalam gagasan Weber justru berkembang sebagai akibat pengaruh etika (protestan)? Kapitalisme tidak selamanya dibentuk oleh faktor produksi yang menjadi landasan seperti dalam teori Marxisme, melainkan direproduksi oleh agama lewat ajaran etika. Perkembangan terakhir kapitalisme sebagai sebuah sistem dengan lahirnya *neocapitalism*, ketika wajah kapitalisme yang baru sudah terpoles dengan kesan humanistik, hal ini menginspirasi lahirnya *social welfare* (Chapra, 2000) dalam Harahap (2001).

E. Kedaulatan Negara: Refleksi Kedaulatan Akuntansi

Dalam kerangka ideologis sebagai sebuah sistem, Islam memandang relasi akuntansi dengan negara cukup erat. Sebagaimana eksistensi akuntansi hadir untuk memperkuat sistem ekonomi sebagai konstruksi ideologi. Dan sistem ekonomi adalah bagian dari kedaulatan negara secara politik dan makro, sebab kebijakan ekonomi adalah bagian dari kebijakan politik (ekonomi politik). Akuntansi pada hakikatnya memiliki *power* untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik keputusan ditingkatan mikro sampai tingkatan makro (negara). Ketidakberdaulatan akuntansi akan mengakibatkan keputusan negara juga tidak akan berdaulat.

Dalam akuntansi kapitalisme yang mapan hari ini (konvensional), tidak dipungkiri ketika akuntansi menjadi (*technological device*) (Suyudi, 2012), perpanjangan tangan penguasa modal (kapitalis) dalam mencapai tujuan sistem. Sebab dalam sistem kapitalisme, kesejahteraan adalah realitas yang akan lahir secara tidak sengaja (*invisible hand*) lewat keberpihakan kepada pemodal, dengan menempatkan modal sebagai faktor produksi primer untuk menciptakan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. Dominasi penguasa modal dalam akuntansi akan berbanding lurus dengan bagaimana dominasi penguasa modal secara politik.¹¹

¹¹Marx pada zamannya telah memperjelas bagaimana struktur kekuasaan termasuk politik (negara) hanyalah representasi dari kelas penguasa ekonomi (*borjuasi*). Marx dalam teorinya membagi struktur sosial dalam dua unsur yakni *basic* struktur dan *suprastruktur*. *Basic* struktur adalah faktor produksi, sedangkan *suprastruktur* adalah semua institusi baik agama, pendidikan termasuk negara. Marx menganggap pertentangan antar kaum *borjuasi* dan *proletar* yang tak kunjung henti, mereproduksi

Untuk konteks Indonesia maraknya kebijakan privatisasi¹² atau penjualan aset-aset negara adalah bagian dari bagaimana akuntansi mengambil peran-peran kapitalistik lewat pengaturan-pengaturannya baik berupa pengukuran-pengukuran maupun penilaian-penilaian dalam menyokong pengambilan keputusan.¹³ Ketika akuntansi berbasis kapitalisme, maka keputusan yang lahir pun adalah kental dengan unsur kapitalisme.

Di sinilah letak bahwa akuntansi Islam (pembebasan) hadir untuk tidak menciptakan batas demarkasi antara mikro ataupun makro. Sebagaimana akuntansi Islam bersifat normatif ideologis, maka akuntansi harus merepresentasikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi bahkan politik. Akuntansi Islam (pembebasan) menempatkan akuntansi sebagai *instrument* yang harus memiliki kedaulatan dalam penegakan nilai-nilai Islam termasuk menjaga secara normatif ideologis kedaulatan negara.

penindasan (kaum *borjuasi*) terhadap kaum *proletar* disebabkan karena penguasaan faktor produksi dimonopoli oleh *borjuasi*. Akibatnya semua struktur termasuk negara hanyalah representasi dari kaum *borjuasi*, struktur (negara) hanyalah bentukan kelas *borjuasi* (penguasa modal) dalam mempertahankan *status quo* kekuasaan. Akuntansi dalam hal ini termasuk struktur. Dalam perkembangan terakhir, Giddens semakin menegaskan lewat teori strukturasinya menganggap bahwa dunia modern ditopang oleh empat pilar yakni kapitalisme, industrialisme, kekuasaan negara, dan militer. Negara dalam posisi ini menurut Giddens hanyalah menjadi wadah dari kapitalisme, dikontrol oleh penguasa modal. Negara sebagai struktur tidak berbeda dengan akuntansi sebagai struktur, yang di dalamnya cengkeraman penguasa modal semakin kuat, langgeng dalam pola dominatif dan hegemonik.

¹²Kenyataan menunjukkan betapa besarnya kepemilikan asing terhadap seluruh sumber daya domestik, 50,5% aset perbankan dikuasai asing, pertambangan mencapai 75%, industri 69,9%, belum lagi industri pariwisata, perkebunan serta telekomunikasi, semua hampir dimiliki asing. Lihat: Muhammad Ruslan, Opini, *Kemandirian dan Konsumerisme Negara*, diterbitkan Harian Fajar (22/10/2011). Informasi terakhir (2012) minyak Indonesia dikuasai sekitar 85% oleh asing.

¹³Termasuk dalam hal ini pengambilan keputusan dalam konteks kedaulatan negara relevansinya dengan intervensi asing. Lahirnya UU akuntan publik yang memberi kebebasan akuntan asing untuk bersaing dengan akuntan lokal, rancangan undang-undang liberalisasi pertanahan, liberalisasi ke pengelolaan hutan, liberalisasi pertambangan dan undang-undang yang memberi kebebasan kepemilikan asing secara leluasa (99%) untuk mengeksploitasi tanah Indonesia, harus dipandang tidak hanya melihatnya sebagai kebijakan politik semata yang mengarah pada deregulasi, melainkan hal ini harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan akuntansi secara politik.

F. Akuntansi Islam: Upaya Penemuan Konsepsi Bukan Penciptaan

Proses perumusan akuntansi Islam tersebut sebagai sebuah doktrinal bukan teoretis seperti halnya proses perumusan ekonomi Islam yang menurut Baqir (2008: 93) melalui proses “penemuan” doktrin, bukan penciptaan sebagaimana sistem kapitalisme dan sosialisme yang membangun teori berdasarkan asumsi dalam kerangka induksi.¹⁴ Upaya penemuan doktrin berupa penafsiran atas Al-Qur’an dan sumber hukum Islam lainnya dengan pengaktualan epistemologi Islam (metafisika Islam)¹⁵ dengan pendekatan integrasi epistemologi dan keilmuan baik berupa interpretasi dengan pendekatan filsafat maupun pendekatan fikih. Sumber-sumber pengetahuan dalam Islam ditafsirkan secara *maudhu’i* dengan berpijak pada landasan filosofis atas kaidah hukum-hukum perdata dalam Islam.

Akuntansi Islam sebagai doktrinal harus ditafsirkan secara mandiri dan dialogis (berdialog) dengan realitas sebagai sebuah fakta teoretis tanpa harus terpengaruh dan terjebak oleh keambiguan realitas historis kehidupan masa lalu, sebab kadangkala cendekiawan Muslim terjebak pada kecenderungan untuk tidak membedakan makna agama yang hakiki dengan realitas “penafsiran” atas agama yang terlihat pada praktik kehidupan umat Muslim sebelumnya. Meminjam istilah Kuntowijoyo (2006: 7), hal ini menciptakan gejala “ekspansif” ketika yang “bukan agama” dianggap sebagai agama disebabkan terjadinya gejala demistifikasi sejarah dan teks. Akibatnya realitas penafsiran lebih cenderung historik dibanding ideologik.

Seperti kata Arkoun, bahwa realitas makna agama sebagai sebuah teks dapat saja terungkap pada masa akan datang yang tidak terdapat pada realitas masa lalu (Hidayat, 1998: 120). Kebenaran makna agama berlapis dan majemuk dalam relevansinya dengan subjek yang mandiri secara rasional, tidak didikte oleh sejarah. Pemaknaan teks dalam rentang sejarah tidak lebih merupakan sebuah hasil penafsiran, yang tidak lepas dari

¹⁴Kapitalisme maupun sosialisme membangun kerangka ideologis bersandar pada kerangka teoretis (alam dan fenomena sosial), dari teoretis menuju ideologis. Sedangkan Islam murni sebagai ideologis. Realitas sosial dalam Islam bukan sumber ideologi melainkan menjadi objek mengaktualnya ideologi.

¹⁵Metafisika Islam merupakan epistemologi Islam yang secara integrasi meliputi *bayani*, *burhani* dan *irfani* serta *tajribi* (teks/kitab, akal dan intuisi/hati, empirik).

potensialitas untuk menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Rentang sejarah yang kompleks dapat menciptakan bias *history* yang memengaruhi bias penafsiran disebabkan perbedaan ruang dan waktu serta perbedaan struktur sosial.

Selaras dengan pendapat Baqir yang mengatakan teks-teks lebih mampu membentuk gambaran doktrin Islam ketimbang realitas praktis (Baqir, 2008: 137). Aplikasi teks-teks hukum pada sebuah kondisi nyata tidak mungkin mampu memvisualisasikan kandungan teks secara sempurna dalam kehidupan sosial.

Upaya penemuan model akuntansi Islam yang berakar pada landasan epistemologi Islam menghasilkan model akuntansi yang bersifat normatif sebagai sebuah doktrin, bukan akuntansi yang bersifat positif sebagai sebuah sains. Secara normatif dalam tinjauan penerapannya, maka akuntansi Islam merupakan wadah dalam mengatur apa saja yang harus dilaporkan secara normatif kaitannya dengan kedaulatan akuntansi dalam mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh entitas bisnis. Bukan seperti dengan akuntansi kapitalisme yang menjadikan akuntansi sebagai “robot” (pelayan) yang tak berdaulat dikendalikan oleh pemilik modal untuk sekadar melaporkan apa yang telah dilakukan entitas bisnis yang bersangkutan dengan dalih memenuhi asas *full disclosure*.

Makna Al-Qur’an akan ditafsirkan dalam kerangka sosiologis, realitas sosial merupakan objek untuk menemukan makna solutif secara normatif dalam Al-Qur’an, khususnya dalam menjawab dan mengatur sistem dan struktur akuntansi yang relevan atas gejala sosial yang melanda umat Muslim seperti ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan, “perampasan” hak dan penindasan yang berkedok teori yang dilegitimasi secara ilmiah atas nama sains. Model-model gagasan yang kemudian hadir bersifat revolutif untuk pembebasan.

Upaya pemaknaan pada Al-Qur’an dan sumber teks-teks epistemologis Islam merupakan upaya penemuan konsepsi dengan mengaktualkan *ijtihad* sebagai metodologi doktrinal. *Ijtihad* sebagai sebuah metode akan menghasilkan pengetahuan doktrinal, bukan saintis, sebab *ijtihad* bukan metode saintis. Melibatkan proses nalar, karsa, rasa dan teks dalam menilai realitas, mengkontekstkan makna teks secara kontekstual. Sebuah konsep dikatakan benar ketika ia memiliki sifat kontekstual. Dalam posisi ini kebenaran akuntansi Islam mencakup kebenaran tekstual (wahyu) yang bersifat universal dan absolut dan kebenaran kontekstual sebagai kebenaran

relativitas dan parsial. Absolutisme dan relativitas kebenaran dalam Islam pada dasarnya manunggal, bukan realitas yang berdiri dalam demarkasi yang cenderung *oposisi biner*.

G. Ringkasan

Islam sebagaimana kapitalisme maupun sosialisme adalah ideologi. Ideologi mengatur serangkaian konsep secara menyeluruh sebagai sebuah sistem, termasuk komponen sistem dan relasi interaksi antara subsistem dengan subsistem lainnya. Proses dialogis antara Islam secara doktrinal dan fakta secara teoretis menghasilkan dua konsepsi yakni Islam “mengamini” fakta atau menolak realitas fakta secara normatif. Teori sistem dalam posisi ini memiliki relevansi dengan sisi nilai doktrinal Islam.

Akuntansi Islam (pembebasan) digagas secara integratif dalam perspektif mikro dan makro, tidak ada keterpisahan di antaranya, sebab akuntansi Islam secara ideologis adalah struktur yang hadir untuk memengaruhi realitas struktur yang lain dalam sistem yang kompleks. Negara dan akuntansi Islam memiliki proses kerja sebagai struktur untuk menentukan keadilan, sebab keduanya memiliki fungsi distributif yang sama. Hubungan antara komponen sistem (*stakeholders*) dalam entitas bisnis tidak hanya terbatas pada batas-batas internal melainkan mencakup keseluruhan eksternal, yang dipersepsi secara integratif dan mutual untuk mencapai tujuan sistem yakni kesejahteraan bersama. Disfungsionalnya subsistem akan memengaruhi sistem secara keseluruhan.

Dalam perspektif makro, akuntansi Islam tidak hanya membatasi ruang lingkup pada entitas bisnis secara mikro, tetapi juga menjelaskan bagaimana keterkaitan antara entitas mikro dengan lainnya dalam suatu sistem yang kompleks sebagai *stakeholders*. Akuntansi Islam (pembebasan) hadir untuk tidak menciptakan batas demarkasi antara mikro ataupun makro, akuntansi harus merepresentasikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Sebagaimana akuntansi adalah representasi dari sistem sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Untuk mencapai hal tersebut dalam perspektif metodologis, akuntansi Islam pada dasarnya digagas secara interpretatif dalam hal ini “ditemukan” bukan “diciptakan”. Sejalan dengan makna akuntansi Islam sebagai pengetahuan doktrinal bukan teoretis.

5



Metafisika Akuntansi Islam: Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Barat dan Epistemologi Berpasangan (*Binary Oppositions*) atau Epistemologi Manunggal

“

*Bila cinta (‘isyq) dan penalaran saling berpelukan
Akan terciptalah sebuah dunia baru
(Oleh sebab itu), bangkitlah dan bangunlah sebuah dunia baru itu
Dengan mengawinkan cinta dan penalaran*

(Muhammad Iqbal, 2008)

”

A. Epistemologi Islam: Tinjauan Dekonstruktif Terhadap Epistemologi Barat

Perbedaan mendasar teorisasi akuntansi Islam dengan akuntansi Barat terletak pada akar epistemologi sebagai bangunan dasar pengetahuan. Pertentangan atau kontradiksi pada epistemologi memengaruhi absurditas ontologis hingga menciptakan pertentangan pada realitas alam sebagai aksiologi atas turunan pertentangan epistemologi. Kontradiksi mewujudkan pada akuntansi kapitalisme yang pada kenyataannya mereproduksi secara spiral persoalan-persoalan kemanusiaan¹ dan ekologis² yang berimbas pada hancurnya tatanan kehidupan manusia. Gejala penindasan dan pertentangan sosial dengan munculnya ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat merupakan buah dari kerangka dualisme epistemologi Barat yang meniscayakan pertentangan. Realitas hadir secara paradoksial pencapaian kinerja perusahaan semakin gemilang dengan akumulasi keuntungan yang melimpah, di sisi lain menimbulkan nestapa kemanusiaan yang tak tertara.

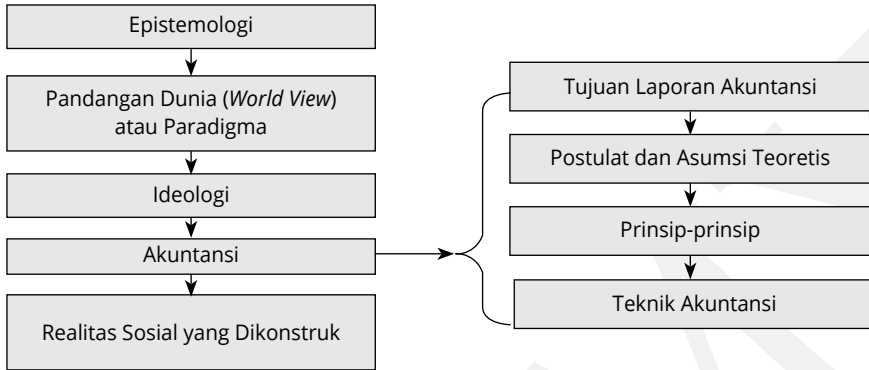
1. Hierarki Pengkonseptualisasian Teorisasi Akuntansi

Akuntansi dan korporasi adalah pihak yang tidak boleh berlepas tangan atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Akuntansi secara semiotik menggambarkan ketimpangan-ketimpangan sosial tersebut dalam struktur akuntansi di samping memperkuat dan memaparkannya. Di sinilah akuntansi sebagai teori memperlihatkan dirinya yang tidak bebas

¹WALHI mencatat, sedikitnya 291.000 ton limbah pertambangan Freeport dibuang ke sungai setiap hari. Jumlah itu menjadi lebih banyak 44 kali lipat dari sampah harian yang ada di Jakarta. Sementara kawasan yang dijadikan tempat membuang limbah Freeport mencapai 230 kilometer persegi, atau 27 kali lebih luas dibandingkan danau lumpur panas PT Lapindo Brantas yang menenggelamkan sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, sumur-sumur milik warga di Papua tercemar merkuri (ini hanya sekelumit di antara banyaknya persoalan korporasi yang sama di Indonesia, WALHI menyebut 83% kawasan Indonesia adalah rawan bencana akibat pengrusakan). Lihat juga: www.sinarharapan.com (Desember, 9/2011).

²Indonesia menjadi negara yang mengalami laju deforestasi yang cukup tinggi. Indonesia pernah menjadi negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia untuk periode 2000-2005, bahkan saat ini Indonesia terus kehilangan hutannya lebih dari 1 juta hektar per tahun. Laporan Indonesia untuk UNFCCC (2009) dan Laporan Kurva Biaya Pengurangan GRK Indonesia oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim menyebutkan bahwa emisi dari pembukaan gambut dan sektor kehutanan menempati urutan tertinggi sampai sekitar 80% dari emisi total Indonesia. Lihat: www.walhi.or.id.

nilai, sebab akuntansi terlibat dalam pengkonstruksian realitas. Berikut bagan untuk menggambarkan relitas tersebut:



Sumber: Peneliti (data diolah)

Gambar 5.1 Hierarki Pengkonseptualisasian Akuntansi

Bagan tersebut menggambarkan struktur teorisasi akuntansi berupa susunan, hierarki dari konsep menyeluruh akuntansi. Setidaknya terkandung dua makna yang terkait dengan pembahasan yakni, *Pertama*: Dari bagan tersebut akuntansi adalah turunan langsung dari ideologi, sebagaimana ideologi merupakan turunan dari epistemologi dan ontologi (pandangan dunia). Hal ini berarti teorisasi akuntansi hadir dengan membawa tujuan-tujuan ideologis yakni merupakan manifestasi ideologi untuk memaparkan ideologi di mana akuntansi tersebut dipraktikkan.³ Akuntansi dalam posisi tersebut menjadi instrumen dalam memastikan sisi nilai dari ideologi berlangsung dalam masyarakat.

Kedua: Bagaimana akuntansi sebagai disiplin ilmu dibentuk oleh epistemologi sebagai dasar untuk memengaruhi realitas sosial. Hal ini berarti kontradiksi epistemologi meniscayakan kontradiksi pula dalam teori akuntansi yang dibentuk sehingga realitas sosial pun akan hadir dalam bentuk pertentangan-pertentangan.⁴

³Seperti halnya “norma” adalah manifestasi dari “nilai” yang hadir untuk mempertahankan “nilai”.

⁴Realitas ketimpangan sosial dan maraknya kerusakan ekologis merupakan semiotika atas pertentangan sosial sebagai gambaran adanya realitas epistemologi yang rapuh (kontradiksi) dalam akuntansi. Runtuhnya epistemologi meruntuhkan pula seluruh bangunan teori, sehingga pergeseran paradigma sebagai revolusi ilmu cukup konteks dalam mengkonfrontir munculnya paradigma yang baru.

2. Kerancuan Metodologi Atas Epistemologi Barat

Baqir (1984: 99) menganggap bahwa akar persoalan sistem kapitalisme maupun sosialisme bukanlah karena faktor produksi bukan pula karena perubahan teknologi melainkan disebabkan falsafah hidup materialisme yang menjadi basis ontologi Barat. Kerancuan dasar epistemologi Barat menurut Baqir (1984: 19-37) terletak pada metodologi yang dipakai Barat dalam menggagas ilmu sosial (termasuk akuntansi) dengan mencaplok metode pengetahuan eksakta yang cenderung observasional, empirik. Akibatnya paradigma Newtonian yang bersifat atomistik pada ilmu alam diterapkan dalam ilmu sosial hingga menimbulkan banyak pertentangan disebabkan karena ketidaksesuaian antara ilmu alam dengan ilmu sosial yang bersifat dinamis. Upaya mereduksi realitas dalam kerangka atom muncul dengan wujud baru dalam ekonomi yang berwujud pada individu dan entitas bisnis sebagai atom sosial yang bergerak secara mekanik mengikuti naluri materiil. Ia adalah bagian-bagian yang terpisah satu sama lain.

Berbeda dengan epistemologi Islam yang menganggap bahwa fenomena alam (*sunnatullah*) berbeda dengan fenomena sosial. Sehingga teori sosial tidak dapat dipandang secara mekanik (atomistik). Manusia memiliki kehendak bebas yang dapat menuntun sejarah, bukan sekadar menjadi produk sejarah, di sinilah perbedaan dasar epistemologi Barat dengan Islam. Barat memosisikan pengetahuan manusia murni sebagai produk alam, sedangkan Islam memandang pengetahuan memiliki realitas mandiri yang melampaui unsur fisiologi. Terdapat eksistensi realitas yang lebih riil ketimbang materi semata.

3. Strukturalisme Transendental⁵ dan Matinya Spiritualitas Barat

Dalam Islam objek pengetahuan tidak terbatas pada fenomena indrawi, melainkan melampaui batas-batas materi (*profan*). Berbeda dengan Barat yang secara ontologi menempatkan materi sebagai hakikat ontologi, sehingga secara aksiologi seluruh bangunan nilai harus diterjemahkan secara materiil sebagai keuntungan. Meski Barat meyakini rasionalisme, tetapi rasionalisme Barat terpola dalam pola-pola materiil. Hakikat

⁵Kuntowijoyo yang memperkenalkan istilah strukturalisme transendental ketika menunjuk eksistensi Tuhan (*wahyu/bayani*) sebagai sumber pengetahuan di luar dari ide dan bersifat transendental serta metahistoris. Lihat: Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 18.

pengetahuan oleh akal dipersepsi hanya sebagai proses asosiasi mental materi yang tiada lain sebagai refleksi indrawi. Rasionalisme Barat hadir dengan bentuknya yang bersifat instrumental.

a. Dari Rasionalisme Instrumental Menuju Rasionalisme Transendental

Weber yang memperkenalkan model rasionalisme instrumental yang menjadi dasar postulat ilmu ekonomi dan akuntansi. Menurutnya tindakan ekonomi yang dianggap rasional ketika tindakan tersebut mengarah pada penciptaan maksimalisasi (utilisasi) keuntungan sebagaimana manusia adalah *homo economicus* (*rational economic man*).⁶

Islam yang dikenal dengan integrasi epistemologinya (metafisika Islam) tidaklah serta merta menolak peran rasio (*burhani*), tidak pula menafikan persepsi indra (*tajribi*) dan penalaran atas teks (*bayani*). Tapi rasionalisme Islam adalah rasionalisme transendental yakni bentuk aktualitas akal untuk mengungkap tabir kebenaran yakni puncak kebenaran pencapaian akal melekat pada wahyu, yang eksistensinya tidak berasal dari alam melainkan realitas mandiri (wahyu),⁷ dalam artian kebenaran akuntansi Islam bersifat ideologis (doktrinal), bukan eksperimental (alam). Alam dalam posisinya bukan sumber, melainkan wadah aktualitas kebenaran Islam sebagai pedoman.

Keberpihakan akuntansi dalam pemberdayaan (pembebasan) masyarakat marginal serta pemberdayaan alam, sebagai wujud manifestasi spiritualitas (pensucian) akuntansi, hal ini dalam terminologi kapitalisme dianggap irasional,⁸ disebabkan hal tersebut bertentangan dengan tendensi korporasi untuk memaksimalkan keuntungan sebagai nilai. Sedangkan dalam Islam *falah* (kemenangan)⁹ adalah hakikat tujuan manusia secara spiritual. Islam memahami bahwa tujuan hidup bukan untuk pencapaian materi semata, bukan pula untuk “mengutuk” materi, melainkan materi

⁶Rasionalisasi pengelolaan bisnis dalam pandangan Weber tersebut identik dengan penguasaan alat produksi dan penguasaan ladang-ladang kekayaan, kebebasan korporasi, penghematan atas keuntungan (modal), mekanisasi kompetisi, dan efisiensi pengelolaan bisnis seperti kebijakan *outsourcing*, atau perampingan kerja yang ditopang oleh mesinisasi.

⁷QS Al-Baqarah [2]: 31-32.

⁸Kecuali ketika hal tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan keuntungan.

⁹*Falah* yang dimaksud di sini muncul sebagai bentuk pencapaian tujuan manusia dalam Islam setelah manusia menjalankan risalahnya (spiritualitas) yakni pembebasan (pensucian). Lebih jelasnya akan dibahas di bab berikutnya (Bab VII).

harus dispiritualisasikan,¹⁰ yang secara sosiologis bermakna pembebasan (pensucian) untuk menegakkan keadilan di muka bumi (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam Islam materi pada dasarnya merupakan non-materi juga dalam maujud yang berbeda, keduanya bersemayam dalam diri yang satu.

Rasionalisme instrumental yang menjadi doktrin kapitalisme berwujud dalam akuntansi dengan lahirnya *entity theory* yang melambangkan unsur parsialisme dan egoisme akuntansi.¹¹ *Entity theory* juga menjadi simbol penindasan dengan menciptakan marginalisasi atas *stakeholders*. Laporan keuangan yang hanya dipersembahkan untuk kepentingan segelintir penguasa modal sangat terlihat dengan *instrument-instrument* yang digunakan seperti laporan laba rugi, saldo laba, neraca hingga penilaian kinerja¹² bahkan tujuan laporan keuangan direduksi hanya untuk kepentingan investor dan kreditor.¹³ Semua hanya merepresentasikan kepentingan pemegang saham (modal). Kritik atas konsepsi tersebut seolah semakin memantapkan sistem kapitalisme sebagaimana eksistensi kapitalisme kontemporer semakin menemukan bentuknya yang baru.¹⁴

¹⁰Islam tidak “mengutuk” materi, sebagaimana kehidupan dunia meniscayakan sifatnya yang materiil. Ancaman Tuhan melekat ketika manusia diperbudak oleh materi, sehingga ia lupa pada substansi kematerialian itu sendiri yakni non-materi sebagai realitas hakiki dari materi (tempat melekatnya materi atau sumber). Oleh karena materi harus dikembalikan pada fitrahnya dengan menspiritualisasinya (mensucikan), sebagaimana dunia harus dispiritualisasikan oleh “akhirat”. Tidak ada keterpisahan di antaranya. Gejala sekularisasi dalam akuntansi kapitalisme ketika materi dipisahkan dari sumbernya (egoisme).

¹¹Dalam perspektif ideologis, *entity theory* sebagai konsepsi teoretis yang menempatkan pusat kepentingan dalam akuntansi terletak pada entitas bisnis (asumsi keterpisahan). Meskipun pada dasarnya entitas bisnis juga adalah representasi kepentingan pemilik bisnis itu sendiri. Sehingga *entity theory* mereproduksi laporan keuangan terbatas untuk kepentingan pemilik (*stockholders*) yang umumnya terbatas pada investor dan kreditor.

¹²Lihat: Alimuddin, 2008, *Tyranny of the Bottom Line Performance: Tinjauan Kritis terhadap Konsep Kinerja Akuntansi*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 6, Nomor 3, hlm. 447- 457. Desember 2008.

¹³Lihat: Kieso, dkk. *Accounting Principle: Pengantar Akuntansi, Buku 2 (terj.)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 58.

¹⁴Salah satu yang menjadi dasar penopang keberlangsungan kapitalisme kontemporer adalah terjadi *self correction*. Kritik-kritik dijadikan sebagai sarana untuk memoles wajah agar terkesan tidak sesuai dengan kritik yang ada. Tampilan wajah yang hadir dalam realitasnya semakin terlihat anggun dan humanistik meski itu hanya bentuk polesan (imaji). Dalam korporasi sekali-kali pertentangan buruh dengan majikan ditepis dengan menciptakan sistem bonus dan lain-lain. Sehingga prediksi Marx akan hancurnya kapitalisme oleh kekuatan buruh tidak terjadi. Ketika Islam

Perkembangan menuju *stakeholders theory* (Evan dan Freman, 1993) hingga *enterprise theory* yang merupakan hasil *instrument* “politis” berupa pembengkakan ruang lingkup *stakeholders* dengan memasukkan unsur-unsur masyarakat kelihatannya tetap saja terpola pada model pola-pola feodal, dengan mendudukan para kapitalis sebagai “bangsawan” atau pusat kepentingan dalam akuntansi. Dalam konteks distribusi nilai tambah tampak bagaimana marginalisasi tetap langgeng,¹⁵ dengan memosisikan masyarakat¹⁶ dan alam secara *inferior*.¹⁷

b. Peran Intuisi (*Irfani*) dalam Epistemologi Islam

Rasionalitas Barat yang berkarakter “tiran” disebabkan berlandaskan pada unsur materiil, pada kenyataannya telah menggilas unsur “rasa” sehingga menciptakan gejala “gairah membunuh” terhadap mereka yang “lemah”. Islam sangat menentang rasionalitas instrumental tersebut, dengan menghidupkan eksistensi “hati” atau “intuisi” (*irfani*) yang dalam filsafat iluminasi disebut sebagai ilmu *khudury* sebagai salah satu alat dan sumber pengetahuan dalam Islam.

Pelengseran nilai seperti “etika” dalam epistemologi Barat disebabkan karena nilai sebagai realitas abstrak tidak dapat diterjemahkan secara materiil dan matematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi kapitalisme telah gagal untuk menggambarkan realitas bisnis secara utuh. Akibatnya sifat egoisme dan pragmatisme mendominasi akuntansi modern yang terefleksi dalam bentuk pengkerdilan *stakeholders* dan hanya berorientasi *stockholders* (*private costs* dan *private benefits*).

hadir untuk meng-*counter* hegemoni kapitalisme, kelihatannya kapitalisme mampu pula menyesuaikan diri dengan bersembunyi di balik jubah “suci” agama semakin muncul satu persatu, untuk mempertahankan eksistensi.

¹⁵Hal ini sesungguhnya tidak akan berubah secara revolutif sebab apa pun bentuk teori yang lahir secara kumulatif selalu dikonstruksi oleh kerangka nilai sebagai ideologi. Sebab epistemologi yang membentuk paradigma secara teoretis dan substansi akan tetap *absolute* meskipun secara aksiden (tampakan) terlihat berubah.

¹⁶Lihat: Hafida, 2012, Implementasi *Shariah Enterprise Theory* Melalui *Value Added Statement* untuk Menilai Tanggung Jawab Perbankan Syariah Kepada *Stakeholders* (skripsi). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin., hlm. 89.

¹⁷Lihat: Forqan, 2010. CSR dan Green Energy, “Benarkah Solusi bagi Krisis Listrik di Indonesia?”. Paper Disampaikan pada Seminar Optimalisasi Program CSR Menuju Masyarakat Mandiri Energi, Hotel Aston Primera-Pasteur Bandung, 22-23 Juli 2010. www.walhi.or.id.

Model akuntansi kapitalisme yang lahir dari epistemologi empirisme dan rasionalisme membentuk ontologi dualisme dibangun dari dasar yang sangat lemah. Relasi *principal-agent* dalam teori *agency* merupakan satu-satunya perekat interaksi dan bangunan sosial ekonomi yang terbangun. Ketika semua *stakeholders*¹⁸ dipersepsi seperti “musuh” maka yang terjadi adalah di dalam *cooperatif* tersimpang naluri “tiranik” untuk saling menguasai yang bergerak seperti “bom” waktu yang setiap waktu bisa meledak.

Disebabkan bangunan pengetahuan diproduksi dari proses marginalisasi unsur “rasa” seperti saling membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur. Fenomena pertentangan antara manajemen dan pemilik saham, majikan-buruh, korporasi-masyarakat menjadi tontonan yang paling lazim di Republik ini. Semua hal tersebut adalah bagian dari rekayasa akuntansi sebagai bagian dari struktur sosial.

4. Pragmatisme dan Kapitalisasi Agama: Produk Epistemologi Barat

Kapitalisme maupun sosialisme sebagai ideologi yang lahir tidak lepas dari landasan pengetahuan yang menempatkan materi sebagai hakikat keberadaan.¹⁹ Gejala sekularisasi pengetahuan yang menciptakan asumsi “bebas nilai” dalam epistemologi Barat dikarenakan konsepsi dasar pengetahuan Barat bersifat analitik (*a priori*) dalam memahami metafisika.²⁰ Dia terjebak pada realitas aksiden (materi), gagal dalam mencapai realitas substansial (transendental).

a. Akuntansi dan Filsafat Pragmatisme

Pragmatisme²¹ sebagaimana materialisme cukup memengaruhi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Pragmatisme lebih merupakan suatu teori

¹⁸Di dalamnya termasuk *stockholders*.

¹⁹Akuntansi dalam kapitalisme maupun sosialisme secara substansi tidak memperlihatkan perbedaan substansial, hanya saja kesadaran dalam kapitalisme bersifat materiil-individual, sedangkan dalam sosialisme bersifat materiil-komunal.

²⁰Lihat penjelasan sebelumnya (Bab IV, hlm. 58).

²¹Pragmatisme lahir di tengah gelombang skeptisisme modern, seiring dengan mudurnya dan silih bergantinya payung epistemologi Barat. Tokohnya yakni William James (1842-1910), dan John Dewey (1859-1952), ia memandang pemikirannya sendiri sebagai kelanjutan dari materialisme dan positivisme.

mengenai arti (*theory of meaning*)²² daripada teori tentang kebenaran (*theory of truth*).

Pragmatisme berpijak pada empirisme, menganggap bahwa pengetahuan yang benar melekat pada akibat (manfaat) praktis. Epistemologi yang *shahih* adalah epistemologi yang memiliki utilisasi (materi) secara praktis.²³ Schiller (1864-1937) mempersempit makna “manfaat praktis” pada filsafat pragmatisme untuk manusia saja.²⁴ Di sinilah letak agama²⁵ dalam filsafat pragmatisme dianggap “salah” ketika agama hanya menjadi penyebab manusia bertindak di luar dari kesadaran materi. Tetapi agama akan “benar” bukan secara esensi melainkan ketika agama memiliki manfaat praktis yang tentunya selaras dengan makna nilai hakiki yang dianut (materialisme). Dalam mazhab materialisme puncak pencapaian nilai terletak pada materi. Maka agama dalam mazhab pragmatisme digiring sebagai sebuah kebenaran ketika agama mampu membawa manfaat (utilisasi) yakni akumulasi materi sebagai puncak pencapaian nilai. Sebab gejala keagamaan dipersepsi secara instrumental yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan materiil perorangan yang tidak disadari.

Mazhab pragmatisme tidaklah menolak eksistensi spiritual atau metafisika, selama eksistensi spiritual tampak secara materiil sebagai *instrument* dalam menciptakan utilisasi secara pragmatis. Di sinilah letak ketika akuntansi yang berwatak kapitalisme menggiring isu agama atau spiritual masuk dalam sistem pasar dalam mendorong pencapaian nilai (kinerja) berupa akumulasi keuntungan. Materialisasi spiritualitas menjadikan “agama” sebagai kiasan komoditas dalam melanggengkan *status quo* kepentingan. Dengan demikian agama yang berkarakter “pembebas”

²²Lihat: Praja, *Aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 172.

²³Filsafat materialisme yang menjadi landasan pragmatisme, menganggap bahwa realitas kesadaran akal (pikiran atau ide) merupakan produk tertinggi dari alam yang melewati fase gerak dari gerak *psiko-fisiologik* menuju *psikologik-ide* sebagai kesadaran. Pikiran adalah bagian dari alam maka pikiran hanyalah mengetahui tentang realitas (alam) materiil itu sendiri. Makanya manusia sebagai produk alam bertindak atas dasar pikiran selalu dilandasi dan dibatasi oleh kesadaran materiil. Dan mustahil manusia bertindak di luar kesadaran materi, sebab hal itu adalah ilusi disebabkan realitas tersebut tidak memiliki eksistensi dalam kesadaran manusia.

²⁴Lihat: Muhammad Baqir As Shadr, *Falsafatuna: Telaah Kritis terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia* (Mizan: Bandung, 1999), hlm. 126.

²⁵Pengikut mazhab pragmatisme seperti George Santayana (1863-1952) menganggap bahwa “keimanan/agama” adalah bentuk kekeliruan atau ketersesatan yang indah. *Ibid.*

tereduksi menjadi “budak” atas kepentingan penguasa modal. Agama kemudian tereduksi secara instrumental, dan yang terjadi adalah polarisasi agama yang cenderung menjadi milik kaum borjuasi.²⁶

b. Kapitalisasi Agama dalam Akuntansi: Tinjauan Semiotologi²⁷

Kapitalisme yang berdasar pada doktrin “bebas nilai” dan filsafat pragmatisme melegitimasi berbagai cara dalam mencapai tujuan materiil termasuk dengan menggandeng isu simbolik agama. Bertenggernya kapitalisme dalam akuntansi mampu mereproduksi tanda (*sign*)²⁸ secara semiotik memberi *power* pada akuntansi sebagai struktur yang merepresentasikan tanda (*sign*) dalam mengkonstruksi realitas (*agen*). Baudrillard (1983) memperkenalkan istilah “*simulacra*”²⁹ dalam menganalisis evolusi kapitalisme yang semakin menguat. Dikarenakan kapitalisme senantiasa mengkonstruksi tanda atau *image*³⁰ dalam mengkomodasi kepentingan-kepentingan produksi yang akan dialirkan ke konsumen sebagai sebuah kesadaran melalui simulasi.

1) Akuntansi Kapitalisme dalam Pusaran Simulasi

Simulasi adalah “penggambaran dengan peniruan”³¹ dalam

²⁶Sama halnya ketika Syariati mengatakan: “adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali ke Islam. Kita harus menspesifikkan Islam yang mana yang kita maksudkan; Islam Abu Zar atau Islam Marwan”. Dalam hal ini Syariati ingin mengatakan antara Islam versi penguasa, penindas atau Islam pembebas. Apakah Islam yang digunakan untuk memapankan kekuasaan ekonomi atau Islam yang melawan tirani ekonomi. Lihat: Supriyadi, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 137.

²⁷Semiotologi atau Semiotika menurut De Saussure dalam *Course in General Linguistics*, adalah ilmu yang mempelajari peran tanda (*sign*) sebagai bagian dari kehidupan sosial, meliputi struktur, jenis, tipologi dan relasi-relasi tanda dalam penggunaannya dalam masyarakat. Lihat: Yasraf Piliang, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 47.

²⁸Tanda (*sign*) merupakan unsur dalam semiotika dan komunikasi yaitu segala sesuatu yang mengandung makna yang mempunyai dua unsur yakni penanda (bentuk) dan petanda (makna). *Ibid.*

²⁹*Simulacra* sebagai sebuah duplikasi dari duplikasi, yang aslinya tidak pernah ada sehingga perbedaan antara duplikasi dengan asli menjadi kabur. *Ibid.*, hlm. 21.

³⁰Sesuatu yang tampak oleh indra akan tetapi tidak memiliki esensi yang substansial.

³¹Simulasi adalah penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyata sebagai referensinya dan kini menjelma menjadi semacam realitas kedua (*second reality*) yang referensinya adalah dirinya sendiri (*simulacrum of simulacrum*). Simulasi bukanlah sebuah bentuk representasi. Bahasa dan tanda-tanda di dalamnya

mereproduksi tanda (*sign*) yang mencitrakan sebuah realitas yang pada hakikatnya tidak senyata dengan realitas yang sesungguhnya. Realitas yang “tidak sesungguhnya” tetapi dicitrakan sebagai realitas yang mendeterminasi kesadaran masif membentuk realitas semu (*hyper-reality*). Realitas fakta kemudian berbaaur dengan ilusi, terjadi proses pencairan batas-batas *difference*³² membentuk satu kesatuan citra (*image*). Antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk, kepalsuan berbaaur dengan keaslian, fakta terintegrasi dengan rekayasa. Proses tersebut menggambarkan bagaimana kapitalisme sebagai ilusi mereproduksi tanda yang seolah menjadi kenyataan. Menciptakan pasifikasi masyarakat dalam menerima realitas tanda sebagai sebuah kenyataan menandingi kenyataan yang riil.

Akuntansi sebagai bahasa terdiri atas sejumlah tanda yang terdapat dalam suatu jaringan sistem dan dapat disusun dalam sejumlah struktur-struktur. Terdapat hubungan yang erat antara penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). “*Sign/tanda*” menciptakan gejala *simulacra*, realitas terkonsepsi secara semantik dalam laporan keuangan yang melibatkan unsur citra yang lebih humanis, dengan menciptakan struktur konsepsi peleburan antara fakta dengan ilusi menyatu menjadi satu kesatuan sebagai tanda.

Citra yang dimaksud seiring dengan evolusi dan penguatan kapitalisme. *Enterprise theory, stakeholders theory*, akuntansi CSR, sampai penglibatan unsur masyarakat dengan hadirnya konsepsi “zakat” dalam laporan keuangan merupakan tanda sebagai *simulacra*, yang merepresentasikan realitas tanda yang *hyper-reality* sebagai sebuah ilusi dalam membentuk kesadaran palsu dalam masyarakat untuk kepentingan penanda dalam mengakumulasi materi.³³

seakan-akan merefleksikan realitas yang sesungguhnya padahal ia hanyalah realitas artifisial (*artificial reality*) yakni realitas yang diciptakan lewat teknologi simulasi, pada tingkat tertentu realitas ini tampak dapat dipercaya sebagai realitas sesungguhnya. *Ibid.*, hlm. 51.

³²*Difference* adalah sistem objek dalam kapitalisme di mana sebuah objek dibedakan dari objek sejenis melalui bentuk dan makna sosial yang dikandungnya. *Ibid.*, hlm. 16.

³³Syariati sering mengingatkan bahwa dalam sejarah, “*trilogy*” kekuasaan selalu bertemu secara dialektis yakni Fir’aun sebagai pemegang kuasa politik yang melegitimasi aktivitas Qorun sebagai penguasa ekonomi dan dimapankan oleh Bal’am sebagai penguasa agama simbolik. Menurut Syariati ketiga kelas tersebut berusaha untuk menguasai, memeras dan mengelabui rakyat untuk kepentingan ekonomis. Lihat: Supriyadi, 2003, *op. cit.*, hlm. 143. Akuntansi pembebasan hadir untuk melawan

2) Matinya Makna dan Terbentuknya *False Consciousness*

Terjadi komunikasi simbol dalam laporan keuangan yang terpola dalam kerangkanya subjek-objek. Konstruksi tanda (*sign*) mengikuti pola-pola simulasi, yakni penciptaan model-model (realitas) tanpa makna hakiki (realitas semu). Organisasi kapitalisme³⁴ kemudian merekayasa tanda “agama” baik berupa label maupun tanda yang lain seperti “bagi hasil” dan “non-riba” sebagai proses simulasi. Akibatnya terjadi pereduksian bahkan pergeseran makna yang secara fungsional. Ketika “tanda” kemudian kehilangan substansi menjadi sekadar *instrument* (alat) dalam melanggengkan dominasi kapitalisme. Pergeseran makna terjadi ketika “tanda” seperti “bagi hasil”, ataupun “non-riba” seolah-olah menjadi identitas tunggal dalam melegitimasi penggunaan tanda. Akibatnya akuntansi Islam seolah hanyalah akuntansi kapitalisme non-riba atau akuntansi kapitalisme *plus* sistem “bagi hasil”.

Pada kenyataannya akuntansi secara ideologis memiliki *power* dalam memengaruhi realitas bahkan mendikte masyarakat. *Image* yang “menuntun” masyarakat pada kesadaran yang ditampilkan oleh simulator-simulator dalam gugusan *simulacra*. Memengaruhi agen dengan menciptakan *false consciousness* secara masif lewat pengeksploitasian identitas simbolik masyarakat sebagai segmen pasar. Masyarakat tidak sadar akan pengaruh simulasi dan tanda (*signs/simulacra*). Menenggelamkan nilai guna menuju superioritas nilai tanda. Masyarakat yang terjebak dalam *false consciousness*

dan membebaskan dari *trilogy* kekuasaan tersebut, dengan mengembalikan makna “Islam” yang sejati.

³⁴Pembengkakan konversi organisasi kapitalisme menjadi syariah secara *instant* cukup deras di Indonesia. Total bisnis syariah di Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dollar AS (setara dengan 20 triliun rupiah). Dilihat dari jumlah institusinya juga mengalami pertambahan yang signifikan di mana tercatat ada 5 Bank Syariah, 25 unit usaha syariah, dan 133 BPR Syariah. Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu PT Bank IFI, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Internasional Indonesia, dan bank asing seperti HSBC (*Kompas*, 2/9/2009). Dan MLM Syariah serta lembaga berbasis *finance* lainnya, ritel (swalayan syariah). Hal ini mengindikatori bahwa pembengkakan organisasi syariah tidak selamanya menjadi indikator pembengkakan semangat religiusitas masyarakat. Kasus koperasi langit biru (Ustad Komara) yang mengelabui nasabahnya atas identitas simbolik (agama) (Lihat: detiknews.com (5/6/2012)). *Ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan* (QS At-Taubah [9]: 107).

(kesadaran palsu)³⁵ sebagai responsif terhadap tanda. Masyarakat yang hanyut dalam kesadaran simulasi bukan hanya menjadi pasif bahkan aktif membentuk kesadaran sendiri, tanda kemudian muncul sebagai sebuah gejala kejiwaan yang mendeterminasi kesadaran masyarakat yang seolah terbuai dengan realitas altruisme, meski itu hanya pada tataran tanda. Superioritas tanda telah memandulkan nalar masyarakat secara masif sebagai objek yang tereksplotasi.

Gejala tersebut merupakan bentuk kapitalisasi spiritualisme dengan cara mengubah spiritualitas sebagai sebuah tanda, sehingga masyarakat akan mengomsumsi “tanda” sebagai realitas. Realitas tanda hadir dengan “taring” untuk mengeksploitasi kesadaran ideologis masyarakat secara simbolik sebagai segmen pasar. Hal ini cukup konteks ketika Tuhan menyatakan: *Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman³⁶ Dengan menukarkan ayat-ayatKu dengan harga yang rendah (murah).³⁷ Menulis dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan “ini dari Allah”, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu.³⁸*

B. Islamisasi Akuntansi atau Pengideologisasian Islam: Tinjauan Kritis

Ide Islamisasi akuntansi pada hakikatnya merupakan bagian dari pengaruh wacana Islamisasi pengetahuan yang diperkenalkan Al Faruqi (1981). Dalam upaya pengislaman akuntansi, metode ini menggunakan pendekatan pragmatis (konvergensi) dengan mengkonversi teorisasi akuntansi konvensional (kapitalisme) yang telah mapan untuk kemudian dikonfrontir atau diarahkan sesuai dengan nilai Islam. Fenomena Islamisasi pengetahuan dalam rentang histori menjadi bukti sejarah bahwa Islam selalu berada dalam sub-ordinat dalam perkembangan ilmu pengetahuan³⁹.

³⁵Kesadaran masyarakat yang bertindak atas dasar di luar dari rasionalitas, kesadaran dibentuk secara dominasi berupa dogmatisasi ideologis.

³⁶QS Al-Baqarah [2]: 9.

³⁷QS Al-Baqarah [2]: 41

³⁸QS Al-Baqarah [2]: 79.

³⁹Islamisasi pengetahuan muncul sebagai wujud responsif (*Phobia*) atas derasnya kemajuan pengetahuan Barat di tengah kegelisahan atas watak dasar pengetahuan Barat yang berakar pada sekularisme yang dianggap mengancam keutuhan masyarakat Muslim, menjadikan ide “Islamisasi pengetahuan (akuntansi)” menjadi wacana dominan.

1. Kelemahan Dasar Model Konvergensi

Kelemahan dasar model Islamisasi akuntansi di samping terletak pada metode yang tidak kuat dan cenderung reaksioner (Kuntowijoyo, 2006: 7), juga pada hakikatnya telah mereduksi dan mengkerdikan makna hakiki Islam sebagai sistem (ideologi). Islam sebagai sebuah *mainstream* ideologi tersendiri, bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan pula percampuran antara keduanya, melainkan Islam memiliki konsepsi tersendiri dalam memahami realitas (pandangan dunia tauhid).

Percampuran teorisasi pada hakikatnya juga menggiring percampuran nilai, sehingga validitas nilai menjadi kabur, tarik menarik kekuatan antara Islam dan kapitalisme dalam konvergensi Islamisasi akuntansi, setidaknya dapat menciptakan dua potensialitas ekstensi yakni Islam berwajah kapitalisme atau kapitalisasi agama (Islam). Dua hal ini pada kenyataannya bukan sekadar sebagai potensi tapi teraktual ke berbagai lapisan bisnis. Akibatnya organisasi syariah kemudian gagal membentuk jaringan bisnis berbasis kuasa Tuhan melainkan tergelincir bahkan terkulai dalam jaringan kuasa pasar.

Dengan hadirnya standar akuntansi keuangan berbasis syariah yakni PSAK No. 59 yang merupakan hasil adopsi dari konsep AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) hingga lahirnya PSAK 101-106 yang mengatur secara teknis penyajian laporan keuangan masih menyisakan persoalan-persoalan filosofis mendasar. Postulat dasarnya masih kental dengan unsur kapitalisme⁴⁰ seperti tujuan laporan keuangan masih dominan unsur materialistik dibanding sosial serta asumsi masih berbasis *entity theory* (Triyuwono, 2000).

Konvergensi akuntansi dalam bentuk Islamisasi akuntansi, pada kenyataannya telah mereduksi makna akuntansi Islam secara simbolik pada zakat atau non-riba. Seolah-olah akuntansi Islam hanya merupakan

⁴⁰Dipertegas Harahap (2001) di antaranya: *Pertama*, ruang lingkup pemakai dan kebutuhan informasi merupakan hasil adopsi keseluruhan dari akuntansi konvensional, hanya ditambah dengan informasi untuk *stakeholders* zakat. *Kedua*: tujuan akuntansi keuangan, *Ketiga*: tujuan laporan keuangan dengan menambahkan informasi kepatuhan syariah dan pihak yang berkepentingan terhadap zakat, *Keempat*: asumsi dasar dalam laporan keuangan sama dengan akuntansi konvensional kecuali untuk pengakuan pendapatan (akrual dan kas basis), *Kelima*: karakteristik kualitatif yang sama dengan akuntansi konvensional, *Keenam*: unsur dan jenis laporan keuangan diikuti penambahan investasi tidak bersyarat (terikat).

akuntansi kapitalisme *plus* zakat atau akuntansi kapitalisme *minus* riba.⁴¹ Pelekatan *instrument* “Islam” pada kapitalisme di samping telah menginferiorikan Islam dengan memosisikan kapitalisme secara superior, hal ini juga menggiring pemaknaan tanda Islam (zakat dan non-riba) secara instrumental.⁴² Akibatnya *spirit* ideologi Islam kemudian tenggelam oleh kuasa pasar yang mendominasi.

2. Pengideologisasian Islam: Akuntansi Islam sebagai *Mainstream Tersendiri*

Seperti yang diungkapkan Baqir (2008) bahwa bukan berarti ketika Islam berbeda dengan kapitalisme maka ia serta-merta adalah sosialisme, begitupun sebaliknya bukan berarti ketika Islam bukan sosialisme, maka ia adalah kapitalisme. Islam adalah mazhab tersendiri secara ideologis disebabkan Islam memiliki persepsi-persepsi tersendiri tentang nilai. Proses pengideologisasian Islam dalam konstruk-konstruk teoretis akuntansi meniscayakan dialog antara Islam sebagai doktrinal nilai dengan realitas (teoretis). Dalam posisi ini Islam ditempatkan secara ideologi mandiri dan didorong untuk proaktif dalam dinamika ilmu ketimbang reaktif terhadap ilmu Barat. Tanpa harus kehilangan identitas keilmuan Islam yang bersifat doktrinal (ideologis).

⁴¹Seperti kata Chapra bahwa norma-norma perilaku (etika), zakat dan non-riba meskipun tindakan tersebut memiliki peranan penting dalam restrukturisasi ekonomi Islam tapi ia tidak menggambarkan keseluruhan sistem ekonomi Islam. Lihat: Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 228.

⁴²Potensialitas formalitas zakat dapat melegitimasi praktik korporasi dalam mengakumulasi dan mengeksploitasi kekayaan tanpa kendali, sehingga yang terjadi adalah “kapitalisme berjamaah” dengan melibatkan seluruh *stakeholders* (*stakeholders theory* atau *enterprise theory*). Ketika penilaian kinerja hanya berkonsentrasi pada nominal zakat, maka upaya peningkatan nominal tentunya berbanding lurus dengan tingkat eksploitasi. Dengan demikian tetap saja melanggengkan spiral persoalan ekologis dalam masyarakat. Upaya “Pengislaman kapitalisme” yang mengarah pada “kapitalisme religius” pada hakikatnya hanya menjadi sebuah utopia ketimbang menjadi fakta, disebabkan bahwa Islam dan kapitalisme tidak akan dapat berbaur sebagai seperangkat nilai, sebab keduanya berangkat dari akar filsafat yang berbeda bahkan cenderung bertentangan. Tak dapat dirasionalisasikan ketika kapitalisme yang seolah direligiuskan lewat tampakan humanistis sebagai fenomena, tetapi tetap meninggalkan akar epistemologi yang menolak realitas transendental di alam.

a. Akuntansi Islam sebagai Proses Pengideologisasian Islam

Kuntowijoyo (2006: 49) menyebut istilah “pengilmuan Islam” yakni terdiri dari proses integralisasi dan objektifikasi. Proses integralisasi merupakan proses penyatuan epistemologis dalam kerangka strukturalisme transendental yakni penyatuan kekayaan keilmuan manusia dengan menempatkan wahyu sebagai puncak kebenaran. Dan objektifikasi sebagai proses penerjemahan dan pengarah ilmu yang telah terintegrasi tersebut menuju fungsi-fungsi sosial sebagai *rahmatan lil alamin*. Untuk mengarah pada objektifikasi, maka makna ayat harus didemistifikasi⁴³ untuk menghindarkan diri dari mistifikasi pemaknaan ayat yang cenderung melahirkan interpretasi yang tidak kontekstual. Berangkat dari subjektif menuju objektifikasi makna ayat.⁴⁴

Jadi dari agama menuju *teo*-antroposentris, kemudian dideferensiasi menuju ilmu integralistik. “Agama” bermakna menempatkan wahyu sebagai sumber utama (landasan) akuntansi. *Teo*-antroposentris sebagai konstruk penyerapan manusia atas sumber kebenaran dengan menjadikan interpretasi terhadap wahyu sebagai sumber kebenaran akuntansi dalam pengkonstruksian nilai-nilai (etika, keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain). Dideferensiasi sebagai upaya dekonstruksi epistemologi maupun ontologi (*dualisme*) pengetahuan Barat yang secara aksiologi bersifat sekuler.

Gagasan pengilmuan Islam kemudian akan selaras dengan gagasan pengideologisasian Islam, ketika makna pengilmuan Islam berada pada pijakan persepsi yang menempatkan Islam secara ideologis yang mereproduksi pengetahuan doktrinal. Tetapi akan berbeda ketika pengilmuan Islam justru dipersepsi sebagai pengetahuan saintis. Gagasan pengideologisasian Islam tidaklah menolak gagasan pengkonsepsian realitas sebagai realitas teoretis, melainkan tetap saja bahwa hal tersebut berbeda dengan sisi Islam sebagai pengetahuan doktrinal. Keduanya harus kemudian berdialog pada posisinya masing-masing. Realitas pengetahuan teoretis akan menjadi dasar sekaligus objek pengetahuan doktrinal dalam mengarahkan realitas sesuai dengan tuntunan Islam sebagai ideologi dalam mengarahkan realitas akuntansi menuju fungsi-fungsi transformatif, emansipatif dan pembebasan.

⁴³Upaya menafsirkan ajaran agama secara kontekstual yakni selaras dengan persoalan-persoalan rill dalam masyarakat.

⁴⁴Misalnya zakat tidak dapat hanya dilihat secara subjektif (penyucian harta) melainkan secara objektif sebagai sarana pembebasan masyarakat yang “lemah”.

b. *Hyper-Positivistik: Pergeseran Paradigma*

Hanya dengan pengideologisasian Islam, hakikat dan tabir Islam sebagai pedoman manusia dapat terungkap dan terkontekstualkan dalam kehidupan. Akuntansi Islam dalam konteks pengideologisasian Islam adalah *mainstream* atau mazhab yang berdiri sendiri bahkan melampaui *mainstream* positivistik (kapitalisme maupun sosialisme), disebabkan epistemologi Islam tidak hanya mengaktualkan sisi rasio dan indrawi manusia melainkan juga intuisi (rasa) sebagai landasan epistemologi. Sebab pada dasarnya keseimbangan itu sebagai sebuah konsep melekat pada kekuatan rasa (cinta), dan konsep ini yang tidak dimiliki Barat lewat akuntansi kapitalisme. Cintalah satu-satunya aktualitas “rasa” yang mampu melampaui dan menundukkan “ego”.⁴⁵

Secara ontologi Islam tidak mendasarkan hakikat realitas pada materi melainkan substansi hakikat dalam Islam melampaui unsur materiil yakni non-materi sebagai puncak pencapaian nilai.⁴⁶ Upaya pengideologisasian Islam menjadi signifikan agar tidak terjebak pada model *falsification*⁴⁷ atau proses “tambal sulam” atau “pencaplokan” teorisasi yang lazim terjadi pada metode konvergensi. Kerapuhan dasar sebuah epistemologi, bagaimanapun model konvergensi yang hadir sebagai sebuah metodologi tetap akan menyisakan pertentangan (kontradiksi) secara aksiologi. Di sinilah koherensinya untuk mengangkat istilah Khun (1962) tentang

⁴⁵Cinta pada hakikatnya adalah gejala jiwa untuk senantiasa memberontak, merindukan pengorbanan. Pengorbanan adalah fitrah yang melekat pada cinta. Realitas inilah yang melampaui “ego”, esensi “ego” tenggelam dalam lautan pengorbanan, ketika kedirian menjadi satu (manunggal) dengan objek, meruntuhkan batas subjek-objek. Seperti kata Syariati (1984) cinta adalah “memberi” bukan “mengambil” sebab “mengambil” itu bukan cinta melainkan “dagang”. Cintalah yang mampu membebaskan manusia dari penjara kehidupan salah satu penjara itu adalah “ego”. Lihat: Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 97-101.

⁴⁶Terminologi atas relasi “materi dan “non-materi” dalam filsafat (teori gradasi) seperti halnya “bayangan” dengan sumbernya. “Bayangan” dalam hal ini materi hanyalah merupakan aksiden sedangkan substansi tempat ia melekat adalah sumbernya itu sendiri (non-materi). Inilah yang disebut “melampaui” (*hyper*), sebagaimana realitas non-materi melampaui realitas materi secara kehakikian.

⁴⁷Istilah yang diperkenalkan Karl Popper, menurutnya teori-teori ilmiah selalu dan hanyalah bersifat hipotesis (dugaan sementara), tak ada kebenaran terakhir. Oleh karenanya ilmu harus terus-menerus dikritik agar dapat berkembang. Pertumbuhan ilmu terjadi akibat dari eliminasi yang semakin ketat terhadap kemungkinan salah. Falsifikasi identik dengan proses mempertahankan ilmu dengan cara menyempurnakan secara kumulatif, berupa perbaikan-perbaikan atas kesalahan.

pentingnya revolusi ilmu yakni suatu bentuk pergeseran paradigma dalam akuntansi. Sesungguhnya telah jelaslah antara *haq* dan *bathil*, *janganlah kamu campuradukkan*.⁴⁸ Katakanlah “yang benar telah datang dan bathil telah lenyap”, sebab yang bathil itu pasti lenyap.⁴⁹

C. Islamic Methaphysics: Antara Epistemologi Berpasangan (Binary Oppositions) atau Epsitemologi Manunggal

Sebagaimana Islam ajaran tauhid, maka dalam epistemologi (metafisika Islam) kecenderungan dualisme bertentangan dengan tauhid. Epistemologi Islam bersifat holistik dan integratif yang berarti ketiadaan dikotomi atau garis demarkasi antara realitas yang dipersepsi secara materiil dan realitas non-materiil.⁵⁰

1. Epistemologi Berpasangan (Oposisi Biner) atau Epistemologi Manunggal?

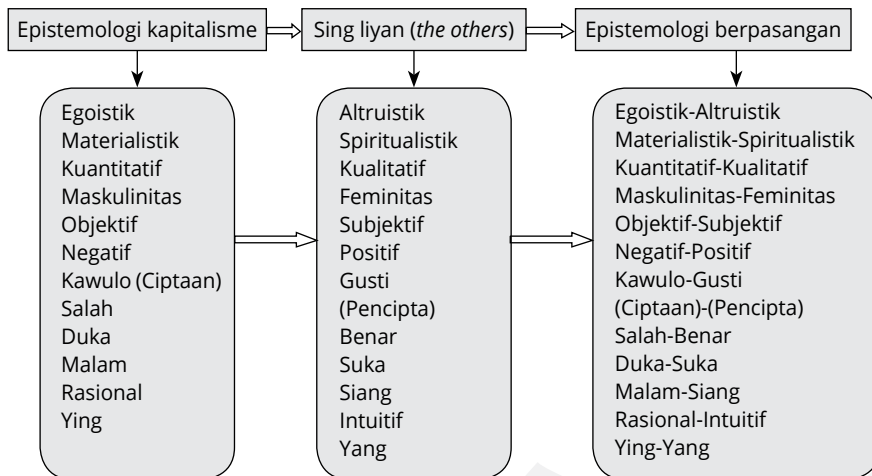
Epistemologi berpasangan dan manunggal diperkenalkan oleh Triyuwono (2007), sebagai landasan teori dalam mengagas akuntansi Islam sebagai *mainstream* tersendiri. Dalam beberapa karyanya kadang menggunakan epistemologi berpasangan sebagai alat analisis (Triyuwono, 2003), kadang pula menggunakan istilah epistemologi manunggal yang merujuk pada filsafat sufistik Syekh Siti Jenar (*manunggaling kawulo gusti*) (Triyuwono, 2007).

Meskipun menurut Triyuwono (2007) pada dasarnya kedua epistemologi tersebut tidaklah berbeda, yakni sama-sama merujuk pada integrasi atau perpaduan dua hal yang berbeda menjadi satu kesatuan (*mutually inclusive*). Seperti halnya perpaduan antara egoistik-altruistik, materialistik-spiritualistik.

⁴⁸QS Al-Baqarah [2]: 42.

⁴⁹QS Al-Israa' [17]: 81.

⁵⁰Sebab pada dasarnya dalam filsafat Islam, hakikat “demarkasi atau batasan” itu sendiri tidak memiliki realitas. Ketiadaan batasan sebagai eksistensi meniscayakan tiadanya realitas yang terbatas dalam hal ini yang memisahkan realitas yang lain. Semua adalah satu kesatuan maknawi sebagai satu eksistensi disebabkan realitas itu sendiri bersumber pada satu sebab yang tidak bersebab, yang menyusun tapi tak tersusun, yang menggerakkan tapi tidak bergerak. Keniscayaan keberadaan menolak keniscayaan eksistensi ketiadaan.



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 5.2 Kerangka Penggagasan Epistemologi Berpasangan

Oposisi biner meniscayakan perbedaan, dan ketika perbedaan tersebut disatukan disebut sebagai manunggal. Triyuwono mendasarkan konsep epistemologi *oposisi biner* pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an seperti: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui* (QS Yaasiin [36]: 36).

Integrasi tersebut dipahami sebagai perpaduan dalam pola kesetaraan (berpasangan-pasangan). Di mana perpaduan muncul secara artifisial yakni dengan mengawinkan sifat-sifat yang bertentangan (*oposisi biner*) ke dalam satu kesatuan sehingga disebut *sinergi oposisi biner* (Triyuwono, 2003) dalam pola keselarasan (kesetaraan). *Sinergi oposisi biner* bermakna penyatuan “yang lain” ke “yang pusat”.

2. **Islamic Methaphysics: Telaah Kritik Epistemologi Berpasangan (Manunggal)**

Suatu keniscayaan bahwasanya tidak ada perbedaan dalam memandang akar epistemologi Islam yang bersifat holistik dan integratif. Sebagaimana Islam tidak menafikan indra (*tajribi*), akal (*burhani*), teks (*bayani*) serta hati/intuisi (*irfani*). Realitas alam adalah realitas manunggal tidak terpisah secara *dualism*. Terang tidak dapat dipisah dari gelap, bumi dan langit, pencipta dan

ciptaan, jiwa dan raga, eksistensial dan non-eksistensial, *absolute* dan relatif. Perbedaan kemudian secara potensial muncul ketika alat pengetahuan tersebut dihubungkan dengan upaya dalam menciptakan pengetahuan. Dalam hal ini merujuk pada pertanyaan bagaimana keterhubungan antara satu sama lain atas realitas berbeda yang dipersatukan (manunggal)?

a. “Perbedaan”: Antara Eksistensi atau Esensi

Di dalam Al-Qur’an istilah perbedaan dapat merujuk pada berbagai hal di antaranya perbedaan antara laki-laki dan perempuan,⁵¹ bumi dan langit,⁵² perbedaan siang dan malam,⁵³ perbedaan orang beriman dan tidak beriman,⁵⁴ perbedaan antara yang *haq* (benar) dan yang salah (*bathil*),⁵⁵ jiwa dan raga,⁵⁶ materi dan non materi serta perbedaan antara Tuhan sebagai pencipta (sebab) dan ciptaan sebagai yang tercipta (akibat) atau perbedaan sebab-akibat.⁵⁷ Perbedaan dibedakan didasarkan atas sifat (azali) dan karakter yang melekat pada dirinya masing-masing.⁵⁸

Di dalam ilmu sosiologi perbedaan juga tidaklah menjadi konsepsi yang tunggal, sebab perbedaan terdiri dari perbedaan yang bersifat horizontal (diferensiasi) dan perbedaan secara vertikal (stratifikasi). Meskipun objek merupakan perbedaan, tetapi posisi perbedaan merupakan perbedaan alam yang dapat ditinjau dari perbedaan persepsi. Di samping itu, perbedaan tidak selamanya hadir sebagai sebuah realitas eksistensi, sebab perbedaan ada yang bersifat substansial (disebut esensi) dan ada pula berupa pertentangan (disebut kontradiksi).

Hal ini berarti bahwa untuk menyatukan perbedaan, maka tidak dapat dipandang secara generalisir perbedaan itu sendiri, disebabkan perbedaan itu memiliki konsepsi perbedaan yang membedakan dengan konsepsi perbedaan yang lain. Perbedaan antara siang dan malam, laki-laki dan

⁵¹QS Al-Hujuraat [49]: 13.

⁵²QS Al-A’raaf [7]: 54.

⁵³QS Al-Baqarah [2]: 164.

⁵⁴QS Al-Baqarah [2]: 91.

⁵⁵QS Al-Israa’ [17]: 81.

⁵⁶QS Al-Hijr [15]: 28.

⁵⁷QS Maryam [19]: 67.

⁵⁸Dapat dimisalkan bahwa perbedaan siang-malam, adalah perbedaan fenomena sebagai gejala beriringan, berbeda dengan perbedaan Tuhan dan ciptaan yang merupakan perbedaan kausalitas (sebab-akibat).

perempuan, kiri-kanan adalah perbedaan yang berbeda dengan perbedaan antara *kawulo* dan *gusti* atau antara pencipta dan ciptaan, jiwa-raga serta materi dan non-materi.

b. Perbedaan dalam Kesatuan dan “Keniscayaan Kemustahilan”

Pada tataran alam terdapat perbedaan yang pada hakikatnya adalah perbedaan yang tidak hakiki, disebut sebagai perbedaan *i'tibari* sebagai konsepsi. Perbedaan *i'tibari* meniscayakan kemustahilan menyatunya (manunggalnya⁵⁹) atau meleburnya dengan realitas yang hakiki. Kemustahilan tersebut merupakan kemustahilan untuk manunggalnya perbedaan di antaranya seperti kemustahilan pada proposisi: “kemustahilan manusia untuk maju sekaligus mundur pada waktu yang bersamaan”. Kemustahilan untuk memanunggalkan “benar-salah” atau “*haq-bathil*”,⁶⁰ kemustahilan memanunggalkan *Wajibul Al Wujud* dengan *mukmim al wujud* (*maujud*), sebagaimana kemustahilan memanunggalkan antara “terang dan gelap”, sebab realitas “gelap” disebut sebagai realitas *i'tibari* atau realitas ketidakhakikian yang eksistensinya akan hilang ketika “gelap” bertemu dengan realitas “terang”, sebab “terang” adalah realitas hakiki dari “gelap”.

Hal ini juga mencakup perbedaan “materi” dengan “non-materi” antara pencipta dan ciptaan adalah perbedaan kausalitas, sebagaimana perbedaan tersebut adalah perbedaan kehakikian dan ketidakhakikian. Perbedaan tersebut berbeda dengan perbedaan yang bersifat horizontal antara laki-laki dan perempuan, siang dan malam adalah perbedaan esensi, bukan perbedaan eksistensi.

Siang bukanlah menjadi sebab dari malam, ia hanyalah perbedaan berupa gejala yang beriringan, tetapi bukan perbedaan kausalitas. Dan begitupula halnya kemustahilan untuk memanunggalkan antara siang dan malam sebab perbedaan tersebut adalah gejala yang beriringan tidak memiliki sifat artifisial. Sebagaimana kemustahilan “benar” menyatu dengan yang “*bathil*”. Bukan membenarkan yang *bathil* bukan pula mem-

⁵⁹Manunggal dalam posisi ini dipahami sebagai realitas peleburan dua esensi yang dipersepsi berbeda dalam satu kesatuan sehingga batas-batas perbedaan kemudian terpenetrasi dalam satu kesatuan.

⁶⁰Dan katakanlah “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”, Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS Al-Israa [17]: 81). Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya (QS Al-Anbiyaa [21]: 18).

bathil-kan yang benar. Itulah kenapa Rasul mengatakan “*semua mukmin merupakan organ dari satu tubuh yang satu*”, Rasul tidak mengatakan bahwa semua manusia merupakan organ dalam satu tubuh. Karena keburukan tidak mungkin satu organ dengan kebenaran, seperti kemustahilan manunggalnya “terang” dengan “gelap”. Pada hakikatnya realitas tersebut hanyalah realitas yang terdeterminasi dari realitasnya yang hakiki.

c. Teori Gradasi: Mengurai Keterhubungan Perbedaan

Teori gradasi (emanasi)⁶¹ menjelaskan hakikat penciptaan serta mengurai keterhubungan antara realitas sumber non-materiil (realitas eksistensial) dengan akibat materiil (realitas non-eksistensial). Non-materi sebagai sebab yang tak bersebab merupakan substansi dari keseluruhan realitas yang bersebab disebut sebagai eksistensi (Wujud). Sedangkan realitas materiil hanyalah manifestasi atas luapan *Ar Rahman* yang pada hakikatnya merupakan esensi (maujud). Hal ini meniscayakan pada dasarnya materi hanyalah gradasi terendah dari sumber-Nya, sehingga meniscayakan materi merupakan aksiden yang membutuhkan pelekatan dirinya pada substansi.⁶²

Di samping menegaskan ketidakterpisahan antara eksistensi dan esensi sebagaimana substansi dan aksiden, tetapi konsep ini mengarahkan untuk melihat keterhubungannya yang tidak bersifat artifisial, tidak pula berada pada posisi yang saling menguatkan sebagai eksistensi. Tapi berada pada pola keterhubungan antara “bagian” sebagai unsur dari “keseluruhan” atau realitas “partikular” adalah manifestasi dari realitas yang “universal”, sebagaimana relitas yang dipersepsi “terbatas” merupakan keniscayaan dari yang “tak terbatas”. Inilah yang dimaksud perbedaan secara vertikal. Jasad merupakan manifestasi dari jiwa, sebagaimana alam materiil adalah

⁶¹Teori yang diperkenalkan oleh filsuf Muslim semenjak Al-Farabi, Ibnu Rusyd yang dengan aliran paripatetiknya, Al Suhrawardi (Al Isyraqiyah) sampai dalam perkembangan terakhir filsafat Islam Mulla Shadra dengan mazhab *Al Hikmah Muta’aliyat*-nya. Lihat: Mansur. Pandangan Al-Farabi tentang Metafisika. *Jurnal Esensia*, Vol. 10, No.2. Juli 2009. Lihat juga: Ahmad. Konsep Isyraqy dan Hakikat Tuhan: Studi atas Pemikiran Al-Suhrawardi Al-Maqtul. *Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No.4, Desember 2006. Lihat juga: Nur, Syaifah. *Filsafat Wujud Mulla Shadra*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2002).

⁶²Seperti antara “bayangan” dengan “sumber bayangan”, bayangan hanyalah tampilan yang tidak hakiki dari sumbernya. Dan sumber itu sendirilah yang hakiki bagi dirinya sendiri.

manifestasi dari sumber-Nya yang non-materiil. Posisi egoistik dengan altruistik tidak secara “setara” melainkan altruistik adalah puncak eksistensi yang mendeterminasi realitas dirinya yang lain.

Berbeda dengan keterhubungan antara siang dan malam, kualitatif-kuantitatif atau feminim dan maskulin, sebagaimana manusia diciptakan secara berpasangan. Pola keberpasangan merupakan konsepsi keterhubungan antara esensi dengan esensi, bukan eksistensi dengan esensi. Oleh karena itu, keterhubungan itu bersifat horizontal yang saling menguatkan secara esensi. Perbedaan ini dapat disebut sebagai perbedaan esensial dalam konteks perbedaan kualitas bukan perbedaan kausalitas.

d. Eksistensi-eksistensi atau Eksistensi-Esensi: Ketidaksinergitas Binary Oppositions dengan Konsepsi Kemanunggalan

Binary oppositions yang bercorak penguatan eksistensi-eksistensi secara filosofis pada hakikatnya berbeda dengan epistemologi manunggal yang lebih cenderung sufistik dengan pola eksistensi-esensi. Epistemologi berpasangan yang memandang realitas penyatuan secara “konkretisasi” eksistensi memiliki potensialitas dualisme.⁶³ Sebagaimana jiwa yang mandiri identik dengan kemandirian jasad, kemandirian egoistik selaras dengan kemandirian altruistik, kemandirian materialistik setara dengan kemandirian spiritualistik (jiwa-jasad, egoistik-altruistik, materialistik-spiritualistik). Ketika egoistik dan materialistik dipandang sebagai orientasi kapitalisme menyatu dengan altruistik (spiritualistik) yang dipersepsi sebagai agama, maka dalam pola kesetaraan tersebut potensi yang akan tercipta adalah penindasan yang berselubung kesalehan.⁶⁴

⁶³Islam bertentangan dengan dualisme, *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya* (QS Al-Ahzaab [33]: 4).

⁶⁴Hal ini secara aksiologi pada tataran realitas dapat menciptakan gejala ketika peningkatan akumulasi materi dipahami sebagai bentuk keselarasan dengan peningkatan spiritualistik. Maka terjeratlah konsepsi “zakat” sebagai alat pengukuran dan penilaian kinerja yang memberi dorongan untuk meningkatkan eksploitasi alam, sehingga peningkatan “zakat” bisa saja berbanding lurus dengan tingkat kerusakan alam, hal ini tetap saja meninggalkan spiral persoalan ekologis. Kapitalisme individual yang terjadi kini bisa berubah wajah menjadi kapitalisme “berjamaah” dengan melibatkan mitologisasi *stakeholders*.

Melihat hasil penelitian Triyuwono (2007)⁶⁵ justru menggambarkan bahwa sesungguhnya yang dikonseptualisasikan adalah epistemologi manunggal. Dari hasil penelitian tersebut bagaimana kemudian egoistik (materialistik) itu kemudian tenggelam, ditenggelamkan dengan begitu dalamnya oleh altruistik (spiritualistik). Hal tersebut menurut Triyuwono adalah suatu nilai tambah yakni *mental value added* dan *spiritual value added*. Hal ini pada hakikatnya menegaskan bahwa pola relasi dalam konteks kaitan antara perbedaan vertikal harus dipandang secara hierarkis, ketika altruistik (spiritualistik) menempati posisi yang lebih tinggi (*hyper*) dibanding dengan egoistik (materialistik), bukan dalam pola setara secara eksistensi.

Inilah yang dimaksud pendekatan sufistik atau kemanuggalan, manusia mempersepsi dirinya tidak lebih sebagai esensi (ketidakhakikian) dengan menempatkan Tuhan sebagai eksistensi (hakiki). Ego yang dipersepsi sebagai ego manusia pada hakikatnya “ego” itu hanyalah manifestasi dari ego Sang Pemilik. Sehingga ego (partikular) itu kemudian menyatukan diri dengan sumbernya yakni Ego Universal, bagai setetes air yang menyatu di samudra yang tak ber tepi. Semua aktivitas manusia ditujukan kepada Tuhannya.⁶⁶

e. Eksistensi-Esensi dalam Kerangka 4 Perhubungan

Berikut adalah konsepsi 4 perhubungan⁶⁷ dalam melihat relasi eksistensi dan esensi (materialistik-spiritualistik) atau (egoistik dan altruistik).

⁶⁵Hasil penelitiannya pada tiga objek (kasus) yakni (1) Banawir yang menjual jamu tradisional dan alami, (2) Emba, seorang nelayan yang berdagang ikan, dan (3) Aiti yang berjualan es lilin. Kesimpulannya dari ketiganya adalah mereka melakukan aktivitas usaha bukan semata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengabdikan dan berbakti pada masyarakatnya, semata-mata karena hal yang altruistik. Triyuwono, mengagap bahwa hal tersebut merupakan nilai tambah berupa *mental value added* dan *spiritual value added*. Lihat: Triyuwono, 2007, *mengangkat sing “liyan” untuk formulasi nilai tambah*, SNA X, Unhas Makassar.

⁶⁶Di sinilah letak kedudukan ketika agama menjalankan fungsinya dalam mengarahkan naluri (ego) manusia. Bahwa kerusakan yang terjadi di alam adalah ulah manusia sendiri (QS Ar-Ruum [30]: 41), akibat menumbuhkan bahkan mengembangbiakkan ego-ego dirinya dengan mempersepsi sebagai miliknya (QS Al-Furqaan [25]: 43). “Ketauhilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena melihat dirinya serba cukup” (QS Al-‘Alaq [96]: 6-7).

⁶⁷Lihat: Amar, *Ringkasan Logika Muslim*, ([t.t]: Yayasan Al-Muntaszhar, 1409 H), h.46-50. (pengecualian untuk konsep Ying dan Yang).

Pertama: Hubungan perbedaan atau penafian, merupakan dua pemahaman universal yang berbeda makna yang saling tidak bertemu pada ekstensi (*misdaq*) masing-masing, bahkan saling menafikan satu sama lain.

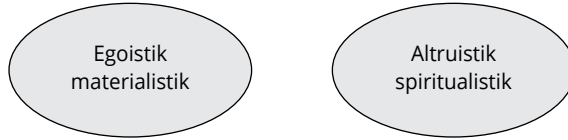
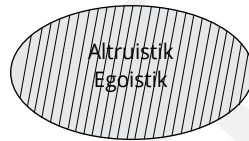


Diagram tersebut menunjukkan pola keterhubungan yang saling terpisah, menafikan satu sama lain. Hal ini cukup representasi pada akuntansi kapitalisme yang memisahkan altruistik atau spiritualistik (sekularisasi) atas dasar “bebas nilai”.

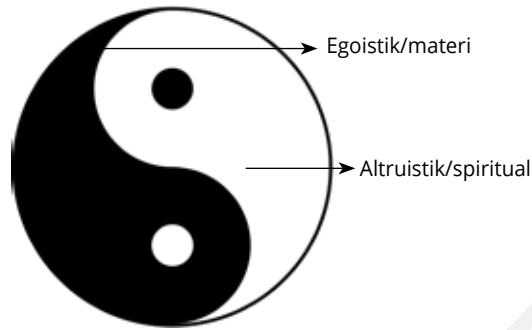
Kedua: Hubungan sama (*tasawi*), merupakan dua perbedaan universal yang berbeda makna, saling bertemu pada semua ekstensi keduanya.



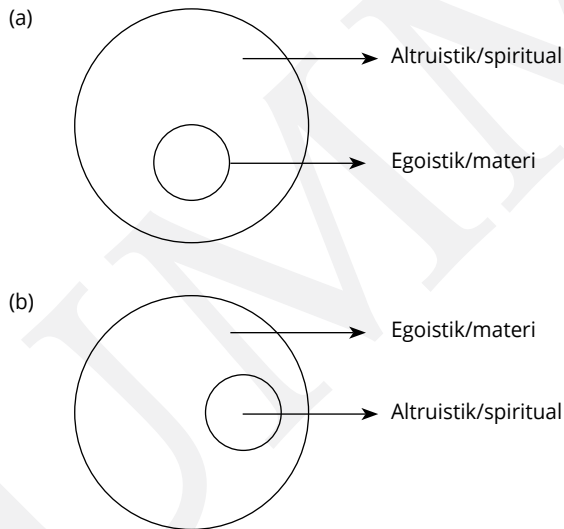
Daerah yang diarsir menandakan kesatuan perbedaan (eksistensi-esensi). Materialistik adalah spiritualistik, dan spiritualistik adalah materialistik ($A=B, B=A$). Hal ini dapat diterjemahkan bahwa penyatuan tersebut menciptakan dua karakter yang memiliki substansi yang sama yakni materialisasi spiritual atau spiritualisasi materi. Tingkat pencapaian spiritual selaras dengan pencapaian materi.⁶⁸

Ketiga: Kesatuan Ying dan Yang, merupakan kesatuan yang berbentuk *oposisi biner* yakni suatu keseimbangan yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang terbatas antar satu sama lain. “Ying” adalah eksistensi yang berbeda dengan “Yang”, begitupun sebaliknya. Kesatuan ini disebut kesatuan *oposisi biner* yang terdapat pada epistemologi berpasangan.

⁶⁸Selaras dengan gagasan Weber (2006) yang menegaskan kebangkitan kapitalisme Eropa adalah produk dari ajaran agama Protestan (khususnya sekte Chalvinisme). Ketika realitas transendental diterjemahkan secara materiil, maka akumulasi materi dijadikan sebagai tingkat penyembahan tertinggi manusia kepada Tuhannya di dunia.



Keempat: Hubungan umum dan khusus mutlak merupakan dua realitas pahaman universal yang berbeda makna, yang satu mencakup pahaman yang lainnya pada ekstensi keduanya, dan tidak sebaliknya.



Dari kedua diagram [(a), (b)] memiliki pola diagram yang sama, tetapi berbeda dalam memberi pemaknaan. Diagram (b) cukup merepresentasikan bentuk evolusi baru dari kapitalisme setelah bersimbiosis dengan filsafat pragmatisme, spiritual (agama) menjadi konsepsi yang diakui bukan secara esensi melainkan dipersepsi secara instrumental untuk kepentingan egoistik/materialistik.

Berbeda dengan diagram (a), spiritual adalah realitas tertinggi sebagai suatu strukturalisme transendental yang memanifestasikan dirinya dari universalitas ego menuju partikular. Ego partikular hanyalah manifestasi dari Ego Universal, yang memiliki fitrah untuk menyatu dengan sumber-Nya.

Di sinilah letak kemanunggalan, Ego Universal melampaui ego partikular. Bukan dalam pola keselarasan (kesetaraan). “*Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, ... yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, ... tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia*”⁶⁹ Tidak pula ada yang menyerupai-Nya,⁷⁰ sebab ia tidak memiliki sekutu (setara) dalam kerajaan-Nya.⁷¹ Hal ini yang menjadi model landasan epistemologi akuntansi Islam (pembebasan) dalam pola metafisika Islam (kemanunggalan), pembebasan (pensucian) akuntansi atas tenggelamnya ego menuju keluasan ego yang universal (altruisme), semuanya bersandar pada Tuhan (altruisme) sebagai pusat kepentingan dalam akuntansi.⁷² Bergerak dalam jaringan kuasa altruisme untuk mensucikan realitas lain.

D. Ringkasan

Epistemologi adalah dasar dari akar perbedaan teorisasi akuntansi kapitalisme, sosialisme dan Islam, sehingga memengaruhi pula realitas yang dikonstruksi sebagaimana akuntansi secara ideologis struktural berperan dalam mengkonstruksi realitas. Upaya dalam mendekonstruksi akuntansi kapitalisme akibat kelemahan akar epistemologi Barat yang pada dasarnya mengandung kontradiksi signifikan, yang memengaruhi kontradiksi dalam teorisasi akuntansi dengan menyuburkan pertentangan-pertentangan sosial. Meskipun akuntansi kapitalisme semakin menyesuaikan diri dengan “wajah” yang baru, lebih humanistik bahkan agamis, tetapi pertentangan akar epistemologi tidak pula memengaruhi dan keluar dari spiral substansi persoalan dasar akuntansi kapitalisme yang diperbudak oleh “egoisme”.

Metafisika Islam sebagai dasar untuk mendekonstruksi epistemologi Barat, dari rasionalisme instrumental menuju rasionalisme transendental dengan menghidupkan peran “intuisi” sebagai salah satu epistemologi Islam. Islam sebagai ajaran dalam posisi ini ditafsirkan secara doktrinal sebagai sebuah *counter* ideologi, menghasilkan pengideologisasian Islam dalam pola dialogis dengan konsepsi teoretis. Dengan demikian akuntansi Islam melampaui (*hyper*) makna akuntansi kapitalisme. Membebaskan akuntansi kapitalisme dari penjara-penjara materialitas sebagai realitas

⁶⁹QS Al-Ikhlas [112]: 1-4.

⁷⁰QS Al-Syuraa [42]:11.

⁷¹QS Al-Israa' [17]: 111.

⁷²Maka (*yang sebenarnya*) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar (QS Al-Anfaal [8]: 17).

yang sempit dan parsial menuju realitas transendental sebagai realitas hakiki dan universal (altruisme).

Upaya penjabaran epistemologi Islam dalam perspektif ini meniscayakan pola hierarkisasi antara peran egoistik dan altruistik, bukan dalam pola kesetaraan di antara keduanya (oposisi biner). Altruistik melingkupi keseluruhan ego, sebagaimana tempat meleburnya ego partikular adalah Ego Universal. Keseluruhan puncak kepentingan dalam akuntansi bersandar pada keluhuran “Tuhan” sebagai *stakeholders* sentral. Altruistik mengungguli dan melingkupi keseluruhan ego (egoistik). Dari kesadaran “Tuhan” menuju ke kesadaran “Tuhan”. Oleh karena itu, akuntansi harus bergerak dari kesadaran “Tuhan” menuju ke kesadaran “Tuhan” adalah akuntansi yang berkarakter “pembebas” dengan menolak atau dekonstruksi keseluruhan akar dari konsep akuntansi yang berwatak “berhala”, yang mereproduksi penindasan-penindasan sosial maupun alam.

6



Akuntansi Islam dan Metafora Pembebasan: Suatu Tinjauan Aksiologis

“

*Bangun dan bangkitlah!, Robohkan fondasi istana kaum kaya
Didihkan darah kaum tertindas dengan api iman,
Ajarlah burung gereja biar berani melawan elang
Saat rakyat berdaulat sudah dekat, Hapuskan sisa-sisa hukum
dan kebiasaan masa lalu*

*Buanglah bulir gandum dan kebiasaan masa lalu, Buanglah
bulir gandum di tegalan*

*Yang gagal memberi kehidupan kaum tani
Kemudian arahkan pandang kepada para pendeta, Dan
singkirkan mereka dari gereja*

*Sebab mereka berdiri bagaikan tirai besi yang memisahkan
Tuhan dan manusia*

*Padamkan lampu disemua kelenteng dan masjid
Karena mereka mencoba menipu Tuhan dan berhala-berhala,
Dengan sujud dan bicara tanpa makna
Aku muak dengan kemegahan palsu,
kelenteng pualam bangunkan daku kelenteng dari tanah*

(Muhammad Iqbal, 2008)

.....”

A. Hakikat Penciptaan dan Metafora Pembebasan dalam Akuntansi

Setiap ciptaan Tuhan adalah makhluk yang memiliki hakikatnya masing-masing di sisi Tuhannya.¹ Hakikat tersebut adalah risalah baginya untuk memuliakan dan memuji dengan “tasbih” kepada Tuhannya yang menciptakan. Semua realitas senantiasa memuji, berdzikir kepada Tuhannya sebagai wujud kerinduannya dengan berbagai caranya masing-masing.

1. Risalah Penciptaan Manusia

Manusia pada hakikatnya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna,² satu-satunya yang mampu³ menyerap risalah Tuhannya⁴ sebagai khalifah,⁵ pemimpin semesta mewakili Tuhannya untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman.⁶ Manusia satu-satunya makhluk yang memiliki eksistensi yang mendahului esensinya. Tabiat dasar eksistensi kemanusiaan itu tiada lain adalah “memberontak” untuk pembebasan sebagai jalan menuju penyempurnaan dirinya di hadapan Tuhannya.

Turunnya Adam ke bumi adalah bentuk penyempurnaan Adam secara spiritual merupakan *ikhthiar*, dipilih secara sadar untuk melaksanakan risalah Tuhannya sebagai makhluk yang terpilih sebagai khalifah (pembebas) untuk menebar rahmat Tuhannya.⁷ Sebab pada dasarnya ketika Adam hanya tinggal di “surga” maka ia melanggar tabiat penciptaannya, untuk mencapai tabiat kemanusiaannya itu makanya ia “memberontak” dengan memakan buah “*khuldi*”⁸. Pemberontakan adalah pencapaian spiritual

¹QS Ali ‘Imran [3]: 191; Al-Mu’minun [23]: 115.

²QS Al-Baqarah [2]: 34.

³QS Al-Ahzaab [33]: 72.

⁴QS Al-Hijr [15]: 29.

⁵QS Al-Baqarah [2]: 30; Fathir [35]: 39.

⁶QS Shaad [38]: 26.

⁷QS Al-Anbiyaa [21]: 107.

⁸QS Al-Baqarah [2]: 35. Merupakan Pohon yang dilarang Allah mendekatinya, tidak dapat dipastikan, sebab Al-Qur’an dan Hadis tidak menerangkannya. Dalam ajaran kristen pohon khuldi dipahami sebagai “pengetahuan”. Memakan buah *khuldi* membuat pengetahuan terbuka sehingga Tuhan merasa tersaingi hingga ia dikutuk dan diusir dari surga, makanya kristen mengenal istilah dosa turunan. Berbeda dengan Muthahhari (2010) menganggapnya sebagai salah satu cermin bahwa manusia memiliki potensi kebinatangan dalam dirinya yang dapat menggelincirkan manusia dari kesempurnaan. Yang pasti bahwa menurut penulis makanya Adam

kemanusiaan Adam yang pertama menuju tangga spiritual yang lainnya dan medannya di bumi yakni memakmurkan bumi dengan keadilan. Inilah Adam sebagai *Al-Insan*, bukan *Al-Basyar*,⁹ yang sampai pada kesadaran kemanusiaan. Risalah keadilan adalah risalah agama, sebab keseluruhan syariat agama (Islam) pada dasarnya mengandung substansi nilai yakni pembebasan.¹⁰ Ritual-ritual agama pada dasarnya adalah medium para Nabi untuk menyampaikan risalah penciptaan manusia kepada umatnya sesuai kapasitas umatnya dalam menyerap risalah. Risalah pembebasan adalah roh dari keseluruhan perangkat ibadah dalam Islam, itulah sebabnya dalam Al-Qur'an pelekatan makna ibadah selalu terintegrasi dengan hubungan manusia secara sosial dan alam semesta.¹¹

2. Akuntansi Islam sebagai Risalah

Risalah adalah segala bentuk amanah yang diamanahkan manusia dari Tuhannya, ia adalah perintah. Sebagaimana perintah Tuhan maka menghindarinya adalah bentuk pembangkangan manusia. Tidak ada perbedaan antara ketika Tuhan memerintahkan hamba-Nya untuk shalat

atas buah *khuldi* adalah simbol kesiapan diri Adam untuk menjalankan risalah penciptaannya di bumi, hal tersebut adalah momentum untuk turun ke bumi.

⁹Al-Basyar (QS Al-Kahfi [18]: 101; Fushshilat [41]: 6) adalah istilah dalam Al-Qur'an untuk menunjuk manusia secara biologis/fisik. Sedangkan Al-Insan (QS At-Tiin [95]:4; Ar-Ruum [30]: 30) menunjuk pada manusia secara intelektual dan spiritual. Dialog malaikat dengan Tuhan (QS Al-Baqarah [2]: 30) yang menganggap bahwa manusia hanyalah menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah adalah yang dimaksud manusia secara Al-Basyar. Yang tidak diketahui oleh malaikat sebagaimana kata Tuhan pada hakikatnya adalah manusia secara Al-Insan.

¹⁰*Syahadat* adalah komitmen manusia untuk menjalankan fungsi penciptaan untuk pembebasan dengan mempersaksikan ketiadaan Tuhan selain Tuhan yang sejati. Begitupun shalat yang memerintahkan untuk bersujud di tanah sebagai simbol kerendahan, pada dasarnya adalah bentuk pembebasan manusia dari segenap ego dan kesombongan untuk memanifestasikan ke dalam masyarakat berupa ketidaktundukan pada selain kehendak Tuhan. Begitupun dengan zakat, pembebasan dengan menyucikan diri dan pembebasan untuk memutus rantai ketimpangan. Begitupun dengan puasa membebaskan dari belenggu keserakahan terhadap materi dengan menahan hawa nafsu sekaligus membebaskan masyarakat dari terhindarnya dari potensi keserakahan dalam diri. Dan haji sebagai bentuk "penghinaan" diri yang paling dalam sebagai syarat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau sebagai komitmen akhir untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

¹¹Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar (QS Al-Ankabut [29]: 45).

atau berzakat dengan perintah untuk melaksanakan akuntansi (pencatatan) pada posisinya sebagai perintah, yakni melanggarnya adalah dosa.¹² Rasul bersabda: *Ada beberapa umatku yang doanya tidak terkabul yaitu seseorang yang berdoa atas pinjaman yang diberikan kepada orang lain sehingga berkurang sebagian hartanya tanpa dicatatnya dan tanpa memiliki saksi...*¹³, sehingga dapat dipahami bahwa akuntansi adalah bentuk peribadatan manusia dengan menjalankan perintah Tuhannya.

*Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,... dengan benar,... janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya,... janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar.*¹⁴ Hal ini menegaskan bahwa akuntansi Islam mengandung sifat *hudus* sebagai risalah, sarana untuk mengaktualkan fitrah kebaikan manusia, agar kebaikan tersebut sempurna di sisi Tuhannya agar manusia tidak terjerumus pada lubang yang dapat mengakibatkan ia lupa kepada kewajibannya sehingga bisa menghambatnya untuk menyempurna. Secara sosial akuntansi hadir untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat agar kemungkinan fitnah tidak hadir.

Dalam konteks yang lebih luas akuntansi Islam memiliki peran signifikan secara ideologis dalam memetakan dan menampakkan hak pada manusia yang mana *haq* (benar) dan yang mana *bhatil*. Tujuannya agar manusia tidak mencampurbaurkan antara keduanya.¹⁵ Karena kesalahan dapat mengakibatkan bencana dalam masyarakat.¹⁶ Inilah yang terjadi pada akuntansi kapitalisme ketika keserakahan manusia menjadi domain aktualitas, maka pada realitasnya “perampasan” hak antara satu sama lain pun terjadi.

Suatu “bencana” akuntansi ketika akuntansi dipasung dan disalib oleh kepentingan kerakusan manusia, menjadi alat untuk menindas yang “lemah”. Akuntansi kapitalisme justru menjadi sumber ketidakadilan dalam masyarakat. Berbeda dengan akuntansi Islam dalam posisi ini dipersepsi sebagai media untuk menegakkan keadilan, menampakkan siapa yang mengerjakan kebaikan (hak) dan siapa yang mengerjakan

¹²QS Al-Baqarah [2]: 282

¹³Lihat: Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al Huda, 2007), hlm. 112-113.

¹⁴QS Al-Baqarah [2]: 282.

¹⁵QS Al-Fajr [89]: 19.

¹⁶QS Al-Hujuurat [49]: 6.

kejahatan (kebatilan) meski seberat *zarrah* pun akan melihatnya (pertanggungjawaban).¹⁷ Segala sesuatu yang telah mereka perbuat (entitas bisnis) tercatat dalam buku-buku catatan, baik (urusan) yang kecil maupun yang besar.¹⁸

3. Metafora Pembebasan

Perbedaan kesempurnaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya adalah kesempurnaan manusia memiliki nilai yang lebih tinggi disebabkan karena keterikatan manusia dengan kesempurnaan adalah keterikatan *ikhthiar* (sebagai sebuah pilihan). Malaikat dan “batu” sekalipun kesempurnaannya bersifat niscaya, sebab ia tidak memiliki potensi untuk selain tidak menyempurna. Metafora penciptaan sesungguhnya pada manusia adalah risalah untuk melaksanakan “pembebasan” di muka bumi sebagai substansi paling mendasar dari amanah penciptaan manusia. Dalam artian manusia diamanahkan banyak risalah, tetapi keseluruhan risalah itu mengandung makna ideologis yakni “pembebasan”. Hanya dengan pembebasan maka “kerajaan” Tuhan dapat terwujud sebagai *rahmatan lil alamin*.

Pembebasan sebagai risalah kemanusiaan meniscayakan adanya subjek sebagai pembebas dan objek sebagai yang dibebaskan. Subjek adalah manusia keseluruhan sedangkan objeknya adalah keseluruhan semesta yang tertindas. Pembebasan berarti mengeluarkan manusia dari belenggu atau penjara kehidupan berupa keserakahan, sekaligus mengangkat dan memuliakan mereka para korban ketidakadilan sistem, mereka yang tertindas dan terampas hak-haknya serta tergilas kemanusiaannya.

Akuntansi Islam pembebasan bermakna yakni pembebasan jiwa akuntansi yang berwatak egois dan eksploitatif menuju jiwa altruisme sebagai puncak penyucian akuntansi. Meniscayakan pembebasan sosial sebagai realitas yang dikonstruksi. Sebab hakikat jiwalah yang menjadi sebab terciptanya akibat yakni penindasan,¹⁹ dalam artian akuntansi yang berjiwa eksploitatif dan egoisme akan mereproduksi pertentangan-pertentangan sosial dan alam.

¹⁷QS Al-Zalzalah [99]: 7-8.

¹⁸QS Al-Qamar [54]: 52-53.

¹⁹Analogi yang tepat seperti halnya Fir'aun pada dasarnya menjadi simbol manusia penindas dalam sejarah manusia disebabkan dirinya (jiwanya) yang “tertindas” dari belenggu-belenggu egoisme, pragmatisme dan keserakahan hingga mereproduksi penindasan-penindasan dalam sosial.

Di sinilah letak akuntansi Islam pembebasan merupakan refleksi teoretis sebagai sebuah doktrinal, struktur yang akan memperantarai keadilan Tuhan²⁰ untuk membumi di kehidupan manusia dengan memetakan keseluruhan hak-hak ciptaan Tuhan sebagaimana ketentuan Tuhan tentang itu. Sebab kekayaan alam semesta menurut Tuhan diciptakan untuk keseluruhan manusia,²¹ bukan untuk segelintir ataupun segolongan manusia. Begitupun halnya alam adalah makhluk Tuhan yang berkesadaran²² sehingga manusia diamanahkan untuk menjaganya dan memakmurkannya. Akuntansi Islam pembebasan berperan secara ideologis untuk menciptakan tatanan tersebut sebagai risalah kemanusiaan.

Metafora pembebasan menuntun akuntansi berorientasi pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan sebagai hak bersama terhadap kekayaan alam. Tidak hanya terjebak pada “formalitas” zakat melainkan memastikan zakat memerankan fungsi sosial pembebasan. Melampaui makna literal zakat yang terbatas pada hitungan kuantitatif yang kaku, menuju makna pembebasan. Wujud pembebasan sosial (berupa zakat²³) dalam akuntansi adalah bentuk manifestasi (turunan) sekaligus tujuan dari pembebasan jiwa akuntansi secara spiritual (altruisme). Akuntansi sebagai “lembaran” Tuhan yang memiliki kedaulatan untuk diisi dengan pena Tuhan. Bukan lembaran pemodal untuk kepentingan pemodal.

²⁰Pada hakikatnya ketidakadilan sebagai sebuah “kejahatan” alam seperti halnya kegelapan. Kegelapan atau ketidakadilan merupakan derivasi dari keadilan atau terang. Gelap muncul sebagai realitas non-eksistensial akibat dirinya yang menutup diri dari terang, bukan karena terang itu yang menghambat dirinya. Akuntansi kapitalisme yang mereproduksi ketidakadilan karena ia menutup diri dari keadilan (karena kepentingan).

²¹QS Al-Baqarah [2]: 29.

²²Dalam Islam semua ciptaannya adalah makhluk yang hidup dan berkesadaran disebabkan kesemuanya berasal dari yang Maha Hidup, kemustahilan Tuhan untuk memiliki sifat “kematian”. Semua bertasbih, memuja dan melantungkan dzikir kepada Tuhannya dengan cara yang berbeda-beda yang kadang tidak dimengerti oleh manusia (QS Al-Israa’ [17]: 44). “Kerasnya” batu adalah bentuk penyembahan yang tak kunjung henti kepada Tuhannya, sebagaimana api dengan membakarnya atau hujan dengan tetesannya.

²³Zakat dalam posisi ini dimaknai sebagai upaya akuntansi Islam dalam memetakan antara yang *haq* dan yang *bathil*. Upaya memisahkan antaranya adalah bentuk pembersihan akuntansi sebagaimana hakikat makna yang melekat pada filosofi zakat.

4. Penyempurnaan Risalah dan Eskatologi

Setiap manusia melekat tanggung jawab *amar ma'ruf nahi mungkar*.²⁴ Untuk manusia yang bergelut dengan akuntansi, maka tugas keprofesian melekat²⁵ pada bagaimana memastikan akuntansi menjadi *instrument* perantara terlimpahkannya kasih sayang Tuhan di muka bumi. Bukan sebaliknya menjadi *instrument* tercurahkannya murka Tuhan²⁶ lewat murka alam dan murka manusia.

Hanya dengan menjalankan risalah tersebut, maka kehendak Tuhan untuk mempusakai bumi kepada hamba-Nya yang saleh²⁷ dapat terwujud. Itulah realitas penyempurnaan risalah, sehingga dengannya Tuhan menghalalkan dan meridai eksistensi kemanusiaan kita dan halal untuk kembali kepadanya secara fitrawi dengan jiwa yang tenang dan hati yang puas.²⁸

B. Akuntansi dalam Pusaran Kekuasaan: Simbol Kekuasaan Teks

Sebagaimana manusia tersusun dari jiwa dan jasad antara yang tampak dan bersembunyi dibalik yang tampak, akuntansi juga demikian. Akuntansi bukan sekadar *instrument* “mati” dalam mencatat dan melaporkan semata, melainkan terkadang jiwa yang lebih substansial dibalik hanya sekadar mencatat dan melaporkan.

Dalam hal ini akuntansi sebagai sebuah teks (laporan keuangan) merepresentasikan kediriannya sebagai produk nilai, budaya bahkan ideologi, hadir untuk memapankan kuasa nilai, budaya maupun ideologi. Sebuah kuasa ideologi bertahan dan merembes ke segmen masyarakat

²⁴QS Ali 'Imran [3]: 110.

²⁵Sebagaimana kata Rasulullah: *Setiap kamu adalah penggembala dan setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya*. Lihat: Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 241.

²⁶Murka Tuhan yang penulis maksud di sini bukanlah untuk melekatkan sifat kemurkaan kepada Tuhan yang maha kasih dan suci, sebagaimana kasih-Nya mendahului murka-Nya. Tapi “murka Tuhan” adalah *ikhtiar* manusia itu sendiri. *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia* (QS Ar-Ruum [30]: 41).

²⁷QS Al-Anbiyaa [21]: 105.

²⁸QS Al-Fajr [89]: 27-30.

disebabkan karena rezim wacana (akuntansi). Akuntansi sebagai bahasa bukan hanya menjadi pencerminan kenyataan, melainkan menjadi sebuah “alat” yang dipergunakan dalam mengatur, menyusun, mengubah, bahkan menguasai kenyataan. Akuntansi sebagai bagian struktur memiliki *power* dalam menstrukturkan struktur-struktur baru dalam sistem yang kompleks, memengaruhi realitas politik, sosial bahkan budaya (nilai) dalam masyarakat.²⁹ Di sinilah akuntansi sebagai sebuah teks (laporan keuangan) merepresentasikan kuasa teks dalam mendeterminasi realitas struktur.

Kekuasaan sebagai manifestasi kepentingan maupun ideologi selalu bersembunyi dibalik pengetahuan lewat pengaturan-pengaturan maupun peraturan-peraturan (larangan dan perintah)³⁰ yang distandardisasi dalam bentuk standar akuntansi sebagai sumber kebenaran yang absolut. Upaya pendefinisian makna kebenaran akuntansi, terwujud dalam standar merupakan wujud kuasa dalam akuntansi. Ketika penjelasan ilmiah yang mapan berusaha menguasai dengan menyingkirkan penjelasan ilmu yang lain (absolutisme).³¹ Foucault (1969) menyebut pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan dan kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Diterimanya sebuah pengetahuan bukan hanya sekadar karena gagasan (ide), tetapi dominan karena kekuasaan yang menopang. Dibalik tampakan “anggun” laporan keuangan mengandung naluri (kepentingan) untuk menguasai.³²

²⁹Dalam posisi ini, akuntansi pada dasarnya adalah produk budaya, melibatkan unsur subjektif dalam pengagasannya, membawa kesadaran nilai (budaya) di mana akuntansi tersebut lahir. Penyebaran akuntansi secara absolut tidak dapat lepas dari bentuk penyebaran budaya (ekspansi budaya). Sebagai sebuah struktur, memiliki *power* dalam mendeterminasi kesadaran individu maupun masyarakat secara masif, sehingga mengandung kuasa dalam menggeser kesadaran nilai (budaya) yang baru bagi masyarakat, terletak pada pengambilan keputusan. Budaya yang dikandung akuntansi ketika diterapkan di masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda akan menciptakan *cultural shock* (guncangan budaya) yang berujung pada dua hal yakni terciptanya alienasi manusia atas kebudayaannya sendiri atau terciptanya model perlawanan yang baru.

³⁰Peraturan, pengaturan, larangan maupun perintah adalah *instrument-instrument* kekuasaan. Dalam konteks ini kekuasaan didefinisikan sebagai segala realitas yang mengandung kuasa untuk mengendalikan.

³¹Rasional dan irasional merupakan hukum-hukum bentukan keseluruhan perangkat-perangkat objek sebagai diskursif, dibentuk oleh institusi dengan label sebagai aktivitas ilmiah, mereproduksi kepastian-kepastian (absolut) dalam bingkai kuasa. Lihat: Foucault, *Pengetahuan dan Metode (terj.)* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 162-166.

³²Godelier (1972) menyebut: Apa yang tampak adalah realitas yang pada dasarnya menyembunyikan realitas lain yakni realitas yang lebih dalam dan tersembunyi.

Absolutisme akuntansi pada dasarnya juga merepresentasikan ekspansifikasi kepentingan. Meminjam istilah Althusser tentang aparatus ideologi, akuntansi dalam posisi ini adalah aparatus ideologi. Sebuah ideologi diterima karena ia menyebar ke berbagai segmen struktur maupun pengetahuan. Setiap aparatus memiliki kuasa dalam mengendalikan sebagai wujud penguasaan terhadap yang lain. Penguasaan kepada struktur adalah bentuk pencaplokan ideologis sebab struktur itu sendiri adalah aparatus ideologis. Upaya menolak adalah juga bentuk aparatus ideologi sebab tidak ada praktik apa pun kecuali melalui dan di dalam ideologi, dan ideologi itu sendiri berdiri di atas kepentingan.

1. Akuntansi sebagai *Practice*: Relasi *Habitus* dan *Field*

Teori *habitus* dan *field* diperkenalkan Bourdieu untuk menjelaskan sebuah realitas dan menepis pertentangan subjektifisme dan objektifisme di kalangan ilmuwan (Ritzer, 2003: 518). *Habitus* merupakan struktur mental atau kognitif yang digunakan *actor* untuk menghadapi kehidupan sosial, berada di dalam pikiran *actor* sebagai sistem disposisi yang mengakuisisi skema persepsi, pemikiran dan tindakan. *Habitus* tiada lain produk sejarah yang terbentuk setelah manusia berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, sifat yang tercipta karena kebutuhan dan realitas berhubungan dengan harapan-harapan, dalam hal ini *habitus* menunjuk pada agen.

Sedangkan *field* sering disebut sebagai “arena” jaringan relasi antar posisi objektif yang keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu, terbentuk dalam pola-pola tertentu dari kekuasaan (*power*) yang merupakan titik-titik pertemuan antar individu (agen). *Field* merujuk pada realitas yang berada di luar individu yang berbentuk struktur (Ritzer, 2003: 522-530). Relasi antara aktor/individu dengan ranah (*field-habitus*) akan menciptakan praktik/*practice*.

2. Akuntansi sebagai *Practice*: “Arena” Pertarungan

Practice sebagai produk hasil dialektis antara *habitus* dan *field* atau struktur dan keagenan (Ritzer, 2003: 519). *Habitus* pada dasarnya dibentuk oleh struktur, di samping berperan menstrukturkan struktur baru dalam sosial. Akuntansi yang lahir dari agen untuk membentuk kembali agen, dalam hal akuntansi kapitalisme membentuk agen-agen kapitalis,

begitupun dengan yang lainnya. Sedangkan arena menurut Bourdieu adalah sejenis pasar kompetitif, lahan pertempuran di mana arena juga merupakan arena perjuangan yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi untuk berupaya baik individu maupun kolektif, mengamankan atau meningkatkan posisi mereka dan menerapkan prinsip hierarkisasi, dapat berupa dominasi maupun subordinasi. Persaingan hadir sebagai upaya untuk menciptakan hierarkisasi kekuasaan.

Di sinilah letak ketika akuntansi menjadi *field* “arena” dan sarana pertarungan kepentingan tiada henti para agen-agen untuk menciptakan hierarkisasi kekuasaan. Akuntansi (kapitalisme) adalah wujud perjumpaan kepentingan dengan cara-cara dominasi terhadap yang “lemah”. Dan menurut Bourdieu posisi dari berbagai agen di arena tersebut ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif modal yang mereka kuasai. Modal menjadi tuan dari keseluruhan aparatus, yang memungkinkan orang mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain. Besaran dari berbagai macam modal yang dimiliki individu dan interaksinya dengan individu lain sebagai agen akan menentukan posisi objektifnya di dalam “ranah”. Agen yang memiliki kuasa terhadap modal akan menguasai “arena” dalam hal ini struktur akuntansi, tidak salah lagi ketika akuntansi kapitalisme dikuasai “pemodal” sebagai “pemenang” atas pertarungan dalam ranah sehingga memiliki kuasa terhadap akuntansi.

Pertarungan dan pertentangan kepentingan tidak hanya bersifat dominatif antara pemodal dan buruh, juga pemodal dengan masyarakat dan alam. Dalam konteks yang lebih luas pertarungan dalam “arena” juga melibatkan identitas kenegaraan secara luas yakni dikotomi antara negara maju dan berkembang. Bourdieu memahami bahwa pertarungan antara agen yang memiliki posisi dominan dengan agen yang memiliki posisi di bawahnya dalam suatu ranah, di mana keduanya akan saling memproduksi wacana yang dapat memperkuat posisi objektifnya dan memperlemah posisi subjektif agen lainnya. Wacana yang diproduksi agen tersebut dinamakan sebagai *doxa*.

Akuntansi kapitalisme yang berwatak eksploitatif yang lahir di negara maju, kelihatannya selalu memproduksi *doxa* sebagai wacana-wacana untuk memapankan kekuasaannya dalam struktur akuntansi. *Doxa-doxa* itu seperti halnya revisi-revisi akuntansi dan yang paling tenar beberapa waktu ini

adalah munculnya IFRS (*International Financial Reporting Standard*), suatu *doxa* untuk mempertahankan bahkan menguatkan kepentingan negara maju lewat kebijakan *absolutism* dan penyeragaman akuntansi untuk memapankan eksploitasi terhadap negara berkembang, yang dominan merepresentasikan kepentingan pasar transnasional. Tanpa memiliki keterkaitan sama sekali dengan kesejahteraan buruh, alam ataupun masyarakat yang tertindas.

Penindasan tidak lagi berada pada posisi kelas sosial dalam masyarakat, tapi bergeser secara regional. Seiring dengan peran negara sebagai pelaku pasar mendorong kesejahteraan semakin bertumbuh, batas-batas kelas semakin kehilangan batasannya, kelas sosial semakin terintegrasi. Dalam konteks tersebut secara nasional telah terjadi stabilisasi kelas, sehingga muatan pertentangan muncul sebagai kekuatan baru dalam konteks global yang merepresentasikan pertentangan negara antara negara maju terhadap negara berkembang. Akuntansi dalam posisi ini menjadi medium yang memperhalus wujud pertentangan (*imperialisme*) tersebut lewat penguasaan-penguasaan secara produktif lewat hegemoni pengetahuan dalam struktur akuntansi.

Begitu halnya dengan entitas bisnis, di tengah negara kehilangan perannya bahkan melegitimasi liberasi pasar, wujud atomistik entitas bisnis hadir dengan membawa pertentangan-pertentangan satu sama lain yang menghilangkan kekuatan batas-batas kelas melainkan muncul secara region (antara entitas bisnis). Upaya pembaruan negara tiada lain merupakan bentuk *symbolic violents* yang berarti *structural violents* (kejahatan struktural). Di sinilah letak bagaimana peran negara dalam konteks global begitu berkepentingan terhadap akuntansi, yang pada dasarnya merupakan produk kepentingan itu sendiri.

3. Objektivitas Pertarungan: *Class Struggle* dalam Struktur Akuntansi

Dalam entitas bisnis, struktur akuntansi kapitalisme sangat mencerminkan bagaimana pertentangan kelas begitu kuat dan dipertahankan. Sebab bukan kapitalisme ketika tidak ada pertentangan, landasan filosofi kapitalisme adalah kebebasan yang mengandung makna kompetisi (pertentangan). Pada realitasnya kompetisi meniscayakan munculnya ketimpangan yang cukup ironis. Gejala feodal dalam akuntansi

kapitalisme,³³ ketika manusia (buruh) diperlakukan setara dengan faktor produksi yang dikendalikan untuk kepentingan pemodal. Mesin dengan beban sewa, modal menciptakan beban bunga dan buruh “dibeli” dengan upah (beban upah dan gaji).

Pertentangan pada hakikatnya tidak hanya ditopang oleh persoalan etika berupa keserakahan, tetapi pertentangan-pertentangan muncul dalam konteks yang objektif dalam kuasa jaringan (relasi pertukaran).³⁴ *Going concern* adalah landasan *habitus* (agen) yang memapankan pertentangan akibat sistem kapitalisme yang meniscayakan hal tersebut. *Habitus* buruh dengan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga harus berbenturan dengan *habitus* pemodal dalam mempertahankan kepentingan laba perusahaan sebagai “nyawa” *survival*-nya perusahaan.

Pertentangan tidak hanya terjadi secara internal (majikan-buruh), tetapi muncul antara pemodal dengan pemodal, pertentangan secara kolektif antara entitas bisnis dengan entitas bisnis atas nama kompetisi untuk *going concern*. Ketika entitas bisnis yang lain dipersepsi sebagai “musuh” yang harus dilumpuhkan. Objektivitas pertarungan antara entitas dalam hal mempertahankan dominasi pasar untuk kelangsungan usaha. Maka yang jadi tumbal atas pertentangan tersebut adalah mereka yang “lemah” yakni buruh dengan ketidaksejahteraannya lewat penekanan upah (beban). Dan alam dengan kerusakannya demi mengakumulasi kekayaan hingga berdampak secara spiral.³⁵

Relasi sosial dalam akuntansi kapitalisme dibangun di atas dominasi-dominasi represif lewat hegemoni produktif yang dilegitimasi secara ilmiah atas nama pengetahuan. Mereproduksi gejala dehumanisasi dan bencana-

³³Dalam kapitalisme, filosofi manusia dipandang sebagai unsur materiil yang tidak ada bedanya dengan faktor produksi. Bahkan menurut Marx, manusia adalah produk dari dinamika faktor produksi.

³⁴Dalam ilmu sosial terdapat teori aktor jaringan, menolak kuasa agen maupun kuasa struktur (Latour, 1999; Law, 1999), yang mengasumsikan bahwa tidak ada esensi dalam realitas, tidak pula ada struktur yang menjadi *basic*, melainkan realitas kesadaran dibentuk oleh relasi yang terbangun. Aktor adalah bagian dan dibentuk oleh jaringan. Bukan agen bukan pula struktur yang membentuk realitas melainkan proses sosial yang memutar entitaslah yang membentuk realitas.

³⁵Itulah sebabnya ketika isu CSR dalam entitas kapitalisme harus dipersepsi sebagai produk yang “dijual” demi memenangkan kepentingan pasar. Di sini letak ketidakberdaulatan akuntansi, bahkan ikut memapankan hal tersebut, sehingga tercipta dominasi simbolik antara pemegang kuasa dan yang dikuasai.

bencana ekologis, hal tersebut timbul bukan hanya karena keserakahan melainkan muncul secara objektif bercengerama dalam logika *going concern*.

Ketika asumsi bebas nilai atau prinsip non-intervensi, *entity theory*, asumsi *unit monetary*, *matching principle*, semua menjadi *instrument* akuntansi kapitalisme yang lahir untuk melegitimasi semangat eksploitasi yang tak terkendali, demi tercapainya pencapaian laba sebagai indikator kinerja *going concern*-nya organisasi, simbol kemenangan dalam persaingan. Meskipun harus menggilas kepentingan buruh dan alam.

C. Hakikat Nilai dalam Islam dan Kedaulatan Buruh dalam Akuntansi

Aksiologi merupakan bentuk pengorganisasian konsepsi ontologi dan epistemologi untuk turun dalam menjawab realitas sosial sebagai sebuah tatanan nilai yang bersifat ideologis. Proposisi-proposisi yang terkait dengan realitas apa yang seharusnya agama (Islam) perankan dalam kehidupan menggiring kita untuk memahami makna dasar Islam dalam memandang nilai.

1. Buruh dan Fenomena Perbudakan dalam Peradaban Akuntansi

Realitas modernisme yang dibangun oleh nilai-nilai kapitalisme, pada kenyataannya telah mereproduksi gejala feodalisme baru yang bertampuk pada kuasa modal menggantikan kuasa tanah para bangsawan.³⁶ Tidak banyak manusia modern menganggap sejarah-sejarah keemasan yang ia sebut sebagai peradaban pada hakikatnya adalah simbol dan cerita masa lalu pada masa sekarang atas sebuah tragedi penindasan. Syariat menggambarkan realitas tersebut:

...Aku betul-betul tertarik pada peradaban. Di Yunani aku melihat tempat pemujaan, di Delphi yang membuatku tercengang karena keindahan artistik. Di Roma aku melihat museum seni berisi arsitektur,

³⁶Akuntansi dalam perspektif sejarahnya memainkan peran-peran tersebut dalam melegitimasi kepentingan penguasa. Dalam sistem feodal, akuntansi tidak ubahnya menjadi alat untuk mencatat kepentingan penguasa tanah. Dalam sistem kapitalisme, akuntansi tetap langgeng di bawah kepentingan penguasa modal. Hal ini menandakan bahwa sejarah akuntansi adalah sejarah kelam, merepresentasikan dominasi menuju dominasi yang lain dalam tampakan wajah yang baru.

biara, kastil dan istana. Di Timur jauh di Cina dan Vietnam candi-candi pemujaan para dewa dan biksu. Di Cina ada tembok raksasa Cina. Di Mesir aku melihat tiga piramida sebagai keajaiban masa lalu. Dengan hati terbuka, aku simak uraian dari pemanduku. Kami ketahui bahwa enam piramida besar dan tiga piramida kecil itu terbuat dari 800 juta keping batu yang diangkut para budak dari Aswan sampai Kairo dengan jarak 980 mil dari ibukota Mesir hanya untuk membangun sebuah tempat peristirahatan tubuh-tubuh Fira'un..., aku betul-betul takjub dengan keajaiban karya manusia ini. Pada sebuah sudut aku melihat goresan besar pada batu-batu itu. "apakah ini?". Bukan apa-apa, hanya sekumpulan batu jawab pemanduku. Yang merupakan tempat kuburan para budak yang dijejalkan di bawah piramida itu. Dari 30 ribu budak yang membawa sebungkahan batu yang berat dengan jarak ratusan mil, setiap hari ratusan di antara mereka tertindih batu raksasa itu. Begitu tidak berartinya mereka dalam sistem sehingga jenazah-jenazah itu dilemparkan dan dikuburkan di satu tempat, mereka yang bertahan hidup harus meneruskan membawa sisa-sisa bongkahan batu itu yang kini tinggal debu. Menurut kepercayaan mereka roh para budak itu akan tetap melayani Fir'aun di alam berikutnya. Aku betul-betul sadar bahwa dibalik kemegahan dan keagungan bangunan (peradaban) itu dibangun oleh mereka yang lemah yang kini terkubur di atas himpitan batu-batu besar (peradaban) itu. Beginilah semua karya besar umat manusia telah dibangun dengan biaya darah dan daging. Menurutku, peradaban tidak lebih sebagai sebuah kutukan...(Syariati, 2001: 1-3).

Hal ini cukup konteks untuk melihat "peradaban" dalam akuntansi yang merujuk pada kinerja sebagai puncak pencapaian nilai yakni laba. Laba dalam akuntansi modern adalah simbol peradaban manusia yang dicapai oleh sebagai wujud kinerja atau prestasi. Entitas bisnis dengan semangat kapitalistik hadir untuk membangun peradaban (laba) itu dengan berbagai bentuk penilaian kinerja yang positifistik seperti solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, dan lain-lain, semua adalah *instrument* akuntansi untuk dipersembahkan kepada pemegang kuasa modal.³⁷ Peradaban laba hanya selalu dipersepsi pada tataran pertumbuhan kesejahteraan akumulatif pemilik modal bukan pada pertumbuhan kesejahteraan buruh apalagi alam.

Sebuah peradaban kata Syariati tiada lain adalah "kutukan" yang meninggalkan jejak-jejak tragedi kemanusiaan. Para pemegang kuasa

³⁷Investor dan kreditor sebagai *stakeholders* utama dalam akuntansi kapitalisme.

(Fir'aun) berubah menjadi pemodal dan para budak kini berubah menjadi buruh akibat perubahan sistem ekonomi industrialisme. Para buruh yang menghabiskan waktu dan umurnya, mencurahkan keseluruhan tenaga tapi tidak mendapatkan haknya³⁸ sebagaimana yang ia curahkan. Meskipun entitas bisnis mengantongi kinerja yang memuaskan yakni laba yang begitu tinggi. Buruh adalah budak (*Romusha* dalam kolonialisasi Jepang) yang tereksplotasi dalam sistem kapitalisme yang tidak mendapatkan haknya (perampasan hak). Buruh yang membangun peradaban (laba) entitas bisnis, tetapi mati dalam himpitan peradaban (laba). Para buruh tenggelam, terhisap dan tersumbat haknya oleh serakahnya peradaban bisnis. Saldo laba yang tak terdistribusikan dalam akuntansi adalah simbol penindasan yang pada hakikatnya merupakan cerita-cerita tragedi kemanusiaan dalam entitas bisnis kapitalisme.

Ketika peradaban (kesejahteraan) segelintir orang dibangun di atas penderitaan sebagian besar orang yang lemah. Peradaban laba dicapai dengan jejak-jejak tragedi kemanusiaan dan alam. Berbeda dengan akuntansi Islam pembebasan menempatkan kinerja bukan pada peradaban laba (akumulasi), melainkan berorientasi pendistribusian sebagai tanggung jawab dengan menempatkan hak pada tempatnya, sebagaimana peribadatan dalam Islam hakikatnya adalah pengorbanan, hadir untuk menggantikan perbudakan (keserakahan). Tujuan produksi sebagai kinerja dalam Islam tiada lain adalah “pertambahan kesejahteraan”, bukan pertambahan (akumulasi) kekayaan.³⁹ Simbol peradaban dalam Islam ketika manusia berada pada derajat yang sama, kesejahteraan adalah milik semua *stakeholders*.

³⁸Itulah sebabnya di Republik ini dan di seluruh dunia menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh, simbol untuk memperjuangkan haknya. Di Indonesia sendiri demonstrasi buruh sebagai wujud pertentangan begitu dalam antara buruh dan majikan tidak hanya terjadi pada hari buruh melainkan setiap waktu. Cukup ironis ketimpangan yang begitu tidak memanusiakan, sebagian (satu) korporasi asing yang pendapatannya melebihi 10 kali lipat pendapatan negara berkembang justru membiarkan buruh begitu terhimpit atas serakahnya “peradaban” bisnis. Untuk konteks Indonesia Sutjahtjo (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB) menyebut tidak lebih dari 10 persen masyarakat Indonesia dari keseluruhan yang mencapai 240 jutaan yang menikmati kekayaan alam Indonesia (metrotvnews.com, 06/05/2012).

³⁹Rasulullah pernah berkata: *Tidak ada yang menimbun makanan kecuali pendosa dan sesungguhnya ia terkutuk. Siapa pun yang telah menimbun makanan selama 40 hari berarti telah berlepas diri dari Allah dan Allahpun berlepas diri darinya.* Lihat: Qorhasi, 2007, *op. cit.*, hlm. 213.

2. Hakikat Nilai dalam Islam dan Doktrin Pasca Produksi: Landasan Aksiologis Akuntansi (Islam) Pembebasan

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh umat Islam adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang sehingga menyebabkan ketimpangan dan kemelaratan sebagian yang lainnya. Fenomena kemiskinan adalah bentuk tidak berjalannya norma dan nilai Islam dalam masyarakat. Menurut Chapra (2000: 262-264), konsentrasi kekayaan merupakan indikator utama runtuhnya tatanan nilai (keadilan, persaudaraan) dalam Islam. Upaya menata kembali memberi peran akuntansi Islam pembebasan hadir untuk merombak pola-pola feodal yang bercorak sentralisasi kuasa kekayaan menuju desentralisasi kuasa kekayaan dengan mengembalikan makna nilai dalam doktrinal Islam. *Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja.*⁴⁰

a. Hakikat Nilai dan Kerja dalam Islam: Tinjauan Fikih

Islam menempatkan asas kepemilikan pada proses kerja, menolak penguasaan kekayaan berdasarkan dominasi karena pertarungan dan unjuk kekuatan manusia. Tiada kepemilikan dan hak-hak privat yang primer berkenaan dengan kekayaan alam, bila tiada kerja yang terlibat (Baqir, 2008: 248). Kerja adalah dasar bagi perolehan hak yang bersifat properties (hak properties).⁴¹ *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*⁴²

Allamah Hilli dalam kitabnya *At Tadzkirah* dalam Baqir (2008: 244) mengatakan: Air pasang yang mengakibatkan masuknya air dalam sebidang tanah, tidak bisa menjadi milik pemilik tanah tersebut, sebagaimana seekor burung menetas telur dan membesarkan anaknya dalam sarang, seekor rusa yang terperosok dalam lumpur dan ikan yang meloncat dalam perahu, ia (pemilik sarana) tidak menjadi pemilik atasnya (air, burung, rusa, ikan), disebabkan ia tidak mencurahkan usaha di dalamnya.

Allamah Hilli, dalam kitab *Asy Syarai* (bab: *Wikalah*) dalam Baqir (2008: 313) menegaskan: Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil untuk menebang kayu di hutan demi kepentingannya (yang menyuruh),

⁴⁰QS Al-Hasyr [59]: 7.

⁴¹Hak properties merupakan hak atas hasil kerja berupa kekayaan bergerak yang bersifat utilisasi/pemanfaatan.

⁴²QS An-Najm [53]: 39.

maka orang penunjuk tidak menjadi pemilik dari kayu yang ditebang oleh yang ditunjuk. Alasannya adalah pekerjaan menebang kayu di hutan atau sejenisnya pada dasarnya tidak menghasilkan pengaruh atau hak khusus apa pun kecuali bila ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu.

Al Isfaani dalam kitab *Ijarah* dalam Baqir (2008: 316) mengatakan: Mengupah pekerja (dalam kasus kekayaan alam), tidak memberikan hak kepemilikan kepada si pengupah atas apa pun yang dihasilkan pekerja lewat kerja fisiknya, jika pekerja beroleh hasil maka itu menjadi miliknya dan pengupah tidak mendapat apa-apa. Syekh At Thusi dalam kitab *Al Mabsuth* dalam Baqir (2008: 317) mengatakan: Jika seseorang individu memerintahkan orang lain menangkap hewan buruan untuknya, milik siapakah tangkapan itu seharusnya? Maka dalam kasus ini hewan buruan yang didapat sepenuhnya menjadi milik orang yang melakukan perburuan bukan menjadi milik yang menyuruhkannya.

Itulah kemudian dalam beberapa riwayat Rasulullah sangat memuliakan para buruh/pekerja. Menempatkan pekerja sebagai *mujahid fisabilillah*,⁴³ kerja dapat menjadi sebab ampunan Allah⁴⁴ bahkan riwayat Rasul mengatakan adanya dosa yang tidak dapat ditebus oleh shalat, sedekah dan haji melainkan ditebus lewat kerja.⁴⁵ Buruh yang bekerja secara manual sangat dipuji dan dihargai Nabi Saw. dengan telapak tangannya yang kasar. Dalam sebuah riwayat, Nabi Saw. pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa'ad bin Mu'az tatkala melihat tangannya kasar akibat bekerja keras. Nabi seraya berkata: "Inilah dua telapak tangan yang dicintai Allah".⁴⁶

b. Kedaulatan Buruh dalam Akuntansi Islam: Doktrin Pasca Produksi

Dalam teori kapitalisme faktor produksi seperti upah, *profit*, sewa, dan bunga diletakkan pada pijakan yang sama untuk diserahkan kepada mekanisme pasar.⁴⁷ Dengan menempatkan profit di luar dari struktur

⁴³HR Ahmad.

⁴⁴HR Ahmad dan Ibnu Katsir.

⁴⁵HR Thabrani.

⁴⁶Dalam riwayat lain Rasul juga sering mencium dan mengangkat tangan para buruh sambil mengatakan "inilah tangan yang tak akan disentuh oleh api neraka". Lihat: Qorashi, 2007, *op. cit.*, hlm. 214-249.

⁴⁷Seperti halnya tanah, mesin, modal sebagai faktor produksi, maka buruh pun juga diperjualbelikan (pasar tenaga kerja).

pendistribusian yang lainnya. *Profit* adalah sarana kepemilikan untuk pemodal (pemegang saham) yang dalam sistem kapitalisme menempati strata hierarki tertinggi dalam pemenuhan hak. Islam dalam konteks distribusi *pasca* produksi memandang bahwa hasil produksi (bahan mentah/alami) sepenuhnya adalah milik pekerja. Berbagai *instrument* dan alat produksi yang digunakan oleh pekerja dalam proses produksi tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan. Semua hanyalah sarana yang membantu pekerja dalam mencapai tujuan aktivitas produksi. Jika sarana-sarana ini merupakan milik individu (pemilik sarana) maka pekerja harus membayar pemilik sarana atas sarana yang disediakan untuknya bagi pekerja dalam memperoleh manfaat (Baqir, 2008: 320-321).

Jadi manfaat yang didistribusikan tidak menjadi bagian atas produk yang dihasilkan melainkan pembayaran yang lahir dari penggunaan manfaat atas sarana produksi. Jadi doktrin Islam tentang distribusi *pasca* produksi, pekerja adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan sedangkan faktor produksi materiil tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan. Pekerja menempati posisi seperti debitur, sehingga dengannya wajib membayar kompensasi kepada pemilik sarana (Baqir, 2008: 321).

Perbedaan Islam dan kapitalis dalam posisi ini, adalah dari sisi status manusia di antara faktor produksi. Kapitalisme menempatkan manusia sebagai bagian dari faktor produksi meskipun itu secara sepihak berdasarkan kriteria kelas sosial yakni buruh, sedangkan kapitalis (manusia penguasa modal maupun sarana) bertindak layaknya “raja” dalam sistem feodalisme modern. Manusia adalah faktor produksi bukan tujuan produksi. Sehingga buruh berdiri di atas pijakan yang sama dengan semua faktor produksi yang lain seperti tanah maupun mesin (alat).

Berbeda dengan Islam, yang memosisikan sarana produksi sebagai alat yang membantu manusia menjalankan aktivitas produksi bukan *partner*, sehingga pada tataran teoretis bagian hak yang diperoleh pekerja harus berbeda dengan yang menjadi bagian sarana produksi. Jika sarana tersebut milik orang lain selain pekerja dalam hal ini pemodal, maka pekerjalah yang memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi atas jasa dan sarana faktor produksi tersebut sebagai sewa. Kompensasi bermakna utang yang bersifat wajib.

Perbedaan sistem kapitalisme dan Islam, dalam posisi kepemilikan atas bahan mentah alami. Kapitalisme dengan model produksi kapitalistik cenderung menindas kaum buruh, misalnya kapitalis (pemilik modal)

mengupah buruh untuk melakukan proses kerja dan hasil dari kerja tersebut menjadi milik kapitalis yang diperoleh dari hasil kerja buruh secara keseluruhan. Akibatnya kapitalislah yang memiliki kuasa penuh atas hasil dan berhak menjual dengan nilai yang dikehendaki⁴⁸ di luar campur tangan buruh sebagai pemilik kerja.

Berbeda dengan doktrin Islam yang tidak memberi ruang segelintir pemilik modal menindas mayoritas pemilik kerja. Sebagaimana dalam Islam menganggap kerja langsung adalah syarat bagi perolehan kepemilikan atas bahan mentah alami. Pekerja beroleh hak sepenuhnya atas hak kepemilikan. Doktrin ini dengan jelas menolak perolehan hak kepemilikan atas dasar pengupahan pada pekerja. Kekuatan modal seolah-olah menjadi kekuatan dalam menciptakan akses kepenguasaan terhadap sumber daya, melebihi eksistensi kerja. Pekerja menjadi pemilik, bukan karena statusnya sebagai pemilik saham atau pemilik sarana produksi tetapi murni karena pemilik kerja. Seperti kata Qorashi (2007) “Keringat buruh lebih mahal daripada modal”.

c. *Constant Phenomena* sebagai Dasar Kepemilikan Atas Properties

Muhaqqiq An Najafi dalam kitab *Al Jawahir* dalam Baqir (2008: 329) mengatakan: Jika dalam kontrak kaitan antara pemilik tanah, pemilik benih, pemilik kerja dan pemilik alat dalam suatu kontrak pertanian, maka jika benihnya adalah milik penggarap maka hasilnya adalah milik penggarap, di samping harus membayar biaya sewa alat dan sewa tanah. Jika benih adalah milik si pemilik tanah, maka ialah yang memiliki kepemilikan atas

⁴⁸Dalam kapitalisme penguasaan (pemodal) terhadap hasil produksi memberi kewenangan untuk menentukan nilai (harga) hasil produksi, biasanya mengikuti hukum-hukum pasar. Dalam konteks ini persoalan ketidakadilan dalam pendistribusian hak (ketimpangan) bukan berakar pada persoalan harga jual hasil produksi, tetapi terletak pada pemetaan hak atas penguasaan hasil produksi. Dalam artian meskipun harga dinaikkan dengan margin yang begitu besar, dalam sistem penguasaan berdasarkan kuasa modal, tetap saja menghasilkan ketimpangan yang ironis, sebab kenaikan atas margin harga tetap menjadi kuasa penguasa modal (sebab sistem perburuhan biasanya berdasarkan kesepakatan diplomatis, tarik menarik kekuatan antara pemodal atau manajemen dengan buruh, sehingga upah buruh cenderung tetap (konstan), terlepas dari naiknya harga jual barang). Apalagi dalam Islam kebijakan harga berpatokan pada harga yang berkeadilan, tidak bersandar pada kebebasan mengambil keputusan (seperti dalam kapitalisme), tidak pula berdasar pada hukum pasar (permintaan dan penawaran) yang cenderung mendorong manusia untuk berspekulasi memanfaatkan kondisi pasar dalam mendulang keuntungan (eksploitasi konsumen).

hasil di samping wajib membayar upah untuk pekerja dan sewa untuk pemilik alat. Tetapi jika benih adalah milik bersama maka hasil dibagi dalam sistem bagi hasil yang proporsional.

Kepemilikan mengikuti kaidah asalnya (sumbernya). Dalam hal ini akses kepemilikan atas properti mengikuti asal kepemilikannya sebagai pemilik bahan baku di luar dari properti alami. Berbeda dengan teori Marxis yang menempatkan kerja secara total sebagai dasar nilai atas hak tanpa membedakan unsur propertiesnya apakah ia adalah bahan alami atau ia adalah barang yang telah memiliki status kepemilikan sebelumnya. Hukum kekonstanan Islam berlaku untuk pengolahan barang yang dasarnya telah memiliki status kepemilikan (bukan bahan alami).

Dalam Islam, bila bahan baku yang digunakan dalam aktivitas produksi, yang mana pekerja mencurahkan kerja padanya, bukan merupakan milik orang lain (selain pekerja) maka pekerja akan memiliki seluruh produk yang dihasilkan. Sementara seluruh faktor lain yang ikut serta dalam aktivitas produksi dipandang sebagai pembantu pekerja dan akan mendapat upah darinya. Seluruh faktor lain itu tidak dipandang sebagai *partner* pekerja yang berbagi kepemilikan atas komoditas yang dihasilkan, tidak pula dipandang berdiri di atas pijakan yang sama dengan pekerja (Baqir, 2008: 334).

Namun jika bahan baku digunakan dalam aktivitas produksi merupakan milik individu tertentu maka keadaannya tetap begitu, dalam artian komoditas yang dihasilkan sepenuhnya akan menjadi milik si empunya bahan baku. Inilah disebut oleh Baqir (2008: 334) sebagai fenomena kekonstanan. Pemilik alat tidak berhak atas kepemilikan hasil produksi. Perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan nilai atas properti tidak mengubah status kepemilikannya.⁴⁹ Kepemilikan tidak diserahkan kepada mereka yang memiliki alat produksi (kapitalis). Dan kerja di sini merupakan dasar langsung bagi pelimpahan kepemilikan berupa hak atas hasil kerja yang bersifat *ujrah* (yakni kewajiban pemilik untuk membayar kompensasi kepada pekerja tanpa melihat hasil dari kerja (untung atau rugi).

d. Pengaruh Doktrinal Nilai dalam Sistem Kerja Sama

Al Mudharabah sebagai salah satu sistem kerja sama dalam hal penanaman modal (*partner* pasif) dan pekerja (*partner* aktif). Iman Ali

⁴⁹Perubahan papan menjadi meja, tidak mengubah status kepemilikan atas meja tersebut yakni pemilik papan.

berkata “Siapa saja yang menjamin saudagar pemilik modal untuk mengembalikan modalnya, maka saudagar yang bersangkutan hanya berhak atas modalnya dan tidak punya bagian atas profit”. Sehingga syarat sah *Al Mudharabah* adalah menjamin pembebanan risiko modal kepada pemilik modal dan risiko kerja kepada pekerja. “Bagi hasil” hanya dapat terjadi atas kerja lewat proses hukum pembebanan sebagai syarat akad (perjanjian) bukan atas dasar sewa (alat dan sejenisnya). Sebab tanpa pemenuhan syarat tersebut maka yang terjadi bukanlah kontrak persekutuan melainkan kontrak pinjaman, yang mana profit milik sepenuhnya oleh pekerja (Baqir, 2008: 345-346).

Dalam hal ini Muhaqqiq Al Hilli dalam kitab *Asy Syara’i* (bab *Al Mudharabah*) dalam Baqir (2008: 350) mengatakan: Jika pemilik alat berburu, dengan meminjamkan alat itu kepada seorang pekerja (pemburu) dengan ketentuan ia (pemilik alat) akan mendapatkan sepertiga bagi hasil buruan, dan pekerja (pemburu) menyepakatinya, maka ini bukanlah kesepakatan *Al Mudharabah*. Pada hakikatnya hewan buruan (sebagai hasil) akan menjadi milik pekerja (pemburu) yang menangkapnya. Sedangkan pemilik alat tidak berhak mendapat bagian dari hasil (bagi hasil). Yang ia (pemilik alat) dapatkan hanya biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pekerja (pemburu) atas alat tersebut. Pemilik alat produksi tidak berbagi hasil atas kekayaan produksi, karena hanya kerja langsung yang terlibat dalam hasil produksi yang dapat berbagi hasil.⁵⁰

Dalam hal ini partisipasi seorang dalam aktivitas produksi dengan sekadar memberi alat dan sarana, tidak membuatnya berhak mendapat bagian profit. Begitupun dalam kontrak *Al Muzariah*, ketika pemodal hanya menyediakan alat pertanian maka ia tidak berbagi hasil dengan petani

⁵⁰Sama halnya ketika rumah disewakan, dan penyewa memanfaatkan rumah itu untuk berusaha, sama sekali hasil usaha tidak berbagi kepemilikan terhadap pemilik rumah. Pemilik rumah seperti pemilik alat dalam produksi berhak mendapatkan hak berupa sewa, tapi bukan bagi hasil dari hasil produksi. Di sinilah letak perbedaan keadilan antara Islam, kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme menyerahkan sepenuhnya pada pasar (negosiasi), unjuk kekuatan dengan saling mengeksploitasi, memanfaatkan kelemahan masing-masing. Sosialisme berpatokan pada kebutuhan sebagai dasar keadilan, bekerja atau tidak, sama sekali tidak memengaruhi perolehan hak, sebab hak dasarnya adalah kebutuhan. Sedangkan Islam memuliakan kerja sebagai salah satu dasar kepemilikan, tidak menempatkan manusia (kerja) setara dengan faktor material produksi, di samping Islam mengakui adanya hak yang tidak berasal dari kerja (berdasar kebutuhan orang-orang lemah berhak menerima nilai lebih atas kebutuhan, disebut zakat).

(pekerja). Bagi hasil hanya sah ketika pemodal (*partner* pasif) menyediakan tanah beserta benihnya (Baqir, 2008: 349-351). Seperti kata Syekh At Thusi dalam Baqir (2008: 344) “tidaklah sah kontrak pertanian sebelum *partner* pasif menyediakan tanah dan benih dan mewajibkan pekerja untuk mengelolanya”.

e. Store Labour sebagai Dasar Nilai

Sewa atas alat produksi pada hakikatnya seperti halnya dengan alokasi nilai berdasarkan kerja. Sebab suatu alat produksi, hakikat nilai terletak pada kerja yang terkandung di dalamnya. Pengukuran nilai (sewa) berdasar pada depresiasi alat sebagai bentuk depresiasi kerja yang terkandung. Bangunan dasar teori Islam tidak lepas dari alokasi nilai berdasarkan kerja (yang terdepresiasi dalam alat produksi) hal ini disebut kerja tersimpan (*store labour*) (Baqir, 2008: 363) sehingga tetap mempertahankan sisi doktrinal nilai yang menempatkan “kerja” sebagai syarat nilai.

Batasan nilainya adalah konsumsi kerja yang terdepresiasi. Dengan demikian tidak ada dikotomi antara upah buruh yang mencurahkan kerjanya secara langsung, dengan pemilik alat yang mencurahkan kerjanya secara tak langsung atas alat. Itulah sebabnya Islam mengharamkan sistem sewa ganda untuk memperoleh keuntungan, misalnya seseorang menyewakan barang kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyewakan pula barang tersebut kepada pihak ketiga dengan margin yang lebih besar daripada hubungannya dengan pihak pertama, tanpa ada curahan kerja yang bersifat modifikasi atas barang tersebut, maka dalam Islam hal ini dianggap haram, seperti halnya dalam kerja, sistem pelimpahan kerja yang dengan mengambil untung atasnya.⁵¹

Itulah juga sebabnya dalam Islam sangat menolak (haram) sistem bisnis yang berorientasi sebagai perantara untuk mendapatkan keuntungan. Seperti halnya dalam sistem jual beli yang memperpanjang waktu terjadinya transaksi atau memperpanjang mata rantai kegiatan untuk mendapatkan

⁵¹Seorang penjahit yang diupah oleh konsumen untuk kerja menjahit, lantas penjahit menyerahkan kepada pihak lain (penjahit lain) untuk melaksanakan dengan menetapkan upah yang lebih rendah dari sebelumnya dengan asumsi untuk mendapatkan keuntungan atasnya, maka hal ini haram dalam Islam disebabkan tidak adanya kerja terhadap barang ia curahkan atas keuntungan. Lihat: Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam* (terj.) (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), hlm. 351-356.

keuntungan tanpa ada proses curahan kerja yang terlibat dalam artian tidak ada proses produksi yang berlangsung (penciptaan *utility*) (Baqir, 2008: 105), sebagaimana asumsi sebelumnya.

f. “Risiko” Bukan Dasar Pembentukan Nilai Ekonomis

Islam sangat menolak kepemilikan atas dasar risiko (spekulasi), sebab risiko bukan kerja bukanlah komoditas melainkan adalah kondisi mental. Menakutkan rasa takut memang adalah nilai psikologis dan moral yang tinggi, tetapi tetap saja hal tersebut bukan nilai ekonomi. Risiko adalah hakikat nilai yang dijadikan sebagai syarat tertinggi dalam sistem kapitalisme melebihi syarat kerja yang terkandung sebagai proses kerja. Akibatnya model distribusi dalam sistem kapitalisme terakumulasi kepada mereka yang mendasarkan kepemilikan atas risiko (pemodal). Islam dalam akad *Al Mudharabah*, kepemilikan atas pemodal tidak didasarkan atas risiko melainkan karena kepemilikannya atas barang atau hasil kerja. Itulah sebabnya bunga dianggap haram dalam Islam, sebab dasar kepemilikan hak atas bunga merupakan produk dari asumsi risiko atas modal.

Mereka yang melakukan praktik riba pada hakikatnya tidak bisa membedakan mana *haq* dan mana *bhatil* (mencampurbaurkan antara nilai psikologis dan nilai ekonomis), sehingga Tuhan menyebutnya sebagai orang gila.⁵² Tuhan menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba,⁵³ dalam artian Tuhan merestui sistem *mudharabah* tapi melarang sistem bunga. Bunga artinya jaminan atas aktivitas pinjaman tanpa melihat untung atau ruginya bisnis. Apa pun yang bersifat jaminan (syarat) maka hal tersebut adalah riba, tidak terbatas pada aspek bunga. Itulah sebabnya terminologi “riba” dalam Al-Qur’an merupakan simbol kezaliman (penindasan) sosial ekonomi.

Lantas apa perbedaan antara bunga dan sewa? Bunga dan sewa sama-sama memastikan adanya pengembalian. Tapi hal ini berbeda dalam hal bahwa dalam sewa ada *store labour* yang terdepresiasi sedangkan bunga tidak terdapat depresiasi atasnya, disebabkan pada dasarnya uang hanyalah alat tukar-menukar, bukan hasil produksi rill.

⁵²QS Al-Baqarah [2]: 275.

⁵³*Ibid.*

D. *Unity Theory*⁵⁴: Refleksi Atas Konsepsi Kepemilikan Sumber Daya dan Filosofi Masyarakat dalam Islam

Unity theory pada dasarnya merupakan proses dialektis sebagai turunan nilai dari epistemologi, ontologi Islam (pembebasan), serta teori sistem yang terefleksikan atas konsepsi filosofis doktrinal kepemilikan sumber daya dan filosofi masyarakat dalam Islam. *Unity theory* adalah wujud penggambaran dari kesatuan realitas antara Tuhan, manusia dan alam, yang melekat dalam akuntansi untuk “membebaskan” yang tertindas agar tercipta kesejahteraan manusia dan alam.

1. Doktrin Pra-Produksi dan Hak Milik Atas Sumber Daya Alam dalam Islam

Secara umum setidaknya ada tiga yang termasuk faktor produksi yakni sumber daya alam, alat-alat produksi, dan manusia. Ketiganya memiliki derajat dan fungsi yang berbeda. Alat produksi pada hakikatnya adalah produk itu sendiri sebagai hasil, sehingga faktor produksi yang bersifat natural hanyalah sumber daya alam (mentah atau alami). Berbeda dengan kapitalisme⁵⁵ maupun sosialisme-marxisme,⁵⁶ dalam Islam kepemilikan atas faktor produksi natural tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak pula bergantung kondisi sejarah melainkan diatur oleh ketentuan

⁵⁴Penggunaan kata “teori” yang dimaksud di sini bukan teori sebagaimana terminologi Barat tentang ilmu pengetahuan (bebas nilai dan empirikal). Hal ini yang dimaksud adalah doktrinal atau sisi doktrin Islam tentang nilai, sehingga *unity theory* bermakna doktrin Islam yang berangkat dari filosofi dasar Islam secara ideologis. Penggunaan kata “teori” semata untuk mengangkat doktrin Islam dalam kancah dinamika wacana yang berlangsung.

⁵⁵Dalam kapitalisme kepemilikan atas faktor produksi diserahkan pada mekanisme pasar, kepemilikan atas faktor produksi (sumber daya alam) tak terbatas. Akibatnya kecenderungan monopoli merupakan hal yang wajar dalam kapitalisme sebagai aktualitas kepemilikan individu yang *absolut*.

⁵⁶Dalam Marxisme, pola distribusi faktor produksi mengikuti perubahan sejarah yang bersifat deterministik. Komunal primitif ditandai dengan sistem distribusi atas dasar kepemilikan bersama secara komunal, sistem *agriculture* membentuk pola distribusi yang berbasis feodalisme, sistem produksi industrial-teknologi membentuk pola distribusi yang berbasis kapital. Hingga pada tahap akhir sejarah sistem produksi kembali dalam bentuk barunya berupa komunal modern dengan basis distribusi ditentukan oleh kelas *proletar*. Penindasan adalah hal yang niscaya untuk lahirnya kemerdekaan.

syariah yakni mutlak merupakan kepemilikan bersama yang digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Kepemilikan terhadap sumber daya alam⁵⁷ (tanah, barang tambang, mineral, air, dan lain-lain) dan seluruh kekayaan alam adalah milik bersama (*communal emansipatoris*). Disebabkan belum adanya rekayasa manusia di dalamnya (sebagai hak properties). Filosofi ini meniscayakan tidak adanya hukum yang seharusnya melegalkan kepemilikan eksklusif atas sumber daya. Kekayaan bumi diciptakan untuk semua manusia⁵⁸ bukan untuk segelintir orang khususnya yang memiliki kuasa modal. Tuhan sebagai pemilik yang *absolut*,⁵⁹ dan manusia dalam koridor sebagai pemegang amanah hanya diwajibkan untuk menikmati lewat kerja⁶⁰ berdasarkan batasan kebutuhan,⁶¹ di luar (melampaui) dari kebutuhan adalah bentuk “perampasan” hak,⁶² sebab hal tersebut adalah milik atau hak manusia yang lain.

Aktivitas pengelolaan atas arena eksploitasi kekayaan alam seperti tambang dan pemanfaatan tanah pada dasarnya hanyalah memiliki hak prioritas dalam menikmati hasil kerja bukan hak milik eksklusif (Baqir, 2008: 201), disebabkan kekayaan yang terkandung dalam perut bumi

⁵⁷Doktrin kepemilikan dalam Islam bersandar pada filosofi yang menempatkan Tuhan sebagai pemilik absolut, berbeda dengan kapitalisme (individu yang absolut) dan sosialisme (masyarakat yang absolut), di sini letak konsep bahwa kapitalisme dan sosialisme sama (antroposentrisme). Dalam Islam tidak ada kepemilikan eksklusif apa pun bentuknya melainkan yang bersandar pada ketentuan Tuhan, dalam artian kepemilikan Islam dibatasi oleh ketentuan Tuhan, sedangkan kapitalisme dibatasi oleh individu, dan sosialisme oleh masyarakat. Dalam konteks ini Islam satu-satunya ideologi yang memiliki konsep kepemilikan non-absolut yang bervariasi (kepemilikan pribadi, publik, umat, dan negara). Tuhan sebagai pemilik absolut, dalam konteks Rasul (sebagai pemimpin politik, negara dan spiritual) berhak mengintervensi keseluruhan bentuk kepemilikan yang ada (sesuai ketentuan Tuhan). Misalnya kepemilikan pribadi yang difungsikan (merugikan) dapat diintervensi. Kepemilikan negara pada hakikatnya merepresentasikan kepentingan umat, bangsa dan masyarakat. Tidak ada perbedaan dari sisi kepentingan antara kepemilikan bersama dan kepemilikan negara. Kepemilikan bersama diintervensi, diatur oleh negara untuk kepentingan bersama itu sendiri.

⁵⁸QS Al-Baqarah [2]: 29.

⁵⁹QS Al-Hadid [57]: 2.

⁶⁰QS An-Najm [53]: 39.

⁶¹QS Al-Baqarah [2]: 219.

⁶²Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak (QS Asy-Syuraa [42]: 42).

adalah hak bersama.⁶³ Rasul menganggap bahwa “*masyarakat pada dasarnya berserikat dalam tiga perkara yakni air, api dan rumput*”.⁶⁴

Kepemilikan dalam Islam berfungsi sosial atau dibatasi oleh sosial, dalam artian ketika fungsi sosial tidak berjalan maka kaidah *fiqh* menggugurkan kepemilikan atasnya. Dikarenakan status sumber daya kekayaan alam adalah milik bersama, maka dalam prosedur pengelolaan institusi bisnis yang mengeruk kekayaan bumi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan hasil (nilai) ke masyarakat,⁶⁵ disebabkan status nilai tersebut tersimpang hak⁶⁶ manusia yang lain atas dasar kepemilikannya atas kekayaan bumi. Sehingga pendistribusian nilai ke masyarakat tidak bersifat *vouuntary* (pilihan), tetapi sebuah kewajiban yang dapat dipaksakan disebabkan statusnya sebagai hak.⁶⁷ *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk*

⁶³Misalnya untuk air yang digali dalam perut bumi, pihak penggali mempunyai hak istimewa di dalamnya yakni hak prioritas tetapi bukan hak milik. Wajib hukumnya ia membagi air tersebut secara gratis kepada masyarakat yang lain setelah kebutuhan terpenuhi tanpa ada imbalan. Ini menandakan air bukan objek bisnis yang harus dikomersilkan seperti halnya kayu di hutan. Tidak ada hak khusus bagi siapa pun atasnya. Lihat: Baqir, 2008, *op. cit.*, hlm. 239-242.

⁶⁴HR Ibnu Abbas.

⁶⁵Pendistribusian tersebut adalah zakat yang menjadi hak masyarakat lemah. Zakat dalam posisi ini berbeda dengan pajak, meski memiliki kesamaan sifat (memaksa). Pajak adalah kewajiban negara, sedangkan zakat adalah kewajiban agama. Zakat akan tetap ada meski negara tidak ada selama agama masih ada. Begitupun pajak sebagai kewajiban negara tidak memandang apakah objek pajak “beragama” ataupun tidak, tidak pula memandang apakah ia kelas sosial atas, menengah ataupun bawah sekalipun. Sedangkan zakat dalam posisi ini diwajibkan untuk yang berkelebihan sebagai hak yang berkekurangan. Pajak difungsikan untuk pengorganisasian negara, tanpa memandang posisi kelas, sedangkan zakat memiliki fungsi spiritual dan pembebasan masyarakat lemah. Membedakan antara pajak dengan zakat bukan berarti memisahkan persoalan agama dari negara. Dalam konteks akuntansi Islam, pajak adalah hak negara dalam entitas bisnis sebagaimana negara adalah *stakeholders*. Di samping masyarakat lemah juga memiliki hak zakat disebabkan pula karena statusnya sebagai *stakeholders*. Negara menarik pajak disebabkan karena entitas bisnis menikmati dan memanfaatkan jasa negara baik fasilitas keamanan, izin beroperasi, dan lain-lain. Untuk konteks Indonesia pajak tidak mampu membebaskan masyarakat lemah, sebab jumlah pajak (Rp 1193 T) untuk memenuhi belanja pemerintah saja (Rp 1683 T) sudah tidak cukup (BPS, APBN 2013).

⁶⁶Di sini jelas bahwa pendistribusian hak (nilai lebih) dari entitas bisnis ke masyarakat dalam Islam bukan karena alasan bahwa perusahaan berinteraksi dengan masyarakat (sebagaimana dalam *stakeholders theory, enterprise theory*), melainkan Islam memandang bahwa di dalam kekayaan bumi yang dikeruk pada dasarnya tersimpang hak masyarakat yang lain atas dasar kepemilikan alam adalah kepemilikan bersama.

⁶⁷Hak adalah segala sesuatu yang dapat dituntut disebabkan statusnya yang dapat diklaim.

orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁶⁸ Tuhan mengecam dan mengancam manusia yang melanggar hak orang lain.⁶⁹

2. Filosofi Masyarakat dalam Islam

Berbeda dengan kapitalisme⁷⁰ dan sosialisme,⁷¹ Dalam Islam, masyarakat adalah sebuah eksistensi yang riil dan substansial⁷² sebagaimana individu yang memiliki karakter dan personalitas (riil).⁷³ Tidak ada dikotomi antara keduanya, dalam hal ketika individu riil maka pada dasarnya masyarakat pun riil disebabkan dibentuk oleh yang riil (individu). Relasi antara keduanya seperti unitas dalam pluralitas dan pluralitas dalam unitas. Di mana individu di samping bertanggung jawab terhadap diri⁷⁴ juga bertanggung jawab pada kolektivitas masyarakat.⁷⁵ Kekeliruan dalam tindakan individu akan berdampak pada masyarakat begitupun sebaliknya.⁷⁶ Seperti halnya kemiskinan, ketimpangan adalah di samping produk individu, pada saat yang sama juga adalah produk masyarakat.

a. Makna “Ummah” dalam Masyarakat Islam

Masyarakat Islam adalah fenomena masyarakat yang diikat oleh ikatan ideologis sebagai makhluk teomorfis, bukan fenomena yang proses sosial

⁶⁸QS Adz-Dzariyaat [51]: 19.

⁶⁹QS An-Nisaa' 4: 30.

⁷⁰Kapitalisme yang bersandar pada filosofi kebebasan memandang eksistensi masyarakat hanyalah imajiner dan yang riil adalah individu disebabkan karena pada hakikatnya masyarakat hanyalah realitas yang disusun oleh individu.

⁷¹Sedangkan sosialisme memandang bahwa eksistensi masyarakat itulah yang riil dan substansial, individu hanyalah bentukan masyarakat sehingga eksistensinya tidak riil. Masyarakat mendahului individu, individu produk sejarah dan masyarakat. Tindakan individu adalah ekspresi dari kesadaran masyarakat. Itulah kemudian dalam sosialisme mendasarkan akar penindasan pada hak milik individu. Kepentingan individu harus dikorbankan untuk menghormati masyarakat.

⁷²QS Al-A'raaf [7]: 34; Al-Jaatsiyah [45]: 28; Al-An'am [6]: 108.

⁷³QS Al-Baqarah [2]: 54; Al-Israa' [17]: 7; Ar-Ruum [30]: 28; At-Taghaabun [64]: 16.

⁷⁴QS Al-Muddatstsir [74]: 38; Az-Zukruhf [43]: 26; Saba' [34]: 25.

⁷⁵QS Al-Haqqah [69]: 30-34; Al-Muddatstsir [74]: 42-44.

⁷⁶Nabi Saw. menggunakan perumpamaan: “*Sekelompok orang naik sebuah kapal. Kapal berlayar membelah lautan. Setiap penumpang duduk di tempatnya masing-masing. Salah seorang penumpang yang beralih bahwa tempat duduknya adalah khusus miliknya mulai membuat lubang di tempat duduknya. Kalau penumpang yang lain segera mencegah perbuatannya, mereka bukan saja akan menyelamatkan diri mereka sendiri namun juga menyelamatkannya.*”

terjadi atas dasar kepentingan dan kebutuhan semata. Di sinilah letak filosofi makna kata “*ummah*”, hasil penelitian Watt dalam Syariati (1989: 42-44) menegaskan bahwa istilah “*ummah*” digunakan untuk menamai jamaah yang dibentuk oleh Islam, melampaui makna *nation*, *people*, *qabilah*, ras, massa, *mujtama*, *thabaqah* (kelas), bukan pula *qaum*. Syariati mendefinisikan *ummah*⁷⁷ sebagai kelompok manusia yang bergerak maju bersama-sama menuju suatu tujuan kesempurnaan yang di dalamnya terdapat gerakan, tujuan dan ketetapan hati yang sadar. Bergerak menuju kesempurnaan secara kolektif atas ikatan persaudaraan ideologis.

Unsur kejiwaan menyatu⁷⁸ sebagai satu kesatuan *ummah*.⁷⁹ Muthahhari menyebutnya sebagai ego kenabian melampaui ego ras, suku bahkan kemanusiaan.⁸⁰ *Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan bagimu.*⁸¹ Meletakkan “cinta”⁸² di atas segala kepentingan sebagai puncak penyembahan.⁸³ *Tidaklah beriman umatku ketika ia kenyang di tengah yang lain dalam kelaparan padahal ia mengetahuinya.*⁸⁴ *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*⁸⁵

⁷⁷Ummah adalah simbolitas dari “gerak” seperti *thawaf* sebagai gerak mengelilingi *kabbah* secara terus-menerus, tanpa henti, tanpa simpangan, tanpa regresi dan bergerak pada poros yang tetap, yang di dalamnya tidak terdapat makna hierarkis kelas sosial baik atas nama jabatan, kekuasaan ekonomi, ras maupun status sosial. Diikat oleh ikatan ideologis (Islam) yang bermakna kekerabatan. Mengarahkan fitrah menuju penyempurnaan kemanusiaan. Lihat: Syariati, *Ummah dan Imamah (terj.)* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 17.

⁷⁸Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa umat ini adalah umat terbaik.

⁷⁹QS Al-Anbiyaa [21]: 92.

⁸⁰Lihat: Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagad Raya (terj.)*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 249-261.

⁸¹QS At-Taubah [9]: 128.

⁸²Imam Ali mengatakan “*hanya dalam masyarakat mukmin sajalah dapat membicarakan cinta*”. Muthahhari, 2008, *ibid.*, hlm. 257.

⁸³Imam Ali pernah berkata: *Sungguh buruk rasanya kalau aku sampai dikuasai hawa nafsuku dan keserakahan lalu aku memilih hidangan yang lezat padahal di Hijaz dan Yamamah bisa jadi ada seseorang yang tak punya harapan untuk memperoleh roti kasar dan yang belum pernah makan sampai kenyang!. Pantaskah kalau aku tidur dalam keadaan kenyang padahal ada perut-perut yang keroncongan dan hati yang tersiksa disekitarku?.* *Ibid.*, hlm. 264.

⁸⁴HR Bukhari

⁸⁵QS At-Taubah [9]: 71.

b. *Cooperative* bukan Kompetitif: Tipikal Masyarakat Islam

Entitas bisnis adalah masyarakat ekonomi yang dibentuk secara ideologis berdasarkan nilai. Berbeda dengan kapitalisme⁸⁶ maupun sosialisme,⁸⁷ Islam memandang masyarakat pada dasarnya baik, sebagaimana individu yang dituntun oleh fitrahnya. Masyarakat Islam adalah satu kesatuan seperti hubungan tubuh dengan organnya⁸⁸ menyatu dalam kesadaran yang sama (setara).⁸⁹ Dalam pandangan Islam bukanlah masyarakat Islam ketika sebagian yang lain sejahtera di tengah kemelaratan yang lainnya.

Tuhan mengancam tindakan manusia yang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, tetapi memuliakan hambanya yang berlomba-lomba dalam kebaikan.⁹⁰ Tabiat dasar penciptaan manusia adalah “*Al Alaq*” yang berarti “ketergantungan”,⁹¹ manusia diciptakan dengan membawa sifat ketergantungan kepada pihak lainnya,⁹² agar dapat saling memberi manfaat (kerja sama)⁹³ sebagai dasar terjadinya proses sosial yang konstruktif. Bukan dengan menganggap perbedaan sebagai sarana untuk saling melumpuhkan satu sama lain atas nama “persaingan” atau memanfaatkan secara sepihak

⁸⁶Kapitalisme memandang masyarakat sebagai proses interaksi sosial merupakan pertemuan antara kepentingan individu dengan yang lainnya. Landasan masyarakat kapitalisme adalah kepentingan. Kesejahteraan dapat terwujud ketika setiap individu bertindak atas dasar kecintaan terhadap diri masing-masing (kepentingan). Seorang yang membeli barang ke toko bukan karena “kebaikan” melainkan karena kepentingan, di saat yang sama memenuhi kepentingan pemilik toko. Jadi masyarakat akan “hidup” dan sejahtera atas dasar kompetisi.

⁸⁷Sosialisme memandang kalau masyarakat dibentuk oleh sejarah, dan puncak kesempurnaan masyarakat ketika semua orang bekerja atas dasar “paksaan” konsekuensi atas ketiadaan hak milik. Lenin berkata kami tidak mempekerjakan kaum buruh dengan menganggap mereka sebagai orang-orang merdeka yang mau bekerja ataupun tidak mau bekerja. Tapi kami mempekerjakan mereka dengan menganggap mereka sebagai orang-orang yang memikul tanggung jawab untuk bekerja, karenanya mereka tidak memiliki hak untuk meninggalkan pekerjaan yang telah ditetapkan untuk mereka. Rusia mengeluarkan keputusan 24 September 1930 dan keputusan 10 Agustus 1940 berupa hukuman bagi mereka yang menolak pemaksaan kerja sepuluh tahun di kamp-kamp kerja paksa. Lihat: Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 197-201.

⁸⁸HR Muslim dan Bukhari.

⁸⁹QS Al-Hujurat [49]: 11.

⁹⁰QS Al-Baqarah [2]: 148.

⁹¹QS Al ‘Alaq [96]: 2.

⁹²QS Az-Zukhruf [43]: 32.

⁹³QS Ali ‘Imran [3]: 103; At-Taubah [9]: 71.

(menindas yang lemah). Sebab indikator kemuliaan manusia ada pada kecenderungan untuk berbuat baik.⁹⁴ Manusia bukan hanya dipandang sebagai *homo economicus*, melainkan ia adalah makhluk teomorfis. Dalam artian manusia diciptakan berpasang-pasangan bukan untuk “bertarung” melainkan saling melengkapi untuk bekerja sama.

Kemustahilan ketika antara organ dalam tubuh bersaing satu sama lain,⁹⁵ sebab pada hakikatnya manusia berasal dari diri dan umat yang satu.⁹⁶ Sebab, “*seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya.*”⁹⁷ Inilah yang dimaksud *ukhuwah* dalam Islam, *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu.*⁹⁸

3. *Unity Theory*: Tuhan sebagai Pusat Kepentingan

Berbeda dengan *proprietary theory* yang menempatkan pemilik sebagai pusat akuntansi, *entity theory*⁹⁹ yang memosisikan perusahaan sebagai pusat kepentingan, atau teori dana (*fund theory*) yang mengakomodir kepentingan penyandang dana sebagai pusat (primer) akuntansi. Akuntansi

⁹⁴QS Al-Hujuraat [59]: 13; Saba' [34]: 4.

⁹⁵Dari Nu'man Ibn Basyir “*Anda akan menyaksikan orang-orang mukmin itu dalam hal kasih sayang, cinta dan kerja sama mereka seperti satu tubuh. Yang mana apabila ada satu anggota tubuh yang merasa kesakitan akibat terlalu terjaga karena demam, maka anggota tubuh yang lainpun akan merasakannya*”

⁹⁶QS An-Nisaa' [4]: 1; Al-Baqarah [2]: 213.

⁹⁷HR Bukhari.

⁹⁸QS Al-Hujuraat [49]: 10.

⁹⁹Triyuwono menegaskan bahwa pergeseran *proprietary theory* menuju *entity theory* pada dasarnya tetap meninggalkan substansi yang sama bahkan justru *entity theory* semakin menguatkan *proprietary theory* secara *legitimate*, meskipun kuasa akuntansi berpindah dari pemilik ke perusahaan, yang pada hakikatnya perusahaan adalah representasi pemilik juga. Sebagai gantinya, entitas bisnislah yang sekarang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan pendapatan dan kekayaannya sendiri, tentu saja dengan orientasi tetap untuk kesejahteraan pemilik perusahaan. Artinya sama saja memberi legitimasi “normatif-etis” karena pemilik kekayaan adalah entitas bisnis itu sendiri, pemilik perusahaan tidak perlu lagi terbebani dengan pertanyaan etis tentang harta kekayaannya. Konsep *entity* pun tidak perlu memperhitungkan legitimasi semacam itu karena ia dianggap alat yang netral dan memiliki personalitas tersendiri yang independen dari kepentingan perorangan. Sementara itu, problem legitimasi normatif-etis kekayaan pemilik dianggap bukan merupakan *concern* konsep ini karena pemilik dianggap sebagai pihak eksternal (*outsiders*). Lihat: Triyuwono, Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/Maret 2003.

Islam menempatkan Tuhan sebagai pusat kepentingan dalam akuntansi.¹⁰⁰ Disebabkan keseluruhan realitas *absolut* adalah milik-Nya. *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.*¹⁰¹ Sebab, *siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?.*¹⁰² *Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran.” Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?*¹⁰³

Di sinilah keterkaitannya untuk memahami posisi akuntansi Islam sebagai teori akuntansi yang memiliki kedaulatan untuk memperantarai tegaknya keadilan Tuhan di bumi. Sebab akuntansi Islam tidak menempatkan penguasa modal sebagai pusat kepentingan dalam akuntansi baik yang berbentuk penyandang dana, pemegang saham maupun pemilik perusahaan. Mereka hanyalah *stakeholders* yang diamanahkan untuk mencurahkan usaha secara *cooperative* untuk menegakkan risalah penciptaannya sebagai makhluk yang diciptakan dalam posisi yang setara.¹⁰⁴

Tuhan sebagai pusat kepentingan meniscayakan bahwa akuntansi Islam adalah akuntansi pertanggungjawaban kepada pusat (pemilik). Pertanggungjawaban kepada-Nya selaras dengan risalah penciptaan untuk memakmurkan alam semesta dan menegakkan risalah keadilan sekaligus melawan kezaliman. Dalam hal ini mengerucut pada konteks pendistribusian hak berdasarkan ketentuan pemilik-Nya. Pertanggungjawaban adalah domain utama laporan keuangan sebagai produk akuntansi Islam.

a. *Shari'ate Enterprise Theory*

Pemikir seperti Triyuwono (2006), Harahap (2007) dan Mulawarman (2006) menganggap bahwa *enterprise theory* adalah teori yang paling dekat

¹⁰⁰Islam memandang bahwa keseluruhan realitas bersumber, bertumpu dan menuju kepada sumber-Nya (Tuhan) (QS Luqman [31]: 28). *Hanya kepada Allahlah dikembalikan segala urusan* (QS Al-Anfaal [8]: 44). Tuhan adalah pusat akuntansi, berasal dari kesadaran Ketuhanan menuju ke kesadaran Ketuhanan. Jaringan kuasa Tuhan melingkupi keseluruhan konsep akuntansi.

¹⁰¹QS Az-Zukhruf [43]: 32.

¹⁰²QS An-Nisaa' [4]: 87.

¹⁰³QS Yunus [10]: 35.

¹⁰⁴QS An-Nisaa' [4]: 1. Semua manusia dalam Islam dipersepsi sederajat disebabkan mereka berasal dari asal usul yang sama (Adam dan Hawa) yang diciptakan dari esensi yang sama. Hal ini merupakan simbol perlawanan Islam terhadap segala model perbudakan termasuk dalam akuntansi kapitalisme.

dengan syariah yang dapat dikembangkan. *Shari'ate enterprise theory* (SET) merupakan hasil derivasi *enterprise theory* yang telah didekonstruksi. Berbentuk perluasan cakupan *stakeholders*, tidak hanya terbatas pada *stockholders* yang menjadi domain teori akuntansi kapitalisme. Dalam menerjemahkan konsep teori tersebut dalam praktik, lahirlah laporan nilai tambah syariah (*shari'ate value added*) yang digunakan untuk menyempurnakan konsep *income* (laba rugi) dalam akuntansi kapitalisme yang sarat dengan nilai egoistik dan pragmatis.

Dengan demikian, dalam pandangan SET, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam bisnis seperti pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau *skill*. Cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* atas pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan bisnis.

Zakat adalah *instrument* penyucian setelah *enterprise theory* disucikan dengan menambahkan nilai tauhid, sehingga terbentuklah istilah *shari'ate value added* yakni turunan *enterprise theory* yang telah di-tazkiyah oleh nilai tauhid (Mulawarman, 2006). Triyuwono (2007) menganggap SET dapat "membangkitkan kesadaran Ketuhanan" bagi para penggunanya.

Enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi partisipan yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau *skill* maupun yang tidak memberi kontribusi dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan sebuah asumsi bahwa perusahaan eksis disebabkan karena berinteraksi dengan masyarakatnya sebagai konsekuensi dari kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat. Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006: 354) menegaskan bahwa yang berhak atas nilai tambah *shariah enterprise theory* yakni: *Pertama*, pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan disebut sebagai *direct stakeholders* (pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah). *Kedua*, yang tidak terkait langsung disebut *indirect stakeholders* (masyarakat sebagai penerima zakat, *infaq* dan sedekah dan lingkungan alam).

b. Penglibatan "Kompetitor"

Dalam akuntansi Islam (pembebasan), penglibatan keseluruhan *stakeholders* secara teoretis dalam akuntansi merupakan konsekuensi teoretis

dari sisi doktrinal Islam yang memandang bahwa kekayaan alam pada dasarnya adalah milik bersama, sehingga siapa pun baik yang berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas nilai entitas bisnis. Berbeda dengan akuntansi kapitalisme (seperti *enterprise theory*) yang membangun argumentasi teoretis pragmatis atas penglibatan masyarakat, yang diasumsikan atas terjadinya interaksi pragmatis antara perusahaan dan masyarakat. Islam dalam posisi ini mengasumsikan penglibatan masyarakat sebagai konsekuensi doktrinal Islam tentang nilai. Seperti halnya Islam juga secara doktrinal memandang masyarakat sebagai satu kesatuan (ummah) bukan dualitas yang melahirkan kompetisi. Penglibatan masyarakat dalam pendistribusian nilai adalah bentuk pengejawantahan makna ummah dan hak milik bersama, yang secara teoretis tergambarkan pada teori sebelumnya. Hak masyarakat lemah tersimpang dalam entitas bisnis yang mengeruk kekayaan alam bukan lantaran masyarakat memiliki kepemilikan modal atas entitas bisnis, bukan pula karena ia hidup di sekitar perusahaan dengannya ia berinteraksi secara pragmatis dengan perusahaan, tetapi hak masyarakat melekat karena kepemilikannya atas sumber daya dan kekayaan alam baik yang terkandung dalam perut bumi maupun di permukaan bumi.

Begitupun halnya secara doktrinal berbeda dengan kapitalisme,¹⁰⁵ dalam Islam, sistem ekonomi harus berlandaskan pada *cooperative*. Sebab perusahaan hadir untuk berbuat baik, maka tidaklah mungkin untuk berbuat baik harus saling melumpuhkan atas nama kompetisi. Akibatnya posisi “kompetitor” dalam sistem kapitalisme dapat dipersepsi sebagai yang tertindas (*sing liyan*) pada akuntansi Islam pembebasan.

Kompetitor (yang tertindas) memiliki hak yang sama dengan *stakeholders* lainnya dalam mendapatkan nilai lebih untuk tetap melangsungkan kelangsungan hidup usahanya. Di sinilah letak makna ummah (berjamaah),¹⁰⁶ di samping ketika dilihat dalam pendekatan sistem,

¹⁰⁵Dalam sistem kapitalisme kesejahteraan dibangun atas dasar kompetisi (pertentangan), pusat kesejahteraan dibangun terletak pada pemodal lewat *trickle down effect*. Kebebasan pasar menciptakan pertentangan yang akan menggiring pada sistem monopolistik atas dasar penguasaan pasar secara sepihak, sehingga melumpuhkan “kompetitor” merupakan medium untuk mencapai nilai sebagai kinerja baik secara individu maupun dalam sistem kerja sama (*holding company*, kartel, dan lain-lain).

¹⁰⁶Berbeda dengan realitas umat Islam hari ini, makna berjamaah hanya didapatkan dalam ritual-ritual ibadah yang temporer. Berjamaah (dalam konteks kebaikan) telah kehilangan rohnyanya dalam masyarakat khususnya dalam bisnis. Yang ada hanyalah kompetisi (individual), berkelompok atas dasar kepentingan materiil semata.

eksistensi pelaku pasar (*competitor*) niscaya pada dasarnya merupakan sebuah sistem untuk mempercepat desentralisasi kekayaan. Musnahnya pelaku pasar atas dasar kompetisi dapat mengguncang kestabilan sistem secara keseluruhan. Bangkrutnya usaha dapat mengakibatkan PHK sehingga tentunya mereproduksi kemiskinan-kemiskinan baru dari pengangguran. Seperti kata Scivotsky dalam Chapra (2000: 17) “kemiskinan di tengah-tengah manusia kaya tidak lain adalah simpton dari kerusakan mendalam”.

Dalam Islam dipahami bahwa teori akuntansi yang mencampakkan entitas bisnis lainnya pada hakikatnya masih mengandung unsur *egoistic*, belum mencapai tatanan altruistik yang hakiki.¹⁰⁷ Sehingga mustahil dapat mencapai kesejahteraan bersama sebagai tujuan dasar akuntansi Islam. Sebab secara doktrinal dalam Islam “siapa pun” yang tertindas merupakan bentuk “perampasan” hak akibat kesalahan sistem. Semua manusia memiliki posisi yang sama untuk mendapatkan haknya yang melekat pada kekayaan bumi.

Di sinilah letak ketika peng gagasan akuntansi harus dipandang secara integratif (mikro dan makro). Sebagaimana Islam sebagai rahmat bagi keseluruhan alam, bukan rahmat untuk segelintir manusia saja. Sebab masyarakat yang menindas dan membiarkan masyarakat lain tertindas seperti kemiskinan di tengah lautan kemewahan, kebangkrutan di tengah kesuksesan yang lain bukanlah masyarakat Islam.

c. “Generasi Mendatang” sebagai *Stakeholders*

Alam semesta diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang sempurna.¹⁰⁸ Nikmat Tuhan yang tak terbatas diciptakan untuk memenuhi hajat hidup manusia.¹⁰⁹ Tetapi realitas kerusakan dan kelangkaan akibat penguasaan secara timpang atas ulah manusia yang mengeksploitasi melampaui dari batasan haknya yang telah digariskan oleh Allah.¹¹⁰ Seperti kata Ghandi “kekayaan alam sangat lebih dari cukup untuk makhluk Tuhan tapi sangat sedikit untuk manusia yang rakus”. Kerakusan segelintir manusia mengakibatkan bencana bagi keseluruhan makhluk, termasuk generasi mendatang yang

¹⁰⁷Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri (HR Muslim dan Bukhari).

¹⁰⁸QS As-Sajdah [32]: 7.

¹⁰⁹QS Al-Kautsar [108]: 1.

¹¹⁰QS Asy- Syuraa [42]: 27.

hanya mewarisi “ampas” yang tiada lain adalah penderitaan dan bencana kemanusiaan.

Kapitalisme memosisikan alam secara *inferior* (pelayan) bagi manusia yang *superior*. Alamlah yang dituduh sebagai penyebab persoalan kemanusiaan (kelangkaan dalam postulat ekonomi)¹¹¹ yang dinisbahkan dengan sifat yang terbatas, dengan melegitimasi keserakahan manusia yang dimitologikan tak terbatas. Sedangkan sosialisme menganggap persoalan ekonomi adalah persoalan faktor produksi¹¹² yang mereproduksi akar persoalan ideologis yakni hak milik. Berbeda dengan Islam, memandang bahwa persoalan ekonomi bertumpu pada persoalan kemanusiaan.¹¹³ Keserakahan manusia dalam mengeksploitasi tanpa batas dan menguasai secara timpang adalah akar persoalan-persoalan ekonomi. Islam menganggap bahwa alam ini sebagai nikmat Tuhan justru tak terbatas.¹¹⁴

Oleh karena, akuntansi Islam memaknai prinsip *going concern* dalam akuntansi tidak hanya dilihat dalam pendekatan egoistik yakni “akumulasi laba” sebagai indikator kelangsungan usaha. Melainkan dipandang secara lebih universal kaitannya dengan kelangsungan proses alam sebagai bentuk penglibatan “generasi mendatang” sebagai *stakeholders*. Tuhan telah menggariskan batasan hak yakni dengan melarang eksploitasi yang berlebihan,¹¹⁵ sebab hal itu disebut Tuhan sebagai perilaku setan.¹¹⁶ Kebutuhanlah yang menjadi batas konsumsi manusia,¹¹⁷ bukan akumulasi.

Bencana yang terjadi adalah proses gerak alam yang pada hakikatnya ingin menyempurna disebabkan karena jauhnya ia dari fitrah penciptaannya

¹¹¹Itulah sebabnya ilmu ekonomi (kapitalisme) menganggap bahwa persoalan ekonomi hanya berputar pada persoalan “apa yang akan diproduksi (*what*), bagaimana (*how*), dan untuk siapa (*who*)”.

¹¹²Hak milik adalah akar ketimpangan dalam perspektif sosialisme, sebab hak miliklah yang mereproduksi munculnya pertentangan kelas. Dan hak milik itu sendiri adalah konsekuensi dari perubahan faktor produksi, yang menggiring sejarah dari fase primitif, feodalisme menuju kapitalisme (berbasis industrialisme dan teknologi).

¹¹³Dalam artian persoalan ekologis, persoalan ketimpangan, kemiskinan, hal tersebut bukanlah produk sejarah secara deterministik, bukan pula karena alam yang dianggap terbatas. Tidak peduli apa pun faktor produksi, teknologi, tetap saja bahwa keserakahan dan penguasaan secara timpang lewat pengkaplingan ladang-ladang ekonomi secara sepihak yang menjadi sumber persoalan ekonomi.

¹¹⁴*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak* (QS Al-Kautsar [108]:1). *Nikmat Tuhan yang manakah kamu dustakan* (QS Ar-Rahmaan [55]: 75).

¹¹⁵QS Al-An’aam [6]: 141.

¹¹⁶QS Al-Israa’ [17]: 27.

¹¹⁷QS Al-Baqarah [2]: 219.

akibat ulah manusia yang rakus. Alam dalam posisi ini menjadi *stakeholders* yang tertindas, yang harus diselamatkan. Sebab melahirkan mereka (generasi mendatang) tanpa adanya sarana untuk mereka melangsungkan hidup dengan baik adalah tindakan tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia untuk hidup, disebabkan dalam proses kelahiran manusia tidak punya pilihan untuk itu, apakah mau lahir masa lalu, sekarang atau akan datang, apakah hidup di alam yang kaya atau di alam yang sudah tandus terhisap oleh serakahnya peradaban bisnis.

d. Alam sebagai Stakeholders: Penolakan Atas Antroposentrisme

Dalam Islam alam diciptakan bukan untuk dinikmati segelintir orang, sebab alam bukan *instrument* mati melainkan ia adalah makhluk seperti halnya dengan manusia¹¹⁸ yang berkesadaran¹¹⁹ yang meliputi eksistensi flora dan fauna.

Oleh karenanya alam harus dipertahankan kelangsungan hidupnya, bukan atas dasar secara pragmatis¹²⁰ bahwasanya alam menunjang kehidupan manusia, melainkan ia adalah makhluk yang memiliki hak yang sama dengan manusia untuk hidup.¹²¹ Dalam artian alam juga pada dasarnya memiliki sisi altruisme.¹²² Bahkan tidak berlebihan ketika manusia diamanahkan untuk “melayani” alam yakni dengan memakmurkannya.¹²³ Di sinilah letak untuk meninggalkan cara berpikir “antroposentrisme” yang selama ini menjadi paradigma dominan dengan menempatkan manusia sebagai penguasa feodal¹²⁴ dan alam sebagai budak manusia yang dipersepsi

¹¹⁸QS Al-An'aam [6]: 38.

¹¹⁹Ketika tabir telah diangkat, kalian melihat seolah diam padahal ia berjalan seperti awan (QS An-Naml [27]: 87-88).

¹²⁰Lihat hasil penelitian Suyudi, Akuntansi sebagai Realitas Sosial-Phenomenology Sustainability Reporting, Konsep Quardrangle Bottom Line (QBL) Dimensi Environmental Performance. *Jurnal Eksis*, Vol.6 No.2, Agustus 2010.

¹²¹Konsepsi etika kontemporer masih menganggap alam secara instrumental (egoistis spesies), dan *inferior*. Setidaknya ada 4 argumentasi pragmatis kenapa alam dijaga. Yakni argumen “lumbung” mengatakan alam dijaga karena ia menyimpan organisme-organisme yang bermanfaat bagi manusia. Argumen “laboratorium” alam adalah objek percobaan-percobaan ilmiah. Argumen “*fitness centre*” alam sebagai tempat berekreasi. Argumen “*katedral*” yakni alam sebagai sumber bagi penikmat estetis. Lihat: Alois, *Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 90.

¹²²QS An-Nuur [24]: 41.

¹²³QS Al-A'raaf [7]: 56.

¹²⁴QS Al-'Alaq [96]: 7.

sebagai objek bisnis semata, sehingga menyisakan bencana-bencana ekologis bagi makhluk.¹²⁵

Hak “alam” melekat pada terciptanya dan terjaganya keseimbangan alam, hak alam bukan termasuk dalam nilai lebih,¹²⁶ melainkan sebuah kemestian bahkan melebihi (*preferent*) dari terpenuhinya hak-hak *stakeholders* internal yang mencurahkan kerjanya. Dalam artian entitas bisnis baik dalam kondisi dan situasi apa pun, tidak melihat berapa jumlah keuntungan ataupun kerugian sekalipun, hukum doktrinal yang menegaskan alam secara *hudus* yang tidak boleh dirusak tetap menjadi ketentuan mutlak. Sebab hakikat dasar penciptaan manusia adalah untuk melestarikan dan menjaga amanah keseimbangan alam.

4. Pendistribusian Nilai Lebih (*Surplus Value*)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nilai lebih di sini adalah segala bentuk nilai perusahaan yang pada hakikatnya merupakan hak *stakeholders* yang tidak terdistribusikan. Sebagaimana Tuhan sangat mengutuk tindakan-tindakan manusia yang mengakumulasi kekayaan,¹²⁷ sebab di dalamnya tersimpan hak manusia yang “lemah”. Disebabkan statusnya sebagai hak maka mendistribusikannya adalah sebuah kewajiban.

Nilai lebih pada dasarnya adalah nilai residu oleh entitas bisnis setelah terpenuhinya hak-hak para *stakeholders* internal yang telah mencurahkan

¹²⁵Walhi Indonesia menyebut bahwa tingkat kerawanan bencana ekologis Indonesia sudah mencapai tahap tinggi yakni mencapai 90%, hal ini disebabkan karena maraknya deforestasi, praktik pertambangan, dan monokultur bisnis perkebunan. (metrotvnews.com, 22/01.2013). Sutjahjo (2012) menyebut hancurnya tatanan sistem dan stabilitas ekologis di Indonesia bersifat permanen dan sistemik.

¹²⁶Berbeda dengan teori yang ada, alam mendapatkan nilai tambah seperti halnya *stakeholders* lainnya yang fluktuatif tergantung keuntungan. Bahkan dalam kenyataannya alam dan buruh tetap saja mendapatkan hak yang *inferior*. CSR yang lahir sejak revolusi industri sampai sekarang tidak pernah menyelesaikan persoalan kerusakan alam yang tak tertara. Sebab rentang waktu dan kapasitas eksploitasi jauh melebihi ketimbang pemulihan. Fakta atas bencana alam yang rutin menghampiri bangsa ini tiada lain disumbangkan oleh korporasi yang jauh lebih besar pengaruhnya dibanding rakyat kecil. Banjir yang menenggelamkan seperti ibukota (Januari 2013) yang menelan korban jiwa dan kerugian materiil (diperkirakan Rp 20 triliun) adalah bagian dari siklus keserakahan bisnis. Secara ekonomis pun Direktur Walhi menyebut bahwa nilai investasi yang selama ini diberikan untuk merambah hutan dan mengeksploitasi habis sumber daya alam Indonesia tidak sebanding dengan kerugian yang diderita akibat bencana (metrotvnews.com, 22/01/2013).

¹²⁷QS At-Taubah [9]: 34-35.

kerja dalam menciptakan nilai. Hak yang dimaksud tentunya selaras dengan makna hak yang telah digariskan oleh Allah. Bahwasanya semua manusia mendapatkan haknya berdasarkan kebutuhan sebagai dasar dari kesejahteraan masing-masing,¹²⁸ *Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keperluan”*.¹²⁹

Selebihnya atau disebut sebagai nilai lebih adalah hak *stakeholders*¹³⁰ “lemah/berkekurangan secara ekonomi”. Hal ini cukup berbeda dengan kapitalisme yang menciptakan nilai distribusi nilai tambah (CSR) kepada *stakeholders* masyarakat, tetapi tetap saja membiarkan posisi buruh sebagai *stakeholders* internal melarat dan tertindas.¹³¹

Model pendistribusian nilai lebih harus berdasarkan ketentuan syariah yang mengatur tentang hak. Tidak hanya menjelaskan teori hanya sampai pada tataran penglibatan keseluruhan *stakeholders*, tetapi persoalan yang menjadi substansi adalah bagaimana model distribusi nilai lebih tersebut. *Enterprise theory* dalam kenyataannya telah berhasil memperluas ruang lingkup kepentingan akuntansi dengan melibatkan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya disebabkan tidak terjelaskannya dalam bentuk konsep, penglibatan *stakeholders* secara analitik dalam konteks yang luas tidak serta merta menyelesaikan persoalan, sebab kecenderungan munculnya model-model feodal tetap saja berlangsung meskipun dalam kerangka nilai tambah. Terjerat pada pola *superior-inferior*, ketika pemodal mengakumulasi nilai tambah secara *superior* sedangkan buruh, masyarakat bahkan alam tetap saja dalam posisi *inferior* dalam mengakses nilai tambah.

Akuntansi Islam pembebasan menegaskan batas-batas hak manusia berdasarkan sisi doktrinal Islam dalam memandang hak. Tidak hanya sampai pada bagaimana memperluas jangkauan *stakeholders*, tetapi menjelaskan batas haknya masing-masing sebagaimana landasan teori

¹²⁸Abu Dzar berkata: tidak benar seorang Muslim memiliki kekayaan melebihi kebutuhan keluarganya. Chapra, 2000, *op. cit.*, hlm. 215.

¹²⁹QS Al-Baqarah [2]: 219.

¹³⁰Merujuk pada keseluruhan *stakeholders* yang “lemah”. Baik eksternal maupun internal.

¹³¹Paradigma Islam (tauhid) adalah paradigma kesatuan (menolak dikotomi) yang bermakna bahwa bukanlah merupakan tauhid ketika sebuah perusahaan mendistribusikan zakat atau nilai lebih, tetapi pada realitas yang lain mengeksploitasi buruh dan merusak alam. Bukanlah sebuah paradigma tauhid ketika entitas syariah menerapkan *instrument-instrument* syariah tapi pada realitas lain ikut memapankan kapitalisme. Model-model ini adalah model dualisme (*oposisi biner*).

sebelumnya yang membahas hakikat nilai (hak). Dengan demikian nilai lebih dalam konteks Islam disebut sebagai zakat yang berfungsi untuk membebaskan masyarakat atau *stakeholders* yang termarginalkan.

a. Zakat sebagai Hak *Stakeholders* yang “Lemah”

Sebagaimana kaidah fikih, zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada manusia yang memiliki kepemilikan harta yang melebihi dari kadar kecukupan (kebutuhan atau kesejahteraan). Kelebihan tersebut pada dasarnya merupakan hak orang yang berkekurangan, sehingga tidak mendistribusikannya atau “memakannya” sama halnya dengan menelan bara api,¹³² disebabkan status hukumnya adalah haram (sebab memakan yang bukan hak berarti haram¹³³). Itulah sebabnya dalam fikih disebutkan bahwa orang yang memakan melebihi kebutuhannya sampai ia termuntah-muntah akan hal itu, maka pada dasarnya yang dimuntahkan itu adalah haram, dalam artian bukan karena haramnya karena merusak kesehatan dari makan berlebihan melainkan hak orang lain yang dikonsumsi (atas nilai lebih tersebut).

Masyarakat yang dibebankan zakat adalah masyarakat yang berkelebihan bukan yang berkekurangan. Tuhan tidak membebankan seseorang melebihi kemampuannya.¹³⁴ Sehingga zakat dalam konteks bisnis melekat kepada perusahaan yang mengantongi nilai lebih. Bukan bisnis yang hanya menghasilkan nilai yang cukup untuk kebutuhan hidup pemiliknya saja (*stakeholders* internal).

Pendistribusian nilai lebih entitas bisnis pada dasarnya sama dengan zakat¹³⁵ yakni setelah kebutuhan sebagai dasar kesejahteraan atau hak mereka

¹³²QS An-Nisaa' [4]: 10.

¹³³Makna haram dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek penjenisan barang (babi, dan lain-lain) dan proses kepemilikan, tetapi juga mencakup aspek konsumsi yang melampaui kebutuhan. Sebab barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang prestisius untuk strata (citra).

¹³⁴QS Al-Baqarah [2]: 286.

¹³⁵Ada yang berpendapat bahwa perusahaan adalah bukan manusia, sehingga tidak wajib membayar zakat. Tahery (2000) menegaskan bahwa yang dikenakan pajak adalah kewajiban manusia bukan perusahaan, sehingga ia lebih memilih *proprietary theory*. Pembahasan sebelumnya sudah meruntuhkan teori ini sebab pada dasarnya entitas bisnis adalah masyarakat ekonomi. Masyarakat dalam Islam dipahami sebagai realitas yang riil, bahkan menurut Ibnu Khaldun dari sisi riilnya, masyarakat tidak berbeda dengan individu bahkan masyarakat menurutnya justru memiliki personalitas,

(*stakeholders* internal) terpenuhi, maka nilai lebih tersebut sudah menjadi hak masyarakat lemah sebagai *stakeholders* eksternal.¹³⁶ Dalam kerangka hak dalam Islam terpenuhinya hak yang dimaksud adalah keseluruhan yang menjadi sebab terciptanya produksi sebagai nilai. Hak buruh atau pekerja melekat pada hasil produksi lewat kerja ataupun ketentuan sistem bagi hasil. Dan hak pemodal lewat kontribusi modal dikonversi dalam bentuk terciptanya alat produksi seperti mesin dan sejenisnya sehingga memiliki hak atas sewa. Setelah hak tersebut terdistribusikan sesuai ketentuan Islam akan hal tersebut, maka keseluruhan nilai sudah menjadi hak masyarakat yang “lemah”. Sebab tidak mungkin suatu entitas bisnis dituntut untuk mendistribusikan nilai ke masyarakat ketika dalam kondisinya kehidupan internal seperti buruh juga cukup memprihatinkan. Seperti yang terjadi dalam entitas kapitalisme lewat CSR-nya.¹³⁷

b. Penerima Hak Atas Nilai Lebih (Zakat)

Islam menggariskan *stakeholders* yang berhak menerima nilai lebih tersebut adalah orang-orang yang tertindas (*mustada'afin*) yakni orang yang hendak berbuat baik, tetapi dibatasi oleh kendala ekonomi. Mereka itu antara lain para fakir, miskin, *amil* zakat, *muallaf*, para budak, orang-orang berhutang, *ibnu sabil*.¹³⁸ Hal ini secara semantik menunjuk pada keseluruhan masyarakat yang berkekurangan tanpa dibatasi oleh ruang. Orang berhutang atau yang terlilit hutang sehingga menghambatnya untuk menabur kebaikan selaras dengan “kompetitor” yang menjadi korban atas persaingan sehingga dekat dengan kebangkrutan, berhak mendapatkan nilai lebih. Begitupun halnya dengan terminologi budak (*riqab*) menunjuk pada orang yang merasa “terjajah” baik secara fisik maupun ekonomi termasuk bekerja secara paksa tanpa ada peluang untuk merdeka. Zakat berperan dalam mengurangi ketimpangan, orang-orang miskin, budak

karakter dan realitas. Itulah dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya pertanggungjawaban masyarakat kelak. Lihat: Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagad Raya (terj.)* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 279.

¹³⁶ Seperti halnya dalam pendistribusian zakat, Rasul menegaskan agar didistribusikan dari internal (kerabat) sampai ke eksternal (HR Muslim).

¹³⁷ Cukup kontradiksi perusahaan-perusahaan kapitalisme yang memperlihatkan sisi kesalahannya dengan mengeluarkan CSR untuk masyarakat tapi pada kenyataannya membiarkan posisi buruh sebagai pihak yang mencurahkan kerja secara langsung dalam kehidupan yang melarat. Hal ini menegaskan bahwa CSR tidak lebih sebagai produk kepentingan.

¹³⁸ QS At-Taubah [9]: 60.

serta membebaskan masyarakat dari sebab munculnya sistem tersebut. Berbeda dengan akuntansi kapitalisme lewat CSR yang pada kenyataannya tidak memiliki objek yang jelas melainkan berdasarkan kepentingan yang pragmatis.¹³⁹

Peran zakat dalam Islam sangat penting sebab merupakan rukun agama yang mengatur secara tegas upaya terbentuknya keseimbangan sosial, dalam artian meninggalkannya sama halnya dengan meninggalkan agama serta meniscayakan kehancuran sosial. Itulah sebabnya yang tidak mengeluarkan nilai lebih tersebut kata Rasul dapat diperangi¹⁴⁰ dan mendapatkan laknat Tuhannya,¹⁴¹ disebabkan karena “merampas” hak orang lain.¹⁴²

*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu.*¹⁴³ Dikarenakan nilai lebih bersumber dari hasil curahan kerja (produksi), maka sebagaimana Islam menekankan konsumsi dibatasi oleh kesejahteraan (kebutuhan). Maka terminologi nilai lebih untuk didistribusikan adalah setelah kebutuhan yang mencurahkan kerja terpenuhi selebihnya adalah nilai lebih. Tuhan menentukan (minimalnya) agar hasil curahan kerja dikeluarkan sebanyak seperlima (20%), *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,*¹⁴⁴ *maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil,...*¹⁴⁵

Terlepas dari perbedaan pendapat (*fiqh*) antara berapa jumlah tarif (zakat), yang pasti bahwa substansi zakat hadir untuk membebaskan orang-orang tertindas, kemiskinan dan ketimpangan. Dan fenomena ketimpangan tersebut berbeda-beda di setiap masyarakat bahkan bangsa dan negara sebab perbedaan standar kesejahteraan. Terlepas apakah 2,5% mampu

¹³⁹Hasil penelitian Walhi (2010) memperlihatkan bagaimana produk perusahaan-perusahaan kapitalisme berupa CSR lebih bermoduskan “kosmetik” dibanding dengan pemberdayaan. Bahkan ada CSR disalurkan dalam bentuk dana studi banding, dan ada juga disalurkan berdasarkan pertimbangan etnisitas atas dasar kepentingan *status quo* perusahaan bahkan ada juga CSR justru hadir untuk memecah belah kelompok masyarakat dalam pusaran kepentingan pragmatis perusahaan.

¹⁴⁰HR Bukhari.

¹⁴¹QS At-Taubah 9: 34-35.

¹⁴²QS Al-Muddatstsir [74]: 42-44.

¹⁴³QS Al-Baqarah [2]: 267.

¹⁴⁴Rampasan perang dalam masyarakat yang berperang maka rampasan itu seperti dengan hasil kerja, karena tidak adanya peluang untuk bekerja, sampai peluang itu muncul.

¹⁴⁵QS Al-Anfaal [8]: 41.

untuk membebaskan masyarakat dari belenggu tersebut hal itu tergantung kontekstualisasinya di masyarakat tanpa harus terjebak pada penafsiran literal (teks) dan kehilangan roh substansinya.¹⁴⁶ Sebab secara historis zakat hadir untuk menyeimbangkan realitas sosial. Untuk konteks kontemporer di tengah perkembangan teknologi, pertumbuhan kekayaan semakin jauh lebih drastis memengaruhi pertumbuhan tingkat ketimpangan, sehingga kekuatan zakat harus memainkan peran untuk menetralkan kehidupan sosial tersebut. Qadhafi (pemimpin revolusi Libya) memandang batasan zakat adalah sesuai dengan kebutuhan umat.

c. Terciptanya Nilai Tambah (*Value Added*)

Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah nilai yang melekat pada diri sebagai efek kesadaran atas terdistribusinya nilai lebih sesuai ketentuan syariah. Triyuwono (2007) telah membahas meskipun dengan pendekatan yang berbeda menunjuk pada nilai tambah spiritual (*spiritual value added*) dan nilai tambah mental (*mental value added*). Sebuah kesadaran kejiwaan (psikologik) yang berbentuk ketenangan intuisi (jiwa), di mana manusia yang telah melaksanakan risalah pendistribusian nilai lebih akan merasakan nilai altruisme yang tak dapat diukur dengan materi berupa menyatunya ego kecil menuju Pemilik Ego yang diikat oleh kesadaran cinta sebagai makhluk yang memiliki kesadaran Ketuhanan (teomorfis).

Posisi nilai tambah ini melampaui makna nilai materiil (kebahagiaan terbatas) menuju nilai-nilai non-materiil yang bersandar pada kebahagiaan yang tak terbatas. Inilah yang dimaksud *falah* atau kemenangan atas pensucian (*tazkiyah*) yang dilakukan manusia secara spiritual dengan mengeluarkan

¹⁴⁶Mungkin sudah saatnya untuk mempertanyakan apakah relevan zakat 2,5% mampu membebaskan masyarakat dari belenggu ketimpangan sosial yang muncul akibat bertambahnya dan semakin kuatnya sebagian manusia mengakses kekayaan yang tidak seimbang. Realitas memperlihatkan bagaimana negara-negara Muslim adalah negara tipikal negara miskin terbelakang, baik sisi kesejahteraan, pendidikan, ekonomi meskipun sebagian elitnya tetap saja menguasai ladang-ladang minyak yang melimpah, sehingga yang terjadi adalah dijadikannya sebagai objek pemerasan, eksploitasi dan bahkan penjajahan oleh negara-negara asing atau dalam bahasa lainnya menjadi budak di negeri sendiri, anak ayam yang mati di lumbung padi. Inilah konteks ketika makna ayat yang ditafsirkan secara literalis kehilangan rohnya (substansinya) sehingga masyarakat terjebak pada "formalitas zakat". Bahkan ketika zakat seolah-olah melegitimasi semangat individual manusia (pembebasan manusia dari tanggung jawab sosial) dan potensi eksploitasi. Sehingga zakat yang "kaku" menjadi *instrument* justru memperlebar kesenjangan yang ada.

“hak” orang lain yang bercampur dengan haknya. *Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya.*¹⁴⁷ Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jiwa (*spiritual value added*).

Risalah pensucian ini bermakna pembebasan masyarakat yang tertindas secara sosiologis sebagai dasar penyingkapan tabir “Ketuhanan” untuk menyatunya maujud ke Wujud Hakiki. Pembebasan atas kemenangan manusia melawan gejolak jiwa berupa potensialitas keserakahan dan nafsu dengan menundukkan kehakikian dirinya sebagaimana makna penghambaan dalam ibadah. Realitas ini tidak akan terdapat pada akuntansi kapitalisme yang terjebak pada pusaran materi semata. Seperti kata Imam Ali: *Ketahuilah, orang-orang bertakwa menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi yang fana dan juga kenikmatan akhirat. Mereka berbagi kehidupan duniawi dengan orang-orang dunia, sementara orang dunia tidak berbagi kehidupan akhirat mereka. Allah telah mengizinkan mereka memiliki kekayaan duniawi yang mencukupi kebutuhan (duniawi) mereka.*¹⁴⁸

Makna memenangkan pertentangan batin (jiwa) berarti memenangkan pula pertentangan sosial berupa lahirnya pembebasan masyarakat yang tertindas. Pensucian diri menjadikan masyarakat pun akan tersucikan yakni dengan terpeliharanya keseimbangan sosial. Sebab pada dasarnya pertentangan sosial muncul merupakan derivasi dari pertentangan batin individu, akibat luapan dari ketidakmampuan manusia menyelesaikan pertentangan dalam dirinya yakni ketika nafsu dan keserakahan berkuasa menundukkan fitrah manusia pada kebaikan. Inilah yang dimaksud Rasul sebagai jihad besar. *Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*¹⁴⁹ Mereka yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya¹⁵⁰ Mereka yang mampu membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bhatil*.¹⁵¹ Mereka itulah yang akan mewarisi bumi beserta isinya.¹⁵² Sehingga Tuhan merelakan baginya surga, untuk

¹⁴⁷*Shahih Al Jami'*

¹⁴⁸Diriwayatkan dalam Al Amali (Syekh Al Thusi), ketika Amirul Mukminin menunjuk Muhammad Ibn Abi Bakr sebagai Gubernur Mesir untuk dibacakan kepada masyarakat Mesir. Baqir, 2008, *op. cit.*, hlm. 398.

¹⁴⁹QS Al-Hasyr [59]: 9.

¹⁵⁰QS Al-Lail [92]: 18.

¹⁵¹QS An-Nisaa' [4]: 29.

¹⁵²QS An-Nuur [24]: 55.

kembali kepada Tuhannya dalam keadaan fitrah (suci), tenang dan lagi diridai-Nya.¹⁵³

Inilah yang dimaksud terjadi gerak *trans*-substansial, sebuah gerak penyempurnaan,¹⁵⁴ ketika jiwa itu terbebaskan karena “membebaskan”, keluar dari penjara-penjara pragmatisme dan egoisme materialistik menuju altruistik yang bermakna perluasan jiwa kehidupan. Sebuah *falsh* atau kemenangan¹⁵⁵ yakni tersingkapnya tabir kehidupan, napas ilmu bersimbiosis dengan napas *Ar Rahman*. Berangkat dari kesadaran Ketuhanan menuju ke kesadaran Ketuhanan. Melebur dalam satu kesatuan eksistensi. *Bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.*¹⁵⁶

E. Ringkasan

Dalam tinjauan aksiologi, akuntansi Islam (pembebasan) merupakan manifestasi dari hakikat penciptaan manusia yang diamanahkan sebuah risalah pembebasan disebut metafora pembebasan sebagai metafora penciptaan. Wujud “penghambaan” dan “pensucian” akuntansi Islam terletak pada risalah untuk membebaskan yang tertindas, menaburi kehidupan dengan keadilan Tuhan. Dengan demikian akuntansi dalam perspektif aksiologi dipahami sebagai risalah, perantara yang akan memperantarai terpenuhinya syarat untuk tercurahkannya kasih Tuhan di alam dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat kepentingan. Hal ini sebagai upaya untuk “melawan” hegemoni akuntansi kapitalisme yang telah melanggengkan model “perbudakan” dalam akuntansi dengan menempatkan “penguasa” modal sebagai pusat segala kepentingan, sehingga mencederai hak-hak Tuhan (yang melekat pada orang-orang yang lemah, tertindas dan terampas hak-haknya). Upaya dekonstruksi bermakna

¹⁵³QS Al-Fajr [89]: 27-30.

¹⁵⁴Gerak penyempurnaan meniscayakan “penghancuran”. Tiadalah seorang bayi untuk menyempurna menjadi remaja atau dewasa, sebelum ia “menghancurkan” sisi eksistensi kebayaannya. Seperti halnya kematian adalah proses penyempurnaan manusia untuk “melebur” dengan diri-Nya. Kematian itu adalah proses kelahiran jiwa di alam yang lebih sempurna dan lapang tak terbatas.

¹⁵⁵*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata* (QS Al-Fath [48]: 1).

¹⁵⁶QS Al-Anfaal [8]: 17.

pembebasan akuntansi dari jiwa eksploitatif, egoisme dan pragmatisme menuju altruisme sebagai puncak pensucian akuntansi.

Dalam Islam dipahami bahwa hakikat nilai yang menjadi basis dasar pendistribusian hak terletak pada kerja yang menjadi simbol kedaulatan buruh dalam akuntansi (doktrin *pasca* produksi), bukan pada kepemilikan manusia terhadap kuasa modal. Hukum-hukum fenomena kekonstanan, sistem kerja sama (akad) dalam Islam, *store labour*, dan makna “risiko” dalam Islam merupakan landasan doktrinal untuk menguatkan argumentasi peran nilai kerja dalam Islam. Sehingga dipahami bahwa fenomena penindasan dan ketimpangan yang ironis adalah bentuk semakin jauhnya manusia dari hukum-hukum Tuhan.

Munculnya ketimpangan tersebut tiada lain bahwa dalam realitas akuntansi kontemporer melegitimasi terjadinya “perampasan” hak lewat *surplus value* yang tidak terdistribusikan. Akuntansi Islam (pembebasan) dalam posisi ini secara ideologis hadir untuk “merombak” sistem tersebut dengan mendistribusikan nilai lebih kepada yang berhak, sebab hal tersebut dipersepsi sebagai kezaliman. Konsepsi ini tergambarkan pada *unity theory* yang digagas untuk menggambarkan realitas keterhubungan filosofis antara Tuhan, manusia dan alam. Pendistribusian nilai lebih dalam posisi ini dibangun atas dasar doktrinal bukan teoretis yang bersandar pada filosofi hak dalam Islam (doktrin pra-produksi) dan filosofi masyarakat dalam Islam sebagai *communal emansipatoris*. Berbeda dengan konsepsi Barat yang membangun pola penglibatan masyarakat dalam akuntansi secara teoretis yang tergambarkan pada *enterprise theory* yakni masyarakat (secara geografis) dilibatkan sebagai *stakeholders* atas dasar terjadinya interaksi “pragmatis” dengan perusahaan (termasuk memberi legitimasi).

Tuhan adalah *stakeholders* sentral dalam artian bahwa arah perusahaan harus berangkat dan berujung pada kesadaran Ketuhanan (*altruism*) menandakan kerelaan manusia dalam menerima ketentuan Tuhannya. Penglibatan kompetitor, masyarakat tertindas, generasi mendatang dan alam adalah konsekuensi dari makna nilai Islam secara doktrinal (bukan teoretis) sebagai *rahmatan lill alamin*. Tuhan adalah pusat, dan keseluruhan manusia hanyalah *stakeholders* partikular yang posisinya sebagai pihak yang diamanahkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan alam (kehidupan). Inilah realitas tenggelamnya pragmatisme dan egoistik dalam pusran altruistik dengan mendistribusikan nilai lebih sesuai ketentuan Tuhan tentang itu. Pendistribusian nilai lebih akan menciptakan nilai

tambah (*value added*) yakni sebuah kesadaran psikologik dan spiritual (*spiritual value added*) atas *falah* (kemenangan) manusia dalam menjalankan risalah penciptaannya (metafora pembebasan). Pembebasan dari keserakahan diri dalam hal ini perampasan hak memengaruhi pembebasan secara sosial (ketimpangan, kemiskinan). Inilah puncak “pensucian” akuntansi Islam sebagai risalah.

7



Penyempurnaan Nilai Tambah Spiritual dan Filosofi Etika Dalam Islam

“.....

Jadilah kamu penegak-penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meski itu merugikan dirimu, orang tuamu atau kerabatmu

(QS An-Nisaa' [4]: 135).

.....”

Pendistribusian nilai lebih adalah salah satu corak dasar ideologi akuntansi Islam. Selaras dengan peran Islam yang membawa risalah pembebasan, menegakkan keadilan yang menjadi dasar tegaknya kesejahteraan manusia secara sosial dan kesejahteraan alam, sebagai salah satu sarana manusia dalam menggapai kesejahteraan spiritual,¹ akibat manusia menjalankan risalahnya sebagai *Khalifatul Fil Ardy*.² Mengembalikan sifat *hudus* pada keseluruhan realitas yang selama ini tertindas, termarginalkan oleh akuntansi kapitalisme.

A. Kesejahteraan: Etika³ atau Keadilan?

Kesejahteraan adalah tujuan akuntansi Islam dalam mendekonstruksi akuntansi konvensional yang melanggengkan ketimpangan. Kesejahteraan melingkupi baik kesejahteraan materiil dan spiritual. Kesejahteraan materiil terdapat pada pendistribusian nilai lebih (*surplus value*)⁴

¹Sebagaimana dunia adalah tangga menuju akhirat. Tidak ada keterpisahan di antaranya. Dunia adalah alam manusia untuk menjalankan risalah penyembahan dengan menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Akhirat adalah alam manusia mempertanggungjawabkan risalah. Menegakkan keadilan di dunia adalah risalah manusia, sarana manusia mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Risalah.

²QS Shaad [38]: 26.

³Etika yang dimaksud adalah segala tindakan yang dianggap memiliki nilai (baik/buruk). Secara filosofi etika pada dasarnya adalah sebuah wujud kesadaran dalam bertindak sebagai sebuah pilihan. Disebutnya sebagai nilai karena dilaksanakan atas kesadaran (kebebasan untuk memilih). Dalam artian segala perbuatan atau tindakan yang lahir karena “paksaan” belumlah bisa disebut sebagai etika (akhlak) meski mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Keterkaitan nilai etika yang dimaksud melingkupi keseluruhan mata rantai nilai antara subjek, proses dan realitas hasil dari tindakan. Etika dalam posisi ini yang bersandar pada kesadaran Ketuhanan disebut sebagai akhlak (QS Shaad [38]: 46). Tindakan yang berakhlak adalah tindakan yang dilaksanakan atas bentuk kecintaan (kepada Tuhan), melaksanakan sesuai perintah (aturan/adab) Tuhan dan tujuannya sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan Tuhan.

⁴*Surplus value* adalah nilai lebih yang pada dasarnya adalah hak masyarakat lemah (berkekurangan). Dalam Islam hak tersebut harus didistribusikan setelah hak masyarakat (internal), mereka yang mencurahkan “sebab” (kerja, sewa dan alam) terpenuhi. *Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan (kebutuhan) (QS Al-Baqarah [2]: 219). Tidak ada shadaqah kecuali setelah kebutuhan (wajib) terpenuhi (HR Al-Bukhari).* Kebutuhan dalam Islam adalah dasar kesejahteraan, sekaligus dasar hak.

untuk membebaskan kesenjangan dan ketimpangan sosial, sedangkan kesejahteraan spiritual terletak pada penciptaan nilai tambah spiritual (*spiritual value added*).⁵

Keduanya (*surplus value* dan *spiritual value added*) tidak dapat dipisah satu sama lain, dipersepsi sebagai ibadah sehingga sebagaimana dalam ibadah memiliki kualitas nilai, maka etika merupakan landasan untuk menyempurnakan kualitas nilai tambah spiritual.⁶ Banyak orang (individu ataupun kelompok) yang melakukan kebajikan sosial, tetapi pada dasarnya ia tidak berbuat baik bagi dirinya secara spiritual (mental) bahkan justru sebaliknya membuat dirinya jauh dari nilai tambah spiritual,⁷ ketika etika tersebut bersandar pada kepentingan pragmatis, maka etika tersebut justru tetap menjebak manusia dalam penjara egoisme dan tidak mendapatkan nilai sama sekali.⁸

⁵Puncak pencapaian nilai dari akuntansi Islam, nilai tambah spiritualitas sebagai sebuah kesadaran jiwa (psikologik) tercipta atas pembebasan manusia dalam mendistribusikan nilai lebih. *Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka* (QS At-Taubah [9]: 103). Ketenteraman jiwa antara individu, entitas dan masyarakat.

⁶Semua orang pada dasarnya beribadah, tetapi perbedaan ibadah terletak pada kualitas ibadah. Yang menentukan kualitas ibadah adalah etika disebut sebagai etika beribadah. Etika yang sampai pada tahap altruisme (akhlik) melingkupi antara niat, proses dan tujuan atas tindakan bersandar pada kesadaran Ketuhanan. Misalnya, tidak semua orang yang beribadah “shalat” memiliki relevansi nilai antara dirinya dengan shalatnya, kualitas nilai shalat setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kesadaran etika atau akhlak yang mendasarinya. Apakah ia ditujukan kepada Tuhannya, dilaksanakan sesuai etika (adab) Tuhannya dan apakah nilai dari ibadah tersebut melekat pada dirinya (mencegah perbuatan keji dan mungkar). Bahkan Tuhan menganggap adanya manusia yang beribadah (shalat), tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan kecelakaan baginya (QS Al-Maa’uun [107]: 4-7). Kecelakaan tersebut disebabkan karena bersandar pada kesadaran egoisme, pragmatisme, dalam istilah etika disebut utilitarianisme (konsep etika yang bersandar pada kepentingan).

⁷Banyak orang yang mampu menaklukkan alam, meruntuhkan sistem bahkan menumbangkan rezim tiran sekalipun, tetapi mandul dan gagal dalam menumbangkan keserakahan jiwanya. Sehingga pembebasan jiwa secara spiritual tidak tercapai, tergadai oleh keserakahan (egoisme). Realitas akuntansi kapitalisme yang mendistribusikan nilai lebih, tetapi bersandar pada etika utilitarianisme (kepentingan sebagai dasar etika), pada dasarnya konsep nilai lebih justru bisa membawa “bencana” bagi kehidupan. Pendistribusian nilai lebih potensial berbanding lurus dengan tingkat pengrusakan (eksploitasi) bagi alam maupun buruh (pekerja).

⁸QS At-Taubah [9]: 107.

Perbedaan Makna Akhlak⁹ dan Keadilan

*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang tertindas.*¹⁰ Orang tertindas adalah orang yang terhambat pendistribusian haknya. Sehingga dapat dipahami bahwa keadilan adalah tangga pertama menuju akhlak, hal ini tidak dapat dicampurbaurkan.

Akhlak adalah bentuk pencapaian moral tertinggi yang melampaui makna keadilan. Keadilan adalah landasan dasar akhlak, tidak dapat dikatakan orang berakhlak ketika pada realitasnya ia belum melaksanakan keadilan.¹¹ Orang yang mendistribusikan hak orang lain, belum dapat disebut sebagai orang yang akhlaki disebabkan yang terdistribusikan adalah hak, pendistribusiannya adalah sebuah kewajiban.¹² Keadilan sebagai bentuk pendistribusian hak pada hakikatnya merupakan nilai yang melekat di dalamnya “klaim”, tuntutan (dapat dituntut) sebagai sebuah keharusan, sedangkan akhlak mengatur sisi subjektif sebagai sebuah kesadaran moral yang bersifat pilihan. Sehingga berbeda pula makna akhlak dan hukum, keadilan identik dengan hukum yang memiliki kekuatan memaksa. Perbuatan tidak merusak alam dilakukan karena hukum, pada dasarnya hal itu bukan perbuatan akhlaki, disebabkan dilakukan atas dasar paksaan (kewajiban).

Islam menegaskan bahwa keseimbangan sosial dalam hal kesejahteraan hanya dapat terwujud ketika keadilan dulu ditegakkan. Rasul berkata (diriwayatkan Imam Ali): *Aku berkali-kali mendengar Rasul berkata: Suatu umat tidak akan bersih dan suci dari aib, kecuali jika yang lemah dari mereka berani menuntut haknya dari yang kuat tanpa tersendat dan tertahan suaranya.*¹³

⁹Akhlak dan etika pada objeknya sama yakni merujuk pada nilai (baik atau buruk) suatu tindakan. Penggunaan kata akhlak di sini menunjukkan makna ideologis yang terkandung dalam konsepsi tentang nilai. Etika yang bersandar pada altruisme atau bersandar pada keluhuran Tuhan disebut penulis sebagai akhlak. *Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat* (QS Shaad [38]: 46).

¹⁰QS An-Nisaa' [4]: 148.

¹¹Perusahaan kapitalis yang mendistribusikan nilai ke masyarakat tidak dapat serta-merta dipandang sebagai perbuatan etik, disebabkan perampasan nilai lebih atas ironisnya kondisi buruh masih terjadi, dalam artian etika tidak akan hadir sebelum keadilan tegak.

¹²Perusahaan yang melakukan perbaikan alam adalah sebuah kewajiban. Presiden menyalurkan subsidi kepada rakyatnya bukan lantaran ia baik atau buruk sebab hal tersebut pada dasarnya adalah hak yang dapat dituntut.

¹³Pesan Imam Ali kepada Malik Al-Asytar (surat ke-53 Najhul Balaghah). Lihat Muthahhari, *Manusia Seutuhnya: Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis*. Terjemahan oleh Abdillah Hamid Ba'abud, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1995), hlm. 44.

Dalam proses penggagasan akuntansi Islam, persoalan nilai-nilai pendistribusian hak tidak dapat diserahkan secara *etics* sebagai sebuah pilihan (*vouluntary*). Melainkan akuntansi Islam harus memiliki kedaulatan sebagai struktur dalam “memaksa” agen. Sebab ketidaktersampaian hak adalah bentuk kezaliman, *Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya*.¹⁴ *Dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan*.¹⁵ *Barangsiapa berbuat dengan melanggar hak, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka*.¹⁶

B. Akhlak Islam dalam Pendistribusian Nilai Lebih (*Surplus Value*)

Perbedaan Islam dengan ideologi lainnya (kapitalisme dan sosialisme), terletak pada konsepsi nilai masing-masing. Islam bukan kapitalisme *plus* etika, begitupun kapitalisme bukanlah sistem tanpa etika, sebab pada dasarnya kapitalisme bukanlah ideologi yang lepas dari pengaruh etika. Bahkan menurut Weber, kapitalisme bangkit karena etika¹⁷ sehingga hal ini mustahil untuk dicampurbaurkan antara satu sama lain. Etika (akhlak) dalam posisi ini menentukan kualitas bagaimana realitas akuntansi membentuk jaringan kuasa Tuhan dalam bisnis. Aktivitas yang dikonstruksi bersandar pada konsepsi “dari kesadaran Ketuhanan menuju ke kesadaran Ketuhanan” secara spiritual. Tuhan adalah basis tempat bersandarnya konsepsi etika dalam Islam,¹⁸ selaras dengan Tuhan sebagai pusat kepentingan dalam akuntansi.

¹⁴QS Asy-Syu'araa [26]: 183.

¹⁵QS Al-A'raaf [7]: 159.

¹⁶QS An-Nisaa' [4]: 30.

¹⁷Etika Protestan yang menginspirasi bangkitnya kapitalisme, setidaknya terdiri dari 3 rukun etika *Calvinis* yakni: *profit motif*, *ascetism oriented* (menciptakan akumulasi) dan *ideas of calling* (misi etik kesucian sebagai kelompok yang prestisius dimata Tuhan untuk berhasil di dunia sebagai simbol keberhasilan akhirat). Lihat: Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme (terj.)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Dan lihat juga: Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).

¹⁸Itulah sebabnya, Rasulullah sering men-*tajalli*-kan dirinya sebagai utusan yang membawa risalah penyempurnaan akhlak (HR Al-Bukhari). Dalam Islam Rasulullah adalah simbol teladan aktualitas dari akhlak yang bersandar pada kesadaran Ketuhanan (altruisme).

1. Altruisme (Pengorbanan) Bukan Egoisme (Kepentingan)

Imam Ali mengatakan “awal agama adalah pengetahuan tentang Tuhan”. Akhlak bersandar pada agama, maka pada hakikatnya akhlak dalam Islam bersandar pada sumbernya (Tuhan). Hilangnya ego dalam artian bermakna perluasan diri dengannya kepribadian menyatu (*khudury*) dengan alam semesta dalam bentuk cinta dan kasih.¹⁹ Tidak ada tujuan melainkan hanya untuk mencari keridaan Tuhannya, meniscayakan akhlak adalah pengorbanan.²⁰ Bisnis yang secara pragmatis memandang pendistribusian nilai lebih untuk kepentingan ekonomis pada dasarnya masih terjebak dalam bentuk egoisme dan pragmatisme.

Altruisme menempatkan Tuhan sebagai basis keluhuran akhlak, bukan kepentingan, apalagi manipulatif ataupun politisasi isu kemanusiaan.²¹ Bukan pula pertimbangan untung atau rugi. *Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka dan mereka mengutamakan orang-orang atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).*²²

Dalam kapitalisme konsepsi etika bersandar pada kepentingan.²³ Menurut Russel manusia pada hakikatnya adalah wujud bendawi,

¹⁹Sesungguhnya cinta-Ku tercurah kepada orang-orang yang saling mencintai pada jalan-Ku (HR Ibnu Abi Dunya). Cinta tidak hanya terbatas pada antara manusia melainkan keseluruhan makhluk Tuhan (flora dan fauna) (HR Bukhari dan Muslim).

²⁰Kesadaran akhlak yang bersandar pada cinta (Tuhan) itulah kesadaran akhlak yang diajarkan Rasulullah Saw. Seperti: Dalam tafsir Majma Al Bayan dalam (Shirazi, 2005: 229-210), Hisyam berkata: Ketika Perang Uhud saya pergi menemui sepupu saya. Ketika melihatnya saya mendapatkan bahwa ia sedang menghadapi *sakaratul maut*. Saya mengetahui dari bibirnya yang kering dan dia sangat kehausan serta tidak mampu berbicara, saya membawakan air untuknya, ketika saya sedang mencoba meneteskan air itu ke mulutnya, ia menutupnya dengan erat dan menunjuk ke arah saudara Mukmin lain yang terluka dekatnya. Ketika menemuinya saya mendapatkan bahwa ia juga menjelang *sakaratul maut* karena kehausan. Saya mencoba meneteskan air itu ke mulutnya ia pun menutup erat, seraya menunjuk ke arah seorang Mujahid ketiga yang juga dalam keadaan terluka. Ketika saya mendekati orang ketiga aku dapati ia sudah wafat, begitupun orang kedua dan sepupunya sendiri. Lihat juga: QS Al-Insan [76]: 8).

²¹QS Al-Baqarah [2]: 264.

²²QS Al-Hasyr [59]: 9.

²³Lihat hasil penelitian Suyudi, Akuntansi sebagai Realitas Sosial-Phenomenology Sustainability Reporting, Konsep *Quardrangle Bottom Line* (QBL) Dimensi Environmental Performance. *Jurnal Eksis*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2010.

sehingga makna etika terikat pada hukum-hukum bendawi. Sebab akal berada di bawah kendali naluri fisik.²⁴ Akhlak adalah pandangan jauh yang dilatarbelakangi oleh upaya manusia mencari keuntungan dan mempertahankan kepentingan.²⁵ Begitupun Smith (1759) peletak dasar liberalisme, memandang manusia secara individual pragmatis yakni selalu bertindak atas dasar kepentingan individu.²⁶

Hal ini memengaruhi pembentukan konsep “CSR”²⁷ dalam perusahaan-perusahaan kapitalisme. Etika dipersepsi secara relatif sebagai sarana dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomis²⁸ (mencari keuntungan). Pendistribusian nilai adalah biaya yang niscaya dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (*matching concept*). Inilah realitas *false morality* (moralitas palsu). Seperti kata Tuhan, *sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya*

²⁴Ia menganggap bahwa akal adalah penerang jalan atas naluri manusia, dalam artian ke manapun hendak pergi lampu (akal) selalu mengikuti kehendak naluri manusia.

²⁵Kepentingan adalah basis bersandar akhlak, seperti halnya: Anda melihat tetangga memiliki sapi perah. Di sini tidak diragukan lagi bahwa bila anda mencurinya, berarti itu akan memberi keuntungan bagi anda. Kita tidak mencurinya atas dasar ketakutan akan reaksi, bahwa pihak yang bersangkutan akan melakukan hal sama sebaliknya terhadap kita (dalam artian kepentingan kita juga terancam). Lihat: Muthahhari, *Falsafah Akhlak: Kritik atas Konsep Moralitas Barat (terj.)* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm. 42-43.

²⁶Dalam analogi “Seorang pelayan restoran bersikap ramah kepada pengunjungnya bukan lantas ia baik, melainkan karena ingin mengeksploitasi kantong konsumennya”. Kepentinganlah yang menjadi landasan terjadinya proses sosial dalam hal interaksi sosial. Seperti kata Smith: “kita tidak mengharapkan makan malam kita disediakan oleh kebaikan hati tukang daging, pembuat bir atau pembuat roti, melainkan perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri”. Cinta pada diri sendiri menjadi dasar manusia memenuhi kebutuhannya sendiri. Lihat: Poli, *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Surabaya: Briliant Internasional, 2010), hlm. 66-67.

²⁷Etika pragmatis-utilitarian ini yang membentuk konsep CSR cukup mengkhawatirkan ketika CSR dipersepsi secara *legitimate* untuk meningkatkan eksploitasi tak terkendali, sehingga dapat berbanding positif antara CSR dengan tingkat kerusakan alam. Fenomena CSR merebak sejak revolusi industri abad ke-18, dan faktanya tetap saja tingkat kerusakan alam semakin deras terjadi sejak abad itu (manusia mengenal CSR).

²⁸Kepentingan-kepentingan ekonomi yang dimaksud di antaranya: Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis, melebarkan akses sumber daya operasional perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas dan peluang mendapatkan penghargaan. Lihat: Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

*kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (antara yang haq dan bathil).*²⁹

2. “Halal” dari Sisi Perolehan, Pengukuran, dan Pendistribusian

Nilai lebih yang dialokasikan atau didistribusikan dalam Islam harus halal,³⁰ yakni sesuai dengan ketentuan Tuhan baik dari sisi produksi, pengukuran nilai sampai pendistribusian.³¹ Dari sisi produksi dipastikan bahwa nilai yang diperoleh tidaklah lahir dari kezaliman, “perampasan” hak-hak buruh, dan pengrusakan alam, sedangkan dari sisi pengukuran tidaklah berdasarkan manipulasi. Dan dari sisi pendistribusian yakni tepat sasaran, tidak bermuatan kepentingan, serta sesuai kaidah hak dalam Islam. “*Barangsiapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa*”.³²

Berbeda dengan kapitalisme yang cenderung “bebas nilai” (kecuali yang diatur dalam ketentuan hukum) dalam hal perolehan, hingga pendistribusian. Bahkan dalam hal perolehan, banyak menimbulkan tragedi kemanusiaan akibat rusaknya ekologis dan melaratnya kaum buruh (pekerja). Sedangkan dalam pendistribusian nilai lebih tersebut dalam bentuk CSR,³³ praktik pendistribusiannya lebih banyak bermuatan politis, kosmetik dibanding dengan substansi tujuannya.³⁴ Seperti kata Carrel

²⁹QS Al-Fajr [89]: 17-19.

³⁰*Tidaklah seorang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik* (HR Bukhari). “*sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hamba-Nya berusaha mencari barang dengan cara yang halal.*” (HR At Thabrani dan Ad Dailami).

³¹*Tidakkah kalian memerhatikan, bagaimana Allah membuat perumpamaan... seperti pohon yang baik, batangnya kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit, Ia memberikan buahnya setiap saat* (QS Ibrahim [14]: 24).

³²HR Huzaimah dan Ibnu Hiban.

³³Penulis menganggap bahwa CSR pada dasarnya adalah *instrument* kapitalisme dalam mengaktualkan model *trickle down effect* (efek menetes ke bawah) yang dipersepsi sebagai jalan menuju kesejahteraan. Meski hanya menjadi ilusi ketimbang fakta, seiring dengan ditinggalkannya model *trickle down effect*. CSR dipersepsi sebagai beban sosial, dalam konteksnya sebagai beban memengaruhi harga pokok atas produksi barang. Sehingga sebenarnya CSR telah menjebak masyarakat dalam sebuah kesadaran palsu. Sebab apa yang didistribusikan pada dasarnya adalah hasil dari eksploitasi masyarakat itu sendiri, yang dibungkus rapi dalam bahasa-bahasa kemanusiaan yang tampak saleh.

³⁴Lihat: Forqan, 2010. CSR dan *Green Energy*, “Benarkah Solusi bagi Krisis Listrik di Indonesia? Paper Disampaikan pada Seminar Optimalisasi Program CSR Menuju Masyarakat Mandiri Energi, Hotel Aston Primera-Pasteur Bandung, 22-23 Juli 2010.

dalam Muthahhari (1990) “Alangkah banyak kepentingan bersembunyi dibalik kalimat kesucian, kebenaran dan keadilan”. *Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; “Ini dari Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.*³⁵

3. Bukan Perbuatan Alami

Dalam Islam perbuatan akhlak berbeda dengan perbuatan alami.³⁶ Perusahaan yang merusak alam lantas diperbaiki adalah perbuatan alami disebabkan karena kewajiban untuk memperbaikinya. Perbuatan alami adalah perbuatan yang dianggap wajar, sedangkan perbuatan akhlak melampaui dari makna kewajaran.

Suatu sikap *altruism* melekat atas kecintaan (*agape*) terhadap manusia, alam, keadilan dan kebenaran, sebagai manifestasi kecintaan manusia pada Tuhannya mewujudkan pada kecintaan pada makhluk-Nya. Sebab tindakan yang hanya bertujuan untuk diri sendiri (*egois*) tidak ada bedanya dengan ketika “binatang” yang bertindak. Perbuatan akhlak adalah perbuatan *altruism* yang bersandar pada keluhuran dan ketentuan Tuhan. *Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”.³⁷

www.walhi.or.id. Lihat juga hasil penelitian Suyudi (2010) juga menyimpulkan hanya untuk kebutuhan berupa kepentingan harmonisasi *stockholders* dengan *stakeholders*.

³⁵QS Al-Baqarah [2]: 79. Kata “Allah” dalam kalimat tersebut selaras dengan kata “kebenaran, keadilan”. Ayat tersebut juga konteks untuk melihat realitas entitas syariah yang berkarakter kapitalistik.

³⁶Seorang yang haus lantas mencari air untuk memuaskan dahaganya adalah perbuatan alami, sedangkan seorang yang haus dan meninggalkan kehausannya demi orang lain adalah perbuatan akhlaki. Realitas inilah merupakan akhlak yang disempurnakan oleh Rasulullah (bersandar pada *altruism*). Seperti ketika turunnya surah Al-Insan [76]: 8, dalam tafsir Nurus Tsalaqyn: Ketika rumah Fatimah terdapat gandum, Beliau (keluarga Beliau) mengolahnya menjadi *asidah* (bubur). Setelah masak Beliau menghidangkan kepada keluarga Beliau. Tiba-tiba seorang miskin datang dan berkata: Semoga Allah merahmati kalian, maka Ali berdiri dan memberikan sepertiga makanan kepadanya. Tidak lama kemudian datang anak yatim dan berkata hal yang sama: Semoga Allah merahmati kalian, Ali pun bangkit dan memberikan sepertiga makanan kepadanya. Kemudian datang lagi seorang tawanan dengan pernyataan yang sama, hingga mereka keluarga Ali tidak merasakan makanan sedikitpun. Lihat: Salman Parisi (Ed), *Hak-hak Sipil dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlulbait as* (Jakarta: Al Huda, Markaz Ar Risalah, 2004), hlm. 27.

³⁷QS Al-Baqarah [2]: 216.

4. Bertujuan untuk Membebaskan

Tujuan utama nilai lebih yang didistribusikan adalah untuk membebaskan (memberdayakan) *stakeholders* yang lemah dari kelemahannya,³⁸ dalam hal mengurangi ketimpangan sosial. Mendistribusikan tanpa memandang penerima dalam posisi *inferior*.³⁹ Bukan untuk kepentingan formalitas belaka yang bersifat *mercusuar*, *Ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak.*⁴⁰

Tidak pula berdasarkan pada simbol-simbol pragmatis baik atas nama *humanism* maupun agama (syariah), selama dalam konteks pendistribusian tersebut juga tersimpang sisi pengrusakan alam di sisi lain atau perampasan hak buruh dan pekerja. *Ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan.*⁴¹

C. Ringkasan

Nilai tambah yang dipersepsi sebagai sebuah kesadaran spiritual (altruisme) yang dirasakan manusia setelah ia mendistribusikan nilai lebih dalam artian memisahkan antara yang hak dan yang bukan haknya. Kesadaran tersebut adalah wujud pembebasan manusia secara individu dan sosial yang bermakna “pensucian”. Etika dalam posisi ini menentukan kualitas pensucian tersebut yang terakomodir dalam istilah *spiritual value added*.

Keseluruhan pendistribusian nilai lebih bersandar pada keluhuran Tuhan (etika altruisme) bukan pada egoisme (kepentingan). Dengan memosisikan keadilan (dalam perseptif Islam) sebagai landasan etika.

³⁸Salah satu entitas bisnis yang sangat *syari'i* dari konteks pembebasan adalah *Grameen Bank* yang lahir di Bangladesh oleh Muhammad Yunus. Sebuah perjuangan panjang melawan tragedi kemanusiaan (kemiskinan) dengan sebuah konsep bisnis yang didesain untuk membebaskan rakyat-rakyat miskin dan sekarang semakin mengekspansifkan semangat pemberdayaan tersebut ke lintas negara (lebih 100 negara pada 5 benua). Lihat: Yunus, *Bank Kaum Miskin* (terj.) (Depok: Marjin Kiri, 2008).

³⁹QS Al-Baqarah [2]: 264.

⁴⁰QS Al-Baqarah [2]: 204-205.

⁴¹QS At-Taubah [9]: 107.

Beberapa prinsip etika yang mendasarinya di antaranya: *Pertama*, bersifat altruisme bukan egoisme. *Kedua*, halal dari sisi perolehan, pengukuran dan pendistribusian. *Ketiga*, bukan merupakan perbuatan alami. *Keempat*, bertujuan untuk membebaskan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

8



Akuntan Tercerahkan (*Rausyan Fikr*¹), Perwakilan “Tuhan” Dalam Entitas Bisnis: Refleksi Kedaulatan Agen

“

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu

(QS Asy-Syu'araa [26]: 181-184).

.....”

¹Istilah yang diperkenalkan Syariati untuk orang-orang yang tercerahkan, menerima dan melaksanakan tanggung jawab agama untuk membebaskan dari kezaliman. Bukan sekadar ilmuwan, ataupun sekadar intelektual.

Akuntan adalah pihak aktor yang berperan terhadap pembentukan dan pelaksanaan akuntansi sebagai struktur. Realitas akuntansi merupakan bagian dari bagaimana akuntan mengambil peran. Tarik menarik kuasa antara aktor (akuntan) dan struktur (akuntansi), meskipun kadang pula bertemu secara mutual. Realitas penyimpangan yang selalu menghadirkan akuntan sebagai pihak sentral adalah bentuk bagaimana aktor dan struktur bertemu secara mutual. Habitus aktor yang “serakah” bertemu dengan akuntansi (kapitalisme) sebagai struktur yang melegitimasi.

A. Relasi Akuntan sebagai “Agen” dan Akuntansi sebagai “Struktur”

Dalam Islam relasi agen dan struktur seperti halnya relasi individu dan masyarakat yang memiliki eksistensi masing-masing. Struktur adalah eksistensi riil sebagaimana agen adalah eksistensi riil. Struktur memiliki kuasa dalam memengaruhi agen, begitupun sebaliknya agen memiliki pula kuasa untuk memengaruhi struktur dalam menstrukturkan struktur baru. Akuntansi sebagai struktur ketika kandungan filosofisnya adalah kapitalisme maka akuntan sebagai agen dan keseluruhan agen yang bertindak dalam pengambilan keputusan akan terpola pada pola-pola kapitalisme pula. Dengan demikian realitas yang dikonstruksi oleh struktur (akuntansi) adalah realitas kapitalisme.

Begitupun halnya agen tidaklah selamanya menjadi objek yang terdikte oleh struktur disebabkan ia memiliki kuasa untuk menolak struktur, hal ini merepresentasikan kedaulatan agen. Dalam artian akuntansi yang dipersepsi (ditafsirkan) secara materiil maka tindakan pun akan mengarah pada bagaimana mengakumulasi materi. Begitupun ketika akuntansi dipersepsi dalam kerangka tauhid (pembebasan), maka realitas akuntansi akan menciptakan tindakan-tindakan yang mengarah pada pembebasan (tauhid) sebagai puncak pencapaian nilai. Akuntansi dalam posisi ini dibentuk (dikonstruksi) oleh agen dalam kerangka nilai sosial, akan kembali memengaruhi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dan keputusan-keputusan dalam kerangka sistem akan memengaruhi keseluruhan subsistem-subsistem dalam struktur sosial.

B. Akuntan dan Belenggu Kapitalisme

Dalam teori strukturalisme yang mengagungkan kuasa struktur akan menempatkan agen sebagai produk struktur. Akuntan dalam posisi tersebut pada dasarnya hanyalah objek yang dibentuk dan didikte oleh struktur. Akuntan pada dasarnya sebagaimana manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah kebaikan, kejujuran, kepedulian, cinta dan keadilan, tetapi aktualitas fitrah tersebut diproduksi oleh realitas struktur. Dalam konteks ini akuntansi yang berwatak kapitalislah yang menggiring akuntan untuk berperawakan kapitalis pula. Tarik menarik kuasa antara akuntan (nilai) dengan realitas struktur (akuntansi kapitalis) telah menenggelamkan akuntan dalam penjara akuntansi. Keburukan (penyimpangan) tidak lagi bermakna karena motivasi atau *opportunity*, melainkan dipaksa oleh struktur.

1. Dilema Keprofesian

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa minat penghuni jurusan akuntansi kebanyakan menganggap bahwa akuntan adalah profesi yang paling menjanjikan.² Dalam artian menjanjikan bukan dalam kapasitasnya untuk *altruism*, tetapi jalan paling *instant* untuk cepat kaya. Tingginya minat pada kenyataannya bertemu dengan “hausnya” pemodal akan bagaimana mengakumulasi kekayaan di tengah pusaran kompetisi yang dahsyat. Maka yang terjadi bukan tarik menarik kepentingan (*interest conflict*) antara *agent* dan *principal* (*agency theory*), melainkan bertemu dalam bentuk asosiasi (*mutualism*) untuk tujuan yang sama yakni memperbesar peradaban laba. Sehingga kode etik pun kadang tinggal selebaran kertas yang “usang” dan hanya dibicarakan di ruang-ruang yang sempit bernama kampus. Seperti halnya “ibadah” dipenjara di tempat-tempat yang suci dan sempit, Tuhan terpenjara dalam gereja, vihara, masjid dan lain-lain.

Bahkan status sebagai profesi banyak yang mempertanyakan disebabkan karena pada praktiknya muatan otonomisasi akuntan tidak terlihat, lebih banyak dipasung dan dikendalikan oleh kepentingan.³ Dalam entitas bisnis

²Lihat: Aisyah. 2005. Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Makassar Mengenai Faktor-faktor yang Memengaruhi dalam Pemilihan Karier. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Skripsi.

³Lihat: Harahap, *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), bab. 5.

banyak anggapan yang menganggap bahwa seolah-olah ketika akuntan telah dibayar sewa jasa maka ia mempersepsikan dapat mendiktenya sesuai kepentingan manajemen.⁴ Dorongan mata pencaharian mengalahkan dorongan sebagai profesi,⁵ maka yang terjadi adalah mencatat (*creative accounting*) sesuai kepentingan pemodal dan manajemen di samping juga kepentingan pribadi terpenuhi,⁶ akibatnya akuntansi sebagai produk lebih dominan menjadi ekspresi naluri, ketimbang intelektual apalagi spiritual, mereproduksi laporan keuangan distortif seperti *earning management*, *windows dressing*, *lipstick accounting*, *income smoothing*, mereproduksi laporan yang manipulatif baik dalam bentuk formal prosedur maupun *moral hazard*. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.⁷

2. Independensi dan Dosa Sosial Akuntan

Independensi adalah salah satu rukun kode etik akuntan yang diproduksi oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai etika yang mengikat pelaku pasar yang bergelar akuntan. Independensi berarti mandiri, netralitas dan tidak memihak dalam berbagai kepentingan. Meski dalam realitasnya makna independensi kemudian terkesan *absurd* ketika dalam kenyataannya akuntan memosisikan diri bagi “patung” dalam melihat perilaku keserakahan entitas bisnis. Mengamini realitas penindasan meski itu bertentangan dengan kecenderungan fitrahnya, tetapi atas nama profesionalisme menyumbat kesadaran eksistensinya sebagai makhluk yang cenderung pada kebaikan.

Praktik pengrusakan alam hingga berimbas pada masyarakat, fenomena “perampasan” hak buruh dan pekerja yang dilegitimasi lewat pengaturan-pengaturan akuntansi (penilaian dan pengukuran) adalah sebuah kezaliman akuntan. *Telah dilaknati orang-orang... disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar*

⁴Lihat: Lidigdo, *Paradox Etika Akuntan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁵*Ibid.*

⁶Mulawarman (2008) menegaskan bahwa dalam akuntan khususnya dalam pelaksanaan auditing, telah terjadi mutualisme eksklusif kepentingan dalam kerangka *the third party*. Akuntan ikut tenggelam dalam relasi kepentingan *agent-principal* akibat terkalihkannya dalam kuasa *agent-principal*. Lihat: <http://www.ajidedim.com>.

⁷QS Al-Baqarah [2]: 79.

yang mereka perbuat.⁸ Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.⁹

Hasil penelitian Wilmott dan Lowe (1989) serta Willmott (1990), Lee (1994) menjelaskan bahwa, berdasar peran profesionalnya, akuntan mengklaim dirinya sebagai representasi kepentingan publik, dengan menggunakan otoritas pengetahuannya, kenyataannya mereka bekerja untuk melayani kepentingan pribadi (*order*). Hal tersebut, sebenarnya juga telah diteliti oleh Bazerman, Morgan dan Loewenstein (1997) dalam Kumalasari dan Joesoef (2002), yang mengatakan bahwa akuntan publik tidaklah mungkin bertindak independen dalam menjalankan tugas audit. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang disebut sebagai *self-serving bias* yang timbul dari interaksi berkesinambungan antara akuntan publik dan manajer di mana keduanya diuntungkan oleh adanya *self-serving bias* tersebut.¹⁰

3. Akuntan dan Dunia *Simulacra*¹¹

Dalam dunia modern, praktik hidup masyarakat mengikuti pola modernitas, Baudrillard (1983) memandang masyarakat kontemporer adalah tipikal masyarakat yang terjebak bahkan hanyut dalam dunia *simulacra*. Satu-satunya perekat relasi akuntan dengan klien adalah relasi “dagang” dengan laporan keuangan adalah “komoditas” dan klien adalah konsumen. Masyarakat yang hanyut dalam dunia *simulacra* bukan hanya tidak dapat membedakan antara realitas dan *image* melainkan melampaui (*hyper-reality*) yakni konsumen menggandrungi realitas imaji

⁸Muthahhari menjelaskan relasi individu dan masyarakat ketika ia menafsirkan ayat Al-Qur'an yang menyebut kisah kaum Tsamud yang membunuh unta betina Nabi Shaleh. Satu orang yang membunuh tapi dihukumi sebagai tindakan kolektif sehingga dengannya Allah melaknati masyarakat (kaum) tersebut. Perbuatan individu dalam entitas merupakan perbuatan kolektif. Untuk lebih jelasnya, Lihat: Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagad Raya (ter.)*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 274-276.

⁹QS Al-Maaidah [5]: 78-79.

¹⁰Mulawarman, 2008., *op. cit.* Lihat juga hasil penelitian Yulius, “Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 4, No. 2, Nopember 2002.

¹¹*Simulacra* adalah realitas konstruksi (rekayasa) yang dianggap “palsu”, validitas antara kebenaran dan kepalsuan bersimpang siur. Bahkan dalam konteksnya kepalsuan menjadi dominan menenggelamkan kebenaran. Masyarakat yang terjebak dalam *simulacra* lebih menggandrungi realitas palsu dibanding yang benar.

dibanding dengan fakta. Realitas yang tidak eksistensial lebih cenderung diperealitaskan. Kepalsuan (*falsity*) adalah jauh mendapatkan popularitas ketimbang yang faktual (*truth*). Dalam konteks pertarungan dagang, realitasnya akuntan juga terjebak pada pusaran pasar yang mereproduksi model-model kesadaran bagi konsumen dalam jaringan *simulacra*.¹² Proses *simulacra* terjadi ketika konsumen lebih menggandrungi realitas *falsity* yakni akuntan yang dapat keluar dari kode etik ketimbang *truth* (akuntan idealis), begitupun sebaliknya bagi pihak akuntan. Akibatnya menciptakan pergeseran-pergeseran fungsi bagi akuntan menuju realitas semu,¹³ ketika kepalsuan menenggelamkan kebenaran, praktik keburukan dipersepsi sebagai kebaikan. Realitas tidak hanya hadir dalam wujud pencairan batas-batas melainkan terjadi silang menyilang, menggantikan realitas eksistensial oleh realitas non-eksistensial.

Reformulasi bagaimana kesadaran mendefinisikan “kenyataan” sejati yang imajiner. Bahkan pilihan atas *falsity* ditopang dan dilegitimasi oleh pertimbangan-pertimbangan rasional instrumental. Bercengkerama dalam logika efisiensi, efektivitas yang dipersepsi sebagai keuntungan dengan menempatkan “uang” sebagai motif utama berlangsungnya interaksi. Akibatnya realitas semu mengalahkan realitas sejati (sesungguhnya). Yang memiliki kuasa dalam mereproduksi *financial reporting* yang bersifat distortif adalah *hero*. Sampai pada puncaknya ketika monolisme realitas tergantikan oleh *simulacra*, sehingga jadilah imaji (akuntan non-idealisme) sebagai yang diperealitaskan (*false is beautiful*). Hal ini menggambarkan, bagaimana kasus penyimpangan, penggelembungan dalam konteks barterisasi profesi yang terjadi menempatkan akuntan sebagai pihak

¹²Kompas (18/3/11) menginformasikan ketatnya persaingan akuntan (KAP) dari 405 KAP mengeluhkan ketidakmampuannya mengembangkan usaha akibat pangsa pasar terbesar telah dikapling (dikuasai) 4 KAP besar yakni Ernest & Young, Pricewaterhouse Coopers, KAP Siddarta & Widjaja (KPMG) dan Deloitte. Empat KAP besar tersebut menguasai 69% total pendapatan sedangkan 405 KAP memperebutkan 31% sisanya. Realitas pertarungan antar akuntan mendorong atau menstimulus terciptanya kesadaran kompromistik bahkan barterisasi untuk mempertahankan pasar atau merebut pasar. Bahkan ironisnya ketika pengambil kebijakan secara yuridis justru semakin melegitimasi pusaran kompetisi tersebut dengan mengesahkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang memberi tambahan pelaku pasar akuntan yakni dengan melibatkan pihak asing (akuntan asing).

¹³Hasil review BPKP terhadap 91 KAP/KJA (1994-1997), hasilnya 97,55% KAP dan KJA tidak mematuhi standar profesional akuntan publik (SPAP). Ludigdo, 2007, *op. cit.*, hlm. 12.

sentral¹⁴. Ketika laporan keuangan dan “opini akuntan” menjadi komoditas bertemu secara kompromistik dengan *fee*. Hukum pasar kemudian menguasai interaksi yang terjadi.

4. Masa Depan Akuntan sebagai Profesi

Roh akuntan terletak pada “kepercayaan”,¹⁵ dalam artian ketika kepercayaan telah hilang maka seperti hilangnya roh dalam jasad manusia yang bermakna kematian. Fakta menunjukkan betapa lonceng “kematian” akuntan semakin nyaring terdengar. Kasus demi kasus penyimpangan hilir berganti yang selalu melibatkan akuntan¹⁶ sebagai pihak sentral, baik terkait ekonomi maupun masuk dalam pusaran politik.¹⁷

Di samping kualitas citra akuntan masuk dalam tataran elit, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan citra manajemen. Sehingga masyarakat mempersepsinya sebagai bagian dari manajemen, yang dalam konteks industri, akuntan sama dengan manajemen sebagai pihak yang dinisbahkan dalam konflik pertentangan majikan dan buruh yang begitu ironis¹⁸ atau kasus-kasus konflik korporasi dengan masyarakat yang sering melanda dan mengorbankan rakyat kecil. Kelihatannya akuntan menemukan dirinya terkulai dalam lumpur kekuasaan manajemen, sehingga tidak dapat

¹⁴Kasus Enron yang pernah menggemparkan merupakan perusahaan besar dengan melibatkan kantor akuntan yang besar pula secara reputasi. Dan sederetan kasus-kasus yang sama termasuk di Indonesia. Untuk lebih detailnya, Lihat: Harahap, 2007, *op. cit.*, bab 5 dan 6.

¹⁵Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan publik dan kepercayaan *stakeholders* secara keseluruhan atas profesi akuntan. Ketika kepercayaan telah hilang akibat tergerus tanpa henti, maka akuntan tidak lagi dibutuhkan.

¹⁶Kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, kemudian diikuti oleh Dana dan beberapa kasus lainnya menodai citra akuntan. Bahkan dalam penelitian Ludigdo (2007) dalam suatu wawancara bagaimana persepsi golongan masyarakat menyebut akuntan adalah “pembongkang” yang seolah-olah sebagai sebuah kodrat yang melekat karena dekatnya akuntan dengan persoalan-persoalan keuangan dan pengambil keputusan.

¹⁷Akuntan yang bergerak dalam ruang pemerintahan, di Indonesia seperti BPK. Tidak sedikit persoalan-persoalan muncul akibat terjeratnya akuntan dalam pusaran politik, yang kadang menciptakan distorsi pelaporan keuangan negara/publik.

¹⁸Indonesia adalah negara yang paling menguat dalam konteks pertentangan majikan-buruh, perusahaan besar seperti Freeport yang mendulang keuntungan dalam jumlah besar (230.000 juta ton emas per tahun ditambah tambaga) juga tidak luput dari pertentangan buruh yang menuntut isu kenaikan upah (kesejahteraan). Yang berujung pada tragedi kemanusiaan (13 tewas) ditangan aparat TNI. Metro TV (10/11/11).

mengambil tindakan-tindakan yang berkeadilan. Hasil penelitian Harahap (2007) mengungkapkan bagaimana penurunan kepercayaan cukup drastis hingga memengaruhi minat terjadi di Amerika hingga mencapai 18%, Harahap menyebutnya sebagai krisis akuntansi.¹⁹

C. Akuntan Tercerahkan (*Rausyan Fikr*): Refleksi Kedaulatan Agen

Islam menurut Syariat bukan ritualitas individu semata, melainkan roh yang menggerakkan hati seorang Muslim untuk menempuh aksi-aksi progresif bagi kemaslahatan umat manusia baik individu maupun kolektif. Sebagai sebuah ideologi, agama Islam bertengger di atas keyakinan yang secara sadar dipilih untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah yang mencuat dalam masyarakatnya (kemiskinan, ketimpangan, dan lain-lain). Rasulullah pernah mengatakan: *Setiap kamu adalah penggembala dan setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya.*²⁰ Akuntan bertanggung jawab bagi keprofesiannya (akuntansi) dalam kerangka ideologis.

Dalam kenyataannya, kebanyakan akuntan, dan hampir semua kelompok yang ada dalam masyarakat bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan (akuntansi) yang netral, bebas nilai. Netralitas berarti bebas nilai, tidak bermuatan ideologis tertentu. Slogan netralitas ilmiah (independensi) telah didiktekan kepada para akuntan sebagai sebuah dogmatisasi, simbol sekaligus kriteria keprofesionalismean. Sehingga para akuntan yang pada dasarnya memiliki sisi altruisme dalam dirinya menemukan dirinya yang terkulai dan terbelah (*split of personality*) menjadi dua bagian atau lebih, berpisah dalam rentang jarak yang jauh atau muncul dalam bentuk pertentangan (konflikual), di satu sisi ilmu dan keahlian, di sisi lain adalah keyakinan, yang menempati wilayah saling terasing satu sama lain (alienasi), terpisah dalam rentang jarak yang begitu jauh. Mereka (akuntan) diharuskan menerima pernyataan-pernyataan dogmatis sebagai ilmuwan yang objektif dan netral, bekerja dalam dunia analisis yang independen, yang menuntut semua dicatat, diklasifikasikan dan dilaporkan

¹⁹Untuk lebih detailnya, Lihat: Harahap, 2007, *op.cit.*, bab 5 dan 6.

²⁰Lihat: Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 241.

secara netralitas, demi menjaga kemurnian ilmu dan menghindari distorsi ilmu.

Maka terjebaklah akuntan dalam belenggu kehampaan atas karya-karya dan jerih payah yang ia kerjakan, kering atas nilai sebab dilahirkan tanpa suatu misi nilai tertentu, ritual mencatat dan melaporkan telah kehilangan jiwanya, terkurung dalam sangkar motivasi serta harapan yang lebih besar untuk mereka dapatkan dari sekadar *fee*, *privelese*, dan penghargaan oleh manusia. Tergelincir dalam *fetisism* yang menciptakan penindasan yang tak disadari, dan tak pula diingini lewat laporan keuangan. Sehingga dalam posisinya akuntan tidak berlepas diri atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan baik sosial maupun kehidupan alam.

Demi mendapatkan “upah”²¹ yang tinggi untuk kemakmuran diri sendiri. Tidak lagi memedulikan ketimpangan, ketidakadilan, *status quo*, kebobrokan, dan peristiwa apa pun yang muncul di tengah-tengah masyarakatnya. Padahal di sinilah tugas dan bidang garap ideologi. Ketika ideologi sudah dicampakkan dari kesatuan utuh paradigma berpikir akuntansi, maka nilai-nilai dasar yang memotivasi seluruh aktivitas keprofesian menjadi pragmatis, egoistik, kekurangan *sense of humanity*, kemanusiaan sudah tergadaikan oleh egoisme dan pragmatisme individualistik dan tujuan-tujuan jangka pendek. *Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.*²²

D. Rausyan Fikr: Pembebasan dari “Perbudakan” Keprofesian

Syariati menggambarkan realitas keprofesian kontemporer:

Ilmu telah memperkuat manusia, tetapi secara moral lemah. Mungkin suatu ketika ia dapat membombardir planet mars dari bumi ini... namun sayang sekali manusia yang sangat cerdas ini secara moral

²¹Upah, gaji, *fee* apa pun namanya pada dasarnya adalah hak akuntan setelah ia melaksanakan tugas. Yang tidak etis adalah ketika keseluruhan aktivitas akuntan terpenjara hanya untuk kepentingan materiil saja dengan memisahkan kepentingan-kepentingan ideologis lainnya, khususnya dalam mencerna setiap persoalan-persoalan yang menyangkut keadilan. Mengabaikan pertimbangan-pertimbangan ideologis tersebut, sama halnya dengan memapankan dan mengamini realitas penindasan, sebab akuntan dalam posisi tersebut memiliki kuasa (kewenangan).

²²QS Al-Baqarah [2]: 86.

sangat lemah, terikat oleh upah dan “mata duitan”, ia mau melakukan apa saja demi uang. Kadang-kadang dikatakan orang bahwa perbudakan masih dipraktikkan di Afrika. Ada orang yang memburu budak yang masuk keluar desa dan hutan mencari budak dan anak-anaknya untuk dijual di pasaran gelap. Akan tetapi, saya menyaksikan jenis perbudakan lain yang sedang dipraktikkan di pusat-pusat intelektual Eropa, di Cambridge, Sorbone di mana budak-budak diperdagangkan bukannya manusia-manusia primitif dari rimba raya Afrika akan tetapi adalah intelektual-intelektual yang sangat pintar di muka bumi yang diletakkan dalam suatu pelelangan untuk harga yang paling tinggi. Sesungguhnya mereka sendirilah yang menawarkan diri untuk dilelang dihadapan barisan para kapitalis dan agen-agen korporasi dan perusahaan-perusahaan raksasa asing.²³

Dengan demikian, seperti gagasan Syariati, sesungguhnya yang dibutuhkan Islam adalah ilmuwan-ilmuwan yang ideolog, ilmuwan yang bergerak dalam dua arus antara idealita dan realita, antara individu dan sosial, antara vertikal dan horizontal, antara profesionalisme dan humanisme, antara misi kemanusiaan dan misi kenabian, antara kehidupan dunia dan akhirat.²⁴ Mereka adalah *Ulil Albab, Rausyan Fikr* yang menyimpan energi untuk menggerakkan peradaban. Bukan sekadar menjadi produk dari kerasnya arus peradaban pasar.

Seorang pemikir tercerahkan yang mengikuti ideologi yang dipilihnya secara sadar. Syariati menegaskan bahwa *Rausyan Fikr* merupakan kunci bagi perubahan. Melawan struktur akuntansi yang berwatak penindasan. Sebab *Rausyan Fikr* memandang tugas akuntan bukan sekadar “memberi makna” terhadap realitas penindasan dan meratapinya, melainkan bertindak menyelamatkan dan membebaskan dari struktur yang menindas dan menggilas hukum-hukum Tuhan. *Jika engkau melihat umatku takut, sehingga tidak berani mengatakan kepada orang zalim: Wahai orang zalim, maka mereka tidak berarti lagi.*²⁵

²³Lihat: Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim (terj.)*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 96.

²⁴QS Al-Qashash [28]: 77.

²⁵HR Ahmad, Al Hakim dan Al Bazzar. Hal ini menegaskan bahwa tingkatan kualitas tauhid dalam Islam melekat pada kualitas perlawanan seorang terhadap kemungkar.

E. Akuntan Tercerahkan (*Rausyan Fikr*): Perwakilan yang Tertindas dalam Entitas Bisnis

Akuntan dalam kerangka pembebasan bukan “dokter” keuangan, melainkan ia adalah “ulama”²⁶ dengan pengetahuannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Akuntan adalah perwakilan “Tuhan” dalam entitas masyarakat ekonomi dalam menampakkan hak dan yang bukan hak. Neraca keseimbangan sosial dan alam terletak di pena seorang akuntan. Sebab sifat “pencatatan” adalah sifat Ketuhanan,²⁷ yang termanifestasikan kepada akuntan sebagai profesionalisme di muka bumi untuk menjalankan akuntansi sebagai risalah dari Tuhan. Ia yang “ditakdirkan” memiliki kemampuan menyerap sifat maha mencatat Tuhan di muka bumi, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, dan mempertahankan keseimbangan alam sebagai risalah keprofesiannya.

Ia sebagai *Rausyan Fikr*, penyambung lidah, penerus “Nabi” sebagai perwakilan kaum tertindas (*mustada'afin*)²⁸ dalam masyarakat ekonomi dengan menjalankan hakikat penciptaan untuk menegakkan keadilan dengan mendistribusikan hak-hak sesuai ketentuan Tuhannya untuk itu. *Sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu*²⁹. Ber-*taqlid* pada kebenaran bukan pada pemodal atau kepentingan sesaat. Sebab ketika pena akuntan telah tunduk pada naluri, *Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri*.³⁰

Akuntan (*Rausyan Fikr*) tidak Menghamba atas nama profesi bukan pula pelayan atas kerakusan para kapitalis³¹, akuntan merupakan profesi

²⁶Ulama adalah simbolitas orang yang berpengetahuan dan beriman dan bertindak untuk menjalankan kebenaran Tuhannya (QS Al-Maaidah [5]: 8), ketika ia melihat kemungkarannya maka ia akan mengubah dengan tangannya, lisannya, dan hatinya (HR Muslim). Mereka yang mampu membedakan hak dan batil, dan memperjuangkan yang hak dan melawan yang batil. Ia wakil Tuhan, bukan wakil penguasa apalagi pemodal.

²⁷*Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, ... maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya* (QS At-Takwiir [81]: 10). *Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis* (QS Al-Qamar [54]: 52-53).

²⁸*Hindarilah doa orang yang teraniaya, walaupun ia kafir, karena ia tidak terhalang* (HR Ahmad).

²⁹QS Shaad [38]: 26.

³⁰QS Al-Baqarah [2]: 79.

³¹*Janganlah engkau takut pada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku* (QS Al-Maaidah [5]: 44).

mulia dalam mengontrol keseimbangan untuk keadilan alam dan sosial. *Dan di antara kaum...itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.*³²

F. *Khusuk* sebagai Basis Etika (Ibadah) Akuntan

Khusuk adalah istilah yang sering digunakan dalam ibadah ritual yang merujuk pada proses kualitas pencapaian ibadah yang tertinggi. Dalam terminologi agama, *khusuk* bermakna *ihsan*,³³ *mukasyafah* (penyaksian), *mahabbah* (cinta) dan *makrifat* (penyatuan). *Barangsiapa yang berpaling menginglatku, maka sesungguhnya penghidupan yang sempit.*³⁴

Akuntansi adalah sarana mendekati diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak hanya ada di tempat ibadah, melainkan juga di tempat-tempat bisnis. Akuntansi akan menjadi sarana “kemusyrikan” ketika akuntan menjadikan profesi tunduk pada naluri.³⁵ *Khusuk* adalah pola penghadiran Tuhan³⁶ dikeseluruhan aktivitas³⁷ manusia, melibatkan unsur pikiran, jiwa dan perasaan. Seorang akuntan yang *khusuk* tidak berarti bahwa ia harus memegang tasbeih sambil menyusun laporan keuangan, atau memakai kopiah dan membentangkan sejadah dalam memeriksa laporan keuangan, tetapi mengingat Tuhan dalam artian apakah aktivitas yang dilakukan sudah selaras dengan perintah Tuhan atau sebaliknya?

Kualitas kerja seorang akuntan terletak pada ke-*khusuk*-an dalam menjalankan tugas, dan kualitas ke-*khusuk*-an itu ditentukan oleh kerja-kerja kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam bingkai keberdaulatan. Laporan keuangan sebagai karya akuntan harus dipersepsi sebagai hasil dari integrasi kualitas intelektual dan spiritual. Akuntan sebagai utusan (membawa amanah) pemberi kabar (informasi) harus dimaknai dalam

³²QS Al-A'raaf [7]: 159.

³³Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah: suatu Nabi berada di tengah-tengah kelompok orang banyak, tiba-tiba seorang laki-laki (Jibril) datang menanyakan... kemudian laki-laki itu bertanya lagi: apakah *ihsan* itu? Nabipun menjawab: *ihsan* adalah di mana ketika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan sekiranya engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu.

³⁴QS Thaaha [20]: 124.

³⁵Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya (QS Al-Furqaan [25]: 43).

³⁶Dia bersamamu di mana saja kamu berada (QS Al-Hadiid [57]: 4)

³⁷Bertasbih di waktu pagi dan petang (QS Al-Fath [48]: 9).

kerangka profetik,³⁸ sebagaimana sifat “kenabian” yang diutus untuk memberi kabar kepada manusia tentang kebenaran, sebagaimana akuntansi adalah risalah dari Tuhan, akuntan berperan dalam menyampaikan kabar-kabar gembira tentang kebenaran dan ancaman kepada siapa pun *stakeholders* yang menindas.

G. Ringkasan

Dalam Islam, struktur dan agen seperti halnya masyarakat dan individu yang pada dasarnya rill, saling memengaruhi satu sama lain. Dalam realitasnya akuntan (agen) terlihat begitu tenggelam dalam belenggu kapitalisme, sehingga teori *agency* berupa konflik kepentingan, kelihatannya bergeser dengan bersimbiosis secara mutual antara kepentingan manajemen dan akuntan. Begitupun halnya asumsi “independensi” kelihatannya justru menjadikan akuntan sebagai “patung” yang diam atas segala penindasan yang terjadi, bukan menjadikan independen sebagai sarana kedaulatan akuntan. Sehingga semakin menjadi bukti betapa krisis akuntan berupa krisis kepercayaan semakin tergerus.

Oleh karenanya akuntan harus dikembalikan *khittah*-nya sebagai profesi yang berdaulat, ia adalah ideolog sebagai *Rausyan Fikr*. Sebab pada dasarnya sifat pencatatan Tuhan “dinisbahkan” kepada akuntan di bumi ini. Akuntan adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dipersepsi sebagai utusan Tuhan untuk memberi kabar kebenaran. Selaras hal tersebut berarti pada dasarnya akuntan seharusnya menjadi perwakilan yang tertindas di dalam masyarakat ekonomi, yang dalam posisi tersebut berperan untuk memberi kepastian terpenuhinya hak-hak *stakeholders* secara adil sesuai ketentuan Tuhan tentang hal tersebut.

Inilah bentuk ke-*khusuk*-an akuntan dalam beribadah, bertasbih dengan “angka” dalam artian menjadikan segenap tugas sebagai tugas-tugas (risalah) “kenabian” untuk memetakan hak para *stakeholders* dengan adil dan benar. Hal ini hanya dapat berlangsung dalam bingkai keberdaulatan dan membangkitkan kesadaran Ketuhanan (*khusuk*) dengan menempatkan Tuhan sebagai arah puncak pertanggungjawaban.

³⁸*Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan (QS Al-Ahzaab [33]: 45), memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Ahqaaf [46]: 12).*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

9



Akuntansi Islam Pembebasan: Perspektif Ideologis

“

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya

(QS An-Nisaa' [4]: 75).

”

Akuntansi Islam pembebasan merupakan produk dari proses integrasi agama (Islam) dengan pengetahuan. Agama sebagai sumber perlawanan (ideologi), lewat pengideologisasian Islam dalam akuntansi, meniscayakan akuntansi dipersepsi secara doktrinal bukan teoretis (saintis). Kandungan nilai pembebasan dalam Islam, kemudian diterjemahkan secara doktrinal dalam akuntansi, menggiring peran akuntansi Islam pembebasan dalam mengartikulasikan pembebasan terhadap yang tertindas, termarginalkan, terzalimi, dan yang terampas hak-haknya. Model akuntansi Islam pembebasan bersandar pada peran ideologis akuntansi dalam membebaskan yang tertindas baik skala individu maupun sosial, masyarakat maupun alam, agen maupun struktur, penindas maupun yang tertindas dari penindas.

A. Pembebasan sebagai Risalah Akuntansi Islam

Sebagaimana akuntansi dipersepsi sebagai manifestasi sifat Tuhan (maha mencatat) di muka bumi. Upaya dekonstruktif merupakan upaya membebaskan jiwa akuntansi yang selama ini terpasung dalam kerangkeng baja egoisme, pragmatisme dan materialisme menuju jiwa altruisme,¹ sebagai sarana dalam membebaskan yang tertindas. Sebagaimana Islam menempatkan Tuhan sebagai pusat realitas, maka akuntansi Islam juga memosisikan Tuhan sebagai pusat akuntansi,² sebagai titik tolak dalam menjalankan risalah pembebasan dalam penciptaan.³ Berbeda dengan akuntansi kapitalisme yang bercorak antroposentrisme, memosisikan kuasa modal (pemodal) sebagai pusat akuntansi dalam menjalankan risalah akumulasi,⁴ yang ujungnya mereproduksi dominasi dan penindasan.

Kapitalisme melanggengkan hierarkisasi kepentingan dalam akuntansi, sedangkan akuntansi Islam pembebasan bersandar pada emansipasi,⁵ sebagai konsekuensi dari konsep “Tuhan sebagai pusat akuntansi”. Keseluruhan *stakeholders* dalam posisinya hanyalah pihak yang diberi amanah untuk menjalankan risalah penciptaan di bumi secara kooperatif.⁶ Tidak ada

¹QS Yusuf [12]: 53.

²QS Al-Anfaal [8]: 44.

³QS An-Nisaa' [4]: 75.

⁴Tuhan sangat mengecam praktik akumulasi, disebabkan karena yang diakumulasi pada dasarnya adalah hak orang lain yang tak terdistribusikan (terampas) (QS Al-Ma'aarij [70]: 18; At-Taubah [9]: 34-35).

⁵Baik sosial maupun alam (QS Al-Hujuraat [49]: 13; Al-An'aam [6]: 38).

⁶QS Al-'Alaq [96]: 2.

oposisi biner dalam pola *superior-inferior*,⁷ baik antara pemodal, buruh, alam, masyarakat, bahkan negara, melainkan bersifat mutual sebagai jaringan interaksi dalam mencapai tujuan sistem yakni kesejahteraan bersama. Berbeda dengan akuntansi kapitalisme, penguasa modal menempati posisi *superior* dalam mengendalikan realitas selain dirinya, sebagai konsekuensi dari paradigma dualisme dalam memandang realitas. Kuasa modal yang mendominasi “arena” atau struktur akuntansi, menundukkan buruh, alam, masyarakat bahkan negara. Dalam akuntansi Islam pembebasan, realitas *stakeholders* berserikat dalam pola kemanunggalan,⁸ tidak ada demarkasi apa lagi pembedaan (dikotomi). Manunggal tidak berarti menolak perbedaan, tapi perbedaan yang dimaksud bukan pembedaan. Buruh, pemodal, masyarakat maupun alam manunggal, berada dalam pijakan yang sama sebagai ketentuan Tuhan.

Berbeda dengan akuntansi kapitalisme yang menciptakan model-model pengendalian dalam kuasa modal (*oposisi biner*), mereproduksi pola dominatif dan hegemoni produktif, memarginalkan bahkan menguasai realitas buruh dan alam. Dalam upaya mencapai kinerja yang terletak pada akumulasi materi, maka pada realitasnya akuntansi kapitalisme melegitimasi model-model “perampasan” hak yakni buruh tereksplorasi atas ketidaksejahteraannya dan alam dikuasai atas kerusakan-kerusakan ekologis yang ironis. Akuntansi Islam pembebasan sebagai sebuah struktur berperan secara ideologis dalam membebaskan buruh maupun alam lewat pendistribusian nilai lebih sebagai bentuk akuntansi dalam menjalankan risalah (memisahkan antara yang *haq* dan yang *bathil*). Nilai lebih yang diakumulasi dalam akuntansi kapitalisme, harus didistribusikan dalam akuntansi Islam pembebasan sebagai hak Tuhan yang melekat pada masyarakat yang lemah (tertindas).⁹ Akumulasi nilai lebih dalam akuntansi kapitalisme adalah bentuk berhala¹⁰ dalam pandangan akuntansi Islam pembebasan.

⁷*Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal (QS Ar-Ruum [30]: 29).*

⁸QS Al-Anfaal [8]: 63.

⁹QS At-Taghaabun [64]: 17.

¹⁰QS Al-An'aam [6]: 150.

B. Risalah Akuntan dalam Akuntansi

Akuntansi Islam dalam posisinya dipersepsi sebagai risalah Tuhan di muka bumi,¹¹ berbeda dengan kapitalisme yang memandang akuntansi sebagai produk sejarah dan kekuasaan yang hadir karena tuntutan kekuasaan di tengah kompleksitas bisnis.¹² Oleh karenanya akuntansi Islam pembebasan tidak tunduk pada kuasa manusia sebagaimana akuntansi kapitalisme, melainkan tunduk pada kehendak dan ketentuan Tuhan tentang hak.¹³ Dalam konteksnya akuntansi Islam berperan secara ideologis dalam memetakan hak-hak kepada keseluruhan makhluk Tuhan sebagaimana ketentuan Tuhan tentang hal tersebut. Kompleksitas zaman tidaklah mengubah substansi peran hakiki akuntansi Islam di muka bumi.¹⁴ Berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme yang mengikuti pola perubahan sejarah (determinisme sejarah).

Akuntansi sebagai risalah, menempatkan sumber kebenaran akuntansi Islam bersandar pada definisi kebenaran dari pemberi risalah.¹⁵ Kebenaran akuntansi bukanlah kebenaran positif-saintis sebagaimana akuntansi kapitalisme, melainkan ia adalah kebenaran normatif-ideologis. Akuntansi tidak lagi dipahami dalam kerangka yang mana benar dan yang mana salah, tapi yang mana yang diyakini sebagai kebenaran ideologis. Dalam menampakkan Tuhan dalam akuntansi sebagai risalah, memberi peran akuntan sebagai agen, pembawa risalah Tuhan dalam konteks profesi. Sinergitas antara agen dan struktur, dalam konteksnya termanifestasi pada tugas-tugas profetik melekat dalam diri akuntan, di sini letak keberpihakan akuntan dalam melawan kezaliman akuntansi (entitas bisnis),¹⁶ menegakkan keadilan dalam upaya menerjemahkan perintah Tuhan dalam struktur akuntansi, menampakkan kebenaran pemetaan

¹¹QS Al-Baqarah [2]: 282.

¹²Akuntansi sebagai produk pasar menandakan bahwa akuntansi pada dasarnya adalah produk kekuasaan pihak berkepentingan yang menguasai pasar. Tuntutan atas kebutuhan bisnis yang semakin kompleks menggiring lahirnya akuntansi sebagai *instrument* dan akuntan (sebagai profesi) yang berperan dalam mencatat, mengkalkulasi secara efisien dan efektif kepentingan bisnis. Itu pula sebabnya kekuasaan pemodal sangat kental pengaruhnya dalam struktur akuntansi kapitalisme.

¹³QS Az-Zukhruf [43]: 32.

¹⁴QS Al-Maidaah [5]: 3.

¹⁵QS Yunus [10]: 35.

¹⁶*Niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantara) tangan-tanganmu (At-Taubah [9]: 14).*

hak dalam struktur, untuk kembali secara spiral memengaruhi para agen (aktor) sebagai realitas yang dikonstruksi.

Model spiralisasi inilah yang akan membentuk sebuah jaringan kuasa altruisme (Tuhan), dari kesadaran Ketuhanan menuju ke kesadaran Ketuhanan.¹⁷ Seperti halnya pensucian individu akan mensucikan masyarakat, begitupun sebaliknya. Relasi agen dan struktur adalah relasi konstruktif, tarik-menarik kuasa secara spiral. Begitupun halnya dalam konteks kapitalisme, kontradiksi *logic* yang melekat pada struktur pada kenyataannya memengaruhi bahkan mendikte kesadaran agen dalam pengambilan keputusan yang juga mereproduksi kontradiksi-kontradiksi dan pertentangan, menciptakan realitas yang paradoksial. Spiralisasi pertentangan begitu melekat sebagai karakter akuntansi kapitalisme dalam melanggengkan dominasi atas mereka yang lemah.

C. Supremasi Keadilan dalam Akuntansi dan Filosofi Hak

Keadilan adalah objek garapan dari ideologi, sehingga kebenaran konsepsi atas keadilan adalah kebenaran doktrinal bukan kebenaran saintis.¹⁸ Semua ideologi secara konsepsi baik kapitalisme, sosialisme dan Islam, menempatkan keadilan sebagai dasar kesejahteraan.¹⁹ Manifestasi perbedaan konsepsi tersebut secara semiotik melekat pada struktur akuntansi yang berperan sebagai *instrument* ideologis dalam memaparkan ideologi. Di sinilah letak ketika akuntansi sebagai disiplin ilmu menyembunyikan realitas substansial, di mana ideologi bersembunyi di balik pengaturan-pengaturan maupun peraturan-peraturan dalam akuntansi.

1. Kerja sebagai Dasar Kepemilikan

Keadilan pada dasarnya melekat pada proses pendistribusian hak.²⁰ Persoalan dasar akuntansi dalam posisi ini secara ideologis terletak pada

¹⁷Inilah yang dimaksud Tuhan “*Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya*” (QS Muhammad [47]: 7).

¹⁸Oleh karenanya kebenaran Islam secara epistemologi bersumber pada realitas wahyu sebagai puncak kebenaran yang harus ditafsirkan dan dikontekstualisasikan lewat pengaktualan epistemologi Islam (sifatnya penemuan kembali atau pengkontekstualisasian). Sedangkan kapitalisme maupun sosialisme menyandarkan kebenaran bersumber (digagas) pada realitas alam yang cenderung diciptakan.

¹⁹QS Al-Hadiid [57]: 25.

²⁰QS Al-A'raaf [7]: 159.

persoalan pendistribusian hak.²¹ Akuntansi memiliki *instrument* berupa pengakuan, penilaian hingga penyajian dalam konteks pendistribusian hak. Akuntansi Islam pembebasan memahami bahwa dasar penilaian maupun pengakuan dan penyajian berdasar pada filosofi hak dalam Islam. Islam memosisikan kerja²² dan kebutuhan²³ sebagai dasar hak. Berbeda dengan kapitalisme kaidah nilai dalam hak berdasar pada kuasa modal yang ditentukan oleh mekanisme pasar baik yang bersifat faktor produksi maupun hasil produksi. Sedangkan sosialisme menempatkan makna hak pada sistem kepemilikan bersama yang dasarnya adalah kebutuhan. Akuntansi dalam posisi masing-masing hadir dan terikat oleh doktrin masing-masing ideologi.

Islam memandang bahwa faktor produksi adalah sarana yang membantu manusia dalam menjalankan produksi, tidak berdiri di atas pijakan yang sama. Sedangkan kapitalisme memandang bahwa faktor produksi berdiri di atas pijakan yang sama dengan pekerja. Islam memahami bahwa kerja adalah syarat perolehan kuasa terhadap hasil produksi yang bersifat langsung terhadap faktor produksi alami. Alam sebagai faktor produksi adalah murni milik Tuhan,²⁴ sehingga yang mencurahkan kerjalah yang memiliki hak atas hasil produksi. Sedangkan kapitalisme memandang bahwa hak atas hasil produksi merupakan milik pihak yang menguasai faktor produksi (dalam hal ini adalah pemodal). Sedangkan faktor produksi (alam) kepemilikan ditentukan oleh sistem pasar (sebagai aktualitas dari doktrin yang menganggap bahwa individu yang riil).

Dalam artian ketika faktor produksi modal dikonversi dalam bentuk alat produksi, maka hasil produksi dalam kapitalisme adalah milik si pemilik faktor produksi secara penuh, dan membeli “kerja” buruh atau pekerja dalam bentuk upah. Sedangkan dalam akuntansi islam (model

²¹Sebagaimana persoalan ekonomi sesungguhnya adalah persoalan bagaimana sistem ekonomi dapat mensejahterahkan, dalam skala makro akar masalah ekonomi terletak pada bagaimana sumber daya didistribusikan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mendasarkan persoalan ekonomi pada bagaimana mengakumulasi dalam perspektif mikro, yakni bagaimana entitas usaha menciptakan barang (*how*), barang apa (*what*) dan untuk siapa (*who*). Dalam akuntansi konvensional, akuntansi kelihatannya hanya mengurus rumah tangga produksi dalam arti yang sempit yakni entitas bisnis.

²²QS An-Najm [53]: 39; Al-Mu'min [40]: 17.

²³QS Al-Baqarah [2]: 219; At-Taubah [9]: 60.

²⁴QS An-Nisaa' [4]: 131.

konvergensi yang mapan) dipahami bahwa kepemilikan atas hasil produksi dibagi antara pemilik faktor produksi dan pemilik kerja (disebut sebagai bagi hasil).

Sedangkan untuk konteks akuntansi Islam pembebasan, kepemilikan kuasa terhadap hasil produksi dalam konteks tersebut milik pekerja, kepemilikan pekerja bukan atas dasar penguasaan terhadap modal tapi murni karena kepemilikan kerja.²⁵ Disebabkan pekerja tidak berada dalam pijakan yang sama dengan faktor produksi, maka pekerja dalam posisinya berkewajiban untuk membayar pemilik faktor produksi berupa sewa atas faktor produksi yang menjadi sarana membantu pekerja. Pembayaran sewa atas faktor produksi (seperti mesin, dan lain-lain) oleh pekerja, tetap berdasar pada makna kerja sebagai dasar kepemilikan dan penilaian nilai atasnya yakni sesuai kadar depresiasi kerja yang terkandung dalam faktor produksi. Dalam hal ini, nilai faktor produksi maupun nilai barang bersifat objektif, yang berdasar pada relasi dan pengorbanan kerja yang terkandung. Tidak seperti kapitalisme yang menetapkan nilai suatu barang atau faktor produksi secara subjektif bahkan spekulatif lewat sistem pasar (tarik menarik kuasa antara permintaan dan penawaran).

2. Bagi Hasil

Konsepsi Islam tentang bagi hasil merupakan wujud manifestasi sisi emansipatoris Islam dalam memandang nilai. Sistem bagi hasil mencerminkan pola dialogis dan holistik, dalam upaya meretas model penguasaan dan meretas rantai pertentangan maupun perbudakan dalam relasi kerja. Oleh karenanya sistem bagi hasil hanya berlaku dalam konteks hubungan antara pekerja, dan ketika bertemu antara kerja dalam suatu akad dengan fenomena kekonstanan untuk kepemilikan bahan non-alami (yakni bahan yang telah memiliki status kepemilikan). Model akad ini

²⁵Penulis menganalogikan, sama halnya ketika seseorang (A) menyewa rumah (sifatnya seperti peralatan) milik (B). Ketika (A) sebagai penyewa rumah menggunakan rumah tersebut sebagai sumber usaha, maka dalam kapitalisme, semua hasil usaha menjadi milik pemilik modal (pemilik rumah). Sedangkan akuntansi Islam (yang mapan, berdasar model konvergensi) menjadikan hasil dari usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan pemilik kerja dalam mitologi “bagi hasil”. Sedangkan akuntansi Islam pembebasan dalam posisi ini menempatkan bahwa keseluruhan hasil usaha tersebut adalah milik penuh pemilik kerja, pemilik modal sebagai pemilik rumah hanya mendapatkan haknya berupa sewa atas rumah. Tidak punya hak sama sekali dalam mengintervensi hasil kerja pekerja.

disebut *mudharabah* yakni sebuah model perjanjian berupa pembebanan risiko,²⁶ yakni pekerja bertanggung jawab atas risiko kerja dan pemodal bertanggung jawab atas risiko modal. Tetapi ketika relasi tersebut tidak berdasar pada akad, maka berlaku hukum *ujrah* yakni hukum pengupahan, di mana pemilik bahan baku wajib membayar hasil kerja pekerja tanpa melihat apakah pemilik bahan baku dalam posisi untung atau rugi sekalipun. Berbeda dengan kapitalisme yang mengagungkan kuasa pasar, semua konteks upah dan sejenisnya berada dalam garis hierarki antara buruh (upah), karyawan (gaji) dan manajer, yang dasar nilai pengupahan biasanya dipengaruhi secara politik lewat tarik menarik kekuatan antara buruh atau serikat buruh dan majikan.

Dalam pola dikotomi antara pemodal dan pekerja, dalam akuntansi Islam pembebasan, definisi pekerja merujuk pada sekelompok orang yang dipekerjakan dalam artian tidak memiliki kuasa terhadap modal. Dalam hal ini mencakup buruh, karyawan bahkan manajemen. Tidak ada pembedaan di antaranya. Berbeda dengan kapitalisme yang berwatak kleptokrasi²⁷ (model pendistribusian hak mengikuti hierarki yang ia sebut jabatan). Model kerja antara manajemen, karyawan dan buruh adalah berada pada status yang sama sebagai pekerja (emansipatif). Kesejahteraan manajemen harus selaras dengan kesejahteraan karyawan dan buruh. Sebab dimensi yang menghubungkannya adalah dimensi mutual, bukan penguasaan antara satu sama lain. Kerja manajemen dalam tingkatan yang berbeda, karyawan maupun buruh adalah proses kerja spesialisasi, yang saling membutuhkan dan menguatkan secara organis satu sama lain, bukan atas dasar dikotomi antara yang menguasai dan dikuasai. Sehingga dengannya ia berbagi hasil atas kerja, bukan atas dasar modal.

²⁶Hal ini berarti ketika pemilik modal mendistribusikan modal kepada pekerja dengan memastikan jaminan pengembalian ataupun jaminan lainnya (tidak ada proses pembebanan risiko). Pemilik modal tidak berhak atas hasil produksi, melainkan hanya berhak atas jaminan. Sebab hal ini bukan merupakan kontrak *mudharabah*, melainkan sistem pinjam meminjam (dalam sistem pinjam meminjam, pemilik modal hanya berhak atas modalnya atas jaminan kepastian pengembaliannya).

²⁷Kleptokrasi merujuk pada realitas “perselingkuhan” secara mutual antara penguasa modal yang bersembunyi dibalik penguasa birokrasi (manajemen), membentuk dinasti baru dalam mengeskloitasi yang lemah, dilegitimasi secara yuridis maupun isu keilmiah sehingga masyarakat menerima secara pasif sebagai sebuah keniscayaan (kewajaran).

3. Objektifikasi Nilai pada Kerja

Akuntansi dalam konteks penilaian sebagai upaya pemberian nilai atas barang, kapitalisme konsisten dengan sistem pasar, bahwasanya nilai sebuah barang, properties ataupun faktor produksi berdasar pada mekanisme pasar (permintaan-penawaran, diplomasi, negosiasi). Pasarlah yang menjadi penentu nilai yang dianggap adil. Sehingga makna kerja dalam kapitalisme justru menjadi dasar penguasaan manusia atas manusia yang lain, kerjalah yang memungkinkan orang dikendalikan satu sama lain sebab dalam konteks kapitalisme, kerja justru menjadi hal yang “terbeli” oleh kuatnya kuasa modal dalam pasar. Relasi-relasi penguasaan dalam sistem kapitalisme bertumpu pada relasi kerja yang menjadi basis berlangsungnya hubungan sosial yang menindas satu sama lain.

Sedangkan Islam konsisten dengan basis kerja sebagai dasar dari suatu pelekatan nilai yang berkeadilan. Nilai sebuah barang bersifat objektif terletak pada curahan kerja yang tercurah di dalamnya bukan pada kuasa modal yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Kerja yang dimaksud selaras dengan kebutuhan sebagai dasar kesejahteraan para pekerja²⁸. Itulah sebabnya, sistem sewa menyewa (misalnya properties) dalam Islam, kadar nilainya terkandung dalam kerja yang terdepresiasi di dalamnya, bukan berdasarkan pasar. Itulah sebabnya kenapa Islam memberi jaminan kesejahteraan bagi manusia, sebab manusia yang bekerja adalah manusia yang menjamin kesejahteraannya sendiri. Nilai dari suatu kerja merepresentasikan kesejahteraan. Berbeda dengan kapitalisme, kuasa pasarlah yang mendikte nilai suatu objek.

Hal ini sangat berbeda pula dengan model akuntansi islam (yang mapan/ yang dipraktikkan). “Akad” seolah-olah menjadi representasi tertulis dari tirani sistem pasar, dalam artian akad memang salah satu syarat dalam sebuah transaksi, tetapi bukan dasar untuk penentuan nilai. Akad tidak mutlak menjadi satu-satunya alat yang melegitimasi sahnya sebuah transaksi Islam. Hal tersebut harus berdasar pada kaidah nilai yang menjadi dasar dari sebuah objek. Sebab pada realitasnya “akad” kelihatannya juga

²⁸Nilai barang objektif yang dimaksud adalah kemutlakan nilai atas barang, tidak fluktuatif seperti dalam sistem kapitalisme yang berdasar pada sistem pasar, yang dapat mengeksploitasi masyarakat atas nama hukum pasar. Objektifitas nilai barang tidak dipengaruhi oleh pangsa pasar (secara geografis), maupun segmen pasar. Kesejahteraan pekerja adalah dasar yang menjadi nilai suatu barang.

dibangun dalam pola-pola pasar, sehingga potensi eksploitasi dapat terjadi secara *legitimate* atas nama akad,²⁹ meskipun itu diterima secara pasif.

Begitupun halnya, doktrin Islam melarang proses penentuan nilai suatu barang yang tidak terkandung curahan kerja di dalamnya. Dalam proses jual beli, mata rantai nilai barang yang panjang menciptakan model-model penindasan (eksploitasi) terhadap masyarakat.³⁰ Model ini kelihatannya diperankan oleh praktik akuntansi Islam yang ada seperti *murabbahah*, *istishna*, dan lain-lain. Ketika bank syariah berperan seperti “makelar”, menaikkan nilai sebuah barang tanpa terlibat proses kerja. Kerja yang dimaksud adalah perubahan (modifikasi) produk sebagai bentuk curahan kerja, menjadi dasar hak untuk menaikkan nilai barang secara proporsional.³¹

D. Akuntansi Islam dan Desentralisasi Kekayaan

Dalam Islam doktrin tentang kesejahteraan berdasar pada terpenuhinya kebutuhan,³² bukan akumulasi sebagaimana doktrin kapitalisme. Itulah sebabnya dalam Islam kepemilikan yang melebihi kesejahteraan, pada dasarnya status kepemilikan tersebut telah berubah sebagai hak milik masyarakat yang berkekurangan (yang tertindas),³³ sebagai bentuk kemanunggalan. Di sinilah letak makna keadilan Islam yang bersandar pada kebutuhan (kesejahteraan). Terminologi masyarakat yang berkekurangan menunjuk pada fakir, miskin, dan lain-lain, yang secara potensial belum memiliki kekuatan untuk mencurahkan kerja secara memadai (kesejahteraan belum terpenuhi).

Kepemilikan masyarakat lemah atas kepemilikan entitas bisnis, berdasar pada sisi doktrinal Islam dalam memandang hak, bukan produk

²⁹Dalam artian transaksi nilai dalam Islam objektif, tidak subjektif atas dasar yang penting semua *stakeholders* sepakat (akad).

³⁰Pokok persoalan keadilan bukan berdasar pada harga, tetapi dari sisi ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penentuan harga tersebut. Sebab harga pada dasarnya objektif dalam Islam.

³¹Distributor dalam akuntansi Islam pembebasan tidak punya hak untuk menaikkan nilai suatu barang tanpa proses kerja yang dicurahkan atas barang. Berbeda dengan kapitalisme yang berdasar pada kebebasan individu, melekat pada kebebasan pasar. Distributor dalam Islam harus mendapatkan komisi atau apa pun namanya dari pemilik produk.

³²QS Ath-Thalaaq [65]: 3; Al-Hijr [15]: 20.

³³QS Al-Baqarah [2]: 219.

teoretis. Islam telah menggariskan bahwa kekayaan alam adalah diciptakan untuk keseluruhan manusia. Di dalam maupun di atas permukaan bumi terkandung hak bagi seluruh makhluk. Dalam artian bahwa entitas bisnis yang mengeruk kekayaan bumi pada dasarnya terkandung hak masyarakat di dalamnya, bukan hanya hak bagi mereka yang memiliki faktor produksi atau yang mencurahkan kerja di dalamnya.

Persoalan yang dihadapi oleh umat hari ini bertumpu pada terciptanya model akumulasi kekayaan sepihak, sentralisasi kekayaan adalah produk dari sistem kapitalisme yang di dalamnya terkandung nilai lebih yang tidak terdistribusikan. Di sini peran akuntansi Islam pembebasan dalam merombak struktur sentralisasi kekayaan tersebut, menuju desentralisasi dengan mendistribusikan hak (nilai lebih). Akuntansi Islam digagas dalam multiperspektif, holistik dan integratif, dalam artian akuntansi Islam harus merepresentasikan realitas-realitas sosial, ekonomi, politik bahkan budaya (nilai) dalam masyarakat, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat (seperti ketimpangan yang ironis³⁴).

E. Spiritualisasi Materi sebagai Gerak *Trans-Substansial*

Materialisme merupakan pokok persoalan dasar akuntansi kapitalisme, hakikat eksistensi (ontologi) adalah materi, sebab dikonstruksi oleh epistemologi empirisme, sehingga secara aksiologi keseluruhan nilai harus diterjemahkan secara materiil sebagai puncak pencapaian nilai melekat pada akumulasi materi. Memahami realitas sebagai materi semata, telah mereduksi realitas (reduksionisme), sehingga dalam perspektif akuntansi Islam pembebasan, akuntansi kapitalisme sebagai informasi telah gagal menggambarkan realitas secara utuh dan integratif. Parsialisme melebur dalam egoisme, sehingga laporan keuangan hanya menggambarkan dan mengakomodir kepentingan pihak tertentu (pemodal).

Berbeda dengan akuntansi Islam pembebasan, realitas dipersepsi secara holistik dan integratif yang bersandar pada Tuhan sebagai pusat

³⁴Ketimpangan dalam masyarakat Muslim adalah bentuk tanda adanya kerusakan sistem yang fatal. Dalam sejarah, awal ketimpangan muncul setelah fase kenabian (Muhammad Saw.). Model kekuasaan beralih dari kekhalifahan atau keimaman menuju fase kesukuan membentuk dinasti politik dengan lahirnya seperti Bani Umayyad dan seterusnya. Model kesukuan sangat menyulut perpecahan di tubuh umat sehingga mengakibatkan kebijakan-kebijakan ekonomi masuk dalam pusaran kepentingan politis. Akibatnya sentralisasi kekayaan terakumulasi dalam lingkaran politik sebagai bagian dari kebijakan politik.

eksistensi.³⁵ Secara ontologi materi hanyalah manifestasi dari realitas yang lebih substansial, materi melekat dan bersandar pada realitas non-materiil.³⁶ Model ini tergambar dalam kerangka metafisika Islam sebagai basis epistemologi. Oleh karena makna aksiologi sebagai nilai melampaui makna materiil. Spiritual adalah puncak pencapaian nilai,³⁷ meniscayakan adanya gerak *trans*-substansial yakni suatu gerak penyempurnaan jiwa dari kesadaran materiil menuju kesadaran non-materiil dalam struktur akuntansi.

Dalam konteks ini materi harus dispiritualisasikan, disucikan, sebagaimana manifestasi kesucian Tuhan melekat pada keseluruhan realitas.³⁸ Upaya pensucian merupakan upaya untuk mengembalikan jiwa materi kepada Yang Suci sebagai sumber. Pensucian materi (spiritualisasi jiwa materi)³⁹ dengan pendistribusian nilai lebih (zakat) adalah upaya untuk menciptakan model-model pensucian dalam kehidupan. Risalah pensucian tersebut melekat pada risalah manusia untuk membebaskan yang tertindas, mengembalikan hak yang terampas. Sehingga dalam posisinya akuntansi akan menjadi medan terperantarainya rahmat Tuhan di muka bumi, yakni terciptanya spiritualisasi kehidupan lewat keseimbangan dan stabilitas sosial, alam dan jiwa.

F. Nilai Lebih: Zakat atau CSR?

Kemanunggalan adalah landasan akuntansi Islam pembebasan. Penglibatan keseluruhan realitas dalam satu sistem organis (*unity theory*), meniscayakan zakat (sebagai nilai lebih) mengandung peran untuk membebaskan yang tertindas (baik masyarakat lemah, alam, kompetitor yang tertindas, generasi mendatang, dan lain-lain) sebagai sarana pensucian akuntansi. Wujud kemanunggalan makhluk dengan Tuhannya, dalam posisinya nilai lebih yang didistribusikan bersandar pada kesadaran altruisme. Berbeda dengan kapitalisme dalam tampilan yang baru (*self correction*) meletakkan pendistribusian nilai (CSR) sebagai wujud *trickle down effect* bersandar pada kesadaran egoisme, dan pragmatisme.

³⁵QS Al-Baqarah [2]: 115.

³⁶QS Al-Israa' [17]: 44.

³⁷QS Al-Fajr [89]: 27-30.

³⁸QS Ad-Dukhaan [44]: 39.

³⁹Dalam hal ini materi dipahami sebagai realitas yang memiliki sisi altruisme (jiwa), bukan benda mati sebagaimana dipahami dalam akuntansi kapitalisme.

Sehingga wujud pembebasan dalam masyarakat tenggelam, bahkan justru tetap mereproduksi kerusakan-kerusakan alam dan ketertindasan buruh yang ironis. CSR di tengah kondisi buruh yang melarat adalah bentuk perampasan hak buruh oleh entitas bisnis yang dimitologikan atas nama pertanggungjawaban sosial.

Dalam akuntansi Islam pembebasan, kewajiban zakat melekat pada entitas bisnis, ketika kesejahteraan internal (yang mencurahkan kerja termasuk buruh) telah terpenuhi,⁴⁰ selebihnya adalah hak masyarakat yang lemah. Mereka yang mencurahkan kerja memiliki hak prioritas atas hasil kerjanya. Dan alam dalam posisi ini bukan menikmati nilai lebih seperti dalam CSR, tetapi dalam Islam, alam sebagai amanah penciptaan harus dimakmurkan,⁴¹ sifat *hudus* alam harus dipertahankan. Dalam CSR alam hanya mendapatkan nilai ketika entitas bisnis mengantongi keuntungan (sifatnya fluktuatif).

Nilai lebih dalam Islam berperan dalam membebaskan dari ketertindasan masyarakat lemah, di samping nilai lebih terikat pada proses ketentuan syariah (halal atau haram).⁴² Bentuk keharaman nilai lebih, adalah ketika ia diperoleh lewat penindasan terhadap pekerja maupun alam. Ketentuan zakat dalam Islam sangat jelas baik dari sisi objek maupun dasar yang menjadi hak. Sedangkan CSR pada kenyataannya memerlukan adaptasi berdasarkan kepentingan entitas bisnis. Pendistribusian hak masyarakat lemah, sesuai ketentuan Tuhan (halal-haram, adil, tepat) inilah yang menjadi dasar terciptanya peradaban bisnis yang bergerak dalam jaringan kuasa altruisme. Membebaskan dan mensucikan individu, entitas bisnis dan masyarakat secara umum (*spiritual value added*), sebagai wujud penyempurnaan risalah akuntan dalam akuntansi.

G. Ringkasan

Akuntansi Islam pembebasan merupakan konsepsi akuntansi yang lahir sebagai bentuk integrasi agama (Islam) dengan akuntansi sebagai disiplin ilmu, lewat pengideologisasian Islam menjadikan Islam sebagai paradigma dalam akuntansi, menciptakan model akuntansi ideologis yang

⁴⁰Tidak ada shadaqah kecuali setelah kebutuhan wajib terpenuhi (HR Bukhari).

⁴¹QS Huud [11]: 61.

⁴²HR Huzaimah dan Ibnu Hi ban.

berperan dalam membebaskan yang tertindas, terzalimi, dan terampas hak-haknya dalam akuntansi kapitalisme.

Kandungan substansi Islam pada dasarnya adalah pembebasan, menjadikan akuntansi dipersepsi sebagai risalah. Memberi peran akuntan sebagai pembawa risalah Tuhan dalam konteks profesi. Menerjemahkan makna keadilan Tuhan dalam struktur akuntansi, sebagai wujud penglibatan Tuhan sebagai pusat akuntansi.

Islam telah menggariskan makna keadilan yang menjadi dasar akuntansi dalam hal penilaian, pengakuan dan penyajian akuntansi. Keadilan berdasar pada supremasi kerja dan kebutuhan sebagai nilai lebih. Kerja adalah syarat kepemilikan atas hak dan dasar objektifikasi nilai. Sedangkan kebutuhan merepresentasikan makna tauhid (unitas), satu kesatuan *stakeholders* akuntansi bersifat emansipatif (manunggal), sebagai sisi doktrinal Islam. Dalam artian hak masyarakat lemah atau yang tertindas melekat pada nilai yang dicapai oleh entitas bisnis yang harus didistribusikan sebagai zakat (bersifat wajib).

Pendistribusian nilai lebih (zakat) tersebut adalah bentuk upaya dalam menspiritualisasikan jiwa materi, mensucikan untuk menggapai keridaan Tuhan di muka bumi. Hal ini menjadi titik tumpu terciptanya peradaban bisnis yang membebaskan, bersandar pada kesadaran altruisme (Ketuhanan), lepas dari penjara-penjara egoisme dan pragmatisme. Sebagai sarana tercurahkannya kasih Tuhan lewat terciptanya keseimbangan kehidupan.

Daftar Istilah

- Absolute*** : Sesuatu yang bersifat mutlak.
- Aksiden** : Realitas tampakan yang melekat pada substansi, bersifat relatif dan berubah-ubah.
- Aksiologi** : Cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai (etika dan estetika) dari objek.
- Alienasi** : Keadaan mental manusia yang ditandai oleh perasaan keterasingan terhadap segala hal atau sesuatu; sesama manusia, alam, lingkungan, Tuhan, bahkan terasing terhadap diri sendiri.
- Altruistik** : Tindakan yang berbasis keluhuran akhlak bersandar pada kesadaran tentang Tuhan.
- Analitik atau *a priori*** : Keyakinan yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti yang valid.
- Anarchist epistemology*** : “Kekerasan” pengetahuan yang umumnya dipaksakan di wadah yang tidak sesuai. Hal ini identik dengan absolutisme (pemuatlakan) dan penyeragaman pengetahuan.
- Ancilia power*** : Budak kekuasaan yakni realitas yang menjadi *instrument* dari pihak yang memiliki kuasa.

- Anomali** : Penyimpangan dari realitas sesungguhnya. Dalam konteks pengetahuan, anomali bermakna kegagalan pengetahuan dalam menjawab objek realitas.
- Antroposentrisme** : Paradigma yang menempatkan keseluruhan realitas pada kuasa manusia.
- Artifisial** : Realitas yang diproduksi sebagai hasil rekayasa dan buatan.
- Atomistik** : Cara pandang yang memandang keseluruhan realitas sosial seperti dengan realitas alam (atom) yang cenderung mekanik, tersusun dari berbagai unsur yang terkecil dan terpisah.
- Basic structure** : Struktur dasar yang menjadi akar dari terbentuknya suprastruktur.
- Bayani** : Epistemologi Islam yang bersandar pada kebenaran tafsir atas teks.
- Berhala** : Bentuk penyekutuan Tuhan yang secara sosial bermakna penindasan.
- Binary oppositions** : Realitas yang berbeda bahkan bertentangan, bersanding bersama membentuk realitas yang satu dalam batasan kesetaraan antaranya satu sama lain.
- Borjuasi** : Kelas sosial masyarakat yang memiliki dan menguasai modal dalam sistem industri (kapitalisme).
- Budak** : Kelas sosial yang menempati strata rendah dalam sistem feodal. Dalam konteks histori ia adalah produk sejarah atas kekalahan perang sebelum fase feodalisme. Mereka seolah ditakdirkan untuk mengabdikan, dikuasai dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi.
- Burhani** : Epistemologi Islam lewat pengaktualan rasio (akal).
- Cooperatif** : Proses sosial yang berlangsung dalam pola kerja sama.
- Communal emansipatoris** : Sistem sosial yang diikat oleh ikatan kesadaran ideologis yang kuat, memandang hubungan sosial secara emansipatif, tanpa ada sekat yang bersifat destruktif.

<i>Constant phenomena</i>	: Fenomena kekonstanan merupakan hukum yang kaidah kepemilikan atas hak berasal dari kepemilikan atas sumber.
Deduksi	: Kerangka metodologi dalam mengungkapkan kesimpulan teori yang berdasar pada realitas umum ke khusus.
Dekonstruktif	: Istilah untuk “membongkar” kemapanan teori yang dianggap menindas.
Dehumanisasi	: Perlakuan terhadap manusia secara tidak manusiawi.
Desentralisasi	: Sistem pengambilan keputusan dan pengendalian yang terdistribusi dalam tingkatan masing-masing.
Deterministik	: Proses sejarah yang bersifat alami, bergerak dengan kehendak sendiri tanpa mampu diintervensi oleh kehendak manusia. Manusia dalam posisi ini hanyalah produk sejarah.
Dialektika	: Proses pertemuan dua realitas yang berbeda (tesa, dan antitesa) menciptakan realitas baru (sintesis) tanpa henti.
Diferensiasi	: Perbedaan secara horizontal, berbeda dalam ruang persepsi yang setara.
<i>Distributive justice</i>	: Keadilan distributif, yang sesuatu dianggap adil ketika orang mendapatkan haknya berdasarkan kebutuhannya.
Dogmatis	: Pengetahuan yang “dipaksakan” baik secara dominatif maupun hegemonik, yang cenderung diterima sebagai kebenaran secara mentah tanpa peduli untuk memverifikasinya secara rasional (irasionalitas).
Doktrin	: Pengetahuan yang bercorak ideologis, normatif tentang “bagaimana seharusnya”, yang objeknya adalah keseluruhan nilai seperti keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, dan lain-lain.
Dominasi	: Penguasaan secara penekanan lewat alat-alat kuasa.
Dualisme	: Hakikat ontologis yang memandang realitas dalam dua bagian yang rill, <i>independent</i> meskipun saling memengaruhi.

Eksistensi	: Keseluruhan realitas yang “ada”, disebut sebagai “keberadaan”.
Eksoterik	: Sisi luar yang tampak sebagai sebuah fenomena.
Ekstensi (<i>misdaq</i>)	: Realitas eksternal di luar dari realitas internal (<i>ide</i>).
Emansipatoris	: Konsep tentang kesederajatan, <i>counter</i> atas sistem feodal yang melanggengkan hierarkisasi strata.
Epistemologi	: Cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber dan teori-teori pengetahuan atas objek.
Esensi	: Derivasi dari eksistensi atau manifestasi keberadaan, menunjuk pada “keapaan” realitas.
Evolutif	: Model perubahan yang membutuhkan waktu yang lama yang cenderung bersifat kumulatif.
<i>False conciusnees</i>	: Kesadaran yang palsu.
<i>False morality</i>	: Moralitas yang palsu disebabkan dikonstruksi oleh kepentingan yang oportunistis dan pragmatis.
<i>Falsity</i>	: Realitas yang kontradiktif dengan kebenaran. Atau sering disebut sebagai “kepalsuan”.
Feodalisme	: Sistem yang bercorak sentralisasi kuasa pada segelintir penguasa tanah (disebut sebagai tuan tanah).
Fethisisme	: Realitas pembendaan, suatu keadaan mental ketika manusia menjadikan “benda” dan “materi” di atas segalanya termasuk kemanusiaannya. Sering disebut sebagai “berhala” materi.
<i>Field</i>	: “Arena” jaringan relasi antar posisi objektif, <i>field</i> merujuk pada realitas yang berada di luar individu yang berbentuk struktur.
Fitrah	: Sesuatu yang suci melekat pada diri manusia, yang di bawah secara batin sejak lahir sebagai sebuah potensialitas yang siap mengaktual di alam.
Gradasi	: Turunan manifestasi dalam tingkatan kualitas yang semakin ke bawah semakin menurun, analogi yang tepat untuk hal tersebut adalah cahaya.
<i>Habitus</i>	: Struktur mental atau kognitif sebagai skema persepsi, pemikiran dan tindakan, menunjuk pada agen.

Hak properties	: Hak yang melekat pada individu atas hasil kerja langsung dari hubungannya dengan kekayaan alam (bahan mentah).
Hegemoni	: Penguasaan dengan cara halus tanpa ancaman kekerasan. Ide-ide didiktekan dan diterima secara pasif bahkan dilegitimasi secara moral.
Holistik	: Perspektif yang menyeluruh (integratif) dalam memandang realitas.
Hudus	: Persepsi yang melekatkan kesucian pada realitas objek.
Hyperreality	: Realitas yang semu melampaui batas-batas kebenaran. Hal ini identik dengan realitas artifisial yang palsu.
Ideologi	: Segenap keyakinan sekaligus cita-cita yang mengarahkan untuk bertindak dan menjawab persoalan-persoalan sosial secara normatif.
Ihsan (mukasyafah)	: Sebuah “kesadaran” spiritual berupa hilangnya batas pembatas antara Tuhan dan hamba.
Image	: Citra yang muncul secara artifisial, mengandung makna yang kadang tidak sesuai dengan realitasnya.
Irfani	: Epistemologi Islam lewat pengaktualan intuisi (hati) untuk mengungkap realitas pengetahuan “rasa”.
Ironic science	: Ironi sebuah pengetahuan yang realitasnya jauh menyimpang dari yang diharapkan.
Induksi	: Kerangka metodologi dalam mengungkapkan kesimpulan teori yang berdasar pada realitas khusus ke umum.
Inferior	: Pihak yang dipersepsi “lemah”, tidak memiliki kuasa, dan menjadi objek penguasaan dari pihak superior.
Instrumentalisme	: Mempersepsi objek sekadar sebagai “alat” yang dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan.
I'tibari	: Realitas non-eksistensial seperti bayangan dari realitas eksistensial.

Kapitalisme	: Sistem yang bercorak liberal-individualisme, yang secara ideologis menciptakan keberpihakan kepada penguasa modal sebagai jalan menuju kesejahteraan.
Kausalitas	: Proses keterhubungan realitas yang berbeda dalam pola sebab-akibat.
Khudury	: Pengetahuan yang menyatu antara subjek dan objek pengetahuan itu sendiri.
Kleptokrasi	: Realitas “perselingkuhan” secara mutual antara penguasa modal yang bersembunyi dibalik penguasa birokrasi (manajemen), membentuk dinasti baru dalam mengeskplotasi yang lemah, dilegitimasi secara yuridis maupun isu keilmiahan sehingga masyarakat menerima secara pasif sebagai sebuah keniscayaan (kewajaran).
Kontradiktif	: Pertentangan logis pada konsepsi, yang meniscayakan kemustahilan realitas.
Kumulatif	: Proses perubahan yang bersifat “penyempurnaan” dalam suatu titik yang sama.
Laizzes faire	: Doktrin tentang kebebasan pasar.
Makrifat	: Puncak dari keseluruhan perjalanan, tersingkapnya (penyaksian) tabir hakiki dari kebenaran sebagai <i>haqqul yaqin</i> . Melampaui makna <i>ainul yaqin</i> dan <i>ilmal yaqin</i> .
Manunggal	: Meleburnya realitas non-eksistensial (partikular) kepada realitas eksistensial (universalitas) sebagai sumber.
Materialistik dialektika Histori	: Konsepsi yang melihat realitas sejarah bergerak secara determinis yang didikte oleh kesadaran materi yakni faktor produksi sebagai <i>basic structure</i> .
Maqam	: Menunjuk pada tingkatan pencapaian spiritualitas.
Materialisme	: Mazhab pemikiran yang menganggap materi sebagai realitas ontologis, empirisme adalah epistemologinya dan pencapaian materi sebagai puncak pencapaian nilai (aksiologis).
Maudhu’i	: Metode tafsir atas teks yang menekankan pola dialogis antara teks dengan realitas sosial.

Maujud	: Determinasi atau manifestasi wujud, sering disebut <i>mukmin al wujud</i> .
Metafisika	: Realitas yang melampaui realitas fisik (non-materi).
Metahistoris	: Tidak dibatasi oleh realitas sejarah (melampaui realitas sejarah itu sendiri).
Mi'raj	: Proses perjalanan spiritualitas Nabi Muhammad dalam mencapai <i>maqam</i> spiritual. Secara fikih dipahami sebagai penerimaan perintah shalat. Dan secara sosial bermakna pembebasan, yakni dari Tuhan bersama Tuhan menyelamatkan (membebaskan) makhluk menuju Tuhan.
Moral hazard	: Penyimpangan moral yang muncul atas asimetri informasi, ketika pihak yang bersangkutan terancam sehingga mengambil tindakan merugikan orang lain dengan sengaja untuk mendatangkan untung bagi diri sendiri.
Mustada'afin	: Kelompok masyarakat yang tertindas dalam sistem baik ekonomi, politik maupun dari sisi ideologi. Identik dengan proletar.
Nilai guna	: Nilai yang melekat pada kegunaan suatu objek.
Nilai tanda	: Nilai yang melekat karena tanda (citra) pada objek.
Nomena	: Sering disebut ide yakni gagasan yang hadir dalam realitas internal pengetahuan manusia sebagai sebuah konsep.
Ontologi	: Cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat dari objek.
Outsourcing	: Dalam kaitannya dengan tenaga kerja (buruh) bermakna “sewa” buruh non-permanen.
Paradoksial	: Realitas yang hadir dalam pola yang sama, tetapi mengandung pertentangan antara idealita dan realita.
Paripatetik	: Aliran filsafat oleh pemikir Muslim klasik seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, yang berpangkal induk pada tradisi pemikiran Aristoteles.
Partikular	: Realitas yang cenderung terbatas oleh ruang dan waktu. Merupakan realitas “bagian” dari realitas yang lebih luas.

- Phobia** : Rasa “takut” yang besar dalam jiwa.
- Postmodernisme** : Perkembangan pemikiran dalam sosial yang dianggap anti terhadap modernisme. Bercorak dekonstruktif, menolak absolutisme, menekankan relativisme, pluralisme untuk mengangkat *the others* yang termarginalkan dalam modernisme.
- Practice** : Produk hasil dialektis antara *habitus* dan *field* atau struktur dan keagenan.
- Pragmatisme** : Mazhab pemikiran yang kategori kebenarannya terletak pada manfaat praktis.
- Profan** : Segala sesuatu yang bersifat materiil (gradasi terendah dari realitas transendental).
- Profetik** : Konsepsi yang terkait dengan tugas-tugas kenabian.
- Proletar** : Kelas sosial masyarakat yang dikuasai oleh borjuasi, dan tidak memiliki akses modal dalam sistem industri (kapitalisme). Mengandalkan “tenaga” demi upah yang rendah.
- Proportional justice** : Keadilan proporsional, yang sesuatu dianggap adil ketika orang mendapatkan haknya sesuai dengan usaha masing-masing.
- Rahmatan lil alamin** : Misi Islam sebagai rahmat bagi keseluruhan alam.
- Rausyan Fikr** : Orang-orang yang tercerahkan, dengan kapasitas ilmu dan ideologi untuk menggerakkan peradaban manusia.
- Redistributive justice** : Konsepsi keadilan yang berdasar pada upaya menghargai proses usaha di samping tidak terikat secara mutlak.
- Reduksionisme** : Pola persepsi yang mempersempit (memecah) realitas dari realitas sesungguhnya menjadi bagian yang sempit (tidak merepresentasikan realitas secara utuh).
- Relatif** : Sesuatu yang bersifat berubah-ubah.
- Revolutif** : Model perubahan yang cepat dan mengakar, menggantikan realitas keseluruhan struktur (disebut sistem).

Saintis	: Pengetahuan yang empirik, observasional yang mengungkapkan fakta secara positif sebagaimana adanya.
Semiologi	: Ilmu yang objek kajiannya berbicara tentang “makna” dibalik tanda (<i>sign</i>).
Semiotik	: Representasi makna dalam bentuk tanda.
Sentralisasi	: Sistem pengambilan keputusan dan pengendalian yang terpusat.
<i>Science revolutions</i>	: Revolusi sains (pengetahuan) berupa pergeseran paradigma pengetahuan dalam bentuk revolusi, setelah melewati fase anomali.
<i>Sign</i>	: Tanda atau simbol yang disimbolkan oleh petanda.
<i>Symbiosis mutualism</i>	: Hubungan yang saling menguntungkan antara dua entitas (realitas) yang berbeda.
<i>Simulacra</i>	: Dianggap sebagai sebuah duplikasi dari duplikasi, yang aslinya tidak pernah ada sehingga perbedaan antara duplikasi dengan asli menjadi kabur.
Spiritualitas	: Proses perjalanan (batin) makhluk menuju realitas transendental (sebagai realitas hakiki, melampaui realitas fisik).
<i>Spiritual value added</i>	: Nilai tambah spiritual sebagai sebuah kesadaran psikologik berupa altruisme atas keputusan pendistribusian nilai lebih.
<i>Stakeholders</i>	: Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akuntansi (laporan keuangan).
<i>Store labour</i>	: Disebut kerja tersimpang, yang nilai dari karya terletak pada depresiasi kerja yang terkandung di dalam aset atau sejenisnya, seperti sewa.
Stratifikasi	: Perbedaan secara vertikal berbentuk hierarkisasi.
<i>Structural violence</i>	: Kekerasan struktural, kekerasan yang diperankan secara halus oleh kuasa struktur, biasanya berbentuk kebijakan.
Strukturalisme	: Mazhab pemikiran sosiologis yang memandang realitas yang riil adalah struktur yang memiliki kuasa penuh memengaruhi agen.

Strukturasi	: Istilah untuk menggambarkan realitas keterhubungan agen dan struktur secara proporsional saling memengaruhi satu sama lain.
Subordinasi	: Realitas hierarki yang berada pada lingkup bawah ordinasi yang cenderung dikendalikan oleh ordinasi.
Substansi	: Realitas yang tetap, tidak berubah dan mutlak, tempat bersandarnya aksiden.
Superior	: Pihak yang dinisbahkan memiliki kuasa memengaruhi dan mengendalikan pihak <i>inferior</i> .
Suprastructure	: Hasil dari bentukan <i>basic structure</i> dalam bentuk institusi (politik, ekonomi, agama, dan lain-lain).
Surplus value	: Nilai yang seharusnya menjadi hak sekelompok orang (<i>mustada'afin</i>) tapi tidak terdistribusikan sebagaimana mestinya. Sering disebut nilai lebih.
Survival	: Kelangsungan hidup (entitas bisnis).
Syahadat	: Persaksian atas kebenaran dengan menafikan realitas yang palsu. Dalam Islam hal ini menjadi syarat utama dan pertama dikatakannya orang beriman.
Symbolic violence	: Kekerasan lewat penggunaan simbol yang merepresentasikan dominasi.
Tajjalli	: Tampak-tampak maujud dari wujud (eksistensi).
Tajribi	: Epistemologi Islam yang bersandar pada persepsi indrawi (empirik).
Tasydiq	: Pengetahuan berupa “penilaian”, bersifat normatif tentang kualitas kebenaran pengetahuan.
Teologi	: Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan secara rasional, memahami Tuhan dalam pendekatan filsafat. Termasuk mengkaji hubungan Tuhan dengan manusia dan alam.
Teologi pembebasan	: Sudut pandang dalam memahami ajaran agama secara rasional, berlandaskan pada tafsir atas ayat suci, dengan orientasi ideologis untuk membebaskan yang tertindas.

Teomorfis	: Realitas kesadaran kemanusiaan yang berpangkal dan berujung pada kesadaran sebagai makhluk dan “budak” Tuhan.
Teosentrisme	: Paradigma yang menempatkan Tuhan sebagai pusat keseluruhan realitas.
Universalitas	: Menunjuk pada realitas yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak pula dibatasi oleh ruang. Menunjuk pada konsepsi tentang keseluruhan.
Value added	: Nilai tambah yakni nilai yang berbentuk “rasa” sebuah kesadaran psikologik yang bercorak altruisme atas terdistribusinya nilai lebih sesuai ketentuan tentang itu.
Value laden	: Asumsi yang menganggap bahwa pengetahuan pada dasarnya syarat dengan nilai (penuh pertimbangan subjektif).
Value neutral	: Asumsi yang menganggap pengetahuan bebas nilai (lepas dari subjektifisme).
Vouluntary	: Sesuatu yang bersifat opsional (pilihan), tidak mengikat.
Wujud	: Realitas yang sesungguhnya, yang keberadaannya sebagai sebuah kepastian adanya (disebut <i>Wajibul Al Wujud</i>).

DUMMMY

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim. 2003. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Abdurrahman, Moeslim. 2005. *Islam yang Memihak*. Yogyakarta: LKIS.
- Abdillah, Mujiyono. 2001. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Abqary, Qusthan. 2009. *Melawan Fasisme Ilmu*. Jakarta: Kelindan.
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2009. *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*. Paper disampaikan pada Kuliah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 7 Desember 2009.
- Alimuddin. 2008. Tyranny of the Bottom Line Performance: Tinjauan Kritis terhadap Konsep Kinerja Akuntansi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 6, Nomor 3, Hal 447- 457. Desember 2008.
- Alimuddin. 2011. Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Ekuitas*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya. Vol. 15 No. 4 Desember.
- Alimuddin, Andi Kusumawati, Muhammad Ashari dan Muhammad Irdam Ferdiansah. 2014. Production Costing Concept Based on Islamic Justice Value. *IOS Journal of Business and Management*. Vol. 16. Issue 7. Ver. III. Juli.

- Amar, Hasan Abu. 1409 H. *Ringkasan Logika Muslim: Sebuah Analisis Definisi*. [t.t]. Yayasan Al-Muntaszhar.
- Amirin, M. Tatang. 2010. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asrifin. 2001. *Jalan Menuju Ma'rifatullah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Apozzolini. 2006. *Pijar-pijar Pemikiran Gramsci*. Yogyakarta: Resist Book.
- As Shadr, Muhammad Baqir. 1984. *Manusia Masa Kini dan Problema Sosial*. Terjemahan oleh M. Hashem. Bandung: Pustaka.
- As Shadr, Muhammad Baqir. 1999. *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Terjemahan oleh M. Nur Mufid. Bandung: Mizan.
- As Shadr, Muhammad Baqir. 2003. *Syahadat Kedua: Ketika Keimanan Saja Tak Cukup*. Terjemahan oleh Muhammad Abdul Qadir Alcaff. Jakarta: Pustaka Zahra.
- As Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Yudi. Jakarta: Zahra Publishing House.
- As Shadr, Muhammad Baqir. 2010. *Paradigma dan Kecenderungan Sejarah Dalam Al-Qur'an, Sebuah Konstruksi Filsafat Sejarah: Study Atas Hukum dan Norma Sejarah Dalam Masyarakat*. Terjemahan oleh M.S.Nasrullah. Jakarta: Shadra Press.
- Bakhtiar, Amsal. 2004. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bakhtiar, Amsal. 2007. *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Baswir, Refrisond. 1999. *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*. Yogyakarta: IDEA & Pustaka Pelajar.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terjemahan oleh Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani.
- Chittick, William C. 2001. *Dunia Imajinal Ibnu 'Arabi: Kreativitas Imajinasi dan Persoalan Diversitas Agama*. Terjemahan oleh Achmad Syahid. Surabaya: Penerbit Risalah Gusti.
- _____. 2001. *The Sufi Path of Knowledge: Tuhan Sejati dan Tuhan-Tuhan Palsu (terj.)*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Chodijim, Achmad. 2002. *Syekh Siti Jenar: Makna Kematian*. Jakarta: PT Serambi Ilmu.

- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 – Juz 30. Semarang: CV Toha Putra.
- Dharmawan, Eko P. 2005. *Agama Itu Bukan Candu: Tesis-Tesis Feurbach, Marx dan Tan Malaka*. Yogyakarta: Resist Book.
- Engel, Friederick. 2007. *Tentang Das Kapital Marx*. Terjemahan oleh Oey Hay Djoen. *E-book Digital: Renaissance*.
- Engineer, Asghar Ali. 2009. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terjemahan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enver, Hasan Ishrat. 2004. *Metafisika Iqbal: Pengantar untuk Memahami "The Reconstruction of Religious Thought in Islam"*. Terjemahan oleh Fauzi Arifin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhil, Ahmad. 2011. *Reformasi Teologis Muhammad Baqir As Shadr: Rangkuman Buku "Al-Tajdid Al-Kalami 'Inda Al-Shahid Al-Sadr"*. Paper Disampaikan dalam Diskusi Bulanan Iran Corner Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten, Serang, Februari 2011.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2004. *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif*. Jakarta: Kompas.
- Forqan, 2010. CSR dan *Green Energy*, "Benarkah Solusi bagi Krisis Listrik di Indonesia? Paper Disampaikan pada Seminar Optimalisasi Program CSR Menuju Masyarakat Mandiri Energi, Hotel Aston Primera-Pasteur Bandung, 22-23 Juli 2010.
- Foucault, Michel. 2009. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault*. Terjemahan oleh Arief. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fukuyama, Francis. 2004. *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (terj.)*. Yogyakarta: Qalam.
- Gharawiyani, Mohsen. 2012. *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam: Penjelasan untuk Mendekati Analisis Teori Filsafat Islam*. Terjemahan oleh M. Nur Djabir. Jakarta: Shadra Press.
- Ghozali, Iman. 2004. *Pergeseran Paradigma Akuntansi dari Positivisme ke Perspektif Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akuntansi di Indonesia*. Paper Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi,

- Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 11 Desember 2004.
- Gramsci, Antonio. 2003. *Negara dan Hegemoni*. Terjemahan oleh Nezar Patria dan Andi Arief. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafizah, Yulia. 2004. Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syariah: Suatu Catatan Aksiologis. *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XI tahun 2004.
- Hafida, 2012. Implementasi *Shariah Enterprise Theory* Melalui *Value Added Statement* Untuk Menilai Tanggung Jawab Perbankan Syariah Kepada *Stakeholders* (skripsi). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.
- Haider Naqvi, Syed Nawab. 1991. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. Terjemahan oleh Husin Anis. Bandung: Mizan.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol.1, No.3, Hal 87-105. Desember 2001.
- Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam Munculnya Era Baru Epistemologi Islam. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 1 No. 2. Agustus 2001, 93-102.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hardiman, F Budi. 2007. *Filsafat Modern dari Machievelly Sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyono, Rudy. 2001. *Tabir Mistri Jagad Raya: Kajian Ilmu Kosmologi*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Heriyanto, Husain. 2003. Tinjauan Hermeneutika: Cara Pandang Ilmuwan Barat dan Muslim Terhadap Sains Kasus Astronomi. Dalam *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 2, Januari 2003: 142-160.
- Heriyanto, Husain. 2003. Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead. Jakarta: Teraju.
- Hick, John. 2001. *Dimensi Kelima: Menelusuri Makna Kehidupan*. Terjemahan Tatan Hermansyah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina.

- Hitami, Munzil. 2009. *Revolusi Sejarah Manusia: Peran Rasul Sebagai Agen Perubahan*. Yogyakarta. LKIS.
- Huntington, Samuel P. 1996. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia (terj.)*. Yogyakarta: CV Al-Qalam.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Iqbal, Muhammad. 2008. *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Terjemahan oleh Ali Audah, dkk. Yogyakarta: Jalasutra.
- Januarti, Indira. 2004. Pendekatan dan Kritik Akuntansi Positivisme. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 1, No. 1, November 2004.
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terjemahan Machnum Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmans Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laporan Investigatif Eyes On The Forest. Mei 2010. *Bisnis seperti biasanya di Riau: Industri Pulp Melanjutkan Penebangan Hutan Alam*. Dipublikasikan Juli 2010. Diakses dari www.walhi.or.id. 15 juni 2012.
- Lidigdo, Until. 2007. *Paradox Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: PT Temprint.
- Madkour, Ibrahim. 2004. *Aliran dan Teori Filsafat Islam*. Terjemahan oleh Yudian W. Asmin. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahfudz, Muhsin. 2011. *Ambiguitas Makna Kesalehan: Mengurai Makna Kesalehan dari Teks Al-Qur'an dan Sosial Politik*. Makassar: Alauddin Press.
- Mahmuddin. 2003. Dakwah dan Kritik Sosial: Pendekatan Dakwah Berbasis Teologi Pembebasan. *Jurnal Al Bayan*, Vol. 7 No. 7, Januari – Juli 2003: 19 – 32.
- Majalah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 2009. Edisi No.20/tahun III/Oktober 2009.

- Majalah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 2007. Edisi No.2/tahun I/Oktober 2007.
- Mandary, Mustamim. (Ed). 2003. *Menuju Kesempurnaan: Persepsi dalam Pemikiran Mulla Shadra*. Makassar: Safinah.
- Mandel, Ernest. 2006. *Tesis-tesis Pokok Marxisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mansur, Mohammad. 2009. Pandangan Al-Farabi tentang Metafisika. *Jurnal Esensia*, Vol. 10, No. 2. Juli 2009.
- Marlaw, Loise. 1999. *Masyarakat Egaliter: Visi Islam (terj.)*. Bandung: Mizan.
- Miri, Seyyed Mohsen. 2007. *Prinsip-prinsip Islam dan Filsafat Mulla Shadra Sebagai Basis Etis dan Kosmologi Lingkungan Hidup*, (Online), <http://icas-indonesia.org>. Diakses 14 mei 2012.
- Mohd Tap, Mohd Nasir. 2009. *Epistemologi & Kosmologi Ahmad Al-Sirhindi (971H/1563M - 1034H/1624M)*. Paper disampaikan pada Seminar Bulanan Etnomatematik Rumpun Melayu, Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah Kajang, Juli 2009.
- Muhammad. 2002. Penyesuaian Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002, pp. 67-87. ISSN 1411 – 013X.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muhammad. 2007. *Menggagas Laporan Kas Syariah Berbasis Ma'isyah: Diangkat dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia*. Paper Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Muhammad. 2009. *Science War dan Paradigma Ilmu Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. Dan Rekonstruksi Independensi Akuntan Publik 1,2,3,4*. <http://ajidedim.wordpress.com/>. Diakses 14 Mei 2012.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2002. *Teologi Kiri: Landasan Gerakan Membela Kaum Mustada'afin*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Munir, Samsul dan Haryanto. 2011. *Etika Beribadah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Amzah.

- Musawiyani, Sayyid Abbas. 2012. *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran*. Jakarta: Shadra Press.
- Muslih, Muhammad. 2004. *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar.
- Muthahhari, Murtadha. 1990. *Falsafah Pergerakan Islam (terj.)*. Bandung: Mizan.
- Muthahhari, Murtadha. 1990. *Falsafah Akhlak: Kritik atas Konsep Moralitas Barat (terj.)*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Muthahhari, Murtadha. 1991. *Falsafah Kenabian (terj.)*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Muthahhari, Murtadha. 1993. *Pandangan Dunia Tauhid*. Terjemahan oleh Agus Effendi. Bandung: Yayasan Muthahhari.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Manusia Seutuhnya: Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis*. Terjemahan oleh Abdillah Hamid Ba'abud. Bangil: Yayasan Pesantren Islam.
- Muthahhari, Murtadha. 2008. *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagad Raya*. Terjemahan oleh Ilyas Hasan. Jakarta: Lentera.
- Muthahhari, Murtadha. 2009. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Terjemahan oleh Agus Effendi. Bandung: Mizan.
- Muthahhari, Murtadha. 2010. *Pengantar Epistemologi Islam: Sebuah Pemetaan dan Kritik Epistemologi Islam atas Paradigma Pengetahuan Ilmiah dan Relevansi Pandangan Dunia*. Terjemahan oleh M. Jawad Bafaqih. Jakarta: Shadra Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2006. *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam*. Terjemahan oleh Maimum Syamsuddin. Yogyakarta: Penerbit IRCISOD.
- Nasution, Hasyimsyah. 2005. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abuddin, dkk. 2005. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Alois. 2001. *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Nur, Syaifah. 2002. *Filsafat Wujud Mulla Shadra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurfatoni, Muhammad. 2008. *Tuhan yang Terpenjara: Relasi Mistrius; Tuhan, Alam dan Manusia*. Jawa Timur: Kanzum Books.
- Ormerod, Paul. 2000. *Menuju Ilmu Ekonomi Baru: Matinya Ilmu Ekonomi 2*. Terjemahan dari: *The Death of Economics Serial 2*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

- Palmer, Richard E. 2005. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Terjemahan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parisi, Salman (Ed). 2004. *Hak-hak sipil dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlulbait as*. Terjemahan Al Habsyi, dkk. Jakarta: Al Huda, Markaz Ar Risalah.
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Polanyi, Karl. 2003. *Transformasi Besar: Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Terjemahan oleh M.Taufiq Rahman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Poli, W.I.M. 2010. *Tonggak-tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Praja, Juhaya. 2003. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Eko. 2003. *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam Dalam Pusaran Konflik Global*. Yogyakarta: Insist Press.
- Prasetyo, Eko. 2004. *Islam Kiri: Jalan Menuju Revolusi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Qorashi, Baqier Syarief. 2007. *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*. Terjemahan oleh Ali Yahya. Jakarta: Al Huda.
- Quthub, Muhammad. 2001. *Islam Agama Pembebas*. Terjemahkan oleh Fungky Kusnaedi. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rahardjo, M. Dawam. 2011. *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Relegius: Prngmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara*. Jakarta: Mizan Publika.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rawl, John. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riadi, Haris. *Hikmah Al-Isra'iyah: Mentelaah Sisi Eksistensialisme Teosofi Transenden Mulla Shadra*. www.google.com. Diakses 14 mei 2012.

- Ritzer, George. Goodman, Douglas. 2003. *Teori Sosiologi Modern, Edisi ke-6*. Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Russell, Bertrand. 2007. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Terjemahan oleh Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdin, Ahmad. 2006. Konsep Isyraqy dan Hakikat Tuhan: Studi atas Pemikiran Al-Suhrawardi Al-Maqtul. *Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No.4, Desember 2006.
- Ruslan, Muhammad. 22 Oktober, 2011. Kemandirian dan Konsumerisme Negara. *Harian Pagi Fajar*, hlm 4.
- Sabri, Muhammad dkk. 2009. *Buku Daras UIN Alauddin Makassar: Filsafat Ilmu*. Makassar: Alauddin Press.
- Said, Edward. 1996. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Terjemahan oleh Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Sanaky, Hujair. 2008. Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin. *Jurnal Al Mawarid*, edisi XVIII tahun 2008.
- Santosa, Purbayu Budi. 2010. *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ekonomi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Shadra, Mulla. 2004. *Kearifan Puncak (terj)*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Shihab, Quraish. 1997. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Shimogaki, Kazuo. 2000. *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Posmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*. Terjemahan oleh Imam Azis dan Jadul Maula. Yogyakarta: LKIS.
- Shirazi, Dastghaib. 2005. *Bermasyarakat Menurut Al-Qur'an*. Terjemahan oleh Salman Parisi. Jakarta: Al Huda.
- Skousen, Mark. 2006. *Sang Maestro: Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Teori-teori Ekonomi Modern: Sebuah Narasi Kritis Menyikapi Pergumulan Intelektual dan Kepedihan Sosial di dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi*. Terjemahan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada.

- Sulistiyo, Agung Budi. 2010. Memahami Konsep Kemanunggalan dalam Akuntansi: Kritik atas Upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah dalam Bingkai Tassawuf. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Volume 8 No. 1, Juni 2010, ISSN: 1693-2420.
- Suhendi, Chresna. 2008. Kritik untuk Bank Syariah: Antara Harapan, Kenyataan dan Paradigma Rahmatan Lil Alamin. *Jurnal Fokus Ekonomi (FE)* Vol. 7, No.1, Hal 52-57, April 2008. ISSN: 1412-3851.
- Supriyadi, Eko. 2003. *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suteja, Hardiansyah. 2008. *Merayakan Keseluruhan: Menjajaki Paradigma Holistik dalam Kehidupan Sosial*. www.google.com. Diakses 14 mei 2012.
- Suyudi, Muhammad. 2010. Akuntansi sebagai Realitas Sosial-Phenomenology Sustainability Reporting, Konsep Quardrangle Bottom Line (QBL) Dimensi Environmental Performance. *Jurnal Eksis*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2010.
- Suyudi, Muhammad. 2012. Akuntansi dan Neoliberalisme: Perspektif Indonesia. *Jurnal Eksis*, Vol. 8 No. 1, Maret 2012. 2001-2181.
- Suwiknyo, Dwi. 2007. Teorisasi Akuntansi Sya'riah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. I, No. 2, Desember 2007.
- Syahrur, Muhammad. 2003. *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: LKIS.
- Syariati, Ali. 1984. *Tugas Cendekiawan Muslim*. Terjemahan oleh M. Amin Rais. Jakarta: CV Rajawali.
- Syariati, Ali. 1989. *Ummah dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Terjemahan oleh Afif Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Syariati, Ali. 2001. *Para Pemimpin Mustada'afin: Sejarah Panjang Perjuangan Melawan Penindasan dan Kezaliman (terj)*. Bandung: Muthahhari Paperbacks.
- Syamsuddin, Mukhtasar. 2011. *Teologi Pembebasan Dalam Konteks Pluralitas Agama di Asia*. Yogyakarta: Bidang Penerbitan Filsafat UGM.

- Tafsir, Ahmad. 2004. *Filsafat Ilmu: Mengurai Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: PT Remaja Bosda Karya.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thahir, Lukman S. 2009. Islam Ideologi Kaum Tertindas: *Counter Hegemony* Kaum Marginal dan Mustada'afin. *Jurnal Hunafa*, Vol.6, No.1, Hal 17-28. April 2009.
- Triantoro, Arvian. 2008. Praktik Akuntansi dalam Budaya Kapitalisme. *Jurnal Percikan*, Vol. 91, Edisi Agustus 2008. ISSN: 0854-8986.
- Triyuwono, Iwan dan As'udi, Mohammad. 2001. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/March 2003, pp. 79 – 90. ISSN 1411 – 013X.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2007. *Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah*. Paper disampaikan pada Acara Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Triyuwono, Iwan dkk. *Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritis Postmodernis-Derridean*. AKPM. www.google.com. Diakses 14 Mei 2012.
- Turner, S Bryan. 2002. *Orientalisme, Posmodernisme dan Globalisme*. Terjemahan oleh Eno Syafrudien. Jakarta: Riora Cipta.
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W.M, Abdul Hadi. 2003. Krisis Manusia Modern: Tinjauan Falsafah Terhadap Scientisme dan Relativisme Kultural. Dalam *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 3, Mei 2003: 191-216.
- Weber, Max. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme: Sejarah Kemunculan dan Ramalan Tentang Perkembangan Kultur Industrial Kontemporer Secara Menyeluruh*. Terjemahan oleh Utomo dan Yusup. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Weygandt, Jerry J. Dkk. 2008. *Accountinga Principle: Pengantar Akuntansi, Buku 2, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadiati, Winwin. 2010. *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Yazdi, M.T.Mishbah. 2010. *Buku Daras Filsafat Islam: Orientasi ke Filsafat Islam Kontemporer*. Terjemahan oleh Musa Kazhim dan Saleh Baqir. Jakarta: Shadra Press.
- Yunus, Muhammad. 2008. *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Terjemahan oleh Irfan Nasution. Depok: Marjin Kiri.
- Zeleny, Jendrich. 2007. *Logika Marx*. Terjemahan oleh Oey Djoen. *E-book Digital*: Oey's Renaissance.

Biodata Penulis



Dr. Alimuddin, S.E., M.M. Ak., adalah dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sejak 1 Januari 1986 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Akuntansi pada Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2011. Sekarang ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Hasanuddin, dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI).



Muhammad Ruslan, menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2013. Sejak tahun 2013, terlibat dalam pendampingan pendidikan di Aceh Utara. Bersama Sekolah Guru Indonesia, Dompot Dhuafa, ikut mengorganisir kegiatan pedagogi bagi lebih dari 100 guru di Aceh Utara. Bersama rekan dan guru dampingan, menulis buku pedagogi, *Cemerlang Merekah di Negeri Seribu Dayah*, diterbitkan SGI-DD. Saat ini terlibat dalam aktivitas pendidikan (Akuntansi Produktif) di Kepulauan Riau.

